

Annual Report 2023
**To be A Global Testing,
Inspection, Certification Company**



Penjelasan Tema

Theme Explanation



Laporan Tahunan **2023**

Annual Report

To be A Global Testing, Inspection, Certification Company

Dengan memanfaatkan keahliannya secara komprehensif dan pendekatan yang inovatif, IDSurvey berupaya untuk menjadi salah satu pemain utama dalam industri Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi (TIC) global. Inisiatif strategis Perseroan berfokus pada perluasan portofolio layanannya, integrasi teknologi mutakhir, dan peningkatan efisiensi operasional. Dedikasi IDSurvey terhadap kualitas dan keandalan menjadikannya memiliki reputasi yang kuat, dan investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan talenta dan digitalisasi yang akan mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Selain itu, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk badan-badan pemerintah dan mitra internasional, menegaskan komitmen IDSurvey terhadap keunggulan dan kepemimpinan global di sektor TIC. Seiring dengan perkembangannya, IDSurvey tetap fokus pada praktik berkelanjutan dan kepatuhan terhadap standar internasional, memastikan layanannya tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui ekspektasi industri.

By leveraging its comprehensive expertise and innovative approach, IDSurvey aims to secure a place among among the top players in the global Testing, Inspection, and Certification (TIC) industry. The Company's strategic initiatives focus on expanding its service portfolio, integrating cutting-edge technologies, and enhancing operational efficiency. IDSurvey's dedication to quality and reliability has earned it a strong reputation, and its continued investments in talent development and digitalization are set to drive further growth. In addition, collaboration with key stakeholders, including government bodies and international partners, underscores IDSurvey's commitment to excellence and global leadership in the TIC sector. As it moves forward, IDSurvey remains focused on sustainable practices and compliance with international standards, ensuring its services not only meet but exceed industry expectations.

Kesinambungan Tema

Theme Continuity



Begin Strong to Achieve More

Mengawali dengan Baik Menuju Pencapaian Lebih Tinggi



Memimpin Perubahan Mengelola Tantangan

Leading Transformation Managing Challenges

IDSURVEY resmi dibentuk pada Desember 2021 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2021. IDSURVEY merupakan gabungan dari tiga perusahaan BUMN besar yang bergerak di bidang jasa survei yaitu PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dipercaya sebagai induk *holding* IDSURVEY.

Sebagai induk *holding* Jasa Survei, Perseroan menempatkan tahun 2022 sebagai titik awal perjalanan IDSURVEY. Koordinasi dan komunikasi menjadi kata kunci di awal perjalanan panjang. Menyatukan visi, misi, budaya perusahaan dan proses harmonisasi tiga entitas perusahaan menjadi sebuah tantangan.

IDSURVEY was officially founded in December 2021 by virtue of Government Regulation (PP) Number 66 of 2021. IDSURVEY is the result of the merger of three major state-owned companies engaged in survey services, namely PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo and PT Surveyor Indonesia. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) is appointed as the holding parent of IDSURVEY.

As the parent holding of Survey Services, the Company sees the year 2022 as the starting point of the IDSURVEY journey. During which, coordination and communication become the keywords at the beginning of a long journey. Unifying the vision and mission, corporate culture and harmonization process of three corporate entities proved to be a tough challenge to overcome.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) telah ditunjuk sebagai induk *holding* BUMN jasa survei, dan dengan demikian BKI memiliki tanggung jawab memimpin transformasi industri survei yang sebelumnya disediakan oleh 3 BUMN yang berbeda. Integrasi ini akan meningkatkan kualitas layanan dan memperbesar peluang pertumbuhan di masa depan. Tentunya selain peluang, ada beragam tantangan yang harus diatasi BKI. Dengan pengalaman dan sinergi antaran berbagai pihak yang terlibat dalam integrasi ini, BKI yakin dapat mengelola tantangan itu dan memberikan hasil terbaik sebagaimana yang diamanahkan.

With the appointment of PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) as the holding company for state-owned surveying services, BKI has the responsibility of leading the transformation of the surveying industry, which was previously provided by three different state-owned enterprises. This integration will elevate the quality of services and increase opportunities for future growth. Obviously, in addition to opportunities, there are various challenges to be overcome by BKI. Through experience and synergy among the various parties involved in this integration, BKI will be able to manage these challenges and deliver the best results as mandated.



Daftar Isi

Table of Contents

2	Penjelasan Tema <i>Theme Explanation</i>	56	Penghargaan <i>Awards</i>
3	Kesinambungan Tema <i>Theme Continuity</i>	59	Peristiwa Penting <i>Event Highlights</i>
4	Daftar Isi <i>Table of Contents</i>	64	Jejak Langkah <i>Milestones</i>
01	IKHTISAR DATA KEUANGAN <i>FINANCIAL HIGHLIGHTS</i>	66	Peta Jaringan Kantor IDSurvey <i>Network of Office IDSurvey</i>
8	Ikhtisar Keuangan <i>Financial Highlights</i>	68	Jaringan Kantor PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) <i>Office Network of PT Biro Klasifikasi Indonesia</i>
10	Kilas Kinerja Operasi <i>Operation Highlights</i>	70	Jaringan Kantor PT Sucofindo <i>Office Network of PT Sucofindo</i>
02	LAPORAN MANAJEMEN <i>MANAGEMENT REPORT</i>	71	Jaringan Kantor PT Surveyor Indonesia <i>Office Network of PT Surveyor Indonesia</i>
16	Laporan Dewan Komisaris <i>The Board of Commissioners' Report</i>	72	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission and Corporate Culture</i>
23	Dewan Komisaris <i>The Board of Commissioners</i>	74	Simbol Perusahaan <i>Company Symbol</i>
32	Laporan Direksi <i>The Board of Directors' Report</i>	75	Komposisi Pemegang Saham <i>Shareholder Composition</i>
39	Direksi <i>The Board of Directors</i>	75	Kegiatan dan Bidang Usaha <i>Activities and Line of Business</i>
46	Surat Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) <i>Statement of The Board of Commissioners on The Responsibilities of The 2023 Annual Report of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)</i>	96	Struktur Organisasi <i>Organizational Structure</i>
47	Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) <i>Statement of The Board of Directors on The Responsibilities of The 2023 Annual Report of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)</i>	04	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN <i>MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS</i>
03	PROFIL PERUSAHAAN <i>COMPANY PROFILE</i>	100	Tinjauan Ekonomi Global dan Nasional <i>Global and National Economic Review</i>
50	Informasi Umum <i>General Information</i>	102	Tinjauan Kinerja Per Segmen <i>Performance Review By Segment</i>
52	Entitas Anak Perusahaan <i>Subsidiary</i>	102	Tinjauan Kinerja Keuangan <i>Financial Performance Review</i>
54	Sejarah Ringkas <i>The Company's Brief History</i>	109	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal <i>Material Commitment for Investment in Capital Goods</i>
		110	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Pelaporan <i>Material Information and Facts Occurring After the Reporting Date</i>
		110	Perbandingan antara Target dengan Pencapaian <i>Comparison between Target and Achievement</i>
		110	Struktur Permodalan <i>Capital Structure</i>

- 111 Tingkat Kesehatan Perseroan
Company Health Level
- 111 Kebijakan dan Pembagian Dividen
Dividend Policy and Distribution
- 111 Informasi Material
Material Information

05 TINJAUAN PENUNJANG BISNIS *BUSINESS SUPPORT OVERVIEW*

- 116 Sumber Daya Manusia
Human Resources
- 121 Teknologi Informasi
Information Technology

06 TATA KELOLA PERUSAHAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

- 128 Dasar Hukum, Prinsip dan Pedoman GCG
Legal Basis, Principles and Guidelines of GCG.
- 132 Penilaian terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of Good Corporate Governance
- 133 Struktur Organ Tata Kelola Perseroan
Structure of the Company's Governance Organs
- 133 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)
- 137 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 145 Direksi
Board of Directors
- 171 Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committees under the Board of Commissioners
- 183 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
- 184 Satuan Pengawasan Internal
Internal Audit Unit
- 185 Akuntan Publik
Public Accountant
- 186 Manajemen Risiko
Risk Management
- 206 Kode Etik
Code of Conduct
- 206 Integritas dalam Berusaha
Integrity in Business

- 207 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data
- 207 Perkara Penting
Legal Cases

07 TANGGUNG JAWAB SOSIAL & KINERJA KEBERLANJUTAN *SOCIAL RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY PERFORMANCE*

- 210 Kebijakan Keberlanjutan
Sustainability Policy
- 212 Tata Kelola Keberlanjutan
Sustainability Governance
- 217 Struktur dan Infrastruktur
Structure and Infrastructure [GRI 2-9, GRI 2-11]
- 218 Penjelasan Lainnya
Other Details
- 218 Kinerja Keberlanjutan
Sustainability Performance
- 219 Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran
Preparation and Implementation of Budget Work Plan
- 221 Program Prioritas Tahun 2023
Priority Program 2023
- 222 Program *Creating Shared Value* (CSV) Tahun 2023
Creating Shared Value (CSV) Program 2023
- 222 Realisasi Program Kemitraan
Realization of Partnership Program
- 223 Program TJSL BKI Secara *Holding*
BKI'S CSR Program at The Holding Level
- 229 Lembar Umpan Balik
Feedback Form

08 LAPORAN KEUANGAN *FINANCIAL REPORT*



01

Ikhtisar DATA KEUANGAN

Financial Highlights





Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Hasil Usaha

Operating Income

Laporan Laba Rugi Konsolidasi

Consolidated Profit (Loss)

(dalam rupiah/in rupiah)

Keterangan Description	2023	2022	2021
Pendapatan Revenues	5.913.103.080.419	5.545.831.425.942	5.147.013.406.965
Beban Pokok Pendapatan Cost of Goods Sold	(4.145.941.194.327)	3.980.782.359.068	(3.799.709.562.849)
Laba Bruto Gross Profit	1.767.161.886.092	1.565.049.066.874	1.347.303.844.116
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	1.037.150.066.910	881.293.901.919	614.251.264.922
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(32.196.861.432)	(84.920.963.043)	168.287.312.865
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Profit For The Year Attributable To:			
Pemilik entitas induk Owners of parent entity	737.839.141.662	646.304.455.530	447.453.608.638
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	45.718.683.226	42.081.486.217	28.309.612.100
Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit For The Year	783.557.824.888	688.385.941.747	475.763.220.738
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Total Comprehensive Profit For The Year Attributable To:			
Pemilik entitas induk Owners of parent entity	706.840.258.557	566.618.520.902	621.291.044.270
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	44.520.704.89	36.846.457.802	22.759.489.333
Jumlah Laba Komprehensif Total Comprehensive Profit	751.360.963.456	603.464.978.704	644.050.533.603

Posisi Keuangan Konsolidasi

Consolidated Financial Position

(dalam rupiah/in rupiah)

Keterangan Description	2023	2022	2021
Jumlah Aset Total Assets	8.701.166.504.638	7.946.317.588.923	7.388.141.053.751
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.965.890.547.778	1.826.087.283.447	1.817.403.877.279
Jumlah Ekuitas Total Equities	6.735.275.956.860	6.120.230.305.476	5.570.737.176.472



Rasio Keuangan

Financial Ratio

(dalam persen, kecuali dinyatakan lain/in percent, unless otherwise stated)

Keterangan Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Tingkat Pengembalian Ekuitas Return on Equity (ROE)	%	13,21	12,71	9,3
Tingkat Pengembalian Investasi (ROI) Return on Investment (ROI)	%	11,92	13,7	11,0
Rasio Kas Cash Ratio	%	274,95	301,7	271,6
Rasio Lancar Current Ratio	%	440,15	463,48	452,3
Periode Kolektibilitas Collection Period	Hari Day	60	55	59





Kilas Kinerja Operasi

Operation Highlights

Tinjauan Kinerja Per Segmen PT BKI (Persero)

Performance Review By Segment PT BKI (Persero)

Segmen Klasifikasi

Classification Segment

(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2023 Realization of 2023	Realisasi 2022 Realization of 2022	Realisasi 2021 Realization of 2021
Klas Tunggal-Dalam Negeri Single Class-Domestic	543.097	481.176	432.085
Klas Tunggal Luar Negeri Single Class-Overseas	24.081	18.961	18.389
Klas Ganda-Dalam Negeri Dual Class-Domestic	20.534	23.911	23.541
Klas Ganda Luar Negeri Dual Class-Overseas	453	877	1.323
Klas Asing-di Indonesia Foreign Class-in Indonesia	14	103	13
Share Partner	(3.157)	(4.544)	(3.901)
Jumlah Total	585.023	520.483	471.450

Segmen Komersil

Commercial Segment

(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2023 Realization of 2023	Realisasi 2022 Realization of 2022	Realisasi 2021 Realization of 2021
Jasa Pengujian Testing Service	85.056	82.559	90.551
Jasa Inspeksi Inspection Service	259.588	203.979	184.897
Jasa Pemetaan Mapping Service	12.744	10.835	15.150
Jasa Survei Survey Service	30.598	24.420	65.551
Jasa Assessment Assessment Service	3.121	1.836	2.361
Jasa Audit Audit Service	3.137	2.030	5.577
Jasa Pengujian Labor Labor Testing Service	6.222	5.913	4.731
Jasa Monitoring Monitoring Service	170	906	467
Jasa Supervisi Supervisory Service	20.692	12.619	5.521
Jasa Sertifikasi Certification Service	31.565	31.185	18.101



(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2023 Realization of 2023	Realisasi 2022 Realization of 2022	Realisasi 2021 Realization of 2021
Jasa Konsultasi Consultancy Service	3.258	288	389
Jasa Training Training Service	9.654	8.968	8.745
Jasa Labor Supply Labor Supply Service	12.161	2.396	4.697
Jumlah Total	477.971	387.934	406.738

Bagian Partner Kerja Sama Part of the Partnership Project

(dalam jutaan rupiah/in million rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2023 Realization of 2023	Realisasi 2022 Realization of 2022	Realisasi 2021 Realization of 2021
Kerja sama klas ganda Double clas collaboration	(3.157)	(4.544)	(3.901)
Bagian agen KS KS agent sections	0	0	-
Jumlah Total	(3.157)	(4.544)	(3.901)

Tinjauan Kinerja per Segmen PT SUCOFINDO Performance Review per Segment of PT SUCOFINDO

Uraian Description	Realisasi 2023 Realization of 2023	Realisasi 2022 Realization of 2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	Kontribusi Contribution
Pendapatan Batubara Coal Revenue	602.905	525.704	77.201	14,69
Pendapatan Aset dan Energi Baru dan Terbarukan Assets and New & Renewable Energy Revenue	431.583	407.470	24.113	5,92
Pendapatan Layanan Publik, Sumber Daya Alam dan Investasi Public Services, Natural Resources & Investment Revenue	161.725	301.275	(139.550)	(46,32)
Pendapatan Laboratorium Laboratory Revenue	360.096	320.817	39.279	12,24
Pendapatan Sertifikasi dan Eco Framework Certification and Eco Framework Revenue	272.366	224.785	47.581	21,17



Uraian Description	Realisasi 2023 Realization of 2023	Realisasi 2022 Realization of 2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	Kontribusi Contribution
Pendapatan Mineral Mineral Revenue	304.507	271.649	32.858	12,10
Pendapatan Industri Industry Revenue	247.149	224.647	22.502	10,02
Pendapatan Komoditi dan Solusi Perdagangan Commodity and Trading Solutions Revenue	167.816	160.410	7.406	4,62
Pendapatan Perdagangan, Industri dan Kelautan Trade, Industry and Marine Revenue	258.131	220.600	37.531	17,01
Pendapatan Hulu Migas dan Produk Migas Upstream Oil and Gas and Oil and Gas Products Revenue	133.573	168.510	(34.937)	(20,73)
Pendapatan Properti Property Revenue	19.624	28.921	(9.297)	(32,15)
PT Sucofindo Episi	54.599	31.529	23.070	73,17
PT Sucofindo Advisory Utama	28.569	13.866	14.703	106,04
Jumlah Total	3.042.643	2.900.183	142.460	4,91

Tinjauan Kinerja per Segmen PTSI

Performance Review per Segment of PTSI

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain/in millions of rupiah, unless stated otherwise)

Uraian Description	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total	Kontribusi Contribution	Jumlah Total	Kontribusi Contribution	Jumlah Total	Kontribusi Contribution
Minyak, Gas dan Energi Baru Terbarukan Oil, Gas, and Renewable Energy	746.973	40,96	684.096	39,20	62.877	9,19%
Mineral, Batubara, dan Lingkungan Oil, Gas, and Renewable Energy	471.992	25,88	329.769	18,90	142.223	43,13%
Infrastruktur Infrastructure	306.999	16,84	258.427	14,81	48.571	18,79%
Penguatan Institusi dan Kelembagaan Government and Institution	276.347	15,15	374.409	21,45	(98.062)	(26,19)%
Lembaga Sertifikasi, Laboratorium, dan Sustainability Certification Bodies, Laboratories, and Sustainability	21.226	1,16	98.503	5,64	(77.277)	(78,45)%
Jumlah Total	1.823.537	100,00	1.745.205	100,00	78.332	4,49%





02

Laporan MANAJEMEN

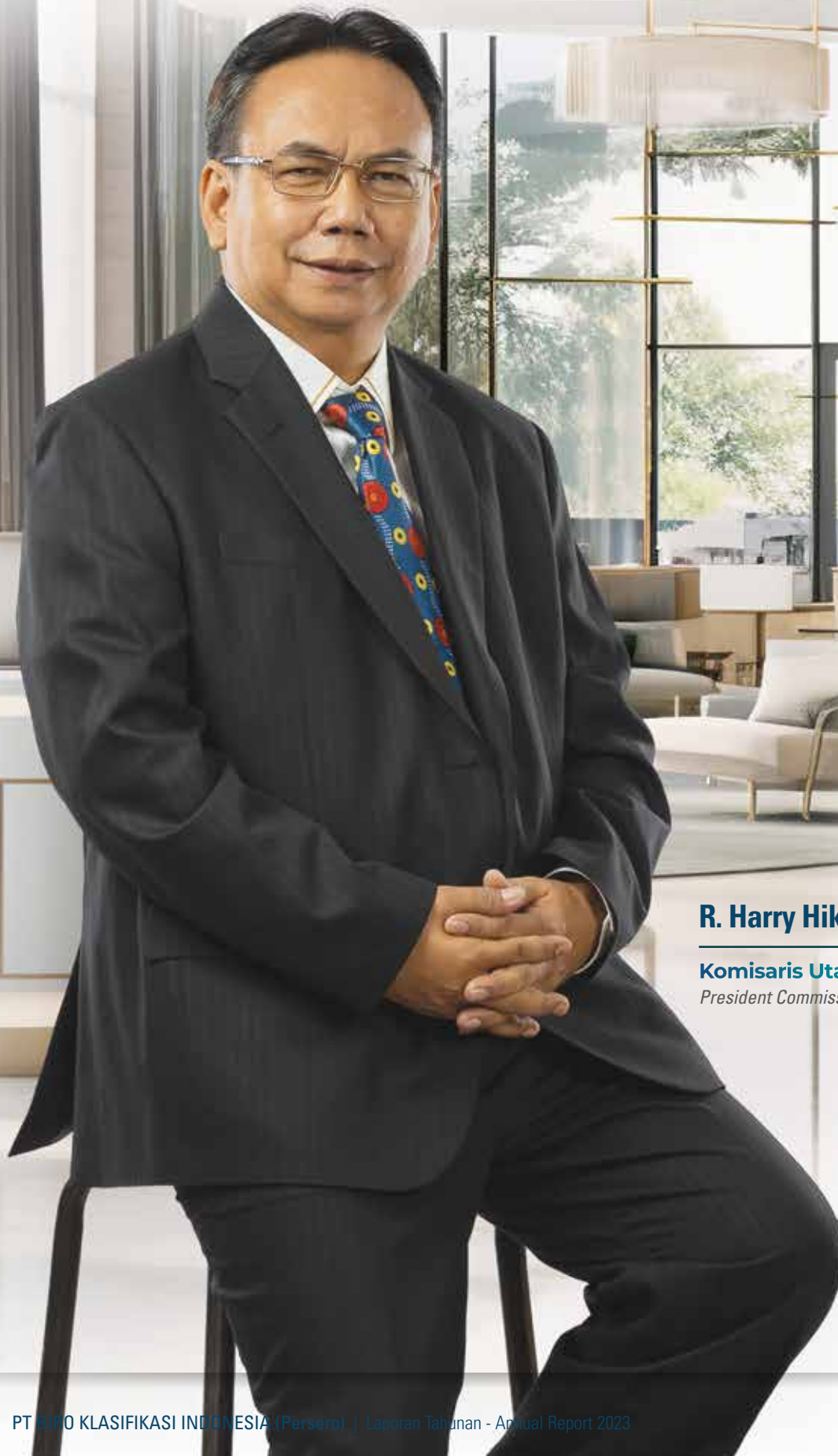
Management Report





Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Report



R. Harry Hikmat

Komisaris Utama
President Commissioner



Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala nikmat dan karunia-Nya, kita semua, PT IDSURVEY dan bangsa Indonesia dapat melalui tahun 2023 yang penuh dinamika dalam kondisi yang baik. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan pengawasan pengelolaan usaha PT IDSURVEY untuk tahun buku 2023.

Laporan Dewan Komisaris meliputi pelaksanaan tugas pengawasan, penilaian atas kinerja Direksi dalam pengelolaan Perseroan, serta pandangan atas prospek usaha Perusahaan yang telah disusun oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mengawasi dan melakukan penilaian terhadap praktik-praktik tata kelola perusahaan.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris menggunakan pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara individu, serta KPI Direksi secara kolektif yang dinilai oleh Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai dasar penilaian kinerja Direksi sepanjang tahun 2023.

Secara umum, kinerja PT IDSURVEY secara konsolidasi mengalami pertumbuhan dibanding capaian kinerja tahun 2022. Hal ini tercermin pada kenaikan Pendapatan sebesar 6,6%, *Adjusted EBITDA* sebesar 12,7%, Laba Bersih sebesar 13,8%, dan Total Aset 9,5%. Pertumbuhan Laba Bersih menunjukkan upaya Direksi untuk terus mengembangkan usaha baik dari sektor bisnis organik maupun non-organik dibarengi dengan upaya untuk melakukan efisiensi Beban, baik Beban Pokok Pendapatan maupun Beban Usaha.

Sementara untuk capaian kinerja keuangan PT BKI *Stand alone* juga mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan dari kinerja Pendapatan tumbuh 17,0%, *Adjusted EBITDA* tumbuh 30,4%, Laba Bersih tumbuh 124,2%, Arus Kas Operasi tumbuh 15,8% dan Total Aset tumbuh 2,1%. Pertumbuhan Laba Bersih mencerminkan upaya peningkatan kinerja baik dari sektor bisnis Klasifikasi maupun Komersil yang ditopang dengan upaya efisiensi pada kedua sektor bisnis PT BKI. Upaya melakukan perbaikan pengelolaan *working capital* ditunjukkan dengan pertumbuhan Arus Kas Operasi serta perbaikan hari piutang dari 119 hari pada tahun 2022 menjadi 103 hari pada tahun 2023.

Dewan Komisaris mengapresiasi peningkatan capaian kinerja keuangan meskipun belum dapat mencapai target RKAP tahun 2023. Berdasarkan performa perusahaan, baik secara finansial maupun non-finansial yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Dewan Komisaris

Dear Shareholders and Stakeholders,

First and foremost, let us offer praise and gratitude to Almighty God. For all His blessings and grace, we, PT IDSURVEY and the Indonesian nation, have been able to navigate the dynamic year of 2023 in good condition. On this occasion, allow me to represent the Board of Commissioners in presenting the oversight report on the management of PT IDSURVEY for the fiscal year 2023.

The Board of Commissioners' report includes the execution of oversight duties, the assessment of the Board of Directors' performance in managing the Company, as well as views on the Company's business prospects as prepared by the Board of Directors. The Board of Commissioners also oversees and evaluates corporate governance practices.

Assessment of the Board of Directors' Performance

The Board of Commissioners evaluates the individual Key Performance Indicators (KPIs) of the Directors, as well as the collective KPIs of the Directors as assessed by the Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism, as the basis for evaluating the performance of the Directors throughout 2023.

In general, the consolidated performance of PT IDSURVEY showed growth compared to the performance achievements in 2022. This is reflected in the increase in Revenue by 6.6%, Adjusted EBITDA by 12.7%, Net Profit by 13.8%, and Total Assets by 9.5%. The growth in Net Profit indicates the Directors' efforts to continue developing the business from both organic and non-organic sectors, accompanied by efforts to achieve cost efficiency in both Cost of Revenue and Operating Expenses.

For the standalone financial performance of PT BKI, growth was also seen, with Revenue growing by 17.0%, Adjusted EBITDA growing by 30.4%, Net Profit growing by 124.2%, Operating Cash Flow growing by 15.8%, and Total Assets growing by 2.1%. The growth in Net Profit reflects efforts to improve performance in both the Classification and Commercial business sectors, supported by efficiency efforts in both sectors. Improvements in working capital management were demonstrated by the growth in Operating Cash Flow and the reduction in days receivable from 119 days in 2022 to 103 days in 2023.

The Board of Commissioners appreciates the improvement in financial performance, even though the 2023 RKAP target was not met. Based on the company's performance, both financial and non-financial, which has improved from the previous year, the Board of Commissioners



menilai bahwa Direksi telah memberikan upaya terbaik dalam peningkatan kinerja perusahaan. Capaian performa yang baik terlihat dari perolehan skor KPI tahun 2023 sebesar 104,08 dari target 100.

Meski demikian Dewan Komisaris melihat masih banyak peluang yang bisa dimaksimalkan dalam menjalankan bisnis *Testing, Inspection, Certification, Classification* dan *Statutory* (TICCS), untuk mengakselerasi pertumbuhan perusahaan. Peluang tersebut antara lain:

- Diversifikasi bisnis perusahaan yang tidak terbatas**
Peluang pengembangan bisnis pada seluruh sektor sangat terbuka bagi IDSurvey, antara lain yang saat ini sedang dikembangkan yaitu Bisnis Informasi Geospasial, Bisnis Hijau termasuk dekarbonisasi dan verifikasi kendaraan listrik serta bisnis *life science*. Kami mengapresiasi atas upaya Direksi untuk terus berkembang dan memperluas portofolio bisnis IDSurvey.
- Sinergi dengan Kementerian dan Lembaga**
IDSurvey dapat bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga untuk menjalankan kebijakan dengan melaksanakan perannya dalam bidang pemastian di berbagai sektor.
- Potensi Akuisisi**
Potensi untuk mengakuisisi perusahaan lain guna pengembangan bisnis dan kinerja perusahaan.
- Jasa Berbasis Teknologi**
Pengembangan jasa berbasis teknologi terbaru dan digitalisasi.
- Sinergi dengan BUMN**
Peluang melakukan sinergi dengan BUMN baik di dalam maupun luar negeri.

Meski demikian kami juga melihat Perusahaan menghadapi kendala baik dari sisi internal maupun eksternal, antara lain:

- Ketergantungan pada Pihak Ketiga**
Beberapa portofolio bisnis masih tergantung pada pihak ketiga dan tenaga ahli. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang ahli pada bidang tertentu serta kurangnya alat operasi pendukung.
- Pemanfaatan Teknologi Digital yang Belum Optimal**
Perseroan perlu memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk mendukung digitalisasi proses bisnis perusahaan.
- Irisan Bisnis Antar-Entitas Anak dalam IDSurvey**
PT BKI selaku induk *holding* diharapkan dapat mengarahkan setiap entitas untuk mengambil pekerjaan sesuai fokus bisnis, bidang keahlian dan penguasaan pasar.
- Ketergantungan Bisnis pada Regulasi Pemerintah**
Perlu upaya untuk menggali potensi bisnis baru sebagai upaya mitigasi hilangnya pekerjaan dari turunan regulasi Pemerintah.
- Keanggotaan IACS**
PT BKI belum menjadi anggota IACS dan menyebabkan pertumbuhan market share bisnis Segman Klas stagnan.

believes that the Directors have made their best efforts to enhance the company's performance. The good performance is evident from the 2023 KPI score of 104.08 out of a target of 100.

Nevertheless, the Board of Commissioners sees many opportunities that can be maximized in running the Testing, Inspection, Certification, Classification, and Statutory (TICCS) business to accelerate company growth. These opportunities include:

- Business Diversification**
The opportunity to develop business in all sectors is wide open for IDSurvey, including currently developing businesses such as Geospatial Information, Green Business including decarbonization and electric vehicle verification, and life sciences. We appreciate the Directors' efforts to continuously expand and diversify IDSurvey's business portfolio.
- Synergy with Ministries and Institutions**
IDSurvey can synergize with Ministries and Institutions to implement policies by performing its role in assurance across various sectors.
- Potential Acquisitions**
There is potential to acquire other companies to develop the business and enhance company performance.
- Technology-Based Services**
Developing services based on the latest technology and digitalization.
- Synergies with Other State-Owned Enterprises**
Opportunities to synergize with state-owned enterprises both domestically and abroad.

However, we also see that the Company faces challenges both internally and externally, including:

- Dependence on Third Parties**
Some business portfolios still depend on third parties and experts. This is caused by a lack of human resources who are experts in certain fields as well as a lack of supporting operational tools.
- Unoptimal Use of Digital Technology**
Companies need to utilize digital technology optimally to support the digitalization of company business processes.
- Business Overlap Between Subsidiaries in IDsurvey**
PT BKI as the holding company is expected to be able to direct each entity to take jobs according to business focus, area of expertise and market control.
- Business Dependence on Government Regulation**
Efforts are needed to explore new business potential as an effort to mitigate job losses from government regulations.
- IACS Membership**
PT BKI is not yet a member of IACS and this has caused stagnant market share growth in the Class Segment business.



Terkait dengan peluang dan tantangan yang dihadapi Perusahaan, Dewan Komisaris telah memberikan saran dan arahan kepada jajaran Direksi, di antaranya agar melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses tender, baik yang menang maupun kalah di seluruh entitas serta aktif menggali potensi bisnis baru atau pengembangan bisnis eksisting guna memenuhi kebutuhan kontrak.

Dewan Komisaris juga menyarankan agar ketiga entitas IDSURVEY berkolaborasi membentuk unit riset untuk mengembangkan potensi-potensi bisnis yang dapat direalisasikan menjadi sumber pendapatan. Terkait bisnis baru yang dikembangkan antara lain Informasi Geospasial Dasar, bisnis *life science*, dan bisnis sektor *electronic vehicle*, agar dikaji secara menyeluruh dan mendalam serta mempertimbangkan risiko pada bisnis tersebut.

Pandangan atas Prospek Usaha

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 mengusung tema Pertumbuhan Berkelanjutan Melalui Akselerasi Transformasi Bisnis di mana Direksi bertekad untuk terus mempertahankan pertumbuhan bisnisnya menuju visi menjadi grup perusahaan TIC kelas dunia yang memberikan peningkatan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Guna mendukung tujuan tersebut, tentunya Direksi telah merencanakan program-program strategis.

Program strategis tersebut antara lain inisiatif restrukturisasi termasuk penetapan perusahaan IT bersama, penetapan perusahaan shared services, penetapan perusahaan pelaksana diklat bersama, penguatan struktur organisasi, strategi perbaikan pada sektor operasi, pengembangan dan peningkatan kinerja bisnis, peningkatan kinerja keuangan, serta implementasi konsep *Environment, Social and Governance* (ESG) dan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) dalam seluruh aspek pengelolaan perusahaan.

Terhadap rencana-rencana yang telah disusun Direksi, Dewan Komisaris mendukung penuh upaya Direksi meningkatkan pengembangan bisnis dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia yang tercermin pada target peningkatan kinerja keuangan. Kami menyarankan, dalam pelaksanaannya Direksi agar terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres pencapaian target dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas target-target kinerja yang masih di bawah target.

Regarding the opportunities and challenges faced by the Company, the Board of Commissioners has provided advice and guidance to the Directors, including evaluating and improving the tender process, whether won or lost, across all entities, and actively exploring new business potentials or developing existing businesses to meet contract needs.

The Board of Commissioners also suggests that the three IDSURVEY entities collaborate to form a research unit to develop business potentials that can be realized as revenue sources. Regarding new businesses being developed, such as Basic Geospatial Information, life sciences, and the electronic vehicle sector, these should be thoroughly and comprehensively reviewed, considering the risks involved.

Business Prospect Outlook

The Work Plan and Budget (RKAP) for 2024 carries the theme of Sustainable Growth Through Business Transformation Acceleration, where the Directors are determined to maintain business growth towards the vision of becoming a world-class TIC group that contributes to national economic development. To support this goal, the Directors have planned strategic programs.

These strategic programs include restructuring initiatives, such as establishing a joint IT company, a shared services company, a joint training company, strengthening organizational structure, operational sector improvement strategies, business performance development and enhancement, financial performance improvement, and implementing Environment, Social, and Governance (ESG) and Governance, Risk, and Compliance (GRC) concepts in all aspects of company management.

The Board of Commissioners fully supports the Directors' efforts to enhance business development and human resource capabilities, as reflected in the financial performance targets. We advise that the Directors continuously monitor and evaluate progress towards targets and make ongoing improvements to performance targets that are still below expectations.



Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT BKI (Persero) Pasal 15, bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Atas tugas yang telah dimandatkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris secara rutin melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan perusahaan setiap bulannya dengan mendalami kinerja perusahaan dibantu oleh Komite di bawah Dewan Komisaris. Apabila terdapat hal-hal yang perlu ditanggapi dan diberikan masukan, Dewan Komisaris menyampaikan baik secara tertulis melalui surat tanggapan maupun secara lisan pada rapat Dewan Komisaris dengan Direksi yang dilaksanakan rutin setiap bulan. Rapat yang diselenggarakan bertujuan untuk memperoleh penjelasan secara lebih detail dari Direksi terhadap isu terkini perusahaan serta Dewan Komisaris dapat memberikan nasihat dan arahnya terhadap isu yang dihadapi oleh Perusahaan.

Selain rapat bulanan, Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat tematik dengan mengundang Direksi dan tim teknis, guna membahas program strategis dan progressnya secara lebih mendalam dan komprehensif.

Penilaian terhadap Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris menilai implementasi tata kelola yang baik di perusahaan telah dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta memperhatikan arahan dari Pemegang Saham. Pelaksanaan *assessment Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan secara mandiri/*self assessment*, diperoleh skor 89,51 poin dengan kategori Sangat Baik berdasarkan pencapaian tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa kualitas implementasi prinsip-prinsip tata kelola Perseroan sangat baik.

Penilaian terhadap Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa Komite. Pertama Komite Audit. Komite ini bertugas memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal. Kedua, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola yang bertugas melakukan pemantauan dan penelaahan atas laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya

Execution of Oversight Functions

According to Article 15 of the Articles of Association of PT BKI (Persero), the Board of Commissioners is tasked with supervising company policies, company operations, and advising the Directors. Based on this mandate, the Board of Commissioners routinely supervises the performance of the Directors and the company every month, delving into company performance with the help of committees under the Board of Commissioners. When necessary, the Board of Commissioners provides written or verbal feedback at the monthly meetings with the Directors. These meetings aim to obtain detailed explanations from the Directors on current company issues and allow the Board of Commissioners to provide advice and direction.

In addition to monthly meetings, the Board of Commissioners also holds thematic meetings, inviting the Directors and technical teams to discuss strategic programs and their progress more deeply and comprehensively.

Evaluation of Corporate Governance Implementation

The Board of Commissioners evaluates the implementation of good governance in the company, which has been carried out well in accordance with applicable regulations and considering the directions of the Shareholders. A self-assessment of Good Corporate Governance (GCG) resulted in a score of 89.51 points, categorized as Very Good. Based on this achievement, the Board of Commissioners considers the quality of GCG principles' implementation in the Company to be very good.

Evaluation of Committees Under the Board of Commissioners

In performing its duties and functions, the Board of Commissioners is assisted by several committees. The first is the Audit Committee, which ensures the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the internal and external auditors' tasks. The second is the Risk Monitoring and Governance Committee, which monitors and reviews Risk Management reports and other reports



terkait dengan penerapan Manajemen Risiko baik di PT BKI (Persero) maupun entitas anak. Yang ketiga, Komite Nominasi, Remunerasi dan SDM yang bertugas melakukan pemantauan berkala terhadap sistem manajemen talenta serta pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Secara umum, Dewan Komisaris menilai seluruh program kerja ketiga Komite yang tercantum dalam Rencana Kerja tiap Komite tahun 2023 terealisasi dengan baik. Seluruh rekomendasi setiap Komite telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atas usulan yang disampaikan Direksi.

Pandangan atas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan telah menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan berpedoman pada ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility*. Sesuai dengan *guidance* tersebut, kegiatan TJSL sudah sejalan dengan SDGs 2030. Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan strategi TJSL berjalan dengan sangat baik dan telah menyoroti pada 4 (empat) pilar SDGs 2030.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada akhir tahun 2023 terjadi perubahan struktur Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-15/MBU/01/2023 tanggal 26 Januari 2023, Sdr Raden Harry Hikmat dikukuhkan kembali sebagai Komisaris Utama PT BKI (Persero). Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-178/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023, Sdr Virgo Eresta Jaya diangkat sebagai Komisaris.

Penambahan Anggota Dewan Komisaris tersebut dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan.

Sehingga susunan Dewan Komisaris sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Komisaris Utama | : R. Harry Hikmat |
| 2. Komisaris | : M. Amperawan |
| 3. Komisaris | : Indra Iskandar |
| 4. Komisaris | : Virgo Eresta Jaya |

related to Risk Management implementation in both PT BKI (Persero) and its subsidiaries. The third is the Nomination, Remuneration, and HR Committee, which regularly monitors the talent management system and evaluates its implementation.

Overall, the Board of Commissioners considers that the work programs of all three committees, as listed in each committee's Work Plan for 2023, have been well realized. All recommendations from each committee have been accepted by the Board of Commissioners and have become considerations in decision-making processes for proposals submitted by the Directors.

Views on the Implementation of Social and Environmental Responsibility

The Company has implemented Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities in line with ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. According to this guidance, TJSL activities are aligned with the SDGs 2030. The Board of Commissioners considers that the TJSL strategy is well implemented, targeting four pillars of the SDGs 2030.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

At the end of 2023, there was a change in the structure of the Board of Commissioners. Based on the Minister of SOEs Decree Number SK-15/MBU/01/2023 dated January 26, 2023, Mr. Raden Harry Hikmat was reappointed as the Chief Commissioner of PT BKI (Persero). Based on the Minister of SOEs Decree Number SK-178/MBU/07/2023 dated July 4, 2023, Mr. Virgo Eresta Jaya was appointed as Commissioner.

The addition of members to the Board of Commissioners is aimed at enhancing the supervisory functions of the Board of Commissioners over the company's performance.

Thus, the composition of the Board of Commissioners until the end of 2023 is as follows:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Chief Commissioner | : R. Harry Hikmat |
| 2. Commissioner | : M. Amperawan |
| 3. Commissioner | : Indra Iskandar |
| 4. Commissioner | : Virgo Eresta Jaya |



Apresiasi

Mengakhiri laporan singkat ini, Atas nama Dewan Komisaris, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan pada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dukungan tersebut membuat kami semakin optimistis menghadapi tantangan di masa mendatang.

Appreciation

In concluding this brief report, on behalf of the Board of Commissioners, I would like to extend our gratitude to all parties who have supported the Board of Commissioners in performing its duties and functions. This support makes us more optimistic in facing future challenges.

Jakarta, Juni/June 2024

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Atas nama Dewan Komisaris

On behalf of the Board of Commissioners

R. Harry Hikmat

Komisaris Utama

President Commissioner



Dewan Komisaris

The Board of Commissioners



M. Amperawan

Komisaris
Commissioner

Lathifah Shohib

Komisaris Independen
Independent Commissioner

R. Harry Hikmat

Komisaris Utama
President Commissioner

Virgo Eresta Jaya

Komisaris
Commissioner

Indra Iskandar

Komisaris
Commissioner



R. Harry Hikmat

Komisaris Utama
 President Commissioner

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia nomor SK227/MBU/10/2022 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as the Meeting of Shareholders of PT Biro Klasifikasi Indonesia number SK227/MBU/10/2022 dated October 07, 2022 concerning Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Biro Klasifikasi Indonesia.

Indonesia

Kewarganegaraan Citizenship

Indonesia

60 Tahun

Usia per 31 Desember 2023 Age as of December 31, 2023

60 Years old

Denpasar, 9 Juli 1963

Tempat Tanggal Lahir Place, Date of Birth

Denpasar, July 9, 1963

Bekasi

Domisili Domicile

Bekasi

- S3 Ilmu Sosial Universitas Padjajaran (2003)
- S2 Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (1996)
- S1 Statistika Institut Pertanian Bogor (1987)

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Doctoral Degree in Social Sciences, Padjadjaran University (2003)
- Master of Social Welfare, University of Indonesia (1996)
- Bachelor of Statistics Bogor Agricultural Institute (1987)

- Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (2021-sekarang)
- Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (2020-2021)
- Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (2016-2020)
- Staf Ahli Menteri bidang Dampak Sosial Kementerian Sosial (2014-2016)
- Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (2012-2014)

Riwayat Pekerjaan Career History

- Secretary General of the Ministry of Social Affairs (2021-present)
- Director General of Social Rehabilitation of the Ministry of Social Affairs (2020-2021)
- Director General of Social Protection and Security of the Ministry of Social Affairs (2016-2020)
- Ministerial Expert Staff on Social Impact of the Ministry of Social Affairs (2014-2016)
- Head of the Social Welfare Education and Research Agency of the Ministry of Social Affairs (2012-2014)

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (2021-sekarang)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Secretary General of the Ministry of Social Affairs (2021-present)

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama atau pengendali.

Hubungan Afiliasi Affiliate

Has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with major or controlling shareholders.

Nihil

Kepemilikan Saham The Company Share Ownership

None



Lathifah Shohib
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia nomor SK227/MBU/10/2022 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.	Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Decree of the Minister of SOEs as the GMS of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia number SK227/MBU/10/2022 dated October 07, 2022 concerning the Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.
Indonesia	Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
64 Tahun	Usia per 31 Desember 2023 <i>Age as of December 31, 2023</i>	64 Years old
Jombang, 9 Desember 1959	Tempat Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Jombang, December 9, 1959
Malang	Domisili <i>Domicile</i>	Malang
S1 IKIP Malang	Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	Bachelor's Degree from IKIP Malang
- Komisaris Independen PT Jasindo (2021-2022) - Anggota Komisi X DPR RI (2019-2020) - Anggota Komisi X DPR RI (2014-2019)	Riwayat Pekerjaan <i>Career History</i>	- Independent commissioner of PT Jasindo (2021-2022) - Member of Commission X DPR RI (2019-2020) - Member of Commission X DPR RI (2014-2019)
Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola PT BKI (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.8/DEKOM.BKI/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Chairman of the Risk Monitoring and Governance Committee of PT BKI (Persero) based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Number: SK.8/DEKOM.BKI/X/2022 dated October 10, 2022 concerning the Dismissal and Appointment of the Chair of the Risk Monitoring and Governance Committee of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama atau pengendali.	Hubungan Afiliasi <i>Affiliate</i>	Has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with major or controlling shareholders
Nihil	Kepemilikan Saham <i>The Company Share Ownership</i>	None



M. Amperawan
Komisaris
Commissioner

Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, Nomor SK-17/MBU/01/2019, tanggal 15 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.	Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Decree of the Minister of BUMN as the GMS of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, Number SK-17/MBU/01/2019, January 15, 2019 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.
Indonesia	Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
57 Tahun	Usia per 31 Desember 2023 <i>Age as of December 31, 2023</i>	57 Years Old
Tanjung Karang, 31 Mei 1966	Tempat Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Tanjung Karang, May 31, 1996
Tangerang	Domisili <i>Domicile</i>	Tangerang
- S-2 Ilmu Administrasi, Administrasi dan Kebijakan Publik, FISIP Universitas Indonesia, Jakarta (2003). - S-1 Manajemen, FE Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, lulus 1992.	Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	- Master of Science in Administration, Administration and Public Policy, FISIP, University of Indonesia, Jakarta (2003). - S-1 Management, FE Krisnadwipayana University, Jakarta, graduated 1992.
- Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet RI, Juli 2015-Juni 2020, berdasarkan Keputusan Presiden RI, Joko Widodo, Nomor 116/M Tahun 2015, 13 Juli 2015. - Pelaksana Harian Deputy Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet, 24 Juli 2018-22 September 2018, berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung, Nomor Sprint.351/Seskab/7/2018, 26 Juli 2018. - Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Deputy Bidang Administrasi, Sekretariat Kabinet RI, Mei 2011-Juli 2015, berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet RI, Dipo Alam, Nomor KEP8/SESKAB/V/2011, 2 Mei 2011.	Riwayat Pekerjaan <i>Career History</i>	- Expert Staff for the Economy and People's Welfare, Secretariat of the RI Cabinet, July 2015-June 2020, based on Decree of the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, Number 116/M of 2015, July 13, 2015. - Acting Deputy for Economic Affairs, Cabinet Secretariat, July 24, 2018-September 22, 2018, based on the Order of the Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia, Pramono Anung, Number Sprint.351/Seskab/7/2018, July 26, 2018. - Head of Planning and Finance Bureau, Deputy for Administration, Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia, May 2011-July 2015, based on Decree of the Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia, Dipo Alam, Number KEP8/SESKAB/V/2011, May 2, 2011.



• Kepala Bagian Program dan Anggaran II, Biro Perencanaan, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara RI, 2011, berdasarkan Keputusan Mensesneg RI, Sudi Silalahi, Nomor 53 Tahun 2011, 9 Maret 2011. • Kepala Bagian Program dan Anggaran II, Biro Perencanaan, Sekretariat Menteri Sekretariat Negara RI, November 2005-Maret 2011, berdasarkan Keputusan Mensesneg RI, Yusril Ihza Mahendra, Nomor 127 Tahun 2005, 18 November 2005. • Kepala Subbagian Anggaran Pembangunan, Biro Anggaran I, Sekretariat Negara RI, 2000-2005, berdasarkan Keputusan Sesneg RI, Djohan Effendi, Nomor KEP/41/SESNEG/8/2000, 29 Agustus 2000.	Riwayat Pekerjaan <i>Career History</i>	• <i>Head of Program and Budget II Section, Bureau of Planning, Secretariat of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia, 2011, based on Decree of the Minister of State Secretary of the Republic of Indonesia, Sudi Silalahi, Number 53 of 2011, March 9, 2011.</i> • <i>Head of Program and Budget II Section, Planning Bureau, Secretariat of the Minister of State Secretariat of the Republic of Indonesia, November 2005-March 2011, based on Decree of the Minister of State Secretary of the Republic of Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, Number 127 of 2005, November 18, 2005.</i> • <i>Head of Development Budget Subdivision, Budget Bureau I, Republic of Indonesia State Secretariat, 2000-2005, based on Decree of the Secretary of State of the Republic of Indonesia, Djohan Effendi, Number KEP/41/SESNEG/8/2000, August 29, 2000.</i>
• Ketua Komite Audit PT BKI (Persero), berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT BKI (Persero), Nomor SK.03/DEKOM.BKI/V/2019, tanggal 8 Mei 2019 tentang Pengangkatan Ketua Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia. • Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet RI, 3 Juni 2020- sekarang, berdasarkan Keputusan Presiden RI, Joko Widodo, Nomor 99/TPA Tahun 2020, 3 Juni 2020.	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	• <i>Chairman of the Audit Committee of PT BKI (Persero), based on Decision of the Board of Commissioners of PT BKI (Persero), Number SK.03/DEKOM.BKI/V/2019, dated May 8, 2019 concerning the Appointment of the Chair of the Audit Committee of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.</i> • <i>Expert Staff for the Economy and People's Welfare, Secretariat of the Republic of Indonesia Cabinet, June 3, 2020-present, based on Decree of the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, Number 99/TPA Year 2020, June 3, 2020.</i>
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama atau pengendali.	Hubungan Afiliasi <i>Affiliate</i>	<i>Has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with major or controlling shareholders.</i>
Nihil	Kepemilikan Saham <i>The Company Share Ownership</i>	<i>None</i>



Indra Iskandar
Komisaris
Commissioner

Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS dengan surat keputusan No: SK-240/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.	Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Decree of the Minister of BUMN as GMS with decision letter No: SK-240/MBU/07/2021 dated July 16, 2021 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.
Indonesia	Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
57 Tahun	Usia per 31 Desember 2023 <i>Age as of December 31, 2023</i>	57 Years Old
Jakarta, 14 November 1966	Tempat Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Jakarta, November 14, 1996
Jakarta	Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
- S3 Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (2020) - S2 Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (2005) - S1 Teknik Sipil Institut Sains dan Teknologi Nasional (1994)	Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	- Doctor of Management and Business, Bogor Agricultural University (2020) - Master of Administrative Science, University of Indonesia (2005) - S1 Civil Engineering National Institute of Science and Technology (1994)
- Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah Kementerian Sekretariat Negara (2015-2018) - Karo Umum Sekretariat Negara Kementerian Sekretariat Negara (2013-2015) - Kasubbag Perencanaan Bangunan (2002-2005) - Kementerian Sekretariat Negara Kasubbag Proyek PBB, Sekretariat Negara Kementerian Sekretariat Negara (2000)	Riwayat Pekerjaan <i>Career History</i>	- Assistant Deputy for State and Regional Institutions Relations, Ministry of State Secretariat (2015-2018) - Head of the General Bureau of the State Secretariat of the Ministry of State Secretariat (2013-2015) - Head of subdivision of Building Planning (2002-2005) - Ministry of State Secretariat, Section Head of UN Project Sub-Division, State Secretariat Ministry of State Secretariat (2000)



- Sekretaris Jenderal DPR RI (2018-sekarang) - Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia PT BKI (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.9/DEKOM.BKI/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan SDM dan Pengalihan Tugas Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan SDM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.	Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Secretary General of the House of Representatives (2018-present) - Chairman of the Nomination, Remuneration and Human Resources Committee of PT BKI (Persero) based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Number: SK.9/DEKOM.BKI/X/2022 dated October 10, 2022 concerning the Dismissal of the Chairman of the Nomination, Remuneration and HR Committee and the Transfer of Duties of the Deputy Chairman of the Nomination, Remuneration and HR Committee of PT Biro Klasifikasi Indonesia.
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama atau pengendali.	Hubungan Afiliasi Affiliate	Has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with major or controlling shareholders.
Nihil	Kepemilikan Saham The Company Share Ownership	None



Virgo Eresta Jaya
Komisaris
Commissioner

Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No: SK-178/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.	Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Decree of the Minister of BUMN as GMS with decision letter No: SK-178/MBU/07/2023 dated July 4, 2023 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.
Indonesia	Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
54 Tahun	Usia per 31 Desember 2023 <i>Age as of December 31, 2023</i>	54 Years Old
Jakarta, 16 September 1969	Tempat Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Jakarta, September 16, 1969
Jakarta	Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
- S2 Land Administration University of New South Wales (1997). - S1 di bidang Teknik Geodesi, Institut Teknologi Bandung (1992)	Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	- Master of Land Administration, University of New South Wales (1997). - Bachelor's degree in Geodetic Engineering, Bandung Institute of Technology (1992)
- Direktur Jenderal Survei Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kemeterian ATR/BPN (2022-sekarang) - Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Teknologi Informasi (2021-2022) - Plt Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (2019-2021) - Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (2018-2019) - Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang (2016-2018) - Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (2013-2016) - Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam (2011-2013) - Kepala Subdirektorat Penilaian Bidang Tanah (2006-2011)	Riwayat Pekerjaan <i>Career History</i>	- Director General of Land and Space Measurement and Mapping Surveys of the ATR/BPN Ministry (2022-present) - Expert Staff to the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency for Information Technology (2021-2022) - Acting Head of the East Java Province National Land Agency Regional Office (2019-2021) - Head of Human Resources Development Center (2018-2019) - Secretary of the Directorate General of Spatial Planning (2016-2018) - Head of Surabaya City Land Office II (2013-2016) - Head of Batam City Land Office (2011-2013) - Head of Land Appraisal Sub-directorate (2006-2011)

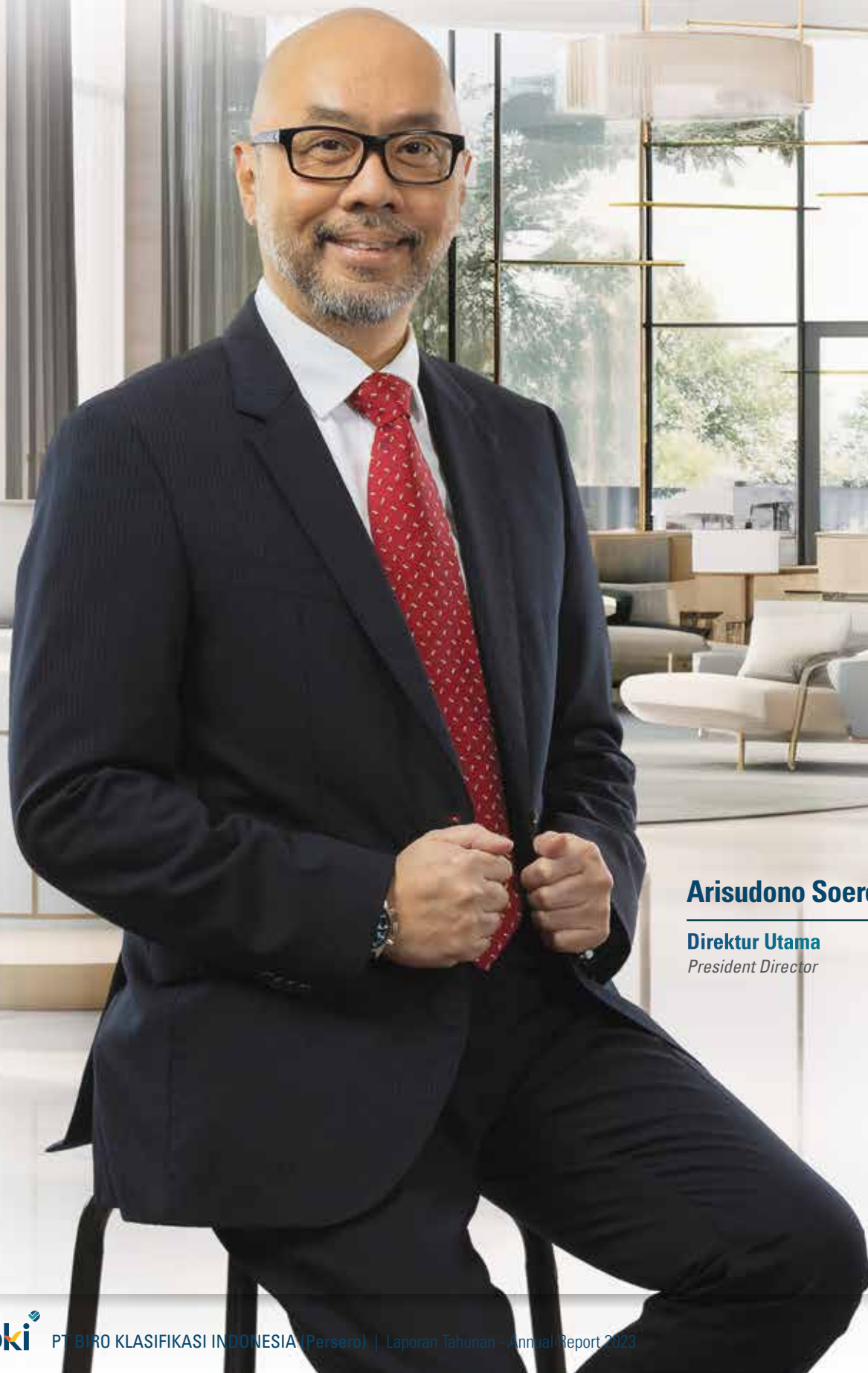


• Kepala Bidang Survei dan Pengukuran dan Pemetaan (2004-2006) • Kepala Seksi Pemetaan dan Integrasi Peta (2001-2004)	Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Head of Survey and Measurement and Mapping Division (2004-2006) • Head of Mapping and Map Integration Section (2001-2004)
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama atau pengendali.	Hubungan Afiliasi Affiliate	Has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with major or controlling shareholders.
Nihil	Kepemilikan Saham The Company Share Ownership	None



Laporan Direksi

The Board of Directors' Report



Arisudono Soerono

Direktur Utama
President Director

**Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,**

Perkenankan kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan karunia-Nya PT IDSURVEY mampu melalui tahun 2023 yang penuh dinamika dengan pencapaian kinerja yang baik.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua Perusahaan dengan status sebagai induk dari *holding* BUMN jasa survei yakni IDSURVEY (IDS). IDS memiliki tiga entitas anak yaitu PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) dan PT Surveyor Indonesia. Selain masih fokus meletakkan pondasi yang kokoh agar Perusahaan tetap tumbuh secara berkelanjutan, Perusahaan juga merealisasikan beberapa inisiatif strategis lingkup *holding* pada aspek organisasi, tata kelola, sumber daya manusia (SDM), pengelolaan bisnis dan pemasaran.

Koordinasi, komunikasi dan penataan organisasi menjadi kata kunci untuk mengintegrasikan tiga entitas bisnis yang berbeda. Kolaborasi berbasis kompetensi membuat kami selalu optimistis menghadapi tantangan.

Kebijakan Strategis dan Pelaksanaannya

Perusahaan merumuskan strategi dan kebijakan strategis dengan memerhatikan faktor eksternal yang meliputi aspirasi Pemegang Saham, peraturan/ketentuan pemerintah, dan asumsi ekonomi makro. Perusahaan juga mempertimbangkan faktor internal di antaranya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Kinerja Tahun Berjalan dan Kinerja Historis, yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023.

Penerapan strategi dan kebijakan dipastikan melalui pemantauan realisasi capaian *Key Performance Indicators* (KPI) Korporat, KPI Direktorat, KPI Unit Kerja melalui penyelenggaraan pertemuan internal manajemen secara berkala pada tingkat entitas dan *holding*, serta dengan Dewan Komisaris dan Keasdepan Industri Manufaktur KBUMN.

Pada tahun 2023, Perusahaan berhasil merealisasikan beberapa inisiatif strategis lingkup *holding*. Salah satunya adalah pengembangan struktur organisasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang memisahkan peran unit-unit kerja pengelolaan *holding* yang berada di bawah Direktur Keuangan, Administrasi dan Risiko, Direktur Pengembangan Sumber Daya, dan Direktur Hubungan Kelembagaan, dengan peran unit-unit kerja yang berada di bawah koordinasi Direktur Operasi.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Allow us to express our gratitude to the Almighty God, for it is by His grace that PT IDSURVEY has been able to navigate the dynamic year of 2023 with commendable performance.

The year 2023 marks the second year of the Company as the parent of the state-owned survey services holding company, IDSURVEY (IDS). IDS encompasses three subsidiary entities: PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) and PT Surveyor Indonesia. While still focusing on laying a strong foundation for sustainable growth, the Company also implemented several strategic initiatives within the holding's scope, covering aspects of organization, governance, human resources (HR), business management, and marketing.

Coordination, communication, and organizational structuring have been key to integrating three distinct business entities. Competency-based collaboration keeps us optimistic in facing challenges.

Strategic Policies and Their Implementation

The Company formulates its strategy and strategic policies by considering external factors, which include Shareholders' aspirations, government regulations/requirements, and macroeconomic assumptions. The Company also takes into account internal factors, including the Company's Long-Term Plan (RJPP), current year performance, and historical performance, which are outlined in the 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP).

The implementation of strategies and policies is ensured through the monitoring of the realization of Corporate Key Performance Indicators (KPI), Directorate KPIs, and Work Unit KPIs by conducting regular internal management meetings at both the entity and holding levels, as well as with the Board of Commissioners and the Ministry of State-Owned Enterprises' Manufacturing Industry Cluster.

In 2023, the Company successfully realized several strategic initiatives within the holding's scope. One notable initiative was the development of the organizational structure of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), which separated the roles of holding management work units under the Director of Finance, Administration, and Risk, the Director of Resource Development, and the Director of Institutional Relations, from the roles of work units under the coordination of the Director of Operations.



Perusahaan juga menerbitkan kebijakan *Talent Mobility*, yang mengatur pergerakan pegawai antar entitas di lingkungan IDSurvey, baik untuk kebutuhan proyek maupun pengisian posisi jabatan.

Di samping itu Perusahaan telah melaksanakan sentralisasi *learning & development*, dengan menunjuk PT SUCOFINDO Advisory Utama/SAU (cucu perusahaan) sebagai pengelola IDSurvey Institute.

Pada tahun 2023 Perusahaan berhasil mengimplementasikan *Key Account Management* IDSurvey untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan-pelanggan utama.

The Company also issued a Talent Mobility policy, regulating employee movement between entities within the IDSurvey environment, for both project needs and position fulfillment.

Additionally, the Company implemented centralized learning and development by appointing PT SUCOFINDO Advisory Utama/SAU (a subsidiary) as the manager of the IDSurvey Institute.

In 2023, the Company successfully implemented IDSurvey Key Account Management to build and maintain good relationships with key customers.

Tantangan dan Peluang

Dalam menjalankan bisnis selalu ada dinamika. Secara internal, IDSurvey masih menghadapi tantangan penguatan sinergi dan kolaborasi antar entitas IDSurvey, terutama dalam upaya pengembangan bisnis dan pemasaran. Pada sisi eksternal, tantangan terbesar perseroan meliputi tantangan pemanfaatan teknologi digital, peningkatan persaingan di pasar bisnis TIC di Indonesia termasuk berkembangnya jumlah *low cost TIC Company*, serta pelaksanaan TIC secara mandiri oleh industri (*Inhouse assurance*).

Meski demikian Perusahaan tetap melihat adanya peluang meningkatkan bisnis. Dengan bergabungnya tiga perusahaan TIC terkemuka di Indonesia, IDSurvey telah menjadi pemimpin pasar TIC Nasional dengan keunggulan sumber daya dan inovasi. Dengan keunggulan yang dimiliki, IDSurvey memperkuat penawaran jasa eksisting kepada segmen pelanggan BUMN, swasta dan pemerintah; memperluas penawaran jasa dalam eksisting pada sektor-sektor yang lebih beragam; memasuki dan membangun kompetensi dalam sektor dengan pertumbuhan tinggi seperti kesehatan, agribisnis, produk konsumen dan jasa keuangan.

Peluang-peluang lain yang dipicu oleh tema yang berkembang dalam perekonomian nasional diantaranya adalah mengembangkan sumber pertumbuhan bisnis baru seperti: bidang Geospasial, Bisnis Hijau Terintegrasi, TIC untuk Industri Digital dan Jaringan Laboratorium Terintegrasi; melakukan ekspansi geografis untuk mengakses pasar potensial di Asia Tenggara/Asia Pasifik melalui Akuisisi dan Kerjasama Strategis.

Challenges and Opportunities

In running a business, dynamics are inevitable. Internally, IDSurvey continues to face challenges in strengthening synergy and collaboration among its entities, particularly in business development and marketing efforts. Externally, the Company's biggest challenges include leveraging digital technology, increasing competition in the TIC (Testing, Inspection, Certification) market in Indonesia, including the rise of low-cost TIC companies, and the implementation of in-house assurance by industries.

Despite these challenges, the Company still sees opportunities to grow its business. With the merger of three leading TIC companies in Indonesia, IDSurvey has become the national market leader in TIC with superior resources and innovation. Leveraging these strengths, IDSurvey enhances its existing service offerings to state-owned enterprises, private sector, and government segments; expands its service offerings in more diverse sectors; and enters and builds competencies in high-growth sectors such as healthcare, agribusiness, consumer products, and financial services.

Other opportunities, driven by emerging themes in the national economy, include developing new business growth sources such as Geospatial services, Integrated Green Business, TIC for the Digital Industry, and Integrated Laboratory Networks; and pursuing geographic expansion to access potential markets in Southeast Asia/Asia Pacific through acquisitions and strategic partnerships.



Perbandingan Hasil Dicapai dengan Target

Secara umum realisasi parameter-parameter keuangan pada tahun 2023 menunjukkan pencapaian positif dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, meski pada beberapa sektor masih perlu perbaikan.

Pendapatan Operasi mencapai 91% dari target RKAP, namun jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022, Pendapatan Operasi mengalami pertumbuhan 7%. *Gross Profit* tercapai 90% dari RKAP namun tumbuh 13% dibandingkan pencapaian tahun 2022.

Sementara, EBITDA tercapai 85% dari target RKAP dan Laba Bersih tercapai 91% dari RKAP. Jika dibanding tahun sebelumnya, EBITDA dan Laba Bersih masing-masing mengalami pertumbuhan 13%.

Beberapa faktor memengaruhi kinerja keuangan di antaranya adalah:

1. Segmen usaha klasifikasi berhasil mencatatkan kinerja positif dan melampaui target pendapatan;
2. Segmen usaha berbasis sumber daya alam seperti Batubara, Mineral, Laboratorium, Sertifikasi mampu mencatatkan kinerja positif dan melampaui target pendapatan;
3. Segmen usaha baru yang masih dalam tahap inkubasi bertumbuh secara positif melalui penetrasi pasar yang selektif dan terukur;

Kendala dan Langkah Penyelesaian

Dalam menjalankan bisnis Perusahaan menemui sejumlah dinamika, di antaranya adanya kecenderungan dunia usaha/industri melakukan secara mandiri upaya pemastian sendiri (*Inhouse TIC*), dan belum optimalnya upaya penggalan bisnis dari segmen pelanggan BUMN. Kehadiran perusahaan-perusahaan TIC kecil yang bersaing atas dasar tarif jasa juga menekan kemampuan laba;

Di sisi lain, porsi pendapatan yang berasal dari sektor migas dan Mineral & Batubara sangat signifikan, sedangkan kedua sektor tersebut merupakan sektor industri *sunset* sehingga diperlukan penyiapan portofolio pengganti.

Dalam melakukan mitigasi atas kendala yang dihadapi selama 2023, Perusahaan memiliki inisiatif dan rencana inisiatif yang diterapkan:

1. Pengembangan bisnis melalui pendekatan organik, yaitu melalui pengayaan portofolio eksisting dan pengembangan portofolio baru;

Comparison between Realization and Target

In general, the realization of financial parameters in 2023 shows positive achievements and improvements compared to 2022, although some sectors still need improvement.

Operating Revenue reached 91% of the RKAP target, but when compared to 2022, Operating Revenue grew by 7%. Gross Profit reached 90% of the RKAP target but grew by 13% compared to 2022.

Meanwhile, EBITDA reached 85% of the RKAP target, and Net Profit reached 91% of the RKAP target. Compared to the previous year, EBITDA and Net Profit each grew by 13%.

Several factors influenced financial performance, including:

1. *The classification business segment recorded positive performance and exceeded revenue targets.*
2. *Natural resource-based business segments such as Coal, Minerals, Laboratory, and Certification recorded positive performance and exceeded revenue targets.*
3. *New business segments, still in the incubation stage, grew positively through selective and measured market penetration.*

Challenges and Resolution

In running the business, the Company encountered several dynamics, including the tendency of businesses/industries to conduct their own assurance efforts (Inhouse TIC) and the suboptimal efforts to tap into business from state-owned enterprise (BUMN) customer segments. The presence of small TIC companies competing on service rates also pressured profitability.

Additionally, the proportion of revenue from the oil and gas, and Mineral & Coal sectors is significant, yet both sectors are considered sunset industries, necessitating the preparation of replacement portfolios.

To mitigate the challenges faced in 2023, the Company implemented several initiatives and plans:

1. *Business development through an organic approach by enriching existing portfolios and developing new portfolios.*



2. Pengembangan Bisnis melalui pendekatan anorganik yaitu melakukan akuisisi dalam rangka penguasaan kapabilitas/bidang bisnis baru;
 3. Sinergi *Holding*, melalui *Shared Services* bidang Teknologi Informasi, SDM dan Pengadaan;
 4. KSO dan kemitraan strategis dalam pengembangan bidang bisnis terutama dengan BUMN lain dan kemitraan strategis terkait upaya-upaya peningkatan efisiensi.
 5. Pembentukan Forum Bisnis sebagai wadah komunikasi antar entitas yang meliputi forum bisnis: Portofolio, Regional dan Cabang dengan tujuan menyelaraskan upaya-upaya pengembangan bisnis dan pemasaran diantara entitas-entitas IDSurvey.
2. *Business development through an inorganic approach by acquiring new business capabilities/fields.*
 3. *Holding synergy through shared services in Information Technology, Human Resources, and Procurement.*
 4. *Joint operations and strategic partnerships in business development, especially with other state-owned enterprises (BUMN) and strategic partnerships related to efficiency improvement efforts.*
 5. *Formation of a Business Forum as a communication platform among entities, including portfolio, regional, and branch business forums, aiming to align business development and marketing efforts among IDSurvey entities.*

Pandangan Terhadap Prospek Usaha

Manajemen optimis dengan prospek jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan diversifikasi produk jasa layanan. Dalam jangka panjang, perusahaan mencanangkan menembus 20 besar global TIC dengan memperkuat pijakan sebagai pemimpin pasar di Indonesia, memperluas penawaran sebagai perusahaan global terintegrasi yang terkemuka dan membangun keunggulan sebagai penyedia layanan TIC kelas dunia

Pada tahun 2024 IDSurvey akan melakukan penataan ulang organisasi dan bisnis termasuk anak dan cucu perusahaan, di antaranya terkait rencana *shared service*, upaya mengurangi ketergantungan kepada sub kontraktor bidang *engineering*.

Pengelolaan *Holding* akan terfokus pada pengembangan strategi untuk dijalankan seluruh Entitas IDSurvey yang meliputi strategi-strategi bidang sumberdaya & teknologi, keuangan, akuntansi & perpajakan, manajemen risiko, pengembangan bisnis & portofolio, proses bisnis & kesisteman, serta penjualan & pemasaran.

Struktur organisasi juga diperkuat dengan adanya *Legal Counsel* sebagai unit yang melakukan mitigasi risiko bidang hukum, menangani permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan, serta memimpin, mengkoordinasi dan memantau tim hukum dalam memberikan pertimbangan hukum, mengembangkan sistem manajemen kepatuhan.

Outlook on Business Prospects

Management is optimistic about both short-term and long-term prospects. In the short term, the focus is on improving operational efficiency and diversifying service product offerings. In the long term, the company aims to break into the top 20 global TIC companies by strengthening its position as the market leader in Indonesia, expanding its offerings as a leading integrated global company, and building its reputation as a world-class TIC service provider.

In 2024, IDSurvey will reorganize its structure and business, including its subsidiaries and affiliates, with initiatives such as shared services and efforts to reduce reliance on engineering subcontractors.

The management of the holding company will focus on developing strategies to be implemented across all IDSurvey entities, encompassing strategies in resources & technology, finance, accounting & taxation, risk management, business development & portfolio, business processes & systems, and sales & marketing.

The organizational structure will also be strengthened with the inclusion of a Legal Counsel unit to mitigate legal risks, handle legal issues faced by the company, lead, coordinate, and monitor the legal team in providing legal considerations, and develop a compliance management system.



Penerapan Tata Kelola yang Baik

Perusahaan menempatkan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik sebagai hal paling penting dalam proses bisnis. Asesmen terhadap praktik GCG dilakukan setiap tahun, baik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga independen maupun *self assessment*. *Assessment* yang dilaksanakan secara rutin tersebut menghasilkan *Area of Improvement* pada aspek GCG yang ditindaklanjuti oleh manajemen sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam menjaga GCG.

Pada tahun 2023 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah menerbitkan Piagam Dewan Komisaris, Piagam Direksi, Piagam Internal Audit, Piagam Manajemen Risiko dan Pedoman Pengendalian Internal dan hal ini juga diberlakukan sebagai kewajiban bagi Anak Perusahaan. Melalui Piagam dan Pedoman tersebut Perusahaan memastikan komitmen dan memberikan aturan yang konsisten bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan ketentuan GCG.

Perubahan Komposisi Direksi

Sebagai Pemilik Saham 100 persen pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), Kementerian BUMN melaksanakan penambahan komposisi Direktur ini dalam rangka penguatan fungsi *holding* khususnya dalam hal hubungan dengan seluruh *stakeholder* terkait dan meningkatkan efektifitas kegiatan usaha yang dilaksanakan seluruh entitas *holding*. Pada tahun 2023, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah memiliki Direktur Hubungan Kelembagaan yang diangkat berdasarkan SK Nomor SK-177/MBU/03/2023 tanggal 4 Juli 2023.

Dengan demikian susunan Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Arisudono
Direktur Operasi	: R. Benny Susanto
Direktur Pengembangan Sumber Daya	: Rozainbahri Noor
Direktur Keuangan, Administrasi & Manajemen Risiko	: Sinung Triwulandari
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Andry Tanudjaja

Implementation of Good Governance

The company places the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles as the most important aspect of its business processes. An assessment of GCG practices is conducted annually, either by independent third parties or through self-assessment. These routine assessments yield areas for improvement in GCG aspects, which management addresses as part of the company's commitment to maintaining GCG standards.

In 2023, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) issued the Board of Commissioners Charter, Board of Directors Charter, Internal Audit Charter, Risk Management Charter, and Internal Control Guidelines, which are also mandatory for subsidiaries. Through these Charters and Guidelines, the company ensures commitment and provides consistent rules for management in conducting company activities in accordance with GCG provisions.

Changes in the Board of Directors

As the 100% shareholder of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) made changes to the composition of the Board of Directors to strengthen the holding functions, particularly in terms of relations with all relevant stakeholders and to enhance the effectiveness of business activities conducted by all holding entities. In 2023, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) appointed a Director of Institutional Relations based on Decree Number SK-177/MBU/03/2023 dated July 4, 2023.

Thus, the composition of the Board of Directors of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) is as follows:

<i>President Director:</i>	<i>Arisudono</i>
<i>Director of Operations</i>	<i>: R. Benny Susanto</i>
<i>Director of Resource Development:</i>	<i>Rozainbahri Noor</i>
<i>Director of Finance, Administration & Risk Management</i>	<i>: Sinung Triwulandari</i>
<i>Director of Institutional Relations:</i>	<i>Andry Tanudjaja</i>



Apresiasi

Mengakhiri Laporan ini, izinkah kami menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris, para Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama tahun 2023. Kami mengapresiasi kepada segenap karyawan atas dedikasi penuh dan kerja kerasnya untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Direksi menyadari masih banyak *area of improvement* yang harus ditindaklanjuti sehingga mampu mewujudkan target menjadi 20 besar perusahaan TIC di pasar global.

Appreciation

In concluding this report, we would like to express our gratitude to the Board of Commissioners, shareholders, stakeholders, and all parties who have provided support throughout 2023. We extend our appreciation to all employees for their full dedication and hard work in realizing the Company's vision and mission. The Board of Directors acknowledges that there are still many areas for improvement that must be addressed to achieve the target of becoming one of the top 20 TIC companies in the global market.

Jakarta, Juni/June 2024

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Atas nama Direksi

On behalf of the Board of Directors

Arisudono Soerono

Direktur Utama

President Director



Direksi

The Board of Directors



Rozainbahri Noor

Direktur Pengembangan Sumber Daya
Director of Resources Development

R. Benny Susanto

Direktur Operasi
Operation Director

Arisudono Soerono

Direktur Utama
President Director

Sinung Triwulandari

Direktur Keuangan, Administrasi & Manajemen Risiko
Director of Finance, Administration & Risk Management

Andry Tanudjaja

Direktur Hubungan Kelembagaan
Director of Institutional Relations



Arisudono Soerono

Direktur Utama
President Director

Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS: SK-288/MBU/12/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.	Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Decree of the Minister of SOEs as GMS: SK-288/MBU/12/2022 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
Indonesia	Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
53 Tahun	Usia per 31 Desember 2023 <i>Age as of December 31, 2023</i>	53 Years Old
Jakarta, 24 Januari 1970	Tempat Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Jakarta, January 24, 1970
Jakarta	Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
- MBA London Business School Institut (2000) - S1 Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (1994)	Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	- MBA from London Business School Institute (2000) - Bachelor of Chemical Engineering from Bandung Institute of Technology (1994)
- Direktur Utama PT Danareksa (Persero) (2020-2022) - Direktur Utama Pengelola Aset (Persero) (2020) - Managing Director & Country Head PT Vena Energy (2019-2020) - Chief Financial Officer PT Paiton Energy (2018-2019) - Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Indonesia Infrastructure (IF) (2013-2018) - Chief Financial Officer PT Blue Bird Tbk (2012-2013) - Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan Cardig Group (2021-2012)	Riwayat Pekerjaan <i>Career History</i>	- President Director of PT Danareksa (Persero) (2020-2022) - President Director of Asset Management (Persero) (2020) - Managing Director & Country Head of PT Vena Energy (2019-2020) - Chief Financial Officer of PT Paiton Energy (2018-2019) - President Director and Director of Finance of PT Indonesia Infrastructure (IF) (2013-2018) - Chief Financial Officer of PT Blue Bird Tbk (2012-2013) - Vice President Director, Director of Finance of Cardig Group (2021-2012)
Tidak memiliki rangkap Jabatan	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Does not have concurrent positions
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama atau pengendali.	Hubungan Afiliasi <i>Affiliate</i>	Has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with major or controlling shareholders.
Nihil	Kepemilikan Saham <i>The Company Share Ownership</i>	None

**Rozainbahri Noor**Direktur Pengembangan Sumber Daya
Director of Resource Development

Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS: No.SK-226/MBU/06/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.	Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	<i>Decree of the Minister of SOEs as GMS: No.SK-226/MBU/06/2021 dated July 2, 2021 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.</i>
Indonesia	Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
40 Tahun	Usia per 31 Desember 2023 <i>Age as of December 31, 2023</i>	40 Years Old
Jakarta, 22 September 1983	Tempat Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Jakarta, September 22, 1983
Jakarta	Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
- S2 Bisnis, The Australia National University, Canberra, 2008 - S1 Bisnis, Swinburne University of Technology, Melbourne, 2006	Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<i>Master's Degree in Business, The Australia National University, Canberra, 2008</i> <i>Bachelor's Degree in Business, Swinburne University of Technology, Melbourne, 2006</i>
- Direktur Sumber Daya Manusia PT Sucofindo (Persero) (2018-2021) - Country HR Manager/Head of Human Resources Function PT Shell Indonesia (2015-2018) - Global Pay Policy & Benchmarking Royal Dutch Shell (2012-2015) - HR Account Manager for Shell Upsretam Internasional PT Shell Indonesia (2011-2012) - HR Country Policy, Benefit, ER/IR, Services & Processes Lead PT Shell Indonesia (2011-2012) - HR Analyst (Shell HR Graduate Development Rotation), PT Shell Indonesia (2010-2011)	Riwayat Pekerjaan <i>Career History</i>	<i>Director of Human Resources of PT Sucofindo (Persero) (2018-2021)</i> <i>Country HR Manager/Head of Human Resources Function PT Shell Indonesia (2015-2018)</i> <i>Global Pay Policy & Benchmarking Royal Dutch Shell (2012-2015)</i> <i>HR Account Manager for Shell Upsretam International PT Shell Indonesia (2011-2012)</i> <i>HR Country Policy, Benefit, ER/IR, Services & Process Lead PT Shell Indonesia (2011-2012)</i> <i>HR Analyst (Shell HR Graduate Development Rotation), PT Shell Indonesia (2010-2011)</i>
Tidak memiliki rangkap jabatan	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	<i>Does not have concurrent positions</i>
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama atau pengendali.	Hubungan Afiliasi <i>Affiliate</i>	<i>Has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with major or controlling shareholders.</i>
Nihil	Kepemilikan Saham <i>The Company Share Ownership</i>	<i>None</i>



R. Benny Susanto
Direktur Operasi
Operation Director

Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS SK No. 234/MBU/10/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).	Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	<i>Decree of the Minister of SOEs as GMS SK No. 234/MBU/10/2022 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).</i>
Indonesia	Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
57 Tahun	Usia per 31 Desember 2023 <i>Age as of December 31, 2023</i>	57 Years Old
Jakarta, 7 Desember 1966	Tempat Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Jakarta, December 7, 1996
Jakarta	Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
S1 Teknik Perminyakan di Universitas Trisakti	Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<i>Bachelor of Petroleum Engineering from the University of Trisakti</i>
- Kepala Sektor Migas dan Sistem Pembangkit PT Surveyor Indonesia (2018-2022) - Kepala Divisi Migas dan Sistem Pembangkit PT Surveyor Indonesia (2016-2018) - Wakil Kepala Unit Bisnis Migas dan Pembangkit (2015-2016) - Kepala Unit Bisnis Sistem Sertifikasi Keselamatan dan Jasa umum (2013-2015) - Ahli Utama Unit Bisnis Migas dan Petrochemical (2012-2013) - Kepala Cabang PT Surveyor Indonesia Palembang (2010-2012) - Kepala Manajemen Proyek Masterlist Migas, Ditjen Migas Kemen ESDM (2005-2010) - Kepala Manajemen KSO Proyek VPTI KSO Sucofindo Surveyor Indonesia (2004-2005). - Kepala Manajemen Proyek Survei kebutuhan dan monitoring Distribusi BBM, ESDM (2003-2004) - Kepala Manajemen Proyek Survey, Pemantauan dan Verifikasi Penyimpanan Distribusi BBM, ESDM (2002-2003)	Riwayat Pekerjaan <i>Career History</i>	- Head of Oil and Gas and Power System Sector of PT Surveyor Indonesia (2018-2022) - Head of Oil and Gas and Power System Division of PT Surveyor Indonesia (2016-2018) - Deputy Head of Oil and Gas and Power Generation Business Unit (2015-2016) - Head of Safety Certification System and General Services Business Unit (2013-2015) - Principal Expert of Oil and Gas and Petrochemical Business Unit (2012-2013) - Head of PT Surveyor Indonesia Palembang Branch (2010-2012) - Head of Oil and Gas Masterlist Project Management, Directorate General of Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources (2005-2010) - Head of KSO Management of VPTI Project KSO Sucofindo Surveyor Indonesia (2004-2005). - Head of Project Management Survey of fuel distribution needs and monitoring, MEMR (2003-04) - Head of Project Management Survey, Monitoring and Verification of Fuel Distribution Storage, MEMR (2002-2003)
Tidak memiliki rangkap Jabatan	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	<i>Does not have concurrent positions</i>
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama atau pengendali.	Hubungan Afiliasi <i>Affiliate</i>	<i>Has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with major or controlling shareholders.</i>
Nihil	Kepemilikan Saham <i>The Company Share Ownership</i>	<i>None</i>

**Sinung Triwulandari**

Direktur Keuangan, Administrasi & Manajemen Risiko
Director of Finance, Administration & Risk Management

Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No: SK-177/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.	Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Decree of the Minister of BUMN as GMS with decision letter No: SK-177/MBU/07/2023 dated July 4, 2023 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.
Indonesia	Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
52 Tahun	Usia per 31 Desember 2023 <i>Age as of December 31, 2023</i>	52 Years Old
Semarang, 23 Maret 1971	Tempat Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Semarang, March 23, 1971
Jakarta	Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta
- S2 Bidang Informatika, University of Abertay Dundee, Inggris. - S1 Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta - Diploma Teknik Elektro, Universitas Diponegoro, Semarang	Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	- Master of Science di bidang Informatika University of Abertay Dundee, Inggris - Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Muhammadiyah University, Yogyakarta - Diploma in Electrical Engineering, Diponegoro University, Semarang
- Direktur Utama PT HALEYORA Power (2022-2023) - Direktur Operasi PT HALEYORA Power (2017-2022) - Kepala Divisi Operasi dan Pengembangan Bisnis PT HALEYORA Power (2013-2017) - Berkarier di PT PLN (Persero) sebagai Deputy Manager Komersial, Deputy Manager Pengembangan Usaha, Manager Cabang Kotabumi dan Manager Area Kota (1994-2004).	Riwayat Pekerjaan <i>Career History</i>	- President Director of PT HALEYORA Power (2022-2023) - Operations Director PT HALEYORA Power (2017-2022) - Head of Operations and Business Development Division PT HALEYORA Power (2013-2017) - Career at PT PLN (Persero) as Deputy Commercial Manager, Deputy Business Development Manager, Kotabumi Branch Manager and City Area Manager (1994-2004).
Tidak memiliki rangkap Jabatan	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Does not have concurrent positions
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama atau pengendali.	Hubungan Afiliasi <i>Affiliate</i>	Has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with major or controlling shareholders.
Nihil	Kepemilikan Saham <i>The Company Share Ownership</i>	None



Andry Tanudjaja
 Direktur Hubungan Kelembagaan
Director of Institutional Relations

Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No: SK-177/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.	Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	<i>Decree of the Minister of BUMN as GMS with decision letter No: SK-177/MBU/07/2023 dated July 4, 2023 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.</i>
Indonesia	Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	<i>Indonesia</i>
52 Tahun	Usia per 31 Desember 2023 <i>Age as of December 31, 2023</i>	<i>52 Years Old</i>
Jakarta, 8 Juni 1971	Tempat Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	<i>Jakarta, June 8, 1971</i>
Jakarta	Domisili <i>Domicile</i>	<i>Jakarta</i>
D3 Pariwisata di National Hotel Insitute, 1994	Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	<i>Diploma 3 in Tourism at the National Hotel Institute, 1994</i>
- Direktur Komersial dan Pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (2021-2023) - Komisaris PT BGR Logistik Indonesia (2021-2023) - Direktur Utama PT Dhanadhipa Karya Adhika (2019-2021) - Komisaris PT Finenz Indonesia (2009-2021) - Komisaris PT Buana Megah Abadi Asset Management (2010-2021) - Vice President MF Global Pte Ltd, Singapore (2005-2008) - Vice President Marketing PT Recapital/Rifan Financindo Berjangka (2003-2005)	Riwayat Pekerjaan <i>Career History</i>	<i>Commercial and Development Director of PT Perusahaan Dagang Indonesia (Persero) (2021-2023)</i> <i>Commissioner of PT BGR Logistik Indonesia (2021-2023)</i> <i>President Director of PT Dhanadhipa Karya Adhika (2019-2021)</i> <i>Commissioner of PT Finenz Indonesia (2009-2021)</i> <i>Commissioner of PT Buana Megah Abadi Asset Management (2010-2021)</i> <i>Vice President MF Global Pte Ltd, Singapore (2005-2008)</i> <i>Vice President Marketing PT Recapital/Rifan Financindo Berjangka (2003-2005)</i>
Tidak memiliki rangkap jabatan	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	<i>Does not have concurrent positions</i>
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan pemegang saham utama atau pengendali.	Hubungan Afiliasi <i>Affiliate</i>	<i>Has no affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or with major or controlling shareholders.</i>
Nihil	Kepemilikan Saham <i>The Company Share Ownership</i>	<i>None</i>





Surat Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

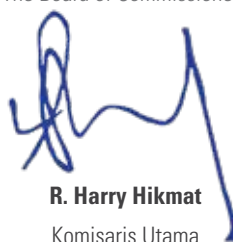
Statement of The Board of Commissioners on The Responsibilities of The 2023 Annual Report of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2023 annual report of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) have been presented in their entirety and that we assume full responsibility for the accuracy of the contents of this Annual Report. This statement is duly made in all integrity.

Dewan Komisaris

The Board of Commissioners



R. Harry Hikmat

Komisaris Utama
President Commissioner



M. Amperawan

Komisaris
Commissioner



Virgo Eresta Jaya

Komisaris
Commissioner



Indra Iskandar

Komisaris
Commissioner



Lathifah Shohib

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Statement of The Board of Directors on The Responsibilities of The 2023 Annual Report of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2023 annual report of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) have been presented in their entirety and that we assume full responsibility for the accuracy of the contents of this Annual Report. This statement is duly made in all integrity.

Direktur

The Board of Directors

Arisudono Soerono

Direktur Utama
President Director

Rozainbahri Noor

Direktur Pengembangan Sumber Daya
Director of Resource Development

R. Benhy Susanto

Direktur Operasi
Director of Operation

Sinung Triwulandari

Direktur Keuangan, Administrasi dan
Manajemen Risiko
*Director of Finance, Administration, and Risk
Management*

Andry Tanudjaja

Direktur Hubungan Kelembagaan
Director of Institutional Relations



03

Profil PERUSAHAAN

Company Profile







Informasi Umum

General Information

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada tahun 2021 ditunjuk menjadi Induk Holding BUMN Jasa Survei dengan entitas anak terdiri dari PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) dan PT Surveyor Indonesia.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) in 2021 was appointed as the Parent Holding of Survey Services SOEs, with subsidiaries consisting of PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) and PT Surveyor Indonesia.

	Nama Perusahaan <i>Name of the Company</i>	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
	Alamat Kantor Pusat <i>Head Office</i>	Jl. Yos Sudarso Kav. 38-40 Tanjung Priok Jakarta-14320, Indonesia
	Telepon <i>Telephone</i>	+6221 4301017
	E-mail	ho@bki.co.id
	Situs Elektronik <i>Website</i>	www.bki.co.id
	Badan Hukum <i>Legal Entity</i>	Perseroan Terbatas
	Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	Jasa Klasifikasi dan Registrasi Kapal, Statutoria, Konsultansi dan Supervisi di Bidang Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi (TIC). <i>Vessel Classification and Registration, Statutory, Consultancy and Supervision Services in the Field of Testing, Inspection and Certification (TIC).</i>
	Status Perusahaan <i>Company Status</i>	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) <i>PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) is a State-Owned Enterprise (SOE).</i>
	Kepemilikan Saham <i>Share Ownership</i>	100% Saham PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. <i>100% of the shares of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) are owned by the Republic of Indonesia.</i>
	Dasar Hukum Kepemilikan <i>Legal Basis of Ownership</i>	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. <i>Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises.</i>
	Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	1 Juli 1964 <i>July 1, 1964</i>



	Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Perusahaan Negara (PN) Biro Klasifikasi Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964. Pada tahun 1977, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 Pemerintah RI mengalihkan status badan hukum BKI dari PN menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia. <i>The Government of the Republic of Indonesia established the Indonesian Classification Bureau State Company (PN) through Government Regulation No. 28 of 1964. In 1977, through Government Regulation No. 1 of 1977, the Government of Indonesia transferred the legal entity status of BKI from PN to a Company (Persero) of the Indonesian Classification Bureau.</i>
	Akta Pendirian <i>Deed of Establishment</i>	Notaris Imas Fatimah, S.H., dengan akta Nomor 57 tanggal 19 Oktober 1978, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: Y.A.5/345/1978 tanggal 7 November 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 58 Tahun 1979. <i>Notary Imas Fatimah, S.H., with deed Number 57 dated October 19, 1978, and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree Number: Y.A.5/345/1978 dated November 7, 1978 and announced in State Gazette Number: 58 of 1979.</i>
	Modal Dasar <i>Authorised Capital</i>	Rp28.000.000.000.000 triliun, yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna dan 27.999.999 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham seri B, dengan masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). <i>Rp28,000,000,000,000 trillion, divided into 1 (one) share of series A Dwiwarna and 27,999,999 (twenty seven million nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine) shares of series B, with each share worth Rp1,000,000 (one million rupiah).</i>
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Issued and Fully Paid-up Capital</i>	Rp7.012.393.000.000,- (tujuh triliun dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) <i>Rp7,012,393,000,000,- (seven trillion twelve billion three hundred ninety-three million rupiah)</i>
	Total Aset <i>Total Assets</i>	Rp8.701.166.504.638 (delapan triliun tujuh ratus satu miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) <i>Rp8,701,166,504,638 (eight trillion seven hundred one billion one hundred sixty six million five hundred four thousand six hundred thirty eight rupiah)</i>
	Jumlah Pegawai <i>Number of Employees</i>	Pegawai tetap 633 orang Pegawai tidak tetap 213 orang <i>633 permanent employees 213 non-permanent employees</i>



Entitas Anak Perusahaan

Subsidiary

Persentase Kepemilikan Saham Percentage of Shares Ownership	Tanggal Berdiri Date of Establishment	Status Status	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO)				
PT BKI 94,9997%	22 Oktober 1956	Aktif	Jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, pelatihan dan konsultasi dalam sektor pertanian, kehutanan, pertambangan (migas dan non migas), konstruksi, industri pengolahan, kelautan, perikanan, pemerintah, transportasi, sistem informatika, dan energi terbarukan.	Graha Sucofindo Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780. Telp : +62-21-7983666, Ext 1116 dan 1124 Faks : +62-21-7986473, 7983888 Email : customer.service@ sucofindo.co.id Website : www.sucofindo.co.id
	October 22, 1956	Active	Inspection, testing, certification, training and consulting services in the agriculture, forestry, mining (oil and gas and non-oil and gas), construction, processing industry, marine, fisheries, government, transportation, information systems, and renewable energy sectors.	
PT Surveyor Indonesia				
PT BKI 85,1160%	29 Juli 1991	Aktif	Jasa survei, inspeksi dan konsultasi	Graha Surveyor Indonesia Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950. Telp : +62-21 526 5526 Faks : +62-21 526 55 25 Email : surveyorindonesia@ptsi.co.id Website : www.ptsi.co.id
	July 29, 1991	Active	Surveying, inspection and consulting services.	



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



Sejarah Ringkas

The Company's Brief History

Berdiri pada 1 Juli 1964, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan klasifikasi kapal niaga berbendera Indonesia. Penugasan ini dikukuhkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Laut No. Th. 1/17/2 tanggal 26 September 1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Kapal-Kapal berbendera Indonesia memiliki sertifikat klasifikasi kapal yang dikeluarkan oleh BKI. Kegiatan Klasifikasi merupakan kegiatan penggolongan kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan salah satu penilaian atas laik laut kapal tersebut berlayar.

Pada tanggal 1 Agustus 1969 Pemerintah RI menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang.

Atas dasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 ini pada tanggal 31 Januari 1977, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pengalihan bentuk perusahaan menjadi Perseroan menjadi titik awal menuju badan klasifikasi modern. Tujuan, tugas, dan lapangan usaha BKI tidak lagi terbatas pada bidang klasifikasi kapal tetapi juga mencakup bidang non-klasifikasi.

Sebagai Perseroan, bisnis BKI semakin fokus dan spesifik yaitu memajukan, meningkatkan, dan mengembangkan usaha-usaha yang terkait dengan perkapalan, pelayaran, dan teknik kelautan untuk menjamin keselamatan jiwa dan benda di laut.

Pada tahun 1982 BKI mulai merintis bidang komersial yang merupakan diversifikasi usaha sekaligus menjadi *profit maker* bagi perusahaan.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 2021 terjadi perubahan Anggaran Dasar Perusahaan melalui Akta No. 35 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ruli Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S988/MBU/12/2021 tertanggal 16 Desember 2021 perihal perubahan Struktur Permodalan dan Anggaran Dasar Perusahaan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Founded on July 1, 1964, the Indonesian Classification Bureau (BKI) is the sole national classification society assigned by the government of the Republic of Indonesia to certify Indonesian-flagged commercial vessels. This assignment was confirmed in the Decree of the Minister of Sea Transportation No. Th. 1/17/2 dated September 26, 1964 concerning Regulations on the Implementation of the Obligation of Indonesian-flagged Ships to have a ship classification certificate issued by BKI. Classification activities are ship classification activities based on hull construction, machinery and ship electricity with the aim of providing one assessment of the seaworthiness of the ship to sail.

On August 1, 1969, the Government of Indonesia issued Law Number 9 of 1969 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 1969 concerning Forms of State Enterprises into Law.

On the basis of Law No. 9 of 1969, on 31 January 1977, the Government issued Government Regulation No. 1 of 1977 concerning the Transfer of the State Company Form of the Indonesian Classification Bureau into a Company (Persero).

The change of form to a Company is a starting point towards a modern classification body. BKI's objectives, duties and business fields are no longer limited to the field of ship classification but also include the field of non-classification.

As a Company, BKI's business is increasingly focused and specific, namely advancing, improving, and developing businesses related to shipping, seafaring, and marine engineering to ensure the safety of life and property at sea.

In 1982 BKI began to pioneer the commercial field, which is a business diversification and a profit maker for the company.

The Company's Articles of Association have undergone several changes. In 2021, an amendment to the Company's Articles of Association through Deed No. 35, dated December 16, 2021, was made before Ruli Iskandar, S.H., Notary in Jakarta. This amendment is a follow-up to the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S988/MBU/12/2021 dated December 16, 2021 regarding changes to the Capital Structure and Articles of Association of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).



Perubahan tersebut menyetujui penambahan modal, penambahan bidang usaha dan perubahan kegiatan usaha. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0001478.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2021 tentang penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT BKI, dan berdasar Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, PT BKI menjadi Induk Holding Jasa Survei dengan entitas anak terdiri dari

- PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo)
- PT Surveyor Indonesia.

Pemerintah secara resmi telah membentuk Holding BUMN Jasa Survei yang dipimpin oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI. Pembentukan holding ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2021.

Holding BUMN Jasa Survei resmi beroperasi setelah dilakukan *soft launching* dengan penyerahan Akta Inbreng dari SUCOFINDO dan Surveyor Indonesia kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) serta dokumen perubahan anggaran dasar ketiga BUMN tersebut oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I, Pahala N. Mansury, di Bandung, Jumat, 17 Desember 2021.

Setelah pembentukan holding, masing-masing perusahaan akan menjalankan bisnis yang berbeda berdasarkan kompetensinya. Sucofindo menjadi pemimpin untuk bisnis jasa *Testing, Inspection and Certification* (TIC) di sektor pertambangan. Surveyor Indonesia akan mendukung pemerintah dalam Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui penerapan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk menjadi lokomotif pertumbuhan industri dan ekonomi nasional. Sementara Biro Klasifikasi Indonesia, sebagai induk holding akan fokus dalam mendukung pemerintah mewujudkan karbon netral (*net zero emission/NZE*) dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui penguatan implementasi layanan *green economy*.

Dengan bergabungnya 3 perusahaan BUMN jasa survei (BKI, SUCOFINDO, dan SURVEYOR INDONESIA), IDSURVEY mulai beroperasi untuk mengoptimalkan layanan jasa survei di Indonesia dan dapat mencapai visi menjadi top 5 leader di Asia Pasifik dengan mengoptimalkan layanan testing, inspeksi, sertifikasi, konsultasi, klasifikasi dan statutoria di seluruh wilayah Indonesia.

The amendment approves the capital increase, the addition of business fields, and changes in business activities. The Minister of Law and Human Rights of the Republics approved the amendment to the Articles of Association of Indonesia in Decree No. AHU-0001478.AH.01.02.Tahun 2022 dated January 7, 2022.

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 66 of 2021 concerning the addition of capital participation of the Republic of Indonesia into the share capital of PT BKI, and based on the Deed of Statement of Shareholders' Decisions, PT BKI became the Parent Holding of Survey Services with subsidiaries consisting of

- PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo)*
- PT Surveyor Indonesia.*

The Government has officially established the State-Owned Enterprises (SOE) Survey Services Holding, led by PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI. This establishment is based on Government Regulation (PP) No. 66 of 2021.

The SOE Survey Services Holding officially commenced operations following a soft launch, marked by the transfer of the Deed of Inbreng from SUCOFINDO and Surveyor Indonesia to PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and the presentation of the amended articles of association for these three SOEs by Deputy Minister of State-Owned Enterprises I, Pahala N. Mansury, in Bandung on Friday, December 17, 2021.

*Post-formation of the holding, each company will conduct distinct business activities based on their respective competencies. Sucofindo will lead the Testing, Inspection, and Certification (TIC) services in the mining sector. Surveyor Indonesia will support the government in the Domestic Product Utilization Enhancement Program (P3DN) by implementing the achievements of the Domestic Component Level (TKDN) to become a locomotive for national industrial and economic growth. Meanwhile, Biro Klasifikasi Indonesia, as the holding parent, will focus on supporting the government in achieving carbon neutrality (*net zero emissions/NZE*) by promoting sustainable development through the strengthening of green economy services implementation.*

With the integration of the three SOE survey service companies (BKI, SUCOFINDO, and SURVEYOR INDONESIA), IDSURVEY has begun operations to optimize survey services in Indonesia, aiming to achieve its vision of becoming one of the top 5 leaders in the Asia-Pacific region by enhancing services in testing, inspection, certification, consultation, classification, and statutory services across Indonesia.



Penghargaan *Awards*



Nama Penghargaan:

Peringkat 2 BUMN Kategori C Nilai Transaksi B2B PaDi UMKM Terbesar Tahun 2022.

Ajang Penghargaan:

PaDi UMKM Expo 2023

Tanggal:

16 Juni 2023

June 16, 2023



Nama Penghargaan:

The Best Commisioners for GRC Excellence 2023
(Survey & Inspection Industries)

Ajang Penghargaan:

GRC 2023 & Performance Excellence Award 2023

Tanggal:

31 Agustus 2023

August 31, 2023



Nama Penghargaan:

The Best CEO for GRC Excellence 2023
(Survey & Inspection Industries)

Ajang Penghargaan:

GRC 2023 & Performance Excellence Award 2023

Tanggal:

31 Agustus 2023

August 31, 2023



Nama Penghargaan:

The Best GRC for Corporate Risk Management 2023
(Survey & Inspection Industries)

Ajang Penghargaan:

GRC 2023 & Performance Excellence Award 2023

Tanggal:

31 Agustus 2023
August 31, 2023



Nama Penghargaan:

The Most Active BUMN By Activity
The Most Resilience High Activity

Ajang Penghargaan:

Digital 5.0 KIP Awards 2023

Tanggal:

27 Oktober 2023
October 27, 2023



Nama Penghargaan:

The best HC Director of The year Survey & Inspection Industries

Ajang Penghargaan:

Human Capital Performance Award 2023

Tanggal:

29 November 2023
November 29, 2023



Penghargaan PT Surveyor Indonesia

PT Surveyor Indonesia Awards

No	Penghargaan Award	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Penghargaan Emas kategori Jasa Lainnya dalam <i>Indonesia Mining Service Awards</i>	28 Januari <i>January 28</i>	Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO)
2	Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konsultan Terbaik	4 Maret <i>March 4</i>	UIP SUMBAGSEL PT PLN (Persero)
3	Terbaik I kategori <i>Vendor</i> Golongan Usaha Besar	22 Mei <i>May 22</i>	PT Pertamina (Persero)
4	Penghargaan Nasional CSR SDGs No. 1 dalam Nusantara <i>CSR Awards 2023</i>	5 Juli <i>July 5</i>	La Tofi School of Social Responsibility
5	Penghargaan Nasional CSR SDGs No. 9 dalam Nusantara <i>CSR Awards 2023</i>	5 Juli <i>July 5</i>	La Tofi School of Social Responsibility
6	Penghargaan Nasional CSR SDGs No. 17 dalam Nusantara <i>CSR Awards 2023</i>	5 Juli <i>July 5</i>	La Tofi School of Social Responsibility
7	<i>Successful Women in Leadership Award 2023</i>	5 Juli <i>July 5</i>	Mediatama
8	<i>The Most Committed BOD of BUMN on TJSL Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Tata Kelola</i>	10 Agustus <i>August 10</i>	BUMN Track
9	Platinum Pilar Hukum dan Tata Kelola dalam TJSL & <i>CSR Award 2023</i>	10 Agustus <i>August 10</i>	BUMN Track
10	Gold Pilar Sosial dalam TJSL & <i>CSR Award 2023</i>	10 Agustus <i>August 10</i>	BUMN Track
11	Gold Pilar Lingkungan dalam TJSL & <i>CSR Award 2023</i>	10 Agustus <i>August 10</i>	BUMN Track
12	Gold Pilar Ekonomi dalam TJSL & <i>CSR Award 2023</i>	10 Agustus <i>August 10</i>	BUMN Track
13	<i>Excellence Financial Performance SOE'S Subsidiary in 10 consecutive years</i>	27 September <i>September 27</i>	Islamic finance summit 2023
14	<i>Excellence financial performance SOE in 2023</i>	27 September <i>September 27</i>	Islamic finance summit 2024
15	<i>Best SOE with Top Financial Performance and Expanding Business Segmentation Category Subsidiary Survey Services</i>	1 Oktober <i>October 1</i>	Warta Ekonomi
16	<i>Most Brilliant Employee Engagement 2023</i>	6 Oktober <i>October 6</i>	Human Capital Brilliance Awards 2023
17	<i>Brilliant Human Capital Director of The Year 2023</i> untuk Direktur Sumber Daya Manusia	6 Oktober <i>October 6</i>	Human Capital Brilliance Awards 2023
18	<i>The Best HC Team of the year</i>	30 November <i>November 30</i>	Human Capital Brilliance Awards 2023
19	<i>The best talent mangement strategy 2023</i>	30 November <i>November 30</i>	Human Capital Brilliance Awards 2023
20	<i>The best HC Women director of the year</i> untuk Direktur Sumber Daya Manusia	30 November <i>November 30</i>	Human Capital Brilliance Awards 2023
21	<i>The next 200 leaders 2023</i> untuk Direktur Sumber Daya Manusia	5 Desember <i>December 5</i>	Infobank award
22	<i>Best Compliance</i> Kegiatan Evaluasi Badan Usaha Surveyor Pelaksana Verifikasi	28 Desember <i>December 28</i>	Kementerian Perdagangan RI

Penghargaan PT SUCOFINDO

PT SUCOFINDO Awards

No	Penghargaan Award	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Global Innovation Award 202	17 Maret 2023 <i>March 17, 2023</i>	Global Youth Parliament
2	Top CSR Awards 2023 Level Bintang Lima (#5)	7 Juni 2023 <i>June 7, 2023</i>	Majalah TOP BUSSINESS
3	Top CSR Awards 2023 Five Star Level (#5)	7 Juni 2023 <i>June 7, 2023</i>	Majalah TOP BUSSINESS
4	TOP GRC Awards 2023 #5 Stars	6 September 2023 <i>September 6, 2023</i>	Majalah TOP BUSSINESS

Peristiwa Penting Event Highlights

3

Januari | January



Pengarahan Direktur Utama dan Komisaris Utama pada rapat koordinasi 2023

President Director and President Commissioner briefing at 2023 coordination meeting

27

Januari | January



RUPS pengesahan RKAP 2023

GMS approves 2023 RKAP

27

Februari | February



Kerja sama Strategis Perdagangan Karbon antara IDSurvey dengan Bursa Efek Indonesia

Strategic Carbon Trading Collaboration between IDSurvey and the Indonesian Stock Exchange

7

Maret | March



PT BKI (Persero) melakukan kunjungan ke DPP INSA (Indonesia National Shipowner Association), Jakarta

PT BKI (Persero) visited DPP INSA (Indonesia National Shipowner Association), Jakarta

4

April | April



Workshop Sosialisasi Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-6/MBU/12/2022 dalam mengakselerasi penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon sesuai Peraturan Perundang-undangan

Workshop on Socialization of BUMN Minister Circular Letter No. SE-6/MBU/12/2022 in accelerating the implementation of Carbon Economic Value in accordance with Legislative Regulations

29

Mei | May



PSC Inspection Awareness, Deklarasi Komitmen Bersama Menjaga Posisi Indonesia Sebagai Negara White List dalam Tokyo MoU

PSC Inspection Awareness, Declaration of Joint Commitment to Maintain Indonesia's Position as a White List Country in the Tokyo MoU



27

Juni | June



Kementerian ATR/BPN dan BKI Menandatangani MoU Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang
Ministry of ATR/BPN and BKI Sign MoU for Organizing Thematic Geospatial Information on Land and Space

1

Juli | July



Hari Ulang Tahun PT BKI (Persero)
Anniversary of PT BKI (Persero)

18

Juli | July



PT BKI (Persero) hadir dalam sidang IMO (International Maritime Organization) Council ke-129 di London
PT BKI (Persero) attended the 129th IMO (International Maritime Organization) Council session in London

10

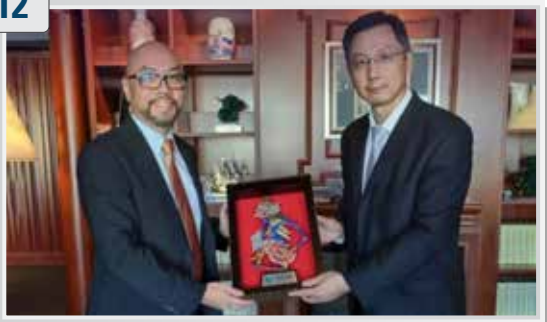
Agustus | August



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT BKI (Persero) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) sebagai komitmen untuk mendukung pembangunan nasional dan memajukan perekonomian negeri.
The signing of a cooperation agreement between PT BKI (Persero) and the Deputy Attorney General for Civil and State Administration (JAMDATUN) as a commitment to support national development and advance the country's economy.

12

September | September



PT BKI (Persero) berkunjung ke kantor Pusat CCS di Beijing
PT BKI (Persero) visited CCS Head Office in Beijing

2

Oktober | October



PT BKI (Persero) melakukan kunjungan ke Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) di Jepang
PT BKI (Persero) visited Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) in Japan



20

November | November



PT BKI (Persero) melaksanakan kunjungan ke Korean Register (KR) dan Kedubes Indonesia di Korea Selatan dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama di Bidang Kemaritiman

PT BKI (Persero) was visit to the Korean Register (KR) and the Indonesian Embassy in South Korea in order to improve cooperative relations in the Maritime Sector

28

November | November



PT BKI (Persero) hadir dalam sidang *International Maritime Organization (IMO)* di London

PT BKI (Persero) was present at the International Maritime Organization (IMO) session in London

17

Desember | December



HUT IDSurvey ke-2
2nd Anniversay IDSurvey



Peristiwa Penting PT SUCOFINDO

Event Highlight of PT SUCOFINDO

No.	Kegiatan Event
1	SUCOFINDO Serahkan Sertifikat SMK3 untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara <i>SUCOFINDO hands over SMK3 certificate to PT Amman Mineral Nusa Tenggara</i>
2	SUCOFINDO Cabang Pontianak Resmikan Gedung dan Laboratorium di Lokasi Terbaru, Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan <i>SUCOFINDO Pontianak Branch Inaugurates Building and Laboratory in Newest Location, Commitment to Improve Service Quality</i>
3	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT SUCOFINDO dan PT Surveyor Indonesia dengan Badan Pengelola Migas Aceh <i>Signing of Cooperation Agreement between PT SUCOFINDO and PT Surveyor Indonesia with Aceh Oil and Gas Management Agency</i>
4	SUCOFINDO Sinergi dengan Pos Indonesia, Tingkatkan Layanan Ekspedisi Laboratorium <i>SUCOFINDO Synergises with Pos Indonesia, Improving Laboratory Expedition Service</i>
5	SUCOFINDO Cetak <i>Future Leader</i> Lewat <i>Staff Development Program</i> (SDP) <i>SUCOFINDO Produces Future Leaders Through the Staff Development Program (SDP)</i>
6	Perkuat Layanan TIC, SUCOFINDO-IPB Kolaborasi Bidang Riset dan SDM <i>Strengthening TIC Services, SUCOFINDO-IPB Collaborate on Research and Human Resources</i>
7	SUCOFINDO Resmi Raih Akreditasi KAN Sebagai Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) untuk skema Gas Rumah Kaca dan Nilai Ekonomi Karbon <i>SUCOFINDO Officially Achieves KAN Accreditation as Validation and Verification (LVV) Institution for Greenhouse Gas and Carbon Economic Value schemes</i>
8	SUCOFINDO Selenggarakan ENSIA (<i>Environmental and Social Initiative Award</i>) 2023 dan Apresiasi 106 Pelaku Usaha atas Inovasi Lingkungan dan Sosial <i>SUCOFINDO Organises ENSIA (Environmental and Social Initiative Award) 2023 and Appreciates 106 Business Actors for Environmental and Social Innovation</i>
9	SUCOFINDO Serahkan Sertifikat <i>Green Building</i> untuk PT Pamapersada Nusantara <i>SUCOFINDO Presents Green Building Certificate to PT Pamapersada Nusantara</i>
10	SUCOFINDO-DLHKP Kab. Kebumen Resmikan Optimalisasi Biogas di TPA Kaligedung <i>SUCOFINDO-DLHKP Kebumen Regency Inaugurates Biogas Optimization at Kaligedung Landfill</i>
11	SUCOFINDO Serahkan Sertifikat Keamanan Pangan untuk Kapal PELNI KM Dorolonda <i>SUCOFINDO Issues Food Safety Certificate for PELNI Ship KM Dorolonda</i>
12	SUCOFINDO Turut Memaparkan Layanan Konsultansi <i>Framework Greenport/Smartport</i> untuk Penurunan Emisi GRK pada Perhelatan COP28 di Dubai <i>SUCOFINDO Presents Greenport/Smartport Framework Consultancy Services for GHG Emission Reduction at the COP28 Event in Dubai</i>

Peristiwa Penting PT Surveyor Indonesia

Event Highlight of PT Surveyor Indonesia

No.	Tanggal Date	Kegiatan Event
1	21 Februari 2023 <i>February 21, 2023</i>	Surveyor Indonesia Tandatangani MoU dengan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Mengenai Kerjasama Kegiatan Survei, Verifikasi, Inspeksi dan Konsultan Teknis. <i>Surveyor Indonesia Signs MoU with PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Regarding Cooperation in Survey Activities, Verification, Inspection and Technical Consultant.</i>
2	4 Maret 2023 <i>March 4, 2023</i>	Surveyor Indonesia Cabang Palembang meraih penghargaan sebagai mitra kerja kategori Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konsultan Terbaik Tahun 2022 di Lingkungan PT PLN (Persero) UIP SUMBAGSEL. <i>Surveyor Indonesia Palembang Branch named as the Best Consultant in 2022, in the category of business partner in the Implementation of Occupational Safety and Health (OHS) of PT PLN (Persero) UIP SUMBAGSEL.</i>
3	9 Maret 2023 <i>March 9, 2023</i>	Surveyor Indonesia melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Jaya (PAM JAYA), dan PT Air Bersih Jakarta (ABJ) sebagai Konsultan Pengawas Independen Sistem Penyediaan Air. <i>Surveyor Indonesia signed a Cooperation Agreement with Regional Public Company (PERUMDA) Air Minum Jaya (PAM JAYA), and PT Air Bersih Jakarta (ABJ) as Independent Supervisory Consultants of the Water Supply System.</i>



No.	Tanggal Date	Kegiatan Event
4	14 Maret 2023 <i>March 14, 2023</i>	PT Surveyor Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. <i>PT Surveyor Indonesia signed a Memorandum of Understanding with the Management Board of the Sabang Free Trade Zone and Port.</i>
5	15 Maret 2023 <i>March 15, 2023</i>	PT Surveyor Indonesia bersama PT SUCOFINDO menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Badan Pengelola Migas Aceh tentang Jasa Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. <i>PT Surveyor Indonesia together with PT SUCOFINDO signed a Cooperation Agreement with the Aceh Oil and Gas Management Agency regarding Domestic Component Level (TKDN) Verification Services in Upstream Oil and Gas Business Activities.</i>
6	18 Maret 2023 <i>March 18, 2023</i>	Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) PT Surveyor Indonesia sebagai LPH Utama Nasional dan Internasional. <i>The Halal Product Assurance Organizing Body (BPJPH) appointed PT Surveyor Indonesia's Halal Examination Body (LPH) as the National and International Primary LPH.</i>
7	29 Maret 2023 <i>March 29, 2023</i>	PT Surveyor Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Barito tentang Pengawasan dan Penilaian Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua Rehabilitasi Hutan dan Lahan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi. <i>PT Surveyor Indonesia signed a Cooperation Agreement with the Barito Watershed Management Centre (BPDAS) regarding Supervision and Assessment of Plant Maintenance of the Second Year of Forest and Land Rehabilitation of the Technical Implementation Unit of the Kayu Tangi Forest Management Unit Office.</i>
8	11 April 2023 <i>April 11, 2023</i>	PT Surveyor Indonesia memfasilitasi proses sertifikasi halal kepada UMK Mitra Binaan. <i>PT Surveyor Indonesia facilitates the halal certification process for its MSEs Fostered Partner.</i>
9	13 April 2023 <i>April 13, 2023</i>	Launching Gerakan Halal untuk Indonesia dan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal. <i>Launching of Halal Movement for Indonesia and Halal Product Process Advisors Training.</i>
10	22 Juni 2023 <i>June 22, 2023</i>	Rapat Umum Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia <i>General Meeting of Shareholders of PT Surveyor Indonesia</i>
11	1 Agustus 2023 <i>August 1, 2023</i>	HUT Ke-32 Tahun Surveyor Indonesia. <i>The 32nd Anniversary of Surveyor Indonesia.</i>
12	15 Agustus 2023 <i>August 15, 2023</i>	MOU Kerjasama dengan HIPINDO yang berisikan dukungan dalam rangka pemasaran produk halal dan diskusi panel yang bertemakan "Bagaimana Sertifikasi Halal Membantu Perkembangan Bisnis". <i>Collaboration MOU with HIPINDO which stated the support for the marketing of halal products and panel discussions with the theme "How Halal Certification Helps Business Development".</i>
13	22 September 2023 <i>September 22, 2023</i>	Penandatanganan Kerjasama Surveyor Indonesia & SKK Migas Terkait Jasa Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). <i>The Signing of Cooperation Agreement between Surveyor Indonesia & SKK Migas Regarding Domestic Component Level (TKDN) Verification Services.</i>
14	10 Oktober 2023 <i>October 10, 2023</i>	Rapat Kerja Tahunan IDSurvey, penyelarasan, dan finalisasi RKAP 2024 Konsolidasi dengan tema Pertumbuhan Berkelanjutan Melalui Akselerasi Transformasi Bisnis. <i>IDSurvey Annual Work Meeting, alignment and finalisation of the 2024 Consolidated RKAP with the theme of Sustainable Growth Through Business Transformation Acceleration.</i>
15	3 November 2023 <i>November 3, 2023</i>	IDSurvey berkolaborasi dengan mitra binaan PT Surveyor Indonesia, VirageAwie Indonesia dalam mengadakan Pelatihan dan Pengembangan Produk Bambu sebagai bentuk kepedulian terhadap kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. <i>IDSurvey collaborates with PT Surveyor Indonesia's fostered partner, VirageAwie Indonesia in conducting Bamboo Product Training and Development as a form of concern for the economic independence of people with disabilities.</i>
16	8 November 2023 <i>November 8, 2023</i>	PT Surveyor Indonesia berkomitmen mendukung percepatan <i>Net Zero</i> dengan melakukan kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) <i>Net Zero</i> Hub yang membahas ruang lingkup berupa perancangan inisiatif bisnis dan perumusan <i>Net Zero Pledge</i> . <i>PT Surveyor Indonesia is committed to supporting the acceleration of Net Zero goal by entering into collaboration with the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) Net Zero Hub which discusses the scope of designing business initiatives and formulating the Net Zero Pledge.</i>
17	17 November 2023 <i>November 17, 2023</i>	Salurkan 18.000 Liter Air Bersih ke Warga Desa Sukatani di Cianjur. <i>Distributing 18,000 Litres of Clean Water to Sukatani Village Residents in Cianjur.</i>



Jejak Langkah

Milestones

1964

BKI semula berbentuk Perusahaan Negara yang didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964 dan mulai menjalankan kegiatan usaha sebagai badan klasifikasi tanggal 1 Januari 1965.

BKI was originally a State Company established through Government Regulation No. 28 of 1964 and began its business activities as a classification body on January 1, 1965.

1977 - 1988

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977, PT BKI berubah status dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perseroan kemudian membuat anggaran dasar di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., dengan Akta No. 57 tanggal 19 Oktober 1978, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. YA.5/345/1978 tanggal 7 November 1978, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tahun 1979.

Through Government Regulation No. 1 of 1977, PT BKI changed its status from a State Company (PN) to a Company (Persero). The Company then made its articles of association before Notary Imas Fatimah, S.H., with Deed No. 57 dated October 19, 1978, which Decree of the Minister of Justice approved No. YA.5/345/1978 dated November 7, 1978 and announced in State Gazette No. 58 of 1979.

1982

BKI merintis bidang usaha *non-class matter* atau bidang non-klasifikasi yang meliputi jasa konsultansi dan supervisi di bidang maritim dan industri serta bidang teknik lainnya. Unit usaha ini kemudian disebut bidang usaha Jasa Komersil.

BKI pioneered a non-class matter or non-classification business field, which includes consultancy and supervision services in the maritime and industrial fields and other engineering fields. This business unit is then called the Commercial Services business area.

1998

Melalui Akta Notaris Neneng Salmiah Nomor 20 tanggal 12 Maret 1998 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait jangka waktu berdirinya perseroan, tujuan dan lapangan usaha serta modal dasar perseroan. Perubahan ini dicatat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 2504 Tahun 1999.

Through the Notarial Deed of Neneng Salmiah Number 20 dated 12 March 1998, the Company amended its Articles of Association related to the period of establishment of the Company, the purpose and field of business as well as the authorized capital of the Company. These changes were recorded in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2504 of 1999.

1984

Melalui Akta Notaris Imas Fatimah Nomor 180 tanggal 30 November 1984 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait tujuan dan lapangan usaha serta modal dasar perseroan. Perubahan ini dicatat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 1479 Tahun 1985.

Through Notarial Deed No. 180 of Imas Fatimah dated 30 November 1984, the Company amended its Articles of Association related to the purpose and field of business as well as the authorized capital of the Company. These changes were recorded in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia, Number 1479 of 1985.

2003

Melalui Akte Notaris Neneng Salmiah Nomor 11 tanggal 14 Maret 2003 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait tujuan dan lapangan usaha serta penyesuaian dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Perubahan ini dicatat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 11847 Tahun 2003.

Through Notarial Deed No. 11 of Neneng Salmiah dated 14 March 2003, the Company amended its Articles of Association related to the purpose and field of business and adjustments to the principles of Good Corporate Governance. This amendment was recorded in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia, Number 11847 of 2003.

2008

Melalui Akte Notaris Umaran Mansjur Nomor 5 tanggal 26 November 2008 Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait tujuan dan lapangan usaha serta modal dasar perseroan. Perubahan ini dicatat dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 10918 Tahun 2008.

Through the Notarial Deed of Umaran Mansjur Number 5 dated 26 November 2008, the Company amended its Articles of Association related to the purpose and field of business as well as the Company's authorized capital. This amendment was recorded in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 10918 of 2008.





2018

BKI Academy diluncurkan dan mulai beroperasi.

BKI Academy launched and commenced operations

2016

Perseroan mengambil langkah strategis yang sangat penting dengan mempersiapkan pendirian BKI Academy. Lembaga pendidikan dan pelatihan ini berfungsi untuk mengembangkan karakter melalui pelatihan dasar dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam pengembangan usaha jasa komersil.

The Company took a crucial strategic step by preparing to establish the BKI Academy. This education and training institution serves to develop character through basic training and the Human Resources needed to create the commercial services business.

2015

BKI terpilih sebagai ACS Chairman

BKI elected as ACS Chairman

2010

BKI bersama Korean Register of Shipping (KR), Nippon Kaiji Kyokai (NK Class), Vietnam Register (VR), Indian Register of Shipping (IRS), dan China Classification Society (CCS) mendirikan asosiasi badan klasifikasi Asia (Asian Classification Society).

BKI, together with the Korean Register of Shipping (KR), Nippon Kaiji Kyokai (NK Class), Vietnam Register (VR), Indian Registry of Shipping (IRS), and China Classification Society (CCS) established the Asian Classification Society Association.

2020

- BKI terpilih kembali sebagai ACS Chairman.
- BKI re-elected as ACS Chairman

2021

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menjadi Induk Holding Jasa Survei dengan entitas anak terdiri dari :

- PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo)
- PT Surveyor Indonesia.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) became the Parent Holding of Survey Services with subsidiaries consisting of :

- PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo)
- PT Surveyor Indonesia.

2023

- IDSurvey membentuk IDSurvey Institute untuk mengelola sentralisasi pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai IDSurvey.
- IDSurvey meluncurkan Purpose grup IDSurvey yaitu "We exist for the Safety of Your Family and Mine" yang kemudian digaungkan dalam semangat "One Family, One Purpose!".
- IDSurvey has established the IDSurvey Institute to manage the centralization of training and the development of IDSurvey employees' competencies.
- IDSurvey has launched the Purpose of the IDSurvey group, which is "We Exist for the Safety of Your Family and Mine," and this is further promoted with the spirit of "One Family, One Purpose!".

2022

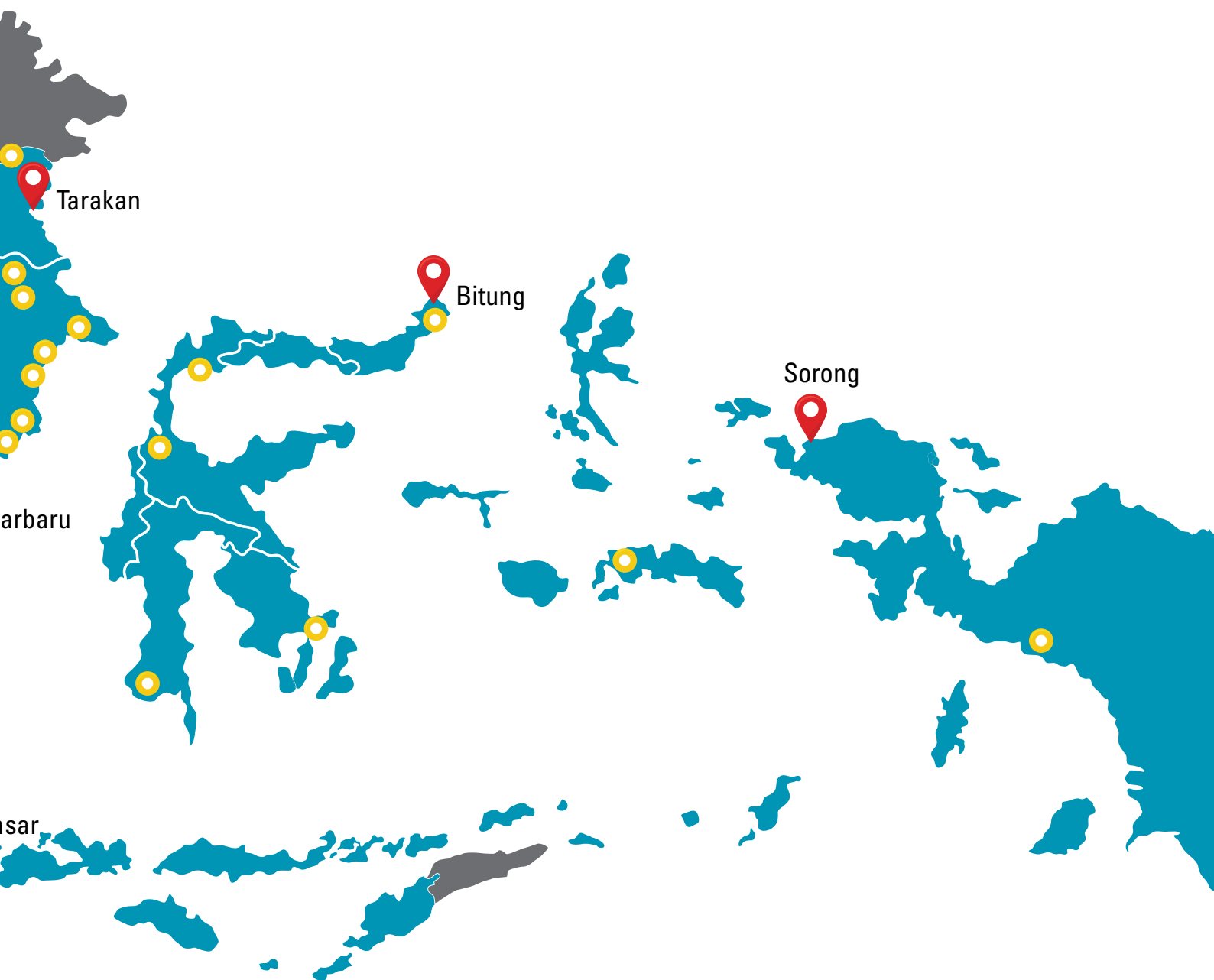
1. BKI menandatangani Nota Kesepahaman dengan berbagai BUMN (Pertamina, PLN, Perum Perhutani, Semen Indonesia, Pupuk Indonesia, MIND ID, PTPN, dan EMI) untuk pilot project dekarbonisasi, mendukung target *net zero carbon emission* Indonesia pada tahun 2060, serta *Letter of Intent* untuk *Voluntary Carbon Market* (VCM) BUMN.
2. BKI menjalin kerja sama dengan PT Bureau Veritas Indonesia (BVI) untuk meningkatkan layanan di bidang dekarbonisasi dan emisi karbon.
1. BKI signed a Memorandum of Understanding with various state-owned enterprises (Pertamina, PLN, Perum Perhutani, Semen Indonesia, Pupuk Indonesia, MIND ID, PTPN, and EMI) for a pilot project on decarbonization, supporting Indonesia's target of achieving *net zero carbon emissions* by 2060, as well as a *Letter of Intent* for the *Voluntary Carbon Market* (VCM) of state-owned enterprises.
2. BKI established a partnership with PT Bureau Veritas Indonesia (BVI) to enhance services in the fields of decarbonization and carbon emissions.



Peta Jaringan Kantor IDSURVEY

Network of Office IDSURVEY







Jaringan Kantor PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Office Network of PT Biro Klasifikasi Indonesia

Jaringan Pelayanan Services Network	Klasifikasi dan Statutoria Classification and Statutory	Komersil Commercial
Belawan	Jl. Williem Iskandar No. 231 Sidorejo Hilir Medan Tembung Medan-20222 Telepon : (62-61) 6941025, 6941276 e-mail : bn@bki.co.id	Jl. Williem Iskandar No. 231 Sidorejo Hilir Medan Tembung Medan-20222 Telepon : (62-61) 6941157, 6940370 e-mail : bnc@bki.co.id
Batam	Graha BKI- Jl. Yos Sudarso Kav. 5 Batam-29458 Telepon : (62-778) 433388, 429023, 429024, 451228 (Hunting) e-mail : bm@bki.co.id	Graha BKI, Jl. Yos Sudarso Kav. 5 Batam-29421 Telepon : (62-778) 428284, 428438, 428250, 432324 Fax : (62-778) 429021 e-mail : bmc@bki.co.id
Pekanbaru	Jl. Arin Achmad No. 40, Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru-28282 Telepon : (62-761) 8417295, 8417296 Fax : (62-761) 8417294 e-mail : pr@bki.co.id	Jl. Arin Achmad No. 40, Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru-28282 Telepon : (62-761) 8417291, 8417292, 7662170 Fax : (62-778) 8417293, 7662180 e-mail : prc@bki.co.id
Jambi	Jl. Raden Bahrin No. E11 RT. 11/RW. 04 Kel. Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Jambi Telepon : (62-741) 671107 Fax : (62-741) 671108 e-mail : jb@bki.co.id	Jl. Raden Bahrin No. E11 RT. 11/RW. 04 Kel. Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Jambi Telepon : (62-741) 671107 Fax : (62-741) 671108 e-mail : jb@bki.co.id
Palembang	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 226, Kec. Ilir Timur II Palembang-30115 Telepon : (62-711) 713172, 713680 Fax : (62-711) 713151 e-mail : pb@bki.co.id	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 226, Kec. Ilir Timur II Palembang-30115 Telepon : (62-711) 717151 e-mail : pbc@bki.co.id
Banten (Cilegon)	Jl. Gerem Raya KM. 5 No. 1A Kel. Gerem Kec. Grogol, Cilegon-Banten 42438 Telepon : (62-254) 572673 Fax : (62-254) 572674 e-mail : cg@bki.co.id	Jl. Raya Bojonegara KM.2 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber, Cilegon-Banten 42422 Telepon : (62-254) 7850151 e-mail : cgc@bki.co.id
Tanjung Priok	Jl. Yos Sudarso 38-40 Tanjung Priok Jakarta Utara-14320 Telepon : (62-21) 43930990, 4301017, 4301703 Fax : (62-21) 4301702 e-mail : tp@bki.co.id	
Cirebon	Jl. Tuparev KM. 3, Cirebon-45153 Telepon : (62-231) 201816 e-mail : cn@bki.co.id	Jl. Tuparev KM. 3, Cirebon-45153 Telepon : (62-231) 201816 e-mail : cnc@bki.co.id
Semarang	Jl. Pamularsih No. 12, Semarang-50148 Telepon : (62-24) 7610399 Fax : (62-24) 7610422 e-mail : sm@bki.co.id	Jl. Pamularsih No. 12, Semarang-50148 Telepon : (62-24) 7610744 Fax : (62-24) 76670354 e-mail : smc@bki.co.id
Surabaya	Jl. Kalianget No. 14, Tanjung Perak Surabaya-60165 Telepon : (62-31) 3295448, 3295449, 3295450 Fax : (62-31) 3294520 e-mail : sb@bki.co.id	Jl. Kalianget No. 14, Tanjung Perak Surabaya-60165 Telepon : (62-31) 3295448, 3295449, 3295450 Fax : (62-31) 320545 e-mail : sbc@bki.co.id
Pontianak	Jl. Gusti Hamzah No. 211, Pontianak-78116 Telepon : (62-561) 739579 Fax : (62-561) 743107 e-mail : pk@bki.co.id	Jl. Gusti Hamzah No. 211, Pontianak-78116 Telepon : (62-561) 739579 Fax : (62-561) 74310 e-mail : pkc@bki.co.id



Jaringan Pelayanan Services Network	Klasifikasi dan Statutoria Classification and Statutory	Komersil Commercial
Banjarmasin	Jl. Skip Lama No. 19, Banjarmasin-70117 Telepon : (62-511) 3358311, 3350983 Fax : (62-511) 3350175 e-mail : bj@bki.co.id	Jl. Skip Lama No. 19, Banjarmasin 70117 Telepon : (62-511) 3367361 Fax : (62-511) 3350175 e-mail : bj@bki.co.id
Balikpapan	Kantor Pelayanan Operasional Klas Jl. M.T. Haryono No.8, Ring Road Balikpapan-7611 Telepon : (62-542) 876637 e-mail : sd@bki.co.id	Jl. M.T. Haryono No. 8, Ring Road Balikpapan-76111 Telepon : (62-542) 876637, 876641 Fax : (62-542) 876639 e-mail : bpc@bki.co.id
Samarinda	Jl. M.T. Haryono No. 199, Air Putih Samarinda Kalimantan Timur-75124 Telepon : (62-541) 4121403, 4121404, 4121405, 4121406 Fax : (62-541) 4121407 e-mail : sd@bki.co.id	
Makassar	Jl. Sungai Cerekang No. 28, Makassar-90115 Telepon : (62-411) 3611993 Fax : (62-411) 36515460 e-mail : ms@bki.co.id	Jl. Sungai Cerekang No. 28, Makassar-90115 Telepon : (62-411) 3611993 Fax : (62-411) 36515460 e-mail : msc@bki.co.id
Bitung	Jl. Babe Palar No. 53, Madidir Unet Bitung-95516 Telepon : (62-438) 38720, 38721, 38722 Fax : (62-438) 21828 e-mail : bt@bki.co.id	Jl. Babe Palar No.53, Madidir Unet Bitung-95516 Telepon : (62-438) 34273 Fax : (62-438) 21828 e-mail : bt@bki.co.id
Sorong	Jl. Jend. Sudirman No. 140, Sorong-98414 Telepon : (62-951) 322600 Fax : (62-951) 323870 e-mail : sr@bki.co.id	Jl. Jend. Sudirman No. 140, Sorong-98414 Telepon : (62-951) 322600 Fax : (62-951) 323870 e-mail : sr@bki.co.id
Singapura	7500A Beach Road #11-301 The Plaza Singapore-199597 Telepon : 65-68830651, 68830634, 68830643 Fax : 65-63393631 e-mail : sg@bki.co.id, class@bki.com.sg	
Strategic Business Unit (SBU) Marine & Offshore		Gedung Graha BKI Jl. Yos Sudarso 38-40, Tanjung Priok Jakarta Utara-14320 Telepon : (62-21) 43937409, 4300139, 4300932 Fax : - e-mail : mno@bki.co.id
Strategic Business Unit (SBU) Energy & Industry		Gedung Graha BKI Jl. Yos Sudarso 38-40, Tanjung Priok Jakarta Utara-14320 Telepon : (62-21) 43938304, 43912806, 43912070 Fax : (62-21) 43900972 e-mail : eni@bki.co.id



Jaringan Kantor PT Sucofindo

Office Network of PT Sucofindo

Nama Name	Kelas Class	Alamat Address
Banjarmasin	Cabang Utama Main Branch	Jl. Jend. A. Yani Km. 18 RT 011/RW 03 No. 238 Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Kode pos 70722 Phone: (+62-511), 327108083 Fax: (+62-511) 3258111, 3272082 Email: banjarmasin@sucofindo.co.id
Jakarta	Cabang Utama Main Branch	Jl. Cumi No. 33-35, Tanjung Priok Jakarta 14310 Phone: (+62-21) 4304444 Fax: (+62-21) 4300616 Email: jakarta@sucofindo.co.id
Surabaya	Cabang utama Main Branch	Jl. Kalibutih No. 215, Surabaya Jawa Timur 60173 Phone: (+62-31) 5469123 Fax: (+62-31) 5469145 Email: surabaya@sucofindo.co.id
Balikpapan	Cabang Madya Madya Branch	Jl. Jend. A. Yani No. 1 Gunung Sari Ulu, Balikpapan 76122, Kalimantan Timur Phone: (+62-542) 732186/8 Fax: (+62-542) 420537 Email: balikpapan@sucofindo.co.id
Batam	Cabang Madya Madya Branch	Graha Sucofindo Jl. Raden Patah No. 61, Baloi Pulau Batam 29432 Phone: (+62-778) 456575 Fax: (+62-778) 456292 Email: batam@sucofindo.co.id
Makassar	Cabang Madya Madya Branch	Jl. Urip Sumoharjo No. 90 A, Makassar 90232, Sulawesi Selatan Phone: (+62-411) 451890, 451891, 451893 Fax: (+62-411) 436651 (lab) Email: makassar@sucofindo.co.id
Medan	Cabang Madya Madya Branch	Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 No. 105, Medan Sumut 20122 Phone: (+62-61) 8451880 (hunting) Fax: (+62-61) 8452568 Email: medan@sucofindo.co.id
Palembang	Cabang Madya Madya Branch	Jl. Jend. Sudirman No. 774, Palembang-Sumatra Selatan 30129 Phone: (+62-711) 312990 Fax: (+62-711) 311978 Email: Palembang@sucofindo.co.id
Samarinda	Cabang Madya Madya Branch	Jl. Teuku Umar No.65 RT.26 Kelurahan Karang Asam Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur 75126 Phone: (+62-541) 6293771-4 Fax: (+62-541) 6293777 Email: samarinda@sucofindo.co.id
Sangatta	Cabang Madya Madya Branch	Jl. Parikesit Road 9 (depan kantor KNE), Sangatta, Kalimantan Timur Phone: (+62-549) 525213 Fax: (+62-549) 525214 Email: sangatta@sucofindo.co.id
Semarang	Cabang Madya Madya Branch	Jl. Raya Kaligawe KM. 8 Semarang Jawa Tengah 50118 Phone: (+62-24) 6590547, 3516616 Fax: (+62-24) 6590548, 6590550, 3583184



Jaringan Kantor PT Surveyor Indonesia

Office Network of PT Surveyor Indonesia

Nama Name	Kelas Class	Alamat Address
Jakarta (Pusat)	Kantor Pusat Head Office	Graha Surveyor Indonesia Lt.5 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.56 Jakarta-12950 Phone: (021) 526 9459 Fax: (021) 526 9455
Jakarta	Kantor Cabang Branch Office	Jl. Lenteng Agung Raya No. 21 Lenteng Agung-Jakarta 12530 Phone: (021) 526 9459 Fax: (021) 526 9455
Pekanbaru	Kantor Cabang Branch Office	Jl. Bukit Raya Indah No. 1 Simpang Tiga-Pekanbaru 28284 Phone: (0761) 848 878 Fax: (0761) 848 213
Surabaya	Kantor Cabang Branch Office	Jl. Raya Margorejo Indah No. 51 Surabaya, Jawa Timur-60238 Phone: (031) 568 1750 Fax: (031) 568 1749
Palembang	Kantor Cabang Branch Office	Jl. Soekarno Hatta No. 3040 A RT 036/RW 011 Kel. Karya Baru, Kec. Alang-alang Lebar, Palembang Phone: (0711) 5614 188 Fax: (0711) 5715 138
Balikpapan	Kantor Cabang Branch Office	Jl. Ars. Muhammad No.4 RT 43, Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan-76114 Phone: (0542) 882 0050 Fax: (0542) 882 0051
Makassar	Kantor Cabang Branch Office	Jl. Kumala No. 128 Kel. Jongaya, Kec. Tamalate. Makassar, Sulawesi Selatan-90223 Phone: (0411) 805 7781
Semarang	Kantor Cabang Branch Office	Jl. Peterongan Timur No. 11B, RT 005/007 Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang-50242
Medan	Kantor Cabang Branch Office	Jl. Sunggal No. 197 Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan, Sunggal Medan-20122 Phone: (061) 4256 9565 Fax: (061) 4256 9565
Batam	Kantor Cabang Branch Office	Jl. Kerapu No. 02-Batu Ampar Pulau Batam-29432
Singapura	Kantor Cabang Branch Office	7500A Beach Rd, #11-301 The Plaza, Singapore, 199591 Phone: +65 6222 3988 Fax: +65 6222



Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission and Corporate Culture

VISI 2020-2024

Vision 2020-2024

Menjadi *independent assurance* dan badan klasifikasi berkelas dunia.

To become a world-class independent assurance and classification body.

MISI 2020-2024

Mission 2020-2024

1. Memberikan nilai tambah terbaik bagi pelanggan Jasa Klasifikasi dan Statutori melalui layanan, operasi dan riset *rules* yang berstandar internasional serta berbasis pada kualitas, keselamatan dan tanggung jawab sosial-lingkungan kelautan.

Provide the best added values for Classification and Statutory Services customers through services, operations and research rules that are of international standard and based on quality, safety and marine social-environmental responsibility.

2. Memaksimalkan sumber daya BKI dengan segenap potensinya agar dapat menjadi *market leader* dalam bisnis *Independent Marine Assurance*.

Maximize BKI's resources with all their potential in order to become a market leader in the Independent Marine Assurance business.



BUDAYA PERUSAHAAN CORPORATE CULTURE

AKHLAK

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020, seluruh BUMN, termasuk BKI, kini wajib mengimplementasikan nilai-nilai inti AKHLAK. AKHLAK itu sendiri memiliki singkatan Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dimana masing-masing nilai memiliki penjabarannya sendiri serta dilengkapi dengan panduan perilaku dan kode etik atau kode perilaku yang akan diterapkan.

BKI telah melakukan adaptasi secara taktis agar nilai-nilai utama di atas dapat diaplikasikan secara baik dalam setiap kegiatan usahanya. Perseroan meyakini dengan menerapkan nilai-nilai AKHLAK secara utuh dan konsisten, maka Perseroan dapat meningkatkan kinerja dan daya saingnya sehingga pada akhirnya dapat memberi kontribusi yang semakin besar bagi perekonomian Indonesia dan mampu menjadi perusahaan jasa survei berkelas internasional.

Penjabaran Nilai-Nilai Utama **AKHLAK** (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).

As stated in the Circular Letter of the Minister of SOEs Number SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020, all SOEs, including BKI, are now required to implement the AKHLAK core values. AKHLAK stands for Amanah, Kompeten, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative, where each value elaborates and is equipped with behavioral guidelines and a code of ethics or code of conduct to be applied.

BKI has made tactical adaptations so that the central values above can be applied properly in every business activity. The Company believes that by applying the AKHLAK values fully and consistently, the Company can improve its performance and competitiveness so that in the long run it can make a greater contribution to the Indonesian economy and be able to become an international class survey service company.

*Explanation of **AKHLAK** Main Values (Trust, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative).*

	AMANAH Trust	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan <i>Upholding the trust given</i>
	KOMPETEN Competent	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas <i>Continue to learn and develop capabilities</i>
	HARMONIS Harmonious	Saling peduli dan menghargai perbedaan <i>Caring for each other and respecting differences</i>
	LOYAL Loyal	Berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara <i>Dedicated to prioritizing the interests of the nation and state</i>
	ADAPTIF Adaptive	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan <i>Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change</i>
	KOLABORATIF Collaborative	Membangun kerja sama yang sinergis <i>Build synergistic co-operation</i>



Simbol Perusahaan

Company Symbol



Melalui Keputusan Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia No: DU.257/LT.101/KI21 tentang Perubahan dan Tata Cara penggunaan logo PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), perusahaan melakukan pergantian logo. Dengan demikian logo lama yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.007/LT.101/KI-08, tanggal 21 Januari 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Transformasi identitas perusahaan (logo) sejalan dengan perkembangan bidang usaha Perusahaan khususnya bidang komersil yaitu *Testing, Inspection* dan *Certification* (TIC).

Logo baru Perusahaan mengandung unsur:

1. *Core Business* BKI yaitu *Testing, Inspection, Certification*.
2. *Sustainable Growth*
3. *BKI as Business Solution*

Arti dan Makna Logo

1. Logo **Tick Mark** menggambarkan bisnis perusahaan di bidang *Testing, Inspection*, dan *Certification*, dan bentuk *Tick Mark* menggambarkan bisnis yang akan tumbuh secara berkelanjutan;
2. Untuk Perusahaan Logo **Tick Mark** menunjukkan inspeksi secara menyeluruh untuk memastikan kualitas jasa yang tidak datang dengan cara yang mudah, penelitian mendalam dan inspeksi detail diperlukan untuk mendapatkan logo *Tick Mark* dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
3. Logo **Tick Mark** dalam standar internasional merupakan simbol penerimaan. Dalam hal ini menggambarkan kegiatan bisnis PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang dilakukan secara menyeluruh dengan standarisasi internasional;
4. Warna biru pada logo menggambarkan kedalaman, stabilitas, kebijakan, dan kepercayaan. Warna jingga menggambarkan kesuksesan, antusias dan kreatifitas.
5. Jenis huruf yang digunakan dalam logo **Tick Mark** menggambarkan kesederhanaan, dinamis dan modern.

Through the Decree of the Board of Directors of PT Biro Klasifikasi Indonesia No: DU.257/LT.101/KI21 concerning Changes and Procedures for the use of the logo of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), the company changed its logo. Thus, the old logo determined through the Decree of the Board of Directors of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Number: DU.007/LT.101/KI-08, dated January 21, 2008, is no longer valid.

The transformation of the corporate identity (logo) aligns with the development of the Company's business field, especially the commercial area of Testing, Inspection, and Certification (TIC).

The Company's new logo contains the following elements:

1. *BKI's Core Business, namely Testing, Inspection, and Certification.*
2. *Sustainable Growth*
3. *BKI as Business Solution*

Logo Meaning and Significance

1. *The **Tick Mark** logo depicts the company's business in the field of Testing, Inspection, and Certification, and the Tick Mark shape depicts a business that will grow sustainably;*
2. *For the Company, the **Tick Mark** Logo denotes a thorough inspection to ensure quality services which do not come easy; in-depth research and detailed inspections are required to obtain the Tick Mark logo from PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);*
3. *The **Tick Mark** logo in international standards symbolizes acceptance. In this case, it illustrates the business activities of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), which are carried out thoroughly with international standards;*
4. *The blue color in the logo represents depth, stability, policy, and trust. The orange color represents success, enthusiasm, and creativity.*
5. *The typeface used in the **Tick Mark** logo depicts simplicity, dynamics, and modernity.*



Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition

Perusahaan memiliki Modal Dasar sebesar Rp28.000.000.000.000, yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna dan 27.999.999 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham seri B, dengan masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Seluruh saham 100% milik pemerintah.

The Company has an Authorised Capital of Rp28,000,000,000,000, which is divided into 1 (one) share of series A Dwiwarna and 27,999,999 (twenty-seven million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine) shares of series B, with each share worth Rp1,000,000,- (one million rupiahs). All shares are 100% owned by the government.

Kegiatan dan Bidang Usaha

Activities and Line of Business

Kegiatan Usaha

Business Activities

Perseroan melakukan kegiatan usaha di bidang jasa klasifikasi dan registrasi kapal, jasa konsultasi dan supervisi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing tinggi.

The Company engages in vessel classification and registration services, consulting and supervision services, and optimizing the use of the Company's resources to produce high-quality and highly competitive goods/services.

Bidang Usaha PT Biro Klasifikasi Indonesia

Perseroan memiliki Bidang Usaha Klasifikasi, sebagai berikut:

- I. Jasa Klasifikasi,
- II. Jasa Statutoria,
- III. Jasa Sertifikasi Material dan Komponen, serta
- IV. Jasa Non-Klasifikasi.

Line of Business PT Biro Klasifikasi Indonesia

The Company has the following Classification Lines of Business:

- I. Classification Services,
- II. Statutory Services,
- III. Material and Component Certification Services, and
- IV. Non-classified Services.

I. Ruang Lingkup Jasa Klasifikasi

Dalam menjalankan kegiatan bidang Jasa Klasifikasi, Perseroan mengemban amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 129 serta Peraturan Menteri Perhubungan PRI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi.

Yang meliputi jasa :

1. Penerimaan Klas dan Mempertahankan Klas
 - a. Pemeriksaan konstruksi, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registrasi kapal;
 - b. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai;
 - c. Keagenan dan atau perwakilan badan klasifikasi atau konsultan asing.
2. Kompetensi bisnis Jasa Klasifikasi
 - a. Admission to Class for New Building
 - b. Admission to Class for Existing Ship

I. Scope of Classification Services

In carrying out activities in the field of Classification Services, the Company carries out the mandate of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping Article 129 and Regulation of the Minister of Transportation PRI Number 61 of 2014 concerning Classification Obligations for Indonesian-flagged Ships at Classification Societies.

Which includes services:

1. Acceptance of Class and Maintaining Class
 - a. Construction inspection, supervision, and testing as well as the issuance of class certificate and ship registration;
 - b. Inspection and testing of floating equipment and offshore construction facilities;
 - c. Agency and/or representation of foreign classification societies or consultants.
2. Classification Services business competence
 - a. Admission to Class for New Building
 - b. Admission to Class for Existing Ship



- c. *Admission to Class for New Building*
- d. *Material/Component Certification*
- e. *Statutory Certification*
- f. *Industrial Approval*
- g. *Company Social Responsibilities*
- h. *Welder Certification*

- c. *Admission to Class for New Building*
- d. *Material/Component Certification*
- e. *Statutory Certification*
- f. *Industrial Approval*
- g. *Company Social Responsibilities*
- h. *Welder Certification*

II. Ruang Lingkup Jasa Statutoria

1. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi di bidang statutoria berdasarkan otorisasi dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintah negara lain;
2. Melakukan survei dan sertifikasi atas nama Pemerintah Mongolia, Timor Leste serta Panama-Belize, Palau, Honduras, dan lain-lain (bekerja sama dengan IBS)
3. Melakukan *drawing/plan approval* yang meliputi antara lain SOPEP/SMPEP, *damage control plan*, *sewage treatment plan*, *garbage management plan*, *cargo securing manual*, *fire control and safety plan*, *P&A manual* untuk *chemical tanker*, *operation manual*, *stability calculation/booklet* dan lain sebagainya yang menjadi pendukung penerbitan sertifikasi sesuai otorisasi yang diberikan;
4. Melakukan survei dan sertifikasi antara lain Marpol Annex I s/d VI, *Anti Fouling System (AFS)*, *Cargo Ship Safety Equipment Certification*, *Cargo Ship Safety Construction Certification*, *Load line Certificate (ILLC, PM 39 & Kapal Penyeberangan)*, Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Angkutan Penyeberangan (SKKP), Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP), Sertifikat Nasional Anti Teritip, Pernyataan Pemenuhan untuk Kapal Angkutan Penyeberangan Pengangkut Barang Berbahaya, Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballast, *Stability Instrument* dan *Condition Assessment Scheme (CAS)*
5. Melakukan audit keselamatan dan kapal di bawah ketentuan *ISM Code (International Safety Management) (DOC & SMC)*
6. Melakukan audit keamanan kapal dan verifikasi keamanan pelabuhan di bawah ketentuan *ISPS Code (ISSC)*

Pelaksanaan kegiatan survei dan sertifikasi statutoria dilakukan atas dasar penugasan dari pemerintah Negara Bendera terutama Pemerintah Republik Indonesia. Otorisasi statutoria yang diterima BKI khususnya dari Pemerintah RI adalah sebagai berikut:

II. Scope of Statutory Services

1. *Carry out inspection and certification in the field of statutory services based on the authorisation from the Government of the Republic of Indonesia and from other governments;*
2. *Conduct surveys and certifications on behalf of the Governments of Mongolia, Timor Leste as well as Panama-Belize, Palau, Honduras, and others (in cooperation with IBS)*
3. *Performing drawing/plan approval which includes SOPEP/SMPEP, damage control plan, sewage treatment plan, garbage management plan, cargo securing manual, fire control and safety plan, P&A manual for chemical tankers, operation manual, stability calculation/booklet and others that support the issuance of certification according to the authorization given;*
4. *Conduct surveys and certifications, including Marpol Annex I to VI, Anti Fouling System (AFS), Cargo Ship Safety Equipment Certification, Cargo Ship Safety Construction Certification, Load line Certificate (ILLC, PM 39 & Crossing Vessels), Safety Certificate for Crossing Passenger Vessels (SKKP), National Certificate of Pollution Prevention (SNPP), National Anti-Barnacle Certificate, Declaration of Compliance for Crossing Vessels Transporting Dangerous Goods, National Certificate of Ballast Water Management, Stability Instrument and Condition Assessment Scheme (CAS).*
5. *Conduct safety and vessel audits under the provisions of the ISM Code (International Safety Management) (DOC & SMC)*
6. *Conduct ship security audits and port security verifications under the provisions of the ISPS Code (ISSC)*

The implementation of the statutory survey and certification activities is carried out based on assignments from the government of the Flag State, especially the Government of the Republic of Indonesia. The statutory authorizations received by BKI, in particular from the Government of Indonesia, are as follows:


Tabel Otorisasi Statutoria dari Pemerintah RI (Sertifikasi Perhubungan Laut)
Table of Statutory Authorisation from the Government of Indonesia (Sea Transportation Certification)

No	Uraian Description	Nomor Penunjukkan Number of Assignment	Lingkup Penunjukkan Scope of Assignment
1	Load Line	No. DKP/46/43/12 Tgl.12.6.1976 (ILLC) No. PY.66/1/1-93 Tgl.28-8-1993 (PGMI) dan diperkuat kembali melalui KM 112 Tahun 2021 Serta diperbaharui melalui Perjanjian Kerja sama No. HK.201/2/7/DJPL/2021 No. DKP/46/43/12 dated 12.6.1976 (ILLC) No. PY.66/1/1-93 dated 28-8-1993 (PGMI) and reinforced through KM 112 of 2021 and renewed through Cooperation Agreement No. HK.201/2/7/DJPL/2021	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI Full Survey and Certification by BKI
2	SOLAS	No. PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995 diperkuat kembali melalui KM 112 Tahun 2021 Serta diperbaharui melalui Perjanjian Kerja sama No. HK.201/2/7/DJPL/2021 No. PY.68/1/3-95 dated 6-4-1995 reaffirmed through KM 112 of 2021 and renewed through Cooperation Agreement No. HK.201/2/7/DJPL/2021	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI untuk kapal yang berlayar ke Luar Negeri Full Survey and Certification by BKI for ship with International Voyage
3	MARPOL Annex I- IV	No. PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-1995 diperkuat kembali melalui KM 112 Tahun 2021 Serta diperbaharui melalui Perjanjian Kerja sama No. HK.201/2/7/DJPL/2021 No. PY.68/1/3-95 dated 6-4-1995 reaffirmed through KM 112 of 2021 and renewed through Cooperation Agreement No. HK.201/2/7/DJPL/2021	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI untuk kapal yang berlayar ke Luar Negeri Full Survey and Certification by BKI for ship with International Voyage
4	Fitness Chemical/ Gas Carrier in Bulk	No. PY.68/1/3-95 Tgl. 6-4-199 diperkuat kembali melalui KM 112 Tahun 2021 Serta diperbaharui melalui Perjanjian Kerja sama No. HK.201/2/7/DJPL/2021 No. PY.68/1/3-95 dated 6-4-199 reaffirmed through KM 112 of 2021 and renewed through Cooperation Agreement No. HK.201/2/7/DJPL/2021	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI Full Survey and Certification by BKI
5	ISM Code	No. PY/1/7-96 Tgl. 12-7-1996 diperkuat kembali melalui KM 112 Tahun 2021 Serta diperbaharui melalui Perjanjian Kerja sama No. HK.201/2/7/DJPL/2021 No. PY/1/7-96 dated 12-7-1996 reaffirmed through KM 112 of 2021 and renewed through Cooperation Agreement No. HK.201/2/7/DJPL/2021	Survei dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI Partial Survey and Certificate by BKI
6	ISPS Code	No. KL.93/2/02-04 Tgl. 14-0502004 (KPL) No. KP.255/DJPL/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Perpanjangan Penetapan PT Biro Klasifikasi Indonesia Sebagai Organisasi Pengaman Yang Diakui (<i>Recognized Security Organization/RSO</i>) di Bidang Kapal dan Fasilitas Pelabuhan No. PY.67/1/7/05 Tgl. April 2010. No. KL.93/2/02-04 dated 14-0502004 (KPL) No. KP.255/DJPL/2021 dated March 3, 2021 concerning Extension of Determination of PT Biro Klasifikasi Indonesia as a Recognized Security Organization (RSO) in the Field of Ships and Port Facilities No. PY.67/1/7/05 dated April, 2010	Survei dan Sertifikasi belum sepenuhnya oleh BKI Partial Survey and Certificate by BKI



No	Uraian Description	Nomor Penunjukkan Number of Assignment	Lingkup Penunjukkan Scope of Assignment
7	Marpol Annex VI	No. PY.67/1/7/05 Tgl. April 2015 diperkuat kembali melalui KM 112 Tahun 2021 Serta diperbaharui melalui Perjanjian Kerja sama No. HK.201/2/7/DJPL/2021 <i>No. PY.67/1/7/05 dated April 2015 reaffirmed through KM 112 of 2021 and renewed through Cooperation Agreement No. HK.201/2/7/DJPL/2021</i>	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI untuk kapal yang berlayar ke Luar Negeri <i>Full Survey and Certification by BKI for ship with International Voyage</i>
8	Condition Assessment Scheme (CAS)	No. UM.485/3/13/DII-05 Tgl. 27-06-2005 diperkuat kembali melalui KM 112 Tahun 2021 Serta diperbaharui melalui Perjanjian Kerja sama No. HK.201/2/7/DJPL/2021 <i>No. UM.485/3/13/DII-05 dated 27-06-2005 reaffirmed through KM 112 of 2021 and renewed through Cooperation Agreement No. HK.201/2/7/DJPL/2021</i>	Survei dan Sertifikasi sementara dilakukan oleh BKI dan Sertifikasi <i>Full Term</i> diberikan oleh Pemerintah <i>Provisional Survey and Certification is carried out by BKI and Full Term Certification is granted by the Government.</i>
9	Ballast Water Management (IBWM)	KM 112 Tahun 2021 Serta diperbaharui melalui Perjanjian Kerja sama No. HK.201/2/7/DJPL/2021 <i>KM 112 of 2021 and renewed through Cooperation Agreement No. HK.201/2/7/DJPL/2021</i>	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI untuk kapal yang berlayar ke Luar Negeri <i>Full Survey and Certification by BKI for ship with International Voyage</i>
10	Anti Fouling System Convention	KM 112 Tahun 2021 Serta diperbaharui melalui Perjanjian Kerja sama No. HK.201/2/7/DJPL/2021 <i>KM 112 Year 2021 and renewed through Cooperation Agreement No. HK.201/2/7/DJPL/2021</i>	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI untuk kapal yang berlayar ke Luar Negeri <i>Full Survey and Certification by BKI for ship with International Voyage</i>
11	Passenger Ship Safety Certificate	KM 112 Tahun 2021 Serta diperbaharui melalui Perjanjian Kerja sama No. HK.201/2/7/DJPL/2021 <i>KM 112 of 2021 and renewed through Cooperation Agreement No. HK.201/2/7/DJPL/2021</i>	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI <i>Full Survey and Certification by BKI</i>
12	Stability Instrument	KM 112 Tahun 2021 Serta diperbaharui melalui Perjanjian Kerja sama No. HK.201/2/7/DJPL/2021 <i>KM 112 of 2021 and renewed through Cooperation Agreement No. HK.201/2/7/DJPL/2021</i>	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI <i>Full Survey and Certification by BKI</i>

Tabel Otorisasi Statutoria dari Pemerintah RI (Sertifikasi Perhubungan Darat)

Table of Statutory Authorisation from the Government of Indonesia (Land Transportation Certification)

No	Uraian Description	Nomor Penunjukkan Number of Assignment	Lingkup Penunjukkan Scope of Assignment
1	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Angkutan Penyeberangan (SKKP) <i>Certificate of Safety of Passenger Ferry (SKKP)</i>	KM 112 Tahun 2021 ; Perjanjian Kerja sama No. HK.201/10/6/DRJD/2021 <i>KM 112 Year 2021; Cooperation Agreement No. HK.201/10/6/DRJD/2021</i>	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI <i>Full Survey and Certification by BKI</i>
2	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP) <i>National Certificate of Pollution Prevention (SNPP)</i>	KM 112 Tahun 2021 ; Perjanjian Kerja sama No. HK.201/10/6/DRJD/2021 <i>KM 112 Year 2021; Cooperation Agreement No. HK.201/10/6/DRJD/2021</i>	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI <i>Full Survey and Certification by BKI</i>



No	Uraian Description	Nomor Penunjukkan Number of Assignment	Lingkup Penunjukkan Scope of Assignment
3	Sertifikat Nasional Anti Teritip <i>National Certificate of Anti-barnacles</i>	KM 112 Tahun 2021 ; Perjanjian Kerja sama No. HK.201/10/6/DRJD/2021 <i>KM 112 Year 2021; Cooperation Agreement No. HK.201/10/6/DRJD/2021</i>	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI <i>Full Survey and Certification by BKI</i>
4	Pernyataan Pemenuhan untuk Kapal Angkutan Penyeberangan Pengangkut Barang Berbahaya <i>Declaration of Compliance for Vessels Transporting Dangerous Goods</i>	KM 112 Tahun 2021 ; Perjanjian Kerja sama No. HK.201/10/6/DRJD/2021 <i>KM 112 Year 2021; Cooperation Agreement No. HK.201/10/6/DRJD/2021</i>	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI <i>Full Survey and Certification by BKI</i>
5	Sertifikat Nasional Manajemen Air Ballast <i>National Certificate of Ballast Water Management</i>	KM 112 Tahun 2021 ; Perjanjian Kerja sama No. HK.201/10/6/DRJD/2021 <i>KM 112 Year 2021; Cooperation Agreement No. HK.201/10/6/DRJD/2021</i>	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI <i>Full Survey and Certification by BKI</i>
6	Sertifikat Garis Muat Kapal Angkutan Penyeberangan <i>Certificate of Loading Line for Crossing Transport Vessels</i>	KM 112 Tahun 2021 ; Perjanjian Kerja sama No. HK.201/10/6/DRJD/2021 <i>KM 112 Year 2021; Cooperation Agreement No. HK.201/10/6/DRJD/2021</i>	Survei dan Sertifikasi sepenuhnya oleh BKI <i>Full Survey and Certification by BKI</i>

III. Ruang Lingkup Jasa Sertifikasi Material dan Komponen

1. Persetujuan dan sertifikasi pabrik dan industri. (Persetujuan Proses pembuatan, Persetujuan Tipe, dan Persetujuan Desain)
2. Persetujuan dan sertifikasi perusahaan penyedia jasa.
3. Persetujuan dan sertifikasi galangan dan bengkel las.
4. Persetujuan kualifikasi dan sertifikasi prosedur Las (WPS)
5. Kualifikasi dan sertifikasi juru las (*welder*)
6. Sertifikasi produk.

IV. Ruang Lingkup Jasa Non-Klasifikasi

Perseroan memiliki kompetensi profesional melakukan 15 jenis layanan jasa pemastian independen. Layanan tersebut terbagi dalam tiga sektor yakni Kelautan, Industri, dan Energi.

Tabel Jasa Non-Klasifikasi

Kompetensi Competence	Kelautan Marine	Industri Industry	Energi Energy
<i>Identification & Survey Mapping</i>	<i>Ship condition survey, etc Marine mapping</i>	<i>Lashing Survey, etc Basic map creation</i>	<i>Petroleum Survey, etc, Oil and Gas Resources Potency Study, etc</i>
<i>Inspection Test</i>	<i>Floating object inspection, etc WPS and welder test, etc</i>	<i>Crane, forklift, loader, truck, etc Wich load testing, etc</i>	<i>Storage tabk inspection, etc WPS and welder test, etc Oil and Gas Resources Potency Study</i>

III. Material and Component Certification Services

1. Approval and Certification of manufacturer and industry (Manufacturing Process Approval, Type Approval, and Design Approval)
2. Approval and Certification of service supplier.
3. Approval and Certification of Shipyard and Welding Shop.
4. Welding Procedure Specification (WPS) Qualification Approval and Certification.
5. Welder qualification and Certification.
6. Product Certification.

IV. Scope of BKI's Non Classification Services

The Company has the professional competence to carry out 15 types of independent assurance services, divided into three sectors: Marine, Industry, and Energy

Table of Non-Classification Services



Kompetensi Competence	Kelautan Marine	Industri Industry	Energi Energy
Laboratory Analysis	Sea water analysis, etc	Mechanical testing laboratory, etc	Material Coal, Oil and Material Analysis
Assessment Verification and Evaluation	Port Assessment, etc Ship's load-line increase evaluation, etc	Remaining Life Assessment, etc Price Verification, etc	Facilities audit, etc Coal Selling Verification, etc
Monitoring Consultancy	Project Monitoring, etc New building design, etc	Monitoring Corrosion, etc Safety, Health and Safety Consultant, etc	LNG Sales Monitoring, etc
Project Management	Planned Maintenance System, etc	Safety Consultant	Monitoring System for Oil & Gas Lifting, etc
Certification	Workshop certification, etc	Project Supervision and Management, etc Lifting gear inspection & Certification	Pipeline inspection & certification
Training Investigation Supervision	Marine inspector training, etc Insurance survey, etc New building supervision, etc	Welding Inspector, etc Failure Analysis, etc Project Supervision and Management, etc	Rigging and Signalman, etc Soil investigation, etc
Manpower Supply	Operation and Maintenance, etc	Failure Analysis, etc Project Supervision and Management, etc Industrial Inspector, etc	Project Management Team, etc

Portofolio SBU Gabungan Antara Sektor Kerja dan Kompetensi

Combined SBU Portfolio Between Sectors and Competences

Portofolio SBU Energi & Industri Energy & Industry SBU Portfolio	Pemetaan	Survei	Inspeksi	Assessment	Audit	Pengujian	Pengujian Laboratorium	Monitoring	Supervisi	Konsolidasi	Sertifikasi	Labor
Refinery/Industrial Installation Fitness Inspection, Supervision & Certification	√	√	√	√	√	√			√	√		
Pressure Vessel Design & Analysis Inspection, Supervision & Certification			√	√	√	√			√	√	√	
Crane Design & Analysis, Inspection, Supervision & Certification			√	√	√	√			√	√	√	
Pipe Line Design & Analysis, Inspection, Supervision & Certification	√	√	√	√	√	√			√	√	√	
Rotating Equipment (Pump, Compressor, etc) Inspection, Supervision & Certification			√	√	√	√			√	√	√	
Electrical Equipment Inspection, Supervision & Certification			√	√	√	√			√	√	√	
Storage Tank Design & Analysis Inspection, Supervision & Certification			√	√	√	√			√	√	√	
RIC Design & Analysis, Inspection, Supervision & Certification	√	√	√	√	√	√			√	√	√	
Pressure Safety Valve Design & Analysis, Inspection, Testing & Certification			√	√	√	√			√	√	√	
Metering System Inspection, Supervision & Certification			√	√	√	√			√	√	√	
Safety Devices/Equipment/System/Installation Inspection, Supervision & Certification			√	√	√	√			√	√	√	
Risk Based Inspection (RBI) Consultant & Audit			√	√	√					√		
Power Plan Installation, Inspection & Certification (SLO DJK)	√		√	√	√	√			√	√	√	



Portofolio SBU Energi & Industri Energy & Industry SBU Portfolio	Pemetaan	Survei	Inspeksi	Assessment	Audit	Pengujian	Pengujian Laboratorium	Monitoring	Supervisi	Konsolidasi	Sertifikasi	Labor
Installation of High Voltage Consumer Electricity Utilization, Inspection & Certification (SLO DJK)	√		√	√	√	√			√	√		
Installation of Medium Voltage Consumer Electricity Utilization, Inspection & Certification (SLO DJK)	√		√	√	√	√			√	√		
Rigging/Lifting Gear Design, Inspection, Testing & Certification			√	√	√	√		√	√	√	√	
WellHead & Drilling Unit (BOP, Tubing Casing, X-Over, etc) Inspection, Testing & Certification			√	√		√				√	√	
Valve Inspection, Testing & Certification			√	√		√				√	√	
Cementing Unit Inspection, Testing & Certification			√	√		√				√	√	
Boiler Design & Analysis, Inspection, Supervision & Certification			√	√	√	√			√	√		
Management System HSE/SMK3 Audit & Certification			√	√	√	√			√	√		
Heliport Design & Analysis, Inspection & Certification			√	√	√	√			√	√		
Rail Ways Facility and Infrastructure, Design & Analysis, Testing, Inspection, & Certification		√	√	√	√	√	√		√	√		
Rigging/Lining Gear Design, Inspection, Testing & Certification			√	√	√	√	√		√	√	√	
Lightning Arrestor Design, Inspection, Testing & Certification			√	√	√	√	√	√	√	√		
Fire & Flame Arrestor System Inspection, Testing & Certification			√	√	√	√	√			√		
Welder Qualification & Certification			√	√		√	√		√			
Welding Procedure Specification Consultant, Qualification & Certification			√	√		√	√		√	√		
Remaining Life Assessment (RLA) of Refinery & Structural Equipment				√	√					√		
Corrosion Protection (Coating/Painting, CP, Etc) Design, Inspection, Testing & Analysis	√	√	√	√		√	√	√		√		
HAZOP/HAZID Audit, Certification & Consultant			√	√	√			√		√		
Oil & Gas Asset Integrity			√	√						√		
Oil & Gas Equipment Feasibility Study										√		
Oil & Gas Structural (Local & Global) Analysis										√		
Oil & Gas FEED										√		
Various Non Destructive Test/Examination (NDT/E)						√						
Material Mechanical & Chemical Destructive Test (DT)						√	√					
Underwater Survey	√	√	√	√		√						
Wire Rope Test			√			√						
Casing-Tubing Inspection, Testing & Certification			√	√		√	√			√	√	
Box Crossover Thread Inspection, Testing & Certification			√	√		√				√	√	
Working at Height/Rope Access Technique (RAT)												√
Oil & Gas VSD Transport Skid Design, Inspection, Testing & Certification			√	√		√				√	√	
Oil & Gas Container Metal Box Design, Inspection, Testing & Certification			√	√		√				√	√	
Oil & Gas Basket Inspection Design, Inspection, Testing & Certification			√	√		√				√	√	



Portofolio SBU Energi & Industri Energy & Industry SBU Portfolio	Pemetaan	Survei	Inspeksi	Assessment	Audit	Pengujian	Pengujian Laboratorium	Monitoring	Supervisi	Konsolidasi	Sertifikasi	Labor
Oil & Gas Skid and Spreader Bar Inspection, Testing & Certification			✓	✓		✓				✓		
Transport Tank Inspection Design, Inspection, Testing & Certification			✓	✓		✓				✓		
Energy & Industrial Labor Supply												✓
VGM Certification				✓	✓	✓					✓	
Convention for Safe Container (CSC)			✓	✓	✓	✓					✓	
Helideck			✓	✓	✓	✓			✓	✓		
Survey Lifting Batu Bara (Minerba)	✓	✓						✓	✓			
Various Industrial & Social Mapping & Survey	✓	✓										
Survei Barang Modal Bukan Baru (KEMENDAG)		✓	✓	✓	✓					✓		
Information Technology System & Infrastructure	✓			✓	✓					✓		
Civil & Industrial Infrastructure	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Aerial Mapping	✓	✓	✓					✓				

Portofolio SBU Marine Services Marine Servicesas SBU Portfolio	Pemetaan	Survei	Inspeksi	Assessment	Audit	Pengujian	Laboratorium	Monitoring	Supervisi	Konsultansi	Sertifikasi	Labor Supply	IT System
Ship New Building	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Ship Repair & Modification	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Ship As Built Drawing and Re-Drawing		✓		✓							✓		
Intact and Damage Stability Calculation											✓		
Hydrodynamic Analysis											✓		
Ship Towing Analysis		✓									✓		
Marine Machinery Analysis		✓	✓	✓		✓					✓		
Marine Structural Analysis		✓	✓	✓		✓					✓		
FPSO/FLNG/FPU GAP Analysis				✓							✓		
Cargo Securing Manual		✓									✓		
Ballast Water Management Plan		✓		✓							✓		
Maritime Labor Convention Plan (MLC 2006)		✓		✓							✓		
Ship Planned Maintenance System	✓	✓		✓							✓		
Mooring System		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓			
Anchoring System & Mooring Line			✓	✓		✓	✓			✓			
Ship Tank/Tank Calibration & Survey		✓		✓						✓			
Marine Warranty Survey		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Ship Condition Survey		✓	✓		✓	✓				✓			



Portofolio SBU Marine Services Marine Servicesas SBU Portfolio	Pemetaan	Survei	Inspeksi	Assessment	Audit	Pengujian	Laboratorium	Monitoring	Supervisi	Konsultansi	Sertifikasi	Labor Supply	IT System
Ship On and Off Hire Survey		√	√		√	√				√			
Ship Towing and Lashing Survey		√	√	√					√	√			
Ship Draught Survey		√	√			√				√			
Vessel Condition Survey (SIRE, Vetting & TMSA, OCIMF & OVID)		√	√	√	√					√			
Container Condition Survey		√	√	√					√	√	√		
Ship Asset Integrity Services	√	√	√	√	√	√		√	√	√			√
Port Facility & Infrastructure Integrity Services	√	√	√	√	√	√		√	√	√			√
QA/QC Service (Independent Assurance)		√								√			
Bunker Survey Services		√	√			√	√	√	√				
Technical Audit of Floating Facility		√	√	√	√	√				√			
Navigation Aids Facilities	√	√		√					√	√			
Floating Concrete/Breakwater Facilities	√	√	√	√		√	√	√	√	√			
Ship Particulars		√									√		
ISPS Code		√	√	√	√			√		√			
ISM Code		√	√	√	√			√		√			
SIMOM (Surat Ijin Memasuki Operasi Migas)			√	√	√					√			
SIMOM (Licence to Enter Oil and Gas Operation)													
Terminal Untuk Khusus (Tersus)/Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	√	√	√	√	√					√			
Terminal for Special Purpose (Tersus)/Terminal for Own Use (TUKS)													
Marine Transportation Statutory Consultant		√	√	√						√			
CAS (Conditional Assessment Scheme) & CAP (Conditional Assessment Program) Consultant										√			
Marine Hose & Rubber Fender		√	√	√		√				√			
Vessel Reflagging Certificate										√			
Fising Vessel Certification (KKP)			√								√		
Technical Procurement Advisory										√			
Tenorm	√	√	√	√		√		√	√	√			
Life Saving Appliances (Raft, Buoy, Boat, Jacket, etc)		√	√			√				√			
Marine Cargo Gear		√	√	√		√	√			√			
TKDN & BMTB Marine		√	√	√	√					√			
Hidrografi/Hydrography	√	√		√						√			
Oceanografi/Oceanography	√	√		√						√			
Container Non CSC (Fleet Container, etc)			√	√	√	√			√		√		
Convention for Safe Container (CSC)			√	√	√	√			√		√		
Aqua Culture	√	√	√	√		√		√	√	√			
Free Board Evaluation		√								√			
WPS/PQR			√	√		√	√		√	√			
Welder Qualification			√	√		√	√		√	√			



Portofolio SBU Marine Services Marine Servicesas SBU Portfolio	Pemetaan	Survei	Inspeksi	Assessment	Audit	Pengujian	Laboratorium	Monitoring	Supervisi	Konsultansi	Sertifikasi	Labor Supply	IT System
Offshore Refinery/Industrial Installation Fitness	√		√	√	√	√			√	√			
Offshore Platform	√		√	√	√	√			√	√	√		
Offshore Pressure Vessel	√		√	√	√	√			√	√	√		
Offshore Crane and Lifting Devices	√		√	√	√	√			√	√	√		
Offshore Pipeline	√	√	√	√	√	√			√	√	√		
Offshore Rotating Equipment (Pump, Compressor, etc)	√		√	√	√	√			√	√	√		
Offshore Electrical Equipment	√		√	√	√	√			√	√	√		
Offshore Storage Tank	√		√	√	√	√			√	√	√		
Offshore Rig System	√		√	√	√	√			√	√	√		
Offshore Pressure Safety Valve			√	√	√	√			√	√	√		
Offshore Metering System			√	√	√	√			√	√	√		
Offshore Safety Devices/Equipment/System/Installation			√	√	√	√			√		√		
Offshore Boiler	√		√	√	√	√			√	√	√		
Subsea Fiber Optic Cable	√	√		√	√				√	√			
Offshore Remaining Life Assessment (RLA) of Structural & Refinery Equipment				√	√					√			
Offshore Corrosion Protection (Coating/Painting, CP, etc.)	√	√	√	√		√	√	√		√			
Offshore HAZOP/HAZID Audit, Verification & Consultant			√	√	√			√		√			
Offshore Top Side Facilities Independent Verification		√	√	√	√				√	√			
Offshore Oil & Gas Asset Integrity		√	√	√	√					√			
Offshore Oil & Gas Equipment Feasibility Study		√	√	√	√					√			
Offshore Oil & Gas Structural (Local & Global) Analysis	√	√	√	√	√					√			
Working at Height/Rope Access Technique (RAT)			√	√		√						√	
Marine Risk Based Inspection (RBI)	√	√	√	√	√					√			
Marine Front End Engineering Design (FEED)				√						√			
Offshore Power Plant (SLO)	√		√	√	√	√			√	√	√		
Information Technology System & Infrastructure	√			√	√					√			
Various Non Destructive Test/Examination NDT/E)						√							
Material Mechanical & Chemical Destructive Test (DT)							√						
Fuel Consumption Test		√	√	√		√							
Noise & Vibration Test		√	√	√		√				√			
Ship Machinery & Electrical Performance Test						√							
Bollard Pull Test						√							
Vessel Leakage Test						√							
Ship Inclining Test						√				√			



Portofolio BKI Academy BKI Academy Portfolio		Sertifikasi Certification	Non Certification Non Certification
I Maritime Category			
A Safety Sub Category			
Internal Auditor ISM Code			√
Designated Person Ashore ISM Code		√	
Risk Assessment ISM Code			√
Marine Accident and Investigation			√
IMDC Code*)			√
Jetty and Loading Master			√
B Security Sub Category			
Internal Auditor ISPS Code		√	
CSO ISPS Code		√	
PFSO ISPS Code		√	
C Survey Sub Category			
Marine Surveyor			√
New Building Supervision			√
Marine Superintendent			√
Technical Superintendent			√
Container Inspector			√
D Crewing Sub Category			
Maritime Labour Convention			√
E Environment Sub Category			
Ballast Water Management			√
Marpol Oil Outflow			√
F Ship Design Sub Category			
Ship-Intact Stability and Ship-Damage Stability Calculation			√
Ship-Design Engineering Review Workshop			√
G Imo Model Course Sub Category			
Training Of Trainer (TOT)		√	
Security Awareness Training For Port Facility Personal with Designated Security Duties		√	
Security Awareness Training for all Port Facility Personnel		√	
II Occupational Health and Safety Category			
A Kemenaker Certification Sub Category			
Ahli K3 Umum General OHS Expert		√	
Auditor SMK3 OHS Management System Auditor		√	
Ahli K3 Pesawat Angkat dan Angkut Lifting and Transporting Equipment OHS Expert		√	
Teknisi/Petugas Pemeriksa Penguji PAA Technician/PAA Examiner		√	



Portofolio BKI Academy BKl Academy Portfolio	Sertifikasi Certification	Non Certification Non Certification
Operator K3 Forklift Kelas I <i>Class I Forklift OHS Operator</i>	√	
Operator K3 Forklift Kelas II <i>Class II Forklift OHS Operator</i>	√	
Operator K3 Crane Kelas I <i>Class I Crane OHS Operator</i>	√	
Operator K3 Crane Kelas II <i>Class II Crane OHS Operator</i>	√	
Operator K3 Crane Kelas III <i>Class III Crane OHS Operator</i>	√	
Operator K3 Gondola, Conveyor, Mesin Pancang <i>Gondola, Conveyor, Piling Machine OHS Operator</i>	√	
Operator K3 Rigger <i>Rigger OHS Operator</i>	√	
Operator K3 Alat Berat <i>Heavy Equipment OHS Operator</i>	√	
Ahli K3 Pesawat Tenaga Produksi <i>Production P</i>	√	
Teknisi/Petugas Pemeriksa Penguji PTP <i>PTP Technician/Inspection Officer</i>	√	
Operator Mesin Produksi, Perkakas, Tanur Kelas I <i>Class I Production Machine, Tooling, Furnace Operators</i>	√	
Operator Mesin Produksi, Perkakas, Tanur Kelas II <i>Class II Production Machine, Tool, Furnace Operator</i>	√	
Operator Mesin Las, Juru Las Karbit <i>Welding Machine, Carbide Welder Operator</i>	√	
Juru Las Listrik dan Gas Kelas I <i>Class I Electric and Gas Welders</i>	√	
Juru Las Listrik dan Gas Kelas II <i>Class II Electric and Gas Welders</i>	√	
Juru Las Listrik dan Gas Kelas III <i>Class III Electric and Gas Welders</i>	√	
Ahli K3 Elevator dan Eskalator <i>Elevator and Escalator OHS Expert</i>	√	
Teknisi K3 Elevator & Eskalator <i>Elevator & Escalator OHS Technician</i>	√	
Operator K3 Elevator & Eskalator <i>Elevator & Escalator OHS Operator</i>	√	
Ahli K3 Listrik <i>Electrical OHS Expert</i>	√	
Teknisi K3 Listrik <i>Electrical OHS Technician</i>	√	
Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan <i>Steam Boiler and Pressure Vessel OHS Expert</i>	√	
Teknisi/Petugas Pemeriksa Penguji PUBT*) <i>Technician/PUBT Tester Examiner*)</i>	√	



Portofolio BKI Academy BKI Academy Portfolio	Sertifikasi Certification	Non Certification Non Certification
Operator Pesawat Uap Kelas I <i>Class I Steam Boiler Operator</i>	√	
Operator Pesawat Uap Kelas II <i>Class II Steam Boiler Operator</i>	√	
Ahli K3 Kimia <i>Chemical OHS Expert</i>	√	
Teknisi K3 Pestisida <i>Pesticide OHS Technician</i>	√	
Petugas K3 Kimia <i>Chemical OHS Officer</i>	√	
Petugas K3 Deteksi Gas <i>Gas Detection OHS Officer</i>	√	
Petugas K3 Asbes <i>Asbestos OHS Officer</i>	√	
Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja <i>Working Environment Junior OHS Expert</i>	√	
Ahli K3 Madya Lingkungan Kerja <i>Working Environment Intermediate OHS Expert</i>	√	
Ahli K3 Utama Lingkungan Kerja <i>Working Environment Senior OHS Expert</i>	√	
Petugas K3 Madya Ruang Terbatas (<i>Confined Space</i>) <i>Confined Space Intermediate OHS Officer</i>	√	
Petugas K3 Utama Ruang Terbatas (<i>Confined Space</i>) <i>Confined Space Senior OHS Officer</i>	√	
Petugas K3 Penyelamat Ruang Terbatas (<i>Confined Space</i>) <i>Confined Space Rescue OHS Officer</i>	√	
Kebakaran Kelas A/Ahli K3 Kebakaran <i>Class A Fire/Fire OHS Expert</i>	√	
Kebakaran Kelas B <i>Class B Fire</i>	√	
Kebakaran Kelas C <i>Class C Fire</i>	√	
Kebakaran Kelas D <i>Class D Fire</i>	√	
HIPERKES untuk Dokter <i>HIPERKES for Doctors</i>	√	
HIPERKES untuk Paramedis <i>HIPERKES for Paramedics</i>	√	
P3K di Tempat Kerja <i>First Aid in the Workplace</i>	√	
B BNSP Certification Sub Category BNSP Certification Sub Category		
Ahli K3 Umum Muda <i>General OHS Junior Expert</i>	√	
Ahli K3 Umum Madya <i>General OHS Intermediate Expert</i>	√	



Portofolio BKI Academy BKl Academy Portfolio	Sertifikasi Certification	Non Certification Non Certification
Ahli K3 Umum Utama <i>General OHS Senior Expert</i>	√	
Ahli <i>Hygiene</i> Industri Muda <i>Junior Industrial Hygienist</i>	√	
Ahli <i>Hygiene</i> Industri Madya <i>Intermediate Industrial Hygienist</i>	√	
Dokter Perusahaan <i>Company Doctor</i>	√	
Paramedis K3 Muda <i>Junior OHS Paramedic</i>	√	
Teknisi- 1 K3 Bekerja di Ketinggian <i>Technician- 1 OHS Working at Heights</i>	√	
Teknisi- 2 K3 Bekerja di Ketinggian <i>Technician- 2 OHS Working at Heights</i>	√	
Entran K3 Bekerja di Ruang Terbatas (<i>Confined Space</i>) <i>OHS Entrant Working in Confined Space</i>	√	
Attendant K3 Bekerja di Ruang Terbatas (<i>Confined Space</i>) <i>OHS Attendant Working in a Confined Space</i>	√	
Supervisor K3 Bekerja di Ruang Terbatas (<i>Confined Space</i>) <i>OHS Supervisor Working in a Confined Space</i>	√	
HAZOPS <i>HAZOPS</i>	√	
Petugas K3 Laboratorium <i>Laboratory OHS Officer</i>	√	
Petugas P3K <i>First Aid Officer</i>	√	
Operator K3 Migas <i>Oil and Gas OHS Operator</i>	√	
Pengawas K3 Migas <i>Oil and Gas OHS Supervisor</i>	√	
<i>Oil and Gas OHS Main Supervisor</i>	√	
C OSH Academy Certification Sub Category OSH Academy Certification Sub Category		
Safety Manager <i>Safety Manager</i>	√	
Safety Supervisor <i>Safety Supervisor</i>	√	
<i>Oil & Gas Safety Operation</i> <i>Oil & Gas Safety Operation</i>	√	
<i>Process Safety Management</i> <i>Process Safety Management</i>	√	
<i>Behavior Based Safety (BBS)</i> <i>Behavior Based Safety (BBS)</i>	√	



Portofolio BKI Academy BKI Academy Portfolio		Sertifikasi Certification	Non Certification Non Certification
III Seasep Category Seasep Category			
A NEBOSH and IOSH Certification Sub Category NEBOSH and IOSH Certification Sub Category			
NEBOSH IGC NEBOSH IGC		√	
IOSH Managing Safely IOSH Managing Safely		√	
B CSWIP Sub Category CSWIP Sub Category			
CSWIP 3.0-Visual Welding Inspector Level I CSWIP 3.0-Visual Welding Inspector Level I		√	
CSWIP NDT MT Level I CSWIP NDT MT Level I		√	
CSWIP NDT PT Level 1 CSWIP NDT PT Level 1		√	
CSWIP NDT MT Level 2 CSWIP NDT MT Level 2		√	
CSWIP NDT PT Level 2 CSWIP NDT PT Level 2		√	
CSWIP NDT RI Level 2 CSWIP NDT RI Level 2		√	
Risk Based Inspection (RBI) on API and ASME (Course only) Risk Based Inspection (RBI) on API and ASME (Course only)		√	
Damage Mechanism Assessment for RBI and FFS, based on API RP 571 (Course Only) Damage Mechanism Assessment for RBI and FFS, based on API RP 571 (Course Only)		√	
Fitness for Service (FFS) based on API 579-I/ASME FFS-1 (Course Only) Fitness for Service (FFS) based on API 579-I/ASME FFS-1 (Course Only)		√	
BGAS-CSWIP Painting Inspector Grade 3/2 BGAS-CSWIP Painting Inspector Grade 3/2		√	
BCAS-CSW IP Site Coatings Inspector BCAS-CSW IP Site Coatings Inspector		√	
IV Energy Category Energy Category			
A Oil and Gas Sub Category Oil and Gas Sub Category			
Welding Inspector Welding Inspector		√	
Inspektur Bejana Tekan Pressure Vessel Inspector		√	
Inspektur Tangki Penimbun Hoarding Tank Inspector		√	
Inspektur Pesawat Angkat Angkut Transport Aircraft Inspector		√	
Inspektur Peralatan Putar (Rotating Equipment) Rotating Equipment Inspector		√	



Portofolio BKI Academy <i>BKI Academy Portfolio</i>	Sertifikasi <i>Certification</i>	Non Certification <i>Non Certification</i>
Inspektur Kelistrikan <i>Electrical Inspector</i>	√	
Inspektur Pipa Penyalur <i>Conveyance Pipe Inspector</i>	√	
Inspektur RIG <i>RIG Inspector</i>	√	
Inspektur K3 <i>OHS Inspector</i>	√	
Inspektur Handak (Bahan Peledak) <i>Explosives Inspector</i>	√	
Inspektur Instalasi <i>Installation Inspector</i>	√	
Inspektur Katup Pengaman & Pemutus Segel <i>Safety Valve & Seal Breaker Inspector</i>	√	
Inspektur Platform <i>Platform Inspector</i>	√	
Inspektur Sistem Alat Ukur Serah Terima (<i>Metering</i>) <i>Handover</i>	√	
B Mining and Coal Sub Category <i>Mining and Coal Sub Category</i>		
Pengawas Operasional Pertama Pertambangan (POP) <i>First Mining Operations Supervisor (POP)</i>	√	
Pengawas Operasional Madya Pertambangan (POM) <i>Junior Mining Operations Supervisor (POM)</i>	√	
Pengawas Operasional Utama Pertambangan (POU) <i>Main Mining Operations Supervisor (POU)</i>		
Petugas Pengambil Contoh Uji Batubara (<i>Sampler</i>) <i>Coal Sampling Officer (Sampler)</i>	√	
Petugas Penguji Contoh Uji Batubara (Analisis) <i>Coal Sample Tester (Analyst)</i>	√	
Petugas Verifikasi Teknis Batubara (<i>Surveyor</i>) <i>Coal Technical Verification Officer (Surveyor)</i>	√	
V Testing Inspection and Certification Category <i>Testing Inspection and Certification Category</i>		
A General Industries <i>General Industries</i>		
TIC Muda A (<i>Introduction</i>) <i>Junior TIC A (Introduction)</i>		√
TIC Muda B (<i>Understanding</i>) <i>Junior TIC B (Understanding)</i>		√
TIC Madya (<i>General</i>) <i>Intermediate TIC (General)</i>		√
TIC Madya (<i>Specialis</i>) <i>Intermediate TIC (Specialized)</i>		√



Portofolio BKI Academy BKI Academy Portfolio		Sertifikasi Certification	Non Certification Non Certification
VI Construction Category <i>Construction Category</i>			
A Kemenaker Certification Sub Category <i>Ministry of Manpower Certification Sub Category</i>			
Ahli K3 Muda Konstruksi <i>Junior Construction OHS Expert</i>		√	
<i>Construction Intermediate OHS Expert</i>		√	
Ahli K3 Utama Konstruksi <i>Major Construction OHS Expert</i>		√	
Teknisi Scaffolding <i>Scaffolding Technician</i>		√	
Supervisor Scaffolding <i>Scaffolding Supervisor</i>		√	
B BNSP Certification Sub Category <i>BNSP Certification Sub Category</i>			
Juru Ukur <i>Quantity Surveyor</i>		√	
<i>Quantity Surveyor Level Muda</i> <i>Junior Level Quantity Surveyor</i>		√	
<i>Quantity Surveyor Level Madya</i> <i>Intermediate Level Quantity Surveyor</i>		√	
<i>Quantity Surveyor Level Utama</i> <i>Senior Level Quantity Surveyor</i>		√	
VII CORROSION CATEGORY <i>CORROSION CATEGORY</i>			
A BNSP Certification Sub Category <i>BNSP Certification Sub Categories</i>			
Cathodic Protection <i>Cathodic Protection</i>		√	
Coating Inspector <i>Coating Inspector</i>		√	
VIII MANAGEMENT SYSTEM CATEGORY <i>MANAGEMENT SYSTEM CATEGORY</i>			
A ISO Series Sub Category <i>ISO Series Sub Categories</i>			
ISO 9001:2015-Quality Management System (Understanding and Implementing) ISO 9001:2015-Quality Management System (Understanding and Application)			√
ISO 9001 :2015-Quality Management System (Auditor) ISO 9001: 2015-Quality Management System (Auditor)		√	
ISO 9001 :2015-Quality Management System (Lead Auditor) ISO 9001:2015-Quality Management Systems (Lead Auditor)		√	
ISO 14001:2015-Environmental Management System (Understanding and Implementing) ISO 14001:2015-Environmental Management System (Understanding and Implementation)			√
ISO 14001:2015-Quality Management System (Auditor) ISO 14001:2015-Quality Management System (Auditor)		√	



Portofolio BKI Academy BKI Academy Portfolio	Sertifikasi Certification	Non Certification Non Certification
ISO 14001:2015-Quality Management System (Lead Auditor) ISO 14001:2015-Quality Management System (Lead Auditor)	√	
ISO 31000:2009-Risk Management (Understanding and Implementing) ISO 31000:2009-Risk Management (Understanding and Implementation)		√
ISO 31000:2009-Quality Management System (Auditor) ISO 31000:2009-Quality Management System (Auditor)	√	
ISO 31000:2009-Quality Management System (Lead Auditor) ISO 31000:2009-Quality Management System (Lead Auditor)	√	
ISO 45001:2018-OHS Management System (Preparing for Migration from OHSAS 18001 to ISO 45001) ISO 45001:2018-OHS Management System (Preparing for Migration from OHSAS 18001 to ISO 45001)		√
ISO 45001:2018-OHS Management System (Auditor) ISO 45001:2018-OHS Management System (Auditor)	√	
ISO 37001:2016-Anti-Bribery Management Systems (Understanding and Implementing) ISO 37001:2016-Anti-Bribery Management Systems (Understanding and Implementing)		√
IX HUMAN RESOURCES CATEGORY HUMAN RESOURCES MANAGEMENT		
A Kemenaker Certification Sub Category Ministry of Manpower Certification Sub Category		
Kader Norma Ketenagakerjaan Level Muda Junior Level Labor Norm Cadre	√	
Kader Norma Ketenagakerjaan Level Madya Intermediate Level Labor Norm Cadre		
Kader Norma Ketenagakerjaan Level Utama Main Level Labor Norm Cadre	√	
B BNSP Certification Sub Category BNSP Certification Sub Category		
Training of Trainer (TOT) Training of Trainer (TOT)	√	
Training Need Analysis Training Need Analysis	√	
Staff Administrasi Sumber Daya Manusia Human Resources Administration Staff	√	
Staff Kompensasi dan Benefit Compensation and Benefit Staff	√	
Staff Manajemen Talenta Talent Management Staff	√	
Staff Penggajian Payroll Staff	√	
Staff Perencanaan Sumber Daya Manusia Human Resource Planning Staff	√	



Portofolio BKI Academy BKI Academy Portfolio	Sertifikasi Certification	Non Certification Non Certification		
Staf Rekrutmen dan Seleksi Recruitment and Selection Staff	√			
Staf Remunerasi Remuneration Staff	√			
Supervisor Manajemen Kinerja dan Karier Performance and Career Management Supervisor	√			
Supervisor Manajemen Talenta Talent Management Supervisor	√			
Supervisor Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Resources Training and Development Supervisor	√			
Supervisor Pengadaan Procurement Supervisor	√			
Human Resources Manager Human Resources Manager	√			
Manajer Human Capital Human Capital Manager	√			
Manajer Administrasi dan Personalia Administration and Personnel Manager	√			
Manajer Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Resources Development Manager	√			
Portofolio Mice Mice Portfolio	Meeting	Incentives	Conference	Exhibitions
Penyelenggaraan dan Penyediaan Ruang Meeting Organization and Provision of Meeting Rooms	√			
Penyelenggaraan Character Building dan Outbond Organization of Character Building and Outbound	√			
Penyelenggaraan Penghargaan dan Pemberian Reward Organization of Awards and Rewards		√		
Seminar, Webinar & Workshop Seminar, Webinar & Workshop			√	
Penyelenggaraan Kegiatan Pameran dan Promosi Organization of Exhibition and Promotion Activities				√

Bidang Usaha PT Sucofindo

Perseroan memiliki Bidang Usaha, sebagai berikut:

1. Inspeksi dan Audit

PT SUCOFINDO menyediakan jasa pemeriksaan kuantitas dan kualitas produk/komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan, makanan, industri, pertambangan, minyak dan gas serta produk konsumen. Secara umum, berbagai layanan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar teknis untuk produk/komoditas perdagangan, serta layanan audit untuk memastikan kapasitas dan kemampuan calon pemasok.

Line of Business PT Sucofindo

The Company has the following Lines of Business:

1. Inspection and Audit

PT SUCOFINDO provides quality and quantity inspection services for agricultural, forestry and fishery products/commodities, food, industry, mining, oil and gas as well as consumer products. In general, these services are intended to protect the interests of related parties and to ensure compliance with technical standards for trading products/commodities, as well as audit services to ensure the capacity and capability of potential suppliers.



2. Pengujian dan Kalibrasi

PT SUCOFINDO memiliki fasilitas pengujian dan kalibrasi lengkap untuk mendapatkan data yang akurat terhadap aspek kualitas dan keamanan produk. Laboratorium PT SUCOFINDO memiliki kapasitas untuk melakukan pengujian kimia, fisik, mekanik, mikrobiologi, listrik dan elektronika serta kegiatan kalibrasi alat produksi, alat uji dan alat ukur. Saat ini sedang dikembangkan pengujian dalam teknologi nano.

3. Sertifikasi

PT SUCOFINDO menyediakan layanan sertifikasi yang mencakup sertifikasi sistem manajemen dan sertifikasi produk. Skema sertifikasi yang tersedia adalah ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000, RSPO, HACCP, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Chain of Custody dan Legal Source.

Sertifikasi produk di antaranya meliputi sertifikasi produk listrik dan elektronika, pupuk dan produk kimia, makanan dan minuman, baja serta komoditas pertanian.

4. Konsultasi

PT SUCOFINDO memiliki layanan konsultasi sistem manajemen, analisa dampak lingkungan, sistem informasi, kandungan produk lokal, pengembangan wilayah, infrastruktur dan penggunaan lahan. Interaksi PT SUCOFINDO yang luas dengan pelaku berbagai lini bisnis memungkinkan PT SUCOFINDO untuk berbagi pengalaman dengan dukungan para pakar yang dimiliki.

5. Pelatihan

Layanan pelatihan PT SUCOFINDO memberikan kontribusi pengetahuan dan kemampuan dalam berbagai aspek bisnis seperti sistem manajemen, termasuk kualitas, kesehatan dan keselamatan kerja, HACCP dan manajemen keamanan. Selain itu, PT SUCOFINDO menyediakan pelatihan tanggap darurat dan pengoperasian alat berat. Pelatihan ini dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

PT SUCOFINDO memiliki semua fasilitas pelatihan yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil maksimal dari program pelatihan tersebut.

2. Testing and Calibration

PT SUCOFINDO has complete testing and calibration facilities to obtain accurate data on product quality and safety aspects. The PT SUCOFINDO laboratory has the capacity to carry out chemical, physical, mechanical, microbiological, electrical and electronic testing as well as calibration activities for production equipment, test equipment and measuring instruments. Currently, testing in nanotechnology is being developed.

3. Certification

PT SUCOFINDO provides certification services including management system certification and product certification. The certification schemes available include ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000, RSPO, HACCP, Sustainable Forest Management, Chain of Custody and Legal Source.

Product certification includes certification of electrical and electronic products, fertilizers and chemical products, food and beverages, steel and agricultural commodities.

4. Consultation

PT SUCOFINDO has a management system for consulting services, environmental impact analysis, information systems, local product content, regional development, infrastructure and land use services. PT SUCOFINDO's extensive interaction with various lines of business allows PT SUCOFINDO to share its experiences with the support of its experts.

5. Training

PT SUCOFINDO training services contribute knowledge and capabilities in various business aspects such as management systems, including quality, occupational health and safety, HACCP and security management. In addition, PT SUCOFINDO provides emergency response and heavy equipment operation training. This training is designed according to customer requirements.

PT SUCOFINDO has all the training facilities needed to get maximum results from the training program.



Bidang Usaha PT Surveyor Indonesia

Perseroan memiliki Bidang Usaha, sebagai berikut:

1. Jasa inspeksi, survei dan uji laboratorium di industri pertambangan Batubara
2. *Energy management services, contractor services in the field of providing electricity infrastructure and other tradeservices*
3. *Architectural, geological, geophysical and other scientific prospecting services, underground survey services, surface survey services, technical testing and analysis, and management consulting services.*

Line of Business PT Sucofindo

The Company has the following Lines of Business:

1. *Inspection, survey and laboratory test services in the coal mining*
2. *Energy management services, contractor services in the field of providing electricity infrastructure and other tradeservices*
3. *Architectural, geological, geophysical and other scientific prospecting services, underground survey services, surface survey services, technical testing and analysis, and management consulting services.*



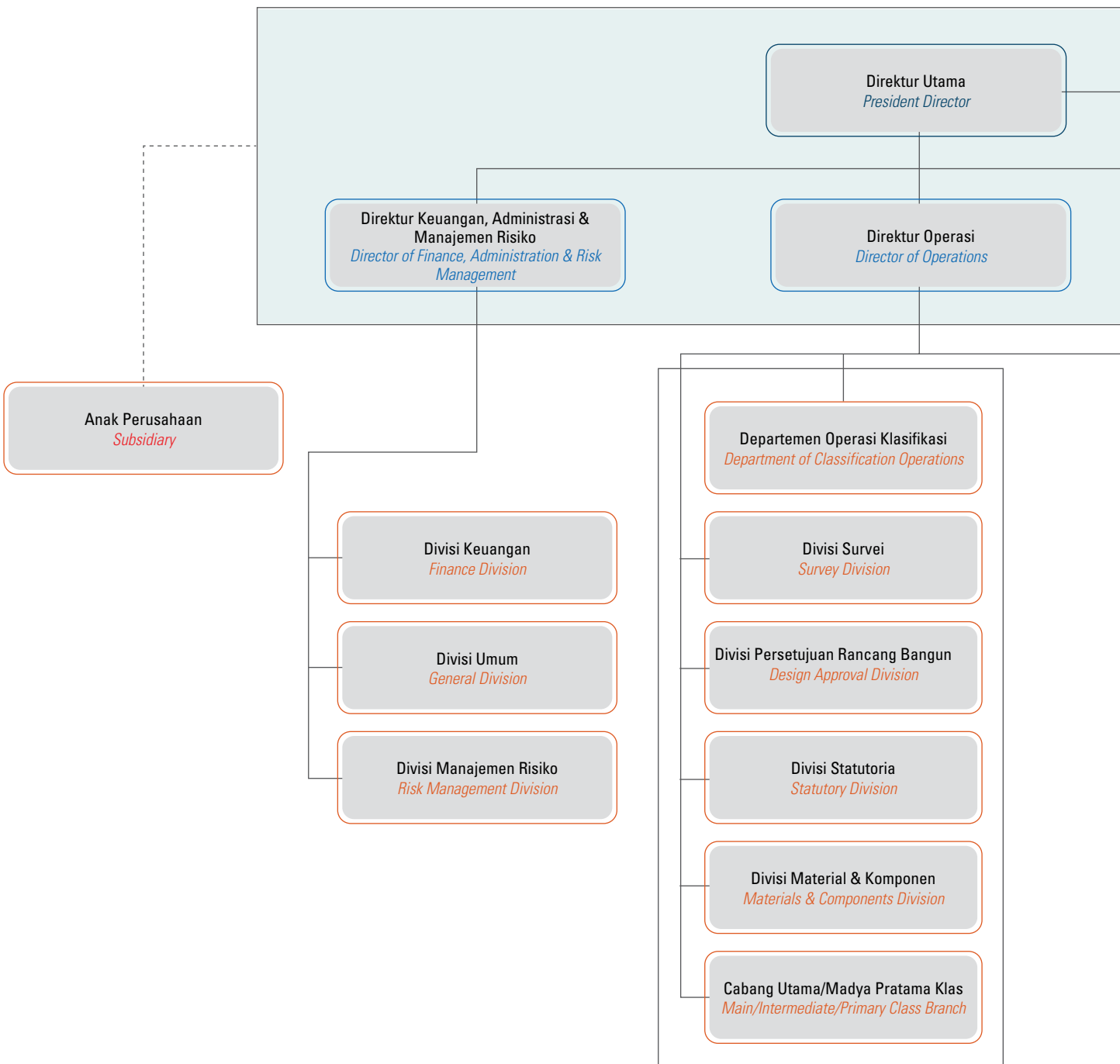


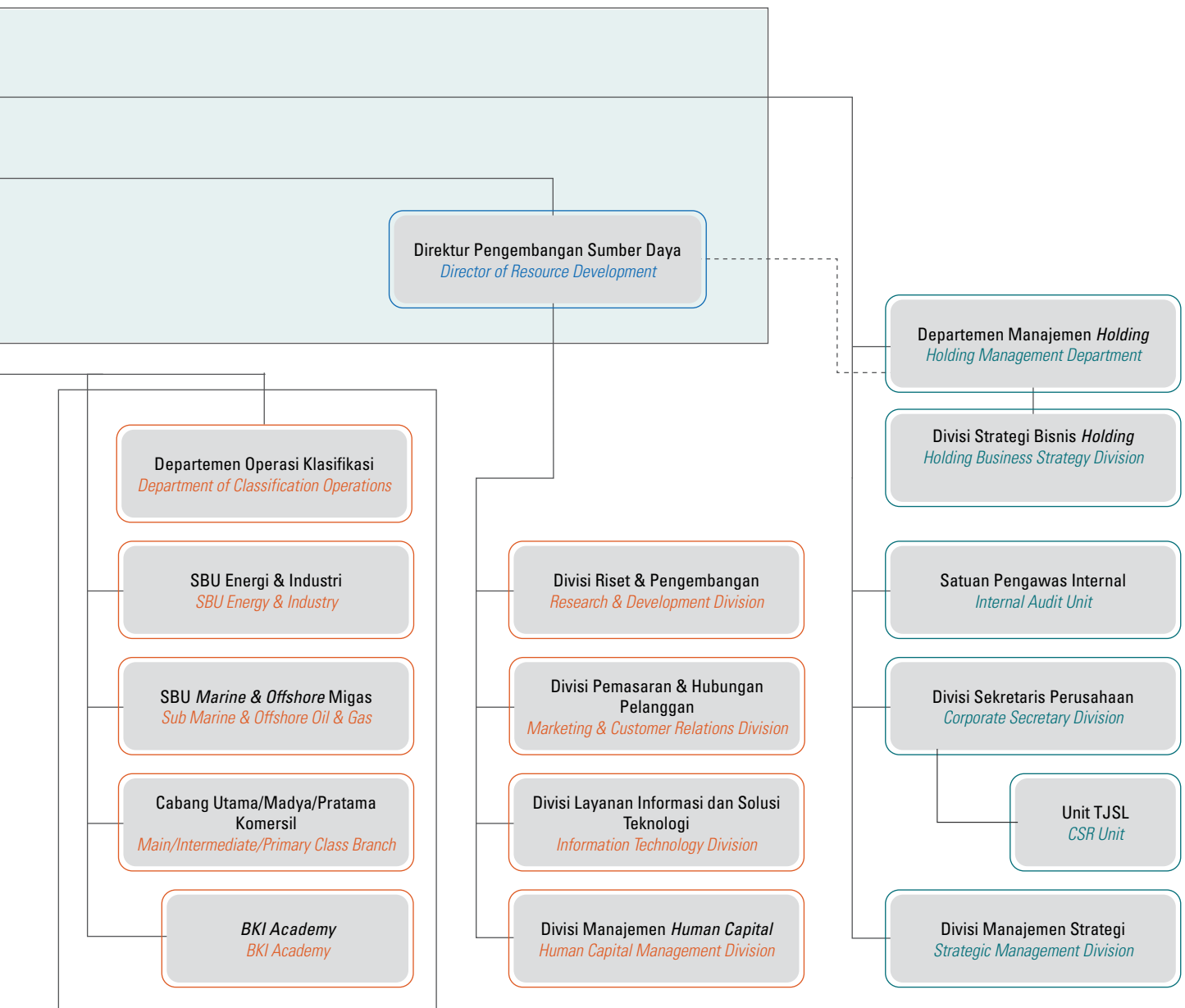
Struktur Organisasi

Organizational Structure

Pada tahun 2021, terdapat perubahan struktur organisasi PT BKI (Persero). Perubahan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi (SK) Nomor DU.297/LT.101/KI-21 tanggal 01 Desember 2021 perihal Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

In 2021, there was a change in the organizational structure of PT BKI (Persero) as stipulated in the Decree of the Board of Directors (SK) Number DU.297/LT.101/KI-21 dated December 01, 2021, regarding the Improvement of the Organizational Structure of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).







04

Analisis dan Pembahasan MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis





Tinjauan Ekonomi Global dan Nasional

Global and National Economic Review

Perekonomian dunia yang mengalami pemulihan pasca berakhirnya pandemi COVID-19, kembali menghadapi tantangan di sepanjang tahun 2023 dengan inflasi tinggi, pengetatan kondisi keuangan, perang kawasan Uni Eropa dan Timur Tengah. Meskipun pembuat kebijakan memperketat kebijakan moneter dan fiskal pasca-pandemi untuk mengerem permintaan dan menurunkan inflasi, masih banyak negara menunjukkan tanda-tanda stagnasi perekonomiannya. Sehingga IMF dalam rilisnya-*World Economic Outlook (WEO)*-Januari 2024, menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian global kembali menurun menjadi 3,1% di tahun 2023 dari sebesar 3,5% di tahun 2022.

Perekonomian Jepang dan berbagai negara-negara besar di kawasan Uni Eropa masih tertekan oleh tingginya tingkat inflasi global yang menurut WEO berada di kisaran 6,8%, sehingga diperkirakan kembali mencatatkan pertumbuhan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Perkembangan yang cukup menggembirakan adalah perekonomian AS pada akhirnya mencatatkan pertumbuhan hingga 2,5% di tahun 2023, lebih besar dari 1,9% di tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut diperkirakan akan membuat The Fed untuk tetap mempertahankan kebijakan ekonomi ketat, tapi tidak lagi meningkatkan suku bunga rujukan di kisaran 5,25%-5,50%, dalam rangka mendorong pertumbuhan, tapi sekaligus menekan laju inflasi.

Perlambatan pertumbuhan perekonomian tampaknya lebih banyak dialami oleh negara-negara maju. Rata-rata perekonomian negara maju, di dalamnya termasuk Amerika Serikat, Jepang, kawasan Uni Eropa dan Inggris, mencatatkan perlambatan pertumbuhan di tahun 2023 menjadi 1,6% dari 2,6% di 2022. Sementara negara-negara berkembang di kawasan Asia, termasuk Tiongkok dan India, juga Eropa maupun Amerika Selatan rata-rata mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,1% sama dengan tahun sebelumnya.

Mempertimbangkan berbagai hal tersebut, IMF memperkirakan setelah tertekan di tahun 2023, perekonomian global akan melanjutkan masa konsolidasi di tahun 2024, dan baru akan kembali meningkat di tahun 2025. World Bank juga memberikan prediksi yang serupa.

Berbagai tantangan ekonomi di tahun 2023 tersebut membuat inflasi global dicatat IMF masih bertahan di level yang tinggi, yakni 6,8% kendati sudah menurun dari level tertingginya, sebesar 9,0% YoY di tahun 2022 lalu. Konsistensi penerapan kebijakan moneter ketat di berbagai negara dan langkah mitigasi yang telah dilakukan untuk memperbaiki rantai pasok, diharapkan dapat menekan inflasi global Kembali ke level normal di tahun 2024 dan 2025, sehingga akan memacu peningkatan perekonomian global di tahun-tahun mendatang.

The global economy, which was in the process of recovering after the conclusion of the COVID-19 pandemic, encountered renewed challenges throughout 2023, including high inflation, tightening financial conditions, and geopolitical conflicts in the European Union and the Middle East. Despite policymakers implementing stringent post-pandemic monetary and fiscal measures to curb demand and reduce inflation, many nations continued to show signs of economic stagnation. Consequently, the International Monetary Fund (IMF) in its January 2024 release of the World Economic Outlook (WEO) reported a decline in global economic growth to 3.1% in 2023, down from 3.5% in 2022.

Japan's economy, along with several major European Union countries, remains under pressure from the high global inflation rate, which the WEO estimates at around 6.8%, leading to an anticipated lower growth rate than the previous year. However, a notably positive development is the U.S. economy, which achieved a growth rate of 2.5% in 2023, up from 1.9% the previous year. This development is expected to prompt the Federal Reserve to maintain its stringent economic policies but refrain from further increasing the benchmark interest rate, keeping it within the 5.25%-5.50% range, to foster growth while simultaneously containing inflation.

The slowdown in economic growth appears to be more pronounced among advanced economies. The average growth rate for developed nations, including the United States, Japan, the European Union, and the United Kingdom, slowed to 1.6% in 2023 from 2.6% in 2022. Meanwhile, emerging economies in Asia, including China and India, as well as in Europe and South America, recorded an average growth rate of 4.1%, consistent with the previous year.

Considering these factors, the IMF anticipates that after the economic strain of 2023, the global economy will continue to consolidate in 2024, with a resurgence expected in 2025. The World Bank has issued a similar forecast.

The economic challenges of 2023 have led the IMF to record global inflation remaining at a high level of 6.8%, albeit down from its peak of 9.0% year-on-year (YoY) in 2022. It is hoped that consistent implementation of tight monetary policies across various nations, coupled with mitigation efforts to improve supply chains, will bring global inflation back to normal levels in 2024 and 2025, thereby spurring global economic growth in the years to come.



Perekonomian Asia berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan dan melebihi pertumbuhan perekonomian global. IMF dalam rilis WEO bulan Januari 2024 memperkirakan perekonomian Asia tumbuh 4,1% YoY di tahun 2023, sementara ekonomi ASEAN tumbuh sebesar 4,2% YoY turun dari 5,5% YoY di tahun 2022. Capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi global yang tumbuh 3,1% YoY di tahun 2023.

Perekonomian Indonesia berdasarkan data BPS, mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05% di tahun 2023. Pulihnya permintaan domestik, tingginya pertumbuhan investasi dan tetap tingginya ekspor produk Indonesia menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian tersebut, yang mana lebih tinggi dari pertumbuhan regional Asia maupun ASEAN.

Guna mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi domestik sekaligus untuk menjaga inflasi, Bank Indonesia menaikkan BI 7-Day Repo-Rate sebanyak 50 basis poin di sepanjang tahun 2023. BPS (2023) mencatat Inflasi semula berada pada level 5,28% YoY di bulan Januari 2023 dan mengalami penurunan hingga level 3,52% YoY di bulan Juni 2023. Dengan respon kenaikan suku bunga acuan BI dan beragam kebijakan moneter yang efektif, secara keseluruhan inflasi tahunan bertahap turun dan tercatat di level 2,61% YoY di akhir 2023.

The Asian economy managed to maintain its growth momentum, surpassing global economic growth. According to the IMF's January 2024 WEO release, the Asian economy grew by 4.1% YoY in 2023, while the ASEAN economy grew by 4.2% YoY, down from 5.5% YoY in 2022. These figures are still higher than the global economy, which grew by 3.1% YoY in 2023.

Indonesia's economy, as reported by the Central Statistics Agency (BPS), recorded a growth rate of 5.05% in 2023. The recovery in domestic demand, robust investment growth, and strong export performance of Indonesian products were the main drivers of this economic growth, which outpaced the growth rates of both the broader Asian and ASEAN regions.

To sustain the momentum of domestic economic growth and curb inflation, Bank Indonesia raised the BI 7-Day Repo Rate by 50 basis points throughout 2023. According to BPS (2023), inflation initially stood at 5.28% YoY in January 2023 and fell to 3.52% YoY in June 2023. With the central bank's interest rate hikes and other effective monetary policies, annual inflation gradually decreased, reaching 2.61% YoY by the end of 2023.



Tinjauan Kinerja Per Segmen

Performance Review by Segment

Pendapatan per Segmen

Revenue by Segment

Tabel Realisasi Pendapatan per Segmen 2023

Realization of Revenue by Segments in 2023

Keterangan Description	Realisasi 2023 Realization 2023	Realisasi 2022 Realization 2022	Pertumbuhan Growth	Persentase Pertumbuhan Growth Percentage	Description
Minyak, Gas dan Energi	1.545.240.	1.438.446	106.794	7,42%	Oil, Gas and Energy
Mineral dan Batubara	1.382.888	1.130.503	252.385	22,33%	Mineral and Coals
Transportasi dan Logistik	746.157	658.169	87.988	13,37%	Transportation and Logistic
Pemerintah	441.084	676.624	-235.540	-34,81%	Government
Teknologi, Infrastruktur dan Properti	403.787	326.371	77.416	23,72%	Technology, Infrastructure and Property
Laboratorium	402.554	449.821	-47.267	-10,51%	Laboratory
Perindustrian	366.635	267.737	98.898	36,94%	Industries
Sertifikasi Sistem dan Produk	345.843	285.360	60.483	21,20%	System and Product Certification
Perdagangan	201.056	251.294	-50.238	-19,99%	Trading
Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	77.861	61.505	16.356	26,59%	Agriculture, Food, Forestry, Maritime, and Fisheries
Jumlah Pendapatan Usaha	5.913.103	5.545.831	367.272	6,62%	Total Revenues

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Review

Pembahasan dan analisis kinerja keuangan Perusahaan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2023. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan-anggota dari PKF Global, firma anggota dari PKF International Limited. Hasil audit menunjukkan laporan keuangan konsolidasian telah disajikan dengan wajar dalam semua hal yang material, meliputi laporan posisi keuangan konsolidasian PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan Entitas Anak per 31 Desember 2023, termasuk kinerja keuangan konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pemahaman atas uraian tinjauan keuangan ini tetap memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Discussion and analysis of the Company's financial performance are based on the consolidated financial statements as of December 31, 2023. These financial statements have been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan-a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited. The audit results indicate the consolidated financial statements have been fairly presented in all material aspects. It includes the consolidated financial position of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and its subsidiaries as of December 31, 2023, encompassing the consolidated financial performance and consolidated cash flow statements, for the financial year ending on that date, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

Understanding the financial review also takes into account the explanations provided in the notes to the Consolidated Financial Statements as an integral part of this Annual Report.



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

The Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Tabel Laporan Rugi Laba Konsolidasian

Consolidated Income Statement Table

(dalam juta rupiah | in million rupiah)

Keterangan Description	Realisasi 2023 Realization 2023	Realisasi 2022 Realization 2022	Pertumbuhan Growth	Persentase Pertumbuhan Growth Percentage
Pendapatan Revenues	5.913.103	5.545.831	367.272	6,62%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Goods Sold	(4.145.941)	(3.980.782)	(165.159)	4,15%
Laba Bruto Gross Profit	1.767.162	1.565.049	202.113	12,91%
Beban Penjualan, Umum & Administrasi Selling, General & Administrative Expenses	XXX			
Pendapatan (Beban) lain-lain-bersih Other income (expenses)-net	XXX			
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	1.037.150	881.294	155.856	17,68%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefit (Expense)				
• Kini Current	(218.825)	(158.008)	(60.817)	38,49%
• Tangguhan Deferred	(34.768)	(34.900)	(132)	(0,38%)
Total Pajak Penghasilan Total Income Tax	(253.593)	(192.908)	(60.685)	31,46%
Laba Tahun Berjalan Net Profit for the Year	783.558	688.386	95.172	13,83%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(32.197)	(84.921)	52.724	-62,09%
Jumlah Laba Komprehensif Total Comprehensive Income	751.361	603.465	147.896	24,51%
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada Profit for the Year Attributable To:				
• Pemilik entitas induk Owners of parent entity	737.839	646.304	91.535	14,16%
• Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	45.719	42.081	3.638	8,65%
Jumlah Total	783.558	688.385	95.173	13,83%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada Total Comprehensive Profit for the Year Attributable to:				
• Pemilik entitas induk Owners of parent entity	706.840	566.618	140.222	24,75%
• Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	44.521	36.846	7.675	20,83%
Jumlah Total	751.361	603.465	147.896	24,51%



Total Pendapatan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp5.913.103 juta, meningkat 6,62% dari Total Pendapatan tahun sebelumnya, yakni Rp5.545.831 juta.

Kenaikan Pendapatan disebabkan oleh kenaikan segmen Minyak, Gas dan Energi, segmen Mineral dan Batubara, segmen Teknologi, Infrastruktur dan Properti, serta segmen Sertifikasi Sistem dan Produk.

Labarugi Konsolidasi

Pada tahun 2023, Perusahaan membukukan pendapatan jasa sebesar Rp5.913.103 juta, naik 6,62% dari tahun sebelumnya, sebesar Rp5.545.831 juta. Kenaikan pendapatan disebabkan oleh kenaikan segmen Minyak, Gas dan Energi, segmen Mineral & Batubara, segmen Teknologi, Infrastruktur dan Properti, serta segmen Sertifikasi Sistem dan Produk. Perusahaan telah berupaya melakukan efisiensi biaya sehingga pertumbuhan biaya jasa Perusahaan, meningkat lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan, yakni hanya naik sebesar 4,15% menjadi sebesar Rp4.145.941 juta dari senilai Rp3.980.782 juta di tahun sebelumnya. Dengan demikian laba bruto yang dibukukan Perusahaan tumbuh 12,91% menjadi sebesar Rp1.767.162 juta.

Perusahaan mencatatkan peningkatan Beban Penjualan, Umum dan Administrasi di tahun 2023 sebesar 7,42% menjadi sebesar Rp1.057.600 juta dari Rp984.524 juta. Walaupun begitu, Perusahaan juga mencatatkan kenaikan perolehan Pendapatan Lain-lain sebesar 8,92% atau senilai Rp327.589 juta, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp300.769 juta.

Dengan kinerja tersebut, di tahun 2023 Perusahaan membukukan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp1.037.150 juta tumbuh 17,68% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp881.294 juta. Perusahaan pada akhirnya mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp783.558 juta, meningkat 13,83% dari tahun sebelumnya.

Di tahun 2023, Perusahaan mencatatkan rugi komprehensif-bersih yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebesar Rp32.197 juta, sehingga jumlah Laba Komprehensif tahun berjalan yang dibukukan Perusahaan meningkat 24,51% menjadi sebesar Rp751.361 juta.

Total revenue realized in 2023 was Rp5,913,103 million, an increase of 6.62% from the previous year's total revenue, namely Rp5,545,831 million.

The increase in revenue was due to increases in the Oil, Gas and Energy segment, the Mineral and Coal segment, the Technology, Infrastructure and Property segment, as well as the System and Product Certification segment.

Consolidated Income Statement

In 2023, the Company recorded service revenue amounting to Rp5,913,103 million, marking an increase of 6.62% from the previous year's IDR Rp5,545,831 million. This revenue growth was driven by increases in the Oil, Gas, and Energy segment; the Mineral & Coal segment; the Technology, Infrastructure, and Property segment; as well as the System and Product Certification segment. The Company has undertaken cost efficiency measures, resulting in a lower growth rate in service costs compared to revenue growth, with an increase of only 4.15% to Rp5,545,831 million from Rp3,980,782 million in the previous year. Consequently, the Company's gross profit grew by 12.91% to Rp1,767,162 million.

The Company reported an increase in Selling, General, and Administrative Expenses in 2023 by 7.42%, reaching Rp1,057,600 million, up from Rp984,542 million. Nevertheless, the Company also recorded an 8.92% rise in Other Income, amounting to Rp327,589 million, higher than the previous year's Rp300,769 million.

With this performance, in 2023, the Company posted a profit before income tax of Rp1,037,150 million, a growth of 17.68% from Rp881,294 million in the prior year. The Company ultimately recorded a net profit for the year of Rp783,558 million, an increase of 13.83% from the previous year.

In 2023, the Company recorded a lower net comprehensive loss of Rp32,197 million compared to the previous year, resulting in a 24.51% increase in Comprehensive Income for the year, amounting to IDR 751,361 million.



Aset

Assets

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

Keterangan Description	Realisasi 2023 Realization 2023	Realisasi 2022 Realization 2022	Pertumbuhan Growth	Persentase Pertumbuhan Growth Percentage
Aset Lancar <i>Current Asset</i>				
Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash Equivalents</i>	3.357.576	3.046.841	310.735	10,20%
Piutang Usaha-Bersih <i>Trade Receivables-Net</i>	972.168	834.412	137.756	16,51%
Piutang Lain-Lain-Bersih <i>Other Receivables-Net</i>	15.897	38.148	-22.251	-58,33%
Persediaan <i>Inventories</i>	26.191	34.097	-7.906	-23,19%
Biaya Dibayar Di Muka <i>Prepaid Expenses</i>	147.343	97.349	49.994	51,36%
Pajak Dibayar Di Muka <i>Prepaid Taxes</i>	87.481	85.457	2.024	2,37%
Uang muka <i>Advances</i>	52.508	34.986	17.522	50,08%
Pendapatan Akan Diterima <i>Accrued Revenue</i>	714.663	507.713	206.950	40,76%
Aset Lancar Lainnya <i>Other Current Assets</i>	1.072	1.044	28	2,68%
Jumlah Aset Lancar <i>Total Current Assets</i>	5.374.903	4.680.051	694.852	14,85%
Piutang Lain-Lain <i>Other Receivable</i>	3.005	3.005	0	0,00%
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama <i>Investment in Associates and Joint Venture</i>	41.171	26.350	14.821	56,25%
Properti Investasi-Bersih <i>Investment Properties-Net</i>	126.169	130.982	-4.813	-3,67%
Aset Tetap-Bersih <i>Fixed Assets-Net</i>	2.875.422	2.799.824	75.618	2,70%
Goodwill	2.544	2.544	0	0,00%
Aset Pajak Tangguhan <i>Deferred Tax Assets</i>	184.748	206.169	-21.420	-10,39%
Jaminan <i>Deposits</i>	20.375	19.924	451	2,26%
Aset Tidak Lancar Lainnya <i>Other Non-Current Assets</i>	72.827	77.467	-4.640	-5,99%
Jumlah Aset Tidak Lancar <i>Total Non-Current Assets</i>	3.326.263	3.266.266	59.997	1,84%
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	8.701.166	7.946.318	754.848	9,50%



Total aset Perseroan per 31 Desember 2023 meningkat 9,50% menjadi sebesar Rp8.701.166 Juta dari sebesar Rp7.946.318 Juta di tahun sebelumnya. Komposisi aset Perseroan didominasi oleh kelompok aset lancar dengan kontribusi mencapai 61,77% dari total aset, yang didukung oleh kuatnya posisi Kas dan Setara Kas Perseroan, dengan nilai sebesar Rp3.357.576 Juta atau 38,59% dari total aset. Sejalan dengan pertumbuhan Pendapatan, Piutang Usaha dan Pendapatan Akan Diterima Perseroan juga meningkat masing-masing sebesar 16,51% dan 40,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

As of December 31, 2023, the Company's total assets increased by 9.50% to Rp8,701,166 million, up from Rp7,946,318 million in the previous year. The Company's asset composition is predominantly comprised of current assets, which contribute 61.77% of the total assets. This is bolstered by the Company's strong Cash and Cash Equivalents position, amounting to Rp3,357,576 million or 38.59% of total assets. In line with revenue growth, the Company's Accounts Receivable and Accrued Income also increased by 16.51% and 40.76%, respectively, compared to the previous year.

Liabilitas

Liabilities

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

Keterangan Description	Realisasi 2023 Realization 2023	Realisasi 2022 Realization 2022	Pertumbuhan Growth	Persentase Pertumbuhan Growth Percentage
Liabilitas Lancar <i>Current Liabilities</i>				
Utang Usaha <i>Trade Payables</i>	336.832	213.768	123.064	57,57%
Biaya Yang Masih Harus Dibayar <i>Accrued Expenses</i>	580.871	540.924	39.947	7,38%
Utang Pajak <i>Taxes Payable</i>	142.750	104.859	37.891	36,14%
Pendapatan Diterima Di Muka <i>Unearned Revenue</i>	87.584	89.985	(2.401)	(2,67%)
Liabilitas Sewa Jangka Pendek <i>Lease Liability-Current Portion</i>	2.320	949	1.371	144,47%
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya <i>Other Current Liabilities</i>	70.791	59.283	11.508	19,41%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek <i>Total Current Liabilities</i>	1.221.149	1.009.768	211.381	20,93%
Liabilitas Jangka Panjang <i>Non Current Liabilities</i>				
Utang Afiliasi <i>Affiliated Payables</i>	10.343.	10.343	0	0,00%
Liabilitas Sewa Jangka Panjang <i>Lease Liability-Non-Current Portion</i>	35.010	37.248	(2.238)	(6,01%)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja <i>Post-Employment Benefits Liabilities</i>	664.277	743.149	(78.872)	(10,61%)
Liabilitas Pajak Tangguhan <i>Deferred Tax Liabilities</i>	27.901	23.644	4.257	18,00%
Utang Jaminan <i>Deposit Payables</i>	2.004	1.935	69	3,57%
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya <i>Others Non-Current Liabilities</i>	5.204	-	5.204	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang <i>Total Non-Current Liabilities</i>	744.741	816.320	-71.579	-8,77%
Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	1.965.890	1.826.087	139.803	7,66%



Total liabilitas Perseroan per 31 Desember 2023 meningkat 7,66% menjadi sebesar Rp1.965.890 Juta dari sebesar Rp1.826.087 Juta di tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikontribusikan oleh bertambahnya hutang usaha Perseroan, biaya yang masih harus dibayar dan utang pajak Perseroan, sejalan dengan peningkatan biaya yang mengikuti pertumbuhan pendapatan. Dengan bertambahnya komponen liabilitas jangka pendek tersebut, komposisi liabilitas Perseroan di tahun 2023 didominasi oleh liabilitas jangka pendek dengan kontribusi 62,12% dari total liabilitas.

As of December 31, 2023, the Company's total liabilities increased by 7.66% to Rp1,965,890 million, up from Rp1,826,087 million in the previous year. This increase was driven by the growth in the Company's trade payables, accrued expenses, and tax liabilities, in line with rising costs associated with revenue growth. Due to the expansion of these short-term liability components, the Company's liabilities in 2023 were predominantly composed of short-term liabilities, accounting for 62.12% of the total liabilities.

Ekuitas

Equity

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

Keterangan Description	Realisasi 2023 Realization 2023	Realisasi 2022 Realization 2022	Pertumbuhan Growth	Persentase Pertumbuhan Growth percentage
Modal Saham Capital Stock	7.012.393	7.012.393	0	0,00%
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-In Capital	(2.630.821)	(2.630.821)	0	0,00%
Penghasilan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Incomes	153.215	184.214	-30.999	-16,83%
Telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated	1.133.249	613.945	51.9304	84,58%
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	697.086	605.554	91.532	15,12%
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to The Owners of The Company	6.365.123	5.785.285	579.838	10,02%
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	370.152	334.944	35.208	10,51%
Jumlah Ekuitas Total Equity	6.735.276	6.120.230	615.046	10,05%
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas Total Liabilities And Equity	8.701.166	7.946.317	754.849	9,50%

Pada tahun 2023, Total Ekuitas Perseroan adalah Rp6.735.276 juta, naik sebesar 10,05% dari tahun sebelumnya, yakni Rp6.120.230 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp1.133.249 juta, atau meningkat sebesar 84,58%.

In 2023, the Company's Total Equity will be Rp6,735,276 million, an increase of 10.05% from the previous year, namely Rp6,120,230 million. This increase was mainly due to an increase in Predetermined Retained Earnings amounting to Rp1,133,249 million, or an increase of 84.58%.



Laporan Arus Kas

Cash Flow Statement

(dalam jutaan rupiah | in million rupiah)

Keterangan Description	2023	2022	Pertumbuhan Growth	Persentase Pertumbuhan Percentage Growth
Arus Kas dari Aktivitas Operasi <i>Cash Flows from Operating Activities</i>	474.344	592.121	(117.777)	(19,89%)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi <i>Cash Flows from Investment Activities</i>	(19.723)	(13.054)	(6.669)	51,09%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan <i>Cash Flows from Financing Activities</i>	(141.259)	(58.914)	(2.345)	139,77%
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas <i>Net Increase in Cash and Cash Equivalents</i>	313.363	520.153	(206.790)	(39,76%)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun <i>Cash and Cash Equivalents at Beginning of The Year</i>	3.046.845	2.511.471	535.374	21,32%
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun <i>Cash and Cash Equivalents at End of The Year</i>	3.357.576	3.046.845	310.731	10,20%

Arus Kas

Arus Kas dan Setara Kas Perseroan pada akhir tahun 2023 sebesar Rp3.357.576 juta, mengalami kenaikan sebesar 10,20% dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp3.046.845 juta.

Kas yang diperoleh dari kegiatan operasional sebesar Rp474.344 juta, turun 19,89% dibanding tahun sebelumnya Rp592.121 juta.

Cash Flow

The Company's Cash Flow and Cash Equivalents at the end of 2023 amounted to Rp3,357,576 million, a significant increase of 10.20% compared to 2022 of Rp3,046,845 million.

Cash generated from operating activities amounted to Rp474,344 million or decreased by 19.89% compared to the previous year of Rp592,121 million.

Struktur Permodalan

Pengelolaan permodalan Perusahaan berdasarkan rasio jumlah utang terhadap modal. Utang neto dihitung dari jumlah pinjaman termasuk jangka pendek dan jangka panjang yang mempunyai bunga, sedangkan modal dihitung dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2023.

Realisasi nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.735.276 juta, naik 10,05% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp6.120.230 juta.

Liabilitas Perusahaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.965.890 juta naik 7,66% dibanding periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp1.826.087 juta. Kenaikan itu terutama dipengaruhi oleh meningkatnya Utang Usaha dan Liabilitas Sewa Jangka Pendek.

Capital Structure

The Company's capital management is based on the ratio of total debt to capital. Net debt is calculated from total borrowings including short-term and long-term interest-bearing loans, while capital is calculated from equity in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023.

The realized Equity value as of December 31, 2023 was Rp6,735,276 million, an increase of 10.05% compared to the same period the previous year of Rp6,120,230 million.

The Company's liabilities as of December 31, 2023 amounted to Rp1,965,890 million, an increase of 7.66% compared to the same period in 2022 of Rp1,826,087 million. The increase was mainly influenced by the increase in Trade Payables and Short Term Rental Liabilities.



Likuiditas dan Solvabilitas

Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nilai rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, yang diukur melalui rasio kas dan rasio lancar.

Pada tahun 2023 secara umum likuiditas Perusahaan cukup baik dengan *current ratio* sebesar 347,1%. Hal ini menunjukkan kondisi finansial perusahaan cukup aman dengan hutang-hutang jangka pendek Perusahaan dijamin lebih dari 3 (tiga) kali oleh aset lancar perusahaan.

Cash ratio mencapai 305,0% dengan saldo kas dan setara kas mencapai Rp3.357.576. Hal ini menunjukkan kondisi likuiditas Perusahaan naik jika dibandingkan akhir tahun lalu. Naiknya likuiditas antara lain disebabkan oleh meningkatnya total aset tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang digunakan untuk mengukur periode waktu yang diperlukan Perseroan untuk menagih piutang menjadi kas sejak selesainya pekerjaan/jasa dilakukan. Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan tahun 2023 rata-rata mencapai 60 (enam puluh) hari, atau 5 (lima) hari lebih baik dibanding target. Namun lebih lambat jika dibanding tahun sebelumnya yakni 55 (lima puluh lima) hari.

Liquidity and Solvency

Liquidity ratio and Solvency ratio show the Company's ability to pay debts, both short-term and long-term. The value of liquidity ratio shows the Company's ability to meet short-term liabilities, as measured by cash ratio and current ratio.

In 2023, in general, the Company's liquidity is quite good with a current ratio of 347.1%. This shows that the company's financial condition is quite safe with the Company's short-term debts guaranteed more than 3 (three) times by the company's current assets.

The cash ratio reached 305.0% with a cash and cash equivalent balance reaching Rp3,357,576. This shows that the Company's liquidity condition has improved compared to the end of last year. The increase in liquidity is partly due to the increase in total assets in 2023 compared to the previous year.

Collectability

The collectability level of receivables is used to measure the time period required by the Company to collect receivables into cash from the completion of work/services. The Company's receivables collectability level in 2023 will average 60 (sixty) days, or 5 (five) days better than the target. However, it is slower than the previous year, namely 55 (fifty five) days.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment for Investment in Capital Goods

Selama kurun waktu periode pelaporan, Perseroan tidak melakukan ikatan material atas investasi barang modal. Dengan demikian, Laporan ini tidak memberikan informasi terkait nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, dan sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut.

During the reporting period, the Company did not make any material commitment for investment in capital goods. Therefore, this report does not provide information related to the name of the party who made the commitment, the purpose of the commitment, and the expected source of funds to fulfil these commitment.



Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Pelaporan

Material Information and Facts Occurring After the Reporting Date

Tidak ada perubahan informasi dan fakta material yang terjadi sejak tanggal laporan akuntan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan.

There were no changes in information and material facts that occurred since the date of the accountant's report until the date of issuance of the financial statements.

Perbandingan antara Target dengan Pencapaian

Comparison between Target and Achievement

Pencapaian Pendapatan Perseroan terealisasi Rp5.913.103 juta atau tercapai 90,78% dibandingkan target tahun 2023 sebesar Rp6.513.600 juta.

The Company's revenue achievement was realized at Rp5,913,103 million or achieved 90.78% compared to the 2023 target of Rp6,513,600 million.

Capaian tersebut belum dapat melampaui target anggaran, namun bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu, kinerja Perusahaan dari sisi pendapatan mengalami peningkatan sebesar 6,62%.

This achievement has not exceeded the budget target, however when compared with the realization in the same period last year, the Company's performance in terms of revenue increased by 6.62%.

Realisasi pendapatan ini terutama dikontribusikan oleh portofolio *Oil, Gas & Renewable Energy* (12,5%), *Batubara* (10,2%), dan *Coal, Mineral & Environment* (8,0%).

This income realization was mainly contributed by the Oil, Gas & Renewable Energy portfolio (12.5%), Coal (10.2%), and Coal, Mineral & Environment (8.0%).

Struktur Permodalan

Capital Structure

Realisasi nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.735.276 juta naik sebesar Rp615.046 juta dibanding tahun 2022 sebesar Rp6.120.230 juta. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya jumlah Ekuitas mengalami kenaikan sebesar 10,05%.

The realized Equity value as of December 31, 2023 was Rp6,735,276 million, an increase of Rp615,046 million compared to 2022 of Rp6,120,230 million. When compared with the same period the previous year, the amount of Equity increased by 10.05%.

Per 31 Desember 2023 jumlah Liabilitas Perseroan sebesar Rp1.965.890 juta, naik dibandingkan pada periode yang sama tahun 2021 yakni sebesar Rp1.826.087 juta.

As of December 31, 2023, the Company's total liabilities amounted to Rp1,965,890 million, an increase compared to the same period in 2021, namely Rp1,826,087 million.

Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp1.221.149 juta dan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp744.741 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah Liabilitas tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,66%.

Short Term Liabilities amounted to Rp1,221,149 million and Long Term Liabilities amounted to Rp744,741 million. When compared with 2022, total liabilities in 2023 will increase by 7.66%.



Tingkat Kesehatan Perseroan

Company Health Level

Tingkat kesehatan Perseroan diukur dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi. Berdasarkan hasil *shadow rating* PT PEFINDO yang disampaikan melalui surat Nomor RC-698/PEF-DIR/VIII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023, Tingkat Kesehatan Perseroan tahun 2023 adalah: AA dengan skor sebesar 103,26.

The Company's health level is measured by referring to the provisions as stated in PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Activities. Based on PT PEFINDO's shadow rating results submitted via letter Number RC-698/PEF-DIR/VIII/2023 dated August 3, 2023, the Company's Health Level in 2023 is: AA with a score of 103.26.

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Dividend Policy and Distribution

Dividen atas Laba Tahun Buku 2023 belum ditetapkan dalam RUPS oleh Kementerian BUMN.

Dividends on Profits for the 2023 Financial Year have not yet been determined at the GMS by the Ministry of BUMN.

Informasi Material

Material Information

Ekspansi

Expansion

Perseroan tidak melakukan ekspansi pada tahun 2023.

The Company did not conduct any expansion in 2023

Divestasi

Divestment

Perseroan tidak melakukan divestasi pada tahun 2023.

The Company did not conduct any divestment in 2023

Merger

Merger

Perseroan tidak melakukan *merger* pada tahun 2023.

The Company did not conduct any merger in 2023.



Akuisisi *Acquisition*

Perseroan tidak melakukan akuisisi pada tahun 2023.

The Company did not make any acquisitions in 2023.

Restrukturisasi Hutang *Debt Restructuring*

Perseroan tidak melakukan restrukturisasi hutang pada tahun 2023.

The Company did not conduct any debt restructuring in 2023.

Transaksi dengan Pihak Terafiliasi *Transactions with Affiliated Parties*

Perseroan tidak melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi pada tahun 2023.

The Company did not conduct any transactions with affiliated parties in 2023.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan *Transactions Containing Conflict of Interest*

Perseroan tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada tahun 2023.

The Company did not conduct transactions that contain conflicts of interest in 2023.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan *Changes in Laws and Regulations*

Tidak ada Perubahan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2023 yang mempengaruhi jalannya Perseroan.

There were no changes in laws and regulations in 2023 that affect the running of the Company.

Perubahan Kebijakan Akuntansi *Changes in Accounting Policies*

Tidak ada Perubahan Kebijakan Akuntansi pada tahun 2023 yang mempengaruhi laporan keuangan Perseroan

There were no changes in accounting policies in 2023 that affect the Company's financial statements.



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



05

Tinjauan PENUNJANG BISNIS

Business Support Overview





Sumber Daya Manusia

Human Resources

PT BKI sebagai induk IDSurvey telah memiliki strategi untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai bagian dari transformasi SDM menuju talenta unggul berdaya saing global, yang dalam pelaksanaannya saling berkaitan dengan transformasi organisasi dan budaya.

Dalam pengelolaan korporasi dan bisnis IDSurvey, SDM tidak hanya dipandang sebagai aset utama, tapi merupakan modal insani dan menjadi elemen penting penunjang pencapaian strategi bisnis dan target kinerja Perusahaan.

Sejalan dengan hal ini, IDSurvey berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas pegawai secara terencana guna menghasilkan talenta IDSurvey yang terdepan dalam berkontribusi dan bertumbuh sehingga mampu berinovasi dan berkolaborasi di industri TIC global, selaras dengan visi Perusahaan sebagai perusahaan kelas dunia.

Pengelolaan fungsi *Human Capital* (HC) di IDSurvey dilaksanakan oleh Divisi *Human Capital Strategy* yang berperan dalam mengawal arah strategi HC secara grup IDSurvey, serta Divisi *Human Capital & Teknologi Informasi Operasi* di PT BKI (Persero) dan Divisi *Human Capital* di PT SUCOFINDO dan PT Surveyor Indonesia yang berperan dalam memastikan pengelolaan HC berjalan dengan baik.

Mengingat pentingnya SDM bagi Perseroan, manajemen senantiasa menjaga keseimbangan komposisi pegawai di seluruh entitas di lingkungan IDSurvey, dimana di tahun 2023 total pegawai mencapai 5.315 orang yang terdiri dari Pegawai Tetap sebanyak 3.004 orang dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 2.311 orang.

PT BKI, as the parent company of IDSurvey, has developed a strategy to enhance the quality of its human resources as part of a broader transformation aimed at cultivating superior, globally competitive talent. This effort is closely intertwined with organizational and cultural transformation.

Within the corporate and business management of IDSurvey, human resources are not merely viewed as a key asset but as human capital a crucial element that underpins the achievement of the Company's business strategies and performance targets.

Aligned with this perspective, IDSurvey is committed to the ongoing development and strengthening of employee capacity and capabilities through strategic planning. This initiative aims to cultivate leading IDSurvey talent that excels in contributing and growing, fostering innovation and collaboration within the global TIC (Testing, Inspection, and Certification) industry, in line with the Company's vision of becoming a world-class enterprise.

The management of Human Capital (HC) functions at IDSurvey is carried out by the Human Capital Strategy Division, which steers the HC strategy across the IDSurvey group. Additionally, the Human Capital & IT Operations Division at PT BKI (Persero) and the Human Capital Divisions at PT SUCOFINDO and PT Surveyor Indonesia play vital roles in ensuring effective HC management.

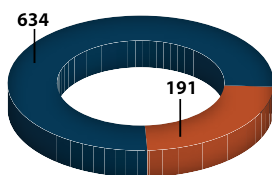
Recognizing the significance of human resources to the Company, management continuously maintains a balanced composition of employees across all entities within IDSurvey. As of 2023, the total number of employees reached 5,315, comprising 3,004 permanent employees and 2,311 non-permanent employees.

Adapun rincian jumlah pegawai per entitas di lingkungan IDSURVEY adalah sebagai berikut:

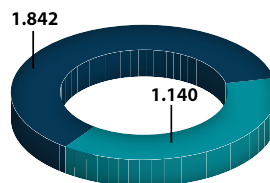
The breakdown of employees by entity within the IDSURVEY group is as follows:

Entitas Entity	Realisasi 2023 Realization 2023	
	Pegawai Tetap Permanent Employee	Pegawai Tidak Tetap Temporary Employee
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	634	191
PT SUCOFINDO	1.842	1.140
PT Surveyor Indonesia	528	981
Jumlah Total	3.004	2.312

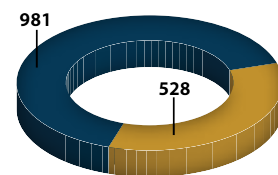
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)



PT SUCOFINDO



PT Surveyor Indonesia



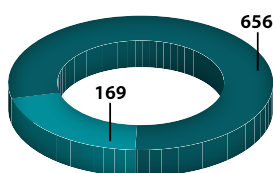
Adapun secara lebih detail profil pegawai IDSURVEY secara konsolidasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

In more detail, the consolidated profile of IDSURVEY employees as of December 31, 2023 is as follows:

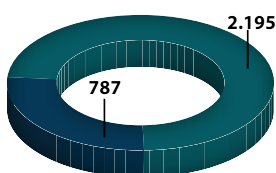
Komposisi berdasarkan Jenis Kelamin Employee Composition by Gender

Keterangan Description	Pria Male	Wanita Female
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	656	169
PT SUCOFINDO	2.195	787
PT Surveyor Indonesia	1.144	365
Jumlah Total	3.994	1.321

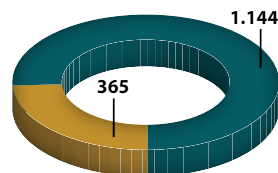
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)



PT SUCOFINDO



PT Surveyor Indonesia

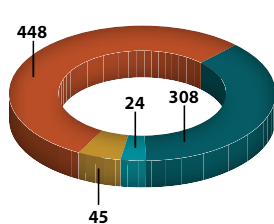




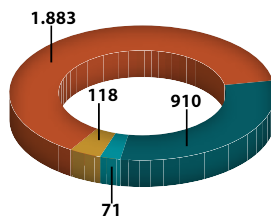
Komposisi berdasarkan Usia Employee Composition by Age

Keterangan Description	≤ 25 Tahun (Gen Z) ≤25 years old (Gen Z)	26-41 Tahun (Milenial) 26-41 years old (Millennials)	42-55 Tahun (Gen X) 42-55 years old (Gen X)	>55 Tahun (Baby Boomers) >55 years old (Baby Boomers)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	45	448	308	24
PT SUCOFINDO	118	1.883	910	71
PT Surveyor Indonesia	190	810	507	2
Jumlah Total	353	3.141	1.725	97

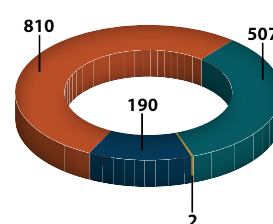
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)



PT SUCOFINDO



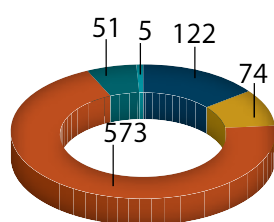
PT Surveyor Indonesia



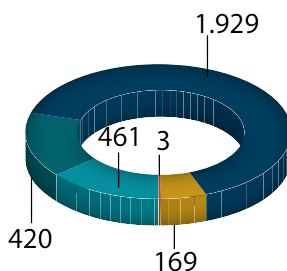
Komposisi berdasarkan Pendidikan Employee Composition by Education

Keterangan Description	≤ SMA ≤ High School	Diploma Associate's Degree	Sarjana Bachelor's Degree	Pasca Sarjana Master's Degree	Doktor Doctoral Degree
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	122	74	573	51	5
PT SUCOFINDO	420	461	1.929	169	3
PT Surveyor Indonesia	97	175	1.130	106	1
Jumlah Total	639	710	3.632	326	9

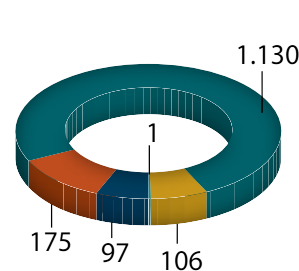
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)



PT SUCOFINDO



PT Surveyor Indonesia





Komposisi berdasarkan Jabatan

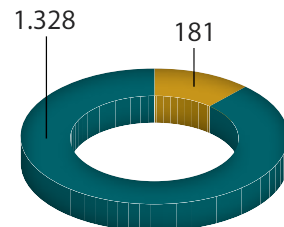
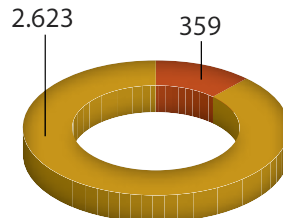
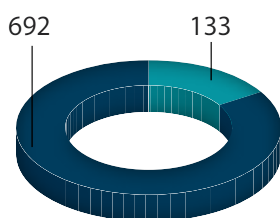
Employee Composition by Position

Keterangan Description	Struktural Structural	Fungsional Functional
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	133	692
PT SUCOFINDO	359	2.623
PT Surveyor Indonesia	181	1.328
Jumlah Total	673	4.642

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

PT SUCOFINDO

PT Surveyor Indonesia



Komposisi berdasarkan Bidang Kerja

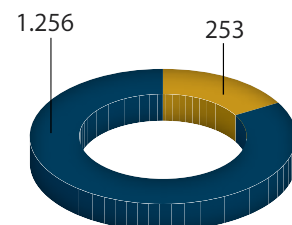
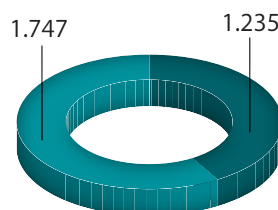
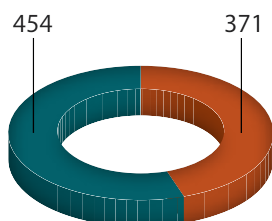
Employee Composition by Field of Work

Keterangan Description	Pendukung Supporting	Operasi Operating
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	371	454
PT SUCOFINDO	1.235	1.747
PT Surveyor Indonesia	253	1.256
Jumlah Total	1.859	3.457

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

PT SUCOFINDO

PT Surveyor Indonesia





Komposisi berdasarkan Bidang Kerja (Pendetailan Khusus Operasi)
Employee Composition by Field of Work (Operation Specific Detailing)

Keterangan <i>Description</i>	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	PT SUCOFINDO	PT Surveyor Indonesia	Jumlah/Total IDSurvey
Analisis/Penguji/Operator Lab <i>Analyst/Tester/Lab Operator</i>	-	323	35	358
Asesor <i>Assessor</i>	-	-	40	40
Auditor	-	97	10	107
Konsultan <i>Consultant</i>	-	37	27	64
Engineer	75	14	92	181
Inspektor <i>Inspector</i>	133	690	119	942
Surveyor	162	88	155	405
Staff/Officer Teknik <i>Technical Expert/Specialist</i>	84	846	574	1.504
Lainnya <i>Others</i>	-	255	204	459
	-	643	-	643



Teknologi Informasi

Information Technology

Sejak tahun 2021 Perseroan telah melakukan perubahan nomenklatur Divisi Teknologi Informasi menjadi Divisi Layanan Informasi dan Solusi Teknologi. Kepala Divisi Layanan Informasi dan Solusi Teknologi bertanggung jawab kepada Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia. Peran Divisi Layanan Informasi dan Solusi Teknologi menjadi bagian yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional di era *new normal*. Divisi ini terus melakukan inovasi untuk mendukung transformasi digitalisasi proses bisnis.

Since 2021, the Company has made a change in the nomenclature of the Information Technology Division to become the Information Services and Technology Solutions Division. The Head of Information Services and Technology Solutions Division is responsible to the Director of Human Resources Development. The role of the Information Services and Technology Solutions Division is a very important part in supporting operational activities in the new normal era. This division continues to innovate to support the digitization transformation of business processes.

Fungsi TI Holding IDSURVEY

The IT Function of IDSURVEY Holding

Seiring dengan perkembangannya, pada bulan Agustus tahun 2023, peran fungsi TI pada BKI dibagi menjadi dua yaitu fungsi *holding* dan fungsi operasi berdasarkan SKD No. DU.097/LT.101/KI-23. Peran fungsi TI *holding* dilakukan oleh Divisi Teknologi Informasi di bawah Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan peran fungsi TI Operasi dilakukan oleh bagian TI Operasi pada Unit Departemen Operasi Klasifikasi di bawah Direktorat Operasi.

As it evolved, on August 2023, the IT function at BKI was divided into two distinct roles: the holding function and the operational function, as stipulated by SKD No. DU.097/LT.101/KI-23. The IT holding function is managed by the Information Technology Division under the Directorate of Resource Development, while the IT Operational function is handled by the IT Operations section within the Classification Operations Department under the Directorate of Operations.

Adapun peran dari Divisi Teknologi Informasi yaitu Mengembangkan ekosistem TI untuk IDSURVEY secara sistematis dan komprehensif, membangun strategi/kebijakan/rencana/tata kelola TI, memimpin proses integrasi (mencakup *holding* dan entitas anak) dan mengendalikan pengembangan aplikasi yang selaras dengan kebutuhan bisnis, sehingga sistem dan teknologi informasi IDSURVEY dapat secara optimal mendukung bisnis serta membangun kerja sama dengan mitra dan *stakeholder* lainnya.

The role of the Information Technology Division includes systematically and comprehensively developing the IT ecosystem for IDSURVEY, as well as formulating its IT strategies, policies, plans, and governance, leading the integration processes (encompassing both the holding company and its subsidiaries), and overseeing application development that aligns with business needs. This ensures that IDSURVEY's information systems and technology optimally support the business and fosters collaboration with partners and other stakeholders.

Perkembangan Teknologi Informasi pada Entitas

Information Technology Development Within Entities

Sebagai fungsi *holding*, Divisi Teknologi Informasi berperan dalam melakukan pemantauan dan perkembangan teknologi informasi yang dilakukan oleh entitas IDSURVEY. Berikut adalah beberapa kegiatan Divisi Teknologi Informasi yang berkoordinasi dengan entitas:

1. Pemantauan Kegiatan *Assessment IT Maturity Level*
2. Program kerja pada *roadmap* INDI 4.0
3. Pemantauan *Cyber Security Maturity*
4. Melakukan inisiasi pengembangan R&D bersama entitas

As the holding function, the Information Technology Division is responsible for monitoring and overseeing the development of information technology within IDSURVEY entities. The following are some of the activities carried out by the Information Technology Division in coordination with the entities:

1. *Monitoring IT Maturity Level Assessment Activities*
2. *INDI 4.0 roadmap work program*
3. *Monitoring Cyber Security Maturity*
4. *Initiating joint R&D development with entities*

Berikut adalah beberapa highlight perkembangan teknologi informasi yang dihasilkan oleh entitas IDSURVEY pada tahun 2023:

Below are some key highlights of the information technology developments achieved by IDSURVEY entities in 2023:

No	Produk/Teknologi Product/Technology	Deskripsi Description	Entitas Entity
1	Sikom V2	Aplikasi Operasional Komersial <i>Commercial Operational Application</i>	BKI
2	Monitoring Data Hubla	Monitoring data Kapal Perhubungan Laut <i>Seaborne Transportation Vessel data monitoring</i>	BKI
3	CRM	Aplikasi pengelolaan order dan pelanggan <i>Order and customer management application</i>	BKI
4	Dashboard Management	Aplikasi pemantauan, dan analisis data secara <i>real-time</i> <i>Real-time data monitoring and analysis application</i>	BKI
5	Platform Green Port	Aplikasi untuk membantu pelaksanaan asesmen <i>Green & Smart Port</i> <i>Applications to assist the implementation of Green & Smart Port assessments</i>	BKI
6	Enterprise Risk Management Sucofindo (ERMS)	Aplikasi Pengelolaan Risiko <i>Risk Management Application</i>	SCI

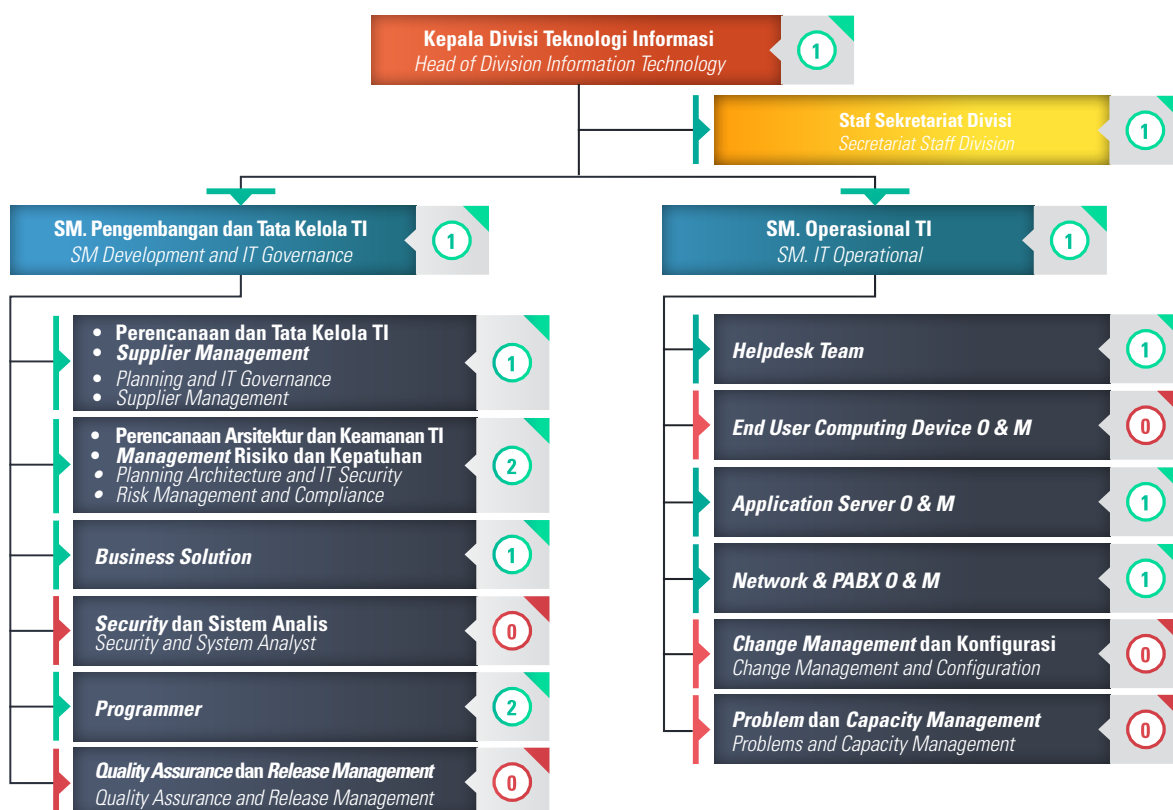
Pengelolaan Teknologi Informasi

Information Technology Management

Bagian pengembangan dan tata kelola TI berubah nomenklatur menjadi bagian pengembangan piranti lunak/SM *Software Development* dan Operasional TI dengan fungsi selevel *manager* infrastruktur.

The IT development and governance section changed its nomenclature to become the Software Development and IT Operations section with functions at the level of infrastructure manager.

Bagan struktur organisasi teknologi informasi
Information technology organizational structure chart



Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Sebagai *business support*, Divisi Layanan Informasi dan Solusi Teknologi PT BKI (Persero) memerlukan pengelolaan dengan perencanaan terstruktur dan mencakup seluruh proses bisnis yang berdasarkan pada RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan), *IT Governance* PT BKI (Persero) dan *best practice* lainnya seperti ITIL dan COBIT.

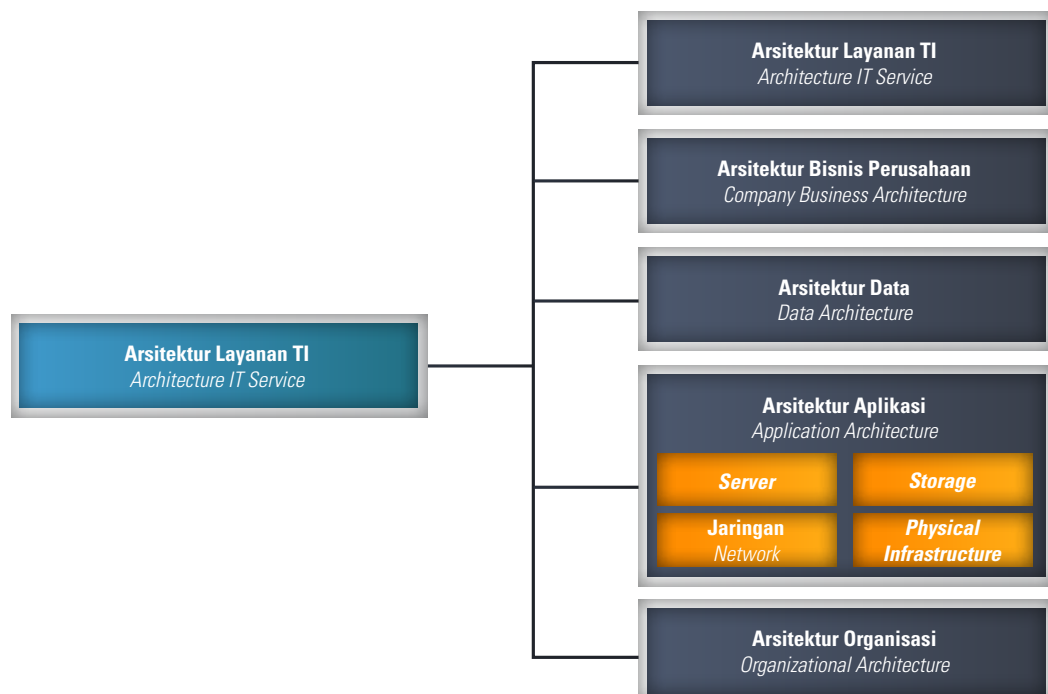
As a *business support*, PT BKI (Persero) Information Services and Technology Solutions Division requires to be managed with a structured planning that covers all business processes based on RJPP (Company Long Term Plan), PT BKI (Persero) IT Governance and other best practices such as ITIL and COBIT.

Arsitektur Teknologi Informasi

Information Technology Architecture

Arsitektur TI menggambarkan bangunan teknologi informasi baik aplikasi maupun infrastruktur yang akan dibangun oleh PT BKI (Persero) sebagai arah pengembangan aplikasi di lingkungan perusahaan sesuai dengan *IT Master Plan*, sebagai berikut:

IT architecture describes the information technology building both applications and infrastructure to be developed by PT BKI (Persero) as the direction of application development within the company in accordance with the IT Master Plan, as follows:





Realisasi Program Kerja Divisi Teknologi Informasi Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023 Divisi Teknologi Informasi telah melakukan beberapa pencapaian, antara lain :

1. Sebagai langkah awal untuk tata kelola teknologi informasi, *IT Holding* telah menyusun *draft IT Steering Committee* untuk *IDSurvey*.
2. Melakukan peninjauan Kerjasama dengan BSSN untuk penyusunan MoU tentang Perlindungan Informasi & Transaksi Elektronik; Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber; dan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik.
3. Mempersiapkan implementasi *Single Platform ERP* yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 melalui *Focus Group Discussion* (FGD), pertemuan dengan Exco, dan pembahasan *draft Project Management Office* (PMO).
4. Mengembangkan *prototype Chat AI* untuk membantu operasional bisnis, serta mengembangkan *Data Warehouse* untuk *dashboard* aplikasi keuangan dengan koordinasi dari tim keuangan *Holding*.
5. Untuk mendukung efisiensi operasional, *IT Holding* membangun aplikasi *e-office IDS* yang telah digunakan oleh insan *IDSurvey* sejak bulan Juni 2023
6. Pada bulan September 2023 meluncurkan aplikasi CRM *Holding* untuk meningkatkan pengelolaan pelanggan *IDSurvey*.

Realization of the Information Technology Division Work Program for 2023

Throughout 2023 the Information Technology Division has made several achievements, including:

1. *As a first step for information technology governance, IT Holding has drafted the IT Steering Committee for IDSurvey.*
2. *Exploring cooperation with BSSN for the preparation of MoU on Protection of Electronic Information & Transactions; Cooperation Agreement (PKS) on Cyber Security Capability Improvement; and Utilization of Electronic Certificates on Electronic Systems.*
3. *Preparing for the implementation of Single Platform ERP which will be implemented in 2024 through Focus Group Discussion (FGD), meeting with Exco, and discussion of Project Management Office (PMO) draft.*
4. *Developing prototype Chat AI to assist business operations, as well as developing Data Warehouse for financial application dashboards with coordination from the Holding's finance team.*
5. *To support operational efficiency, IT Holding built IDS e-office application which has been used by IDSurvey people since June 2023.*
6. *In September 2023 launched the Holding CRM application to improve IDSurvey's customer management.*



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



06

Tata Kelola PERUSAHAAN

Good Corporate Governance





PT Biro Klasifikasi Indonesia memiliki komitmen kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Hal ini untuk mendukung penguatan praktik GCG yang dilakukan Kementerian BUMN untuk mewujudkan keunggulan kompetitif, mengaplikasikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses bisnis. Praktik GCG ini juga sejalan dengan tujuan ke-16 Pembangunan Berkelanjutan yaitu membangun lembaga yang efektif dan akuntabel dengan target *zero tolerance* terhadap korupsi dan *fraud*. Perseroan selalu menerapkan praktik-praktik GCG secara berkesinambungan.

BKI menerapkan GCG dari manajemen puncak hingga karyawan di lapangan, sebagai bentuk komitmen untuk menjadi perusahaan yang bersih dan bebas korupsi. Program sosialisasi dan edukasi GCG serta pentingnya berperilaku berintegritas dalam bekerja selalu dilakukan berkesinambungan, termasuk kepada manajemen baru dan calon pekerja BKI. Komitmen penerapan GCG juga diwujudkan BKI dengan memberlakukan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*), Panduan Dewan (*Board Manual*), dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Perseroan juga memiliki kode kepatuhan yang mengatur perihal gratifikasi, benturan kepentingan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan *Whistleblowing System* (WBS), serta didukung penerapan *Compliance Online System*.

PT Biro Klasifikasi Indonesia has a strong commitment in applying the principles of Good Corporate Governance. This commitment is made by the Company to support the strengthening of GCG practices of the Ministry of SOEs to realize competitive advantage, apply accountability and transparency in business processes. This GCG practice is also in line with the 16th goal of Sustainable Development, which is to build effective and accountable institutions with a target of zero tolerance for corruption and fraud. The Company always implements GCG practices on an ongoing basis.

BKI implements GCG consistently, from top management to employees in the field, as a manifestation of its commitment to become a clean and corruption-free company. The GCG socialization and education program and the importance of integrity in work are always carried out continuously, including to new management and prospective BKI workers. BKI is also committed to implementing GCG by enforcing the Code of Corporate Governance, Board Manual, and Code of Conduct. The Company also has a compliance code that regulates gratuities, conflicts of interest, State Organizer Asset Reports (LHKPN), and the Whistleblowing System (WBS), and is supported by the implementation of the Compliance Online System.

Dasar Hukum, Prinsip dan Pedoman GCG

Legal Basis, Principles and Guidelines of GCG.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) didasarkan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tata kelola perusahaan menjadi landasan Perseroan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

The principles of good corporate governance (GCG) refer to the provisions of applicable laws and regulations. The implementation of corporate governance is the foundation of the Company to realize the Company's vision, mission and objectives.

Dasar Hukum Penerapan GCG

Legal Basis for GCG Implementation

Pelaksanaan GCG diatur dalam beberapa perangkat hukum yakni perundang-undangan, Keputusan Menteri, serta peraturan internal Perseroan berdasarkan keputusan Direksi.

The implementation of GCG is regulated in several legal instruments, namely legislation, Ministerial Decrees, as well as internal regulations of the Company based on decisions of the Board of Directors.



Undang-Undang Law

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 on State Administration that is clean and free from corruption, collusion and nepotism.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 on the Amendment to Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOEs).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permeneg BUMN) Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (Permeneg BUMN)

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara.
Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2006 concerning Audit Committee for State-Owned Enterprises.

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan Perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and its Amendment No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK. 16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN

Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK. 16/S. MBU/2012 dated June 6, 2012 regarding indicators/parameters for assessment and evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.

Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-15/MBU/2012 dated September 25, 2012 concerning amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2008 dated September 3, 2008 on the General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services of SOEs.

Peraturan Internal Perseroan The Company's Internal Regulations

Keputusan Direksi PT BKI (Persero) No. 012a/PL.104/KI-20 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT BKI (Persero).
Decree of the Board of Directors of PT BKI (Persero) No. 012a/PL.104/KI-20 dated March 2, 2020 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services of PT BKI (Persero).

Anggaran Dasar Perusahaan, Akta Notaris Umaran Mansjur, S.H., No. 32 tanggal 21 April 2009 sebagaimana perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan.

Articles of Association of the Company, Notarial Deed of Umaran Mansjur, S.H., No. 32 dated April 21, 2009 as the latest amendment to the Company's Articles of Association.

Panduan atau *Board Manual Good Corporate Governance* (GCG) yang disahkan Dewan Komisaris dan Direksi pada 27 Desember 2021.
Good Corporate Governance (GCG) Guidelines or Board Manual approved by the Board of Commissioners and Directors on December 27, 2021.

Pedoman Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS) yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 007/KP.803/IDS-22 tanggal 29 April 2022.
Whistleblowing System (WBS) Guidelines which were approved by the Board of Directors Decree No. 007/KP.803/IDS-22 dated April 29, 2022.

Code of Conduct, atau panduan kode etik dan pedoman perilaku yang disahkan Direksi pada 27 Desember 2021.
Code of Conduct, or code of ethics and code of conduct guidelines approved by the Board of Directors on December 27, 2021.

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 135/KP.008/KI-15 tanggal 23 Agustus 2015.
Guidelines for Handling Conflict of Interest, which has been approved through Board of Directors Decree No. 135/KP.008/KI-15 dated August 23, 2015.



Prinsip-Prinsip GCG

GCG Principles

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang berlaku secara umum.

In conducting its business, the Company applies the generally accepted governance principles.

Transparansi: Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.

Transparency: Openness in carrying out the decision-making process, and openness in disclosing material and relevant information about the Company.

Akuntabilitas: Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.

Accountability: Clarity of functions, implementation and accountability of organs so that the management of the Company is carried out effectively.

Pertanggungjawaban: Kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Responsibility: Conformity in the management of the Company to the prevailing laws and regulations and sound corporate principles.

Kemandirian: Keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Independence: A situation in which the Company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations and sound corporate principles.

Kewajaran: Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fairness: Fairness, namely justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising based on agreements and applicable laws and regulations.

Tujuan Penerapan GCG

Purpose of GCG Implementation

Pengelolaan Perusahaan dengan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik bertujuan untuk:

1. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, efektif dan memberdayakan fungsi organ Perseroan serta meningkatkan kemandirian korporasi.
2. Mendorong agar setiap pengambilan dan pelaksanaan keputusan selalu dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
3. Mendorong kesadaran adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun kelestarian lingkungan di mana perusahaan beroperasi.
4. Mengoptimalkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang kuat di level nasional maupun internasional.
5. Meningkatkan kontribusi BKI dalam perekonomian nasional.
6. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

The management of the Company with the principles of Good Corporate Governance aims to:

1. *Encouraging the management of the Company in a professional, efficient, effective manner and empowering the functions of the Company's organs and increasing corporate independence.*
2. *Encouraging every decision making and implementation are always based on high moral values and compliance with laws and regulations.*
3. *Encouraging awareness of the Company's social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability where the company operates.*
4. *Optimizing the Company's value in order to have strong competitiveness at the national and international levels.*
5. *Increase BKI's contribution to the national economy.*
6. *Improving the climate conducive to the development of national investment.*



Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG di BKI:

Implementation of GCG Principles at BKI:

Transparansi	Transparansi ini diupayakan dan diwujudkan oleh BKI dengan selalu berusaha memelopori pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi tersebut dilakukan dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktik GCG. Kepercayaan <i>shareholder</i> sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan Perseroan. Oleh karena itu, BKI berupaya menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan, dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Penyampaian informasi kepada <i>stakeholders</i> secara terbuka, benar, kredibel, dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan risiko yang dihadapi Perseroan
Transparency	<i>Transparency is pursued and realized by BKI by always trying to spearhead the disclosure of financial and non-financial information to various interested parties and in its disclosure is not limited to the information carried out by not violating applicable laws and regulations and recommended by GCG practices.</i> <i>Shareholder trust is highly dependent on the quality of information submitted by the Company. Therefore, BKI strives to provide information that is clear, accurate, timely and, comparable to the same indicators. The submission of information to stakeholders in an open, correct, credible and timely manner will make it easier to assess the performance and risks faced by the Company.</i>
Akuntabilitas	Akuntabilitas diperlukan BKI sebagai salah satu solusi mengatasi <i>problem</i> yang timbul dari konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Perseroan maupun kepentingan Perseroan dengan <i>stakeholder</i>-nya. BKI menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan /atau organ Perseroan menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya. Akuntabilitas ini dijalankan agar BKI selalu dapat mengkomunikasikan hak dan kewajiban masing-masing dan selalu dapat mengupayakan agar pihak-pihak yang berkepentingan mampu benar-benar memahami hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Accountability	<i>Accountability is required by BKI as one of the solutions to overcome problems that arise as a logical consequence of the difference between the interests of individuals and the interests of the Company and the interests of the Company and its stakeholders. BKI implements accountability by encouraging all individuals and/or organs of the Company to realize their rights and obligations, duties and responsibilities and authority.</i> <i>This accountability is carried out so that BKI can always communicate the rights and obligations of each and can always strive so that interested parties are able to fully understand their respective rights and obligations in accordance with the applicable laws and regulations.</i>
Pertanggungjawaban	Prinsip tanggung jawab menekankan pada sistem yang jelas untuk menekankan pada sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban Perusahaan kepada <i>Shareholders</i>. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam GCG, yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan Perseroan seperti masyarakat, Pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Prinsip tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban Perseroan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku.
Responsibility	<i>The principle of responsibility emphasizes a clear system to regulate the Company's accountability mechanism to Shareholders. This is to realize the objectives to be achieved in GCG, namely accommodating the interests of parties related to the Company such as the community, the Government, business associations and so on. The principle of responsibility also relates to the Company's obligation to comply with all applicable laws and regulations.</i>
Kemandirian	Kemandirian ini ditekankan oleh BKI dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing organ Perseroan. BKI yakin bahwa kemandirian merupakan suatu keharusan agar BKI dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perseroan.
Independence	<i>Independence is emphasized by BKI by always respecting the rights and obligations, duties and responsibilities and authority of each organ of the Company. BKI believes that independence is a necessity so that BKI can perform its duties properly and be able to make the best decisions for the Company.</i>
Kewajaran	Dengan kewajaran ini BKI menjamin bahwa setiap <i>stakeholder</i> mendapatkan perlakuan yang wajar. BKI menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan akan mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik bisnis yang sehat.
Fairness	<i>By applying the principle of fairness, BKI ensures that each Stakeholder receives fair treatment. BKI ensures that every interested party will receive treatment in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and sound business practices.</i>



Penilaian terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Assessment of Good Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik memberikan manfaat besar bagi kinerja Perseroan keseluruhan. Tata kelola perusahaan yang baik juga menjadi sarana dalam mengembangkan aset dan akuntabilitas kepada para *stakeholder*.

The implementation of Good Corporate Governance provides great benefits to the Company's overall performance. Good corporate governance is also a way to develop assets and accountability to stakeholders.

Assessment terhadap pelaksanaan GCG mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Praktik Good Corporate Governance* di Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2014, serta Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

Assessment of GCG implementation refers to the Regulation of the Minister of SOEs No.PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises which has been amended by the Regulation of the Minister of SOEs No.PER-09/MBU/2014, as well as the Decree of the Minister of SOEs No. Kep-100/MBU/2002 on the Assessment of the Health Level of SOEs.

Perseroan juga berupaya meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik melalui penerapan nilai-nilai baru (*new values*) dan budaya baru (*new culture*) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

The Company also strives to improve good corporate governance through the implementation of new values and new culture of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Assessment tersebut dilakukan dengan menggunakan alat ukur/kriteria/parameter yang disusun berdasarkan SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atau Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dengan aspek yang diukur meliputi Dewan Komisaris dan Direksi.

The assessment is carried out using parameters compiled based on SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation or Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, with aspects assessed including the Board of Commissioners and Directors.

Aspek Pengujian

Assessment Aspects

Sesuai dengan ketentuan SK-16/S.MBU/2012, pada tahun 2023 Perseroan melakukan *Self-Assessment* GCG yang didampingi oleh BPKP DKI Jakarta dengan pencapaian skor 89,51 dengan kualifikasi **SANGAT BAIK**.

*In accordance with the provisions of SK-16/S.MBU/2012, in 2023 the Company conducted a GCG Self-Assessment assisted by BPKP DKI Jakarta with a score of 89.51 with the qualification of **VERY GOOD**.*

Hasil *Assessment* pelaksanaan GCG

Assessment result of GCG implementation

No.	Aspek Pengujian/Indikator/Parameter <i>Test Aspect/Indicator/Parameter</i>	Bobot <i>Weight</i>	Skor <i>Score</i>
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	7,00	6,84
2.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>	9,00	8,11
3.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners/Supervisory Board</i>	35,00	32,63
4.	Direksi <i>Board of Directors</i>	35,00	30,20
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,00	7,98
6.	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,00	3,75
Nilai Pencapaian <i>Total Score</i>		100,00	89,51
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG <i>Classification of GCG Implementation Quality</i>		SANGAT BAIK VERY GOOD	



Struktur Organ Tata Kelola Perseroan

Structure of the Company's Governance Organs

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), struktur tata kelola Perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ Perusahaan.

Based on Law (UU) No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT), the Company's governance structure consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors as the main organs of the Company.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

RUPS merupakan organ Perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam struktur tata kelola perseroan. RUPS berwenang mengambil seluruh keputusan untuk menyetujui Laporan Tahunan, mengevaluasi kinerja Perusahaan, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris atau Direksi. RUPS juga menjadi forum bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kepentingan usaha. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi usaha, RUPS memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat dalam mengambil keputusan.

GMS is the Company's organ that has the highest power in the corporate governance structure. The GMS is authorized to make all decisions to approve the Annual Report, evaluate the Company's performance, appoint and dismiss members of the Board of Commissioners or Board of Directors. The GMS is also a forum for Shareholders to make important decisions related to business interests. As the highest authority of the business, GMS has legal and binding power in making decisions.

Pemegang Saham

Shareholders

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perusahaan. PT BKI (Persero), adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang sahamnya 100% dimiliki Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN.

Shareholders are individuals or legal entities that legally own shares of the Company. PT BKI (Persero), is a state-owned enterprise (BUMN) whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of BUMN.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Rights and Responsibilities of Shareholders

Sesuai Anggaran Dasar PT BKI (Persero), pemegang saham memiliki hak dan tanggung jawab atas Perseroan. Pemenuhan hak dan tanggung jawab pemegang saham dijamin oleh perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan bisnis Perseroan.

In accordance with PT BKI (Persero) Articles of Association, shareholders have rights and responsibilities over the Company. The fulfillment of the rights and responsibilities of shareholders is guaranteed by applicable laws and regulations, while still considering the sustainability of the Company's business.



Penyelenggaraan RUPS

Organization of GMS

Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan dua kali dalam setahun. RUPS dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

The Company holds an Annual GMS twice a year. The GMS is attended by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Penyelenggaraan RUPS 2023

The Holding of the 2023 AGM

RUPS 1

GMS 1

Tanggal Date	Agenda
27 Januari 2023	1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 termasuk di dalamnya penetapan klasifikasi risiko, serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023; 2. Penetapan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi Tahun 2023 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham; 3. Penetapan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2023 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham; 4. Persetujuan Indikator Aspek Operasional Tahun 2023 untuk menghitung Tingkat Kesehatan Perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP- 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.
January 27, 2023	1. <i>Ratification of the 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP), including the determination risk classification, as well as Work Plan and Program Budget Social and Environmental Responsibility (RKA TJSL) Year 2023;</i> 2. <i>Determination of Key Performance Indicators (KPI) for Directors Year 2023 as stated in the 2023 Management Contract between the Board of Directors and Board of Commissioners and the Holders Share;</i> 3. <i>Determination of the Board's Key Performance Indicators (KPI). Commissioner for 2023 as stated in the Contract Management in 2023 between the Board of Commissioners and Shareholders;</i> 4. <i>Approval of Operational Aspect Indicators for 2023 for calculate the Company's Health Level based on Decree of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number KEP- 100/MBU/2002 dated June 4, 2002.</i>

Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS

Attendance of the Board of Commissioners in the GMS

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
R. Harry Hikmat	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	100%
M. Amperawan	Komisaris <i>Commissioner</i>	100%
Lathifah Shohib	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	100%



Kehadiran Direksi dalam RUPS

Attendance of Board of Directors in GMS

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
Arisudono	Direktur Utama <i>President Director</i>	100%
Rozainbahri Noor	Direktur Pengembangan Sumber Daya <i>Director of Resource Development</i>	100%
Bandung Pardede	Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance, Administration and Risk Management</i>	100%
R. Benny Susanto	Direktur Operasi <i>Director of Operations</i>	100%

RUPS 2

GMS 2

Tanggal Date	Agenda
20 Juni 2023	1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022; 2. Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022; 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022; 4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2022; 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.
June 20, 2023	1. Approval of the Company's Annual Report including Reports Supervisory Duties of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2022 and Report on the Implementation of Social Responsibility Programs and Environment ending December 31, 2022, and Ratification of Consolidated Financial Statements Company Fiscal Year 2022; 2. Ratification of Business Funding Program Financial Reports Micro and Small Enterprises (PUMK) Financial Year 2022; 3. Determination of the Use of Consolidated Net Profit Company Fiscal Year 2022; 4. Determination of Salary/Honorarium along with Facilities and Allowances Others for the Company's Directors and Board of Commissioners 2023 Book, as well as Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the Company's Directors and Board of Commissioners for Performance Fiscal Year 2022; 5. Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit Company Consolidated Financial Statements and Reports Micro and Small Business Funding Program Finance (PUMK) Financial Year 2023.

Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS

Attendance of the Board of Commissioners in the GMS

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
R. Harry Hikmat	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	100%
M. Amperawan	Komisaris <i>Commissioner</i>	100%
Indra Iskandar	Komisaris <i>Commissioner</i>	100%
Lathifah Shohib	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	100%



Kehadiran Direksi dalam RUPS

Attendance of Board of Directors in GMS

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
Arisudono	Direktur Utama <i>President Director</i>	100%
Rozainbahri Noor	Direktur Pengembangan Sumber Daya <i>Director of Resource Development</i>	100%
Bandung Pardede	Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance, Administration and Risk Management</i>	100%
R. Benny Susanto	Direktur Operasi <i>Director of Operations</i>	100%



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dalam struktur tata kelola Perseroan, Dewan Komisaris adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan atas jalannya perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi. Anggota Dewan Komisaris bertindak secara kolegal sebagai Dewan dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang disahkan oleh RUPS. Dewan Komisaris juga berperan dalam mengawasi penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

In the Company's governance structure, the Board of Commissioners is the organ that carries out the supervisory function over the running of the company, carried out by the Board of Directors. Members of the Board of Commissioners act collegially as a Board and shall not act on their own. The duties, authorities and obligations of the Board of Commissioners are regulated under the Company's Articles of Association as authorized by the GMS. The Board of Commissioners also plays a role in overseeing the implementation of GCG within the Company.

Komposisi Dewan Komisaris

Composition of the Board of Commissioners

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia nomor : SK-15/MBU/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, RUPS mengangkat kembali Sdr. R. Harry Hikmat menjadi Komisaris Utama.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia number: SK-15/MBU/01/2023 dated January 26, 2023, regarding the Dismissal and Appointment of the President Commissioner of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, the General Meeting of Shareholders reappointed Mr. R. Harry Hikmat as President Commissioner.

SK-178/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.

SK-178/MBU/07/2023 dated July 4, 2023, regarding the Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.

Susunan Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) until the end of 2023 is as follows:

1. Komisaris Utama : R. Harry Hikmat
2. Komisaris Independen : Lathifah Shohib
3. Komisaris : M. Amperawan
4. Komisaris : Indra Iskandar
5. Komisaris : Virgo Eresta Jaya

1. President Commissioner : R. Harry Hikmat
2. Independent Commissioner : Lathifah Shohib
3. Commissioner : M. Amperawan
4. Commissioner : Indra Iskandar
5. Commissioner : Virgo Eresta Jaya

Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

The terms of office of Member of the Board of Commissioners will end if:

1. Masa jabatannya berakhir;
2. Mengundurkan diri;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
4. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS; dan
5. Meninggal dunia dalam masa jabatannya.

1. His/her term of office ends;
2. Resigns;
3. No longer meets the requirements of the applicable legislation;
4. Dismissed based on GMS Resolution; and
5. Died during his/her term of office.



Uraian Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Description of the Duties of the Board of Commissioners

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, tugas pokok Dewan Komisaris adalah:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi;
2. Mengikuti perkembangan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap setiap masalah penting Perseroan;
3. Melaporkan kepada RUPS jika terjadi gejala penurunan kinerja Perseroan;
4. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan dari Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
5. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dengan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
6. Sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, Dewan Komisaris dapat menggunakan saran profesional yang mandiri dan atau membentuk komite-komite bila diperlukan.

Based on the Company's Articles of Association, the main duties of the Board of Commissioners are:

1. *Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the RJPP and RKAP proposed by the Board of Directors;*
2. *Follow the development of the Company, provide opinions and suggestions to the GMS on any important issues of the Company;*
3. *Report to the GMS if there are symptoms of a decline in the Company's performance;*
4. *Examining and reviewing periodic reports and annual reports from the Board of Directors and signing the annual report;*
5. *Carry out other obligations in the context of supervisory duties by not contradicting the legislation, Articles of Association, and/or GMS resolutions;*
6. *In accordance with predetermined procedures, the Board of Commissioners may utilize independent professional advice and/or form committees as necessary.*

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Division of duties of the Board of Commissioners

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris bertugas sesuai dengan latar belakang profesi, pengetahuan, pengalaman dan kapasitas anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor SK.7/DEKOM.BKI/X/2022, pembagian tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

In carrying out their duties and responsibilities, members of the Board of Commissioners are assigned according to their professional background, knowledge, experience and capacity. Based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Number SK.7/DEKOM.BKI/X/2022, the division of duties of the Board of Commissioners is as follows:

Nama Name	Uraian Tugas Job Description
R. Harry Hikmat Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Mengkoordinasi tugas-tugas Dewan Komisaris <i>Coordinating the duties of the Board Commissioners</i>
M. Amperawan Komisaris <i>Commissioner</i>	• Melaksanakan pengawasan dan memberi nasihat atas kebijakan dan rencana di bidang Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Rencana Pengadaan Barang & Jasa. • Sebagai Ketua Komite Audit <i>Supervise and advise on policies and plans in the areas of Finance, Intern Control System and Goods & Services Procurement Plan</i> <i>As well as serving as the Head of the Audit Committee.</i>
Indra Iskandar Komisaris <i>Commissioner</i>	• Melaksanakan pengawasan dan memberi nasihat atas kebijakan dan rencana di bidang Nominasi Remunerasi dan SDM serta bidang Teknologi Informasi Hukum dan Pemasaran. • Sebagai Ketua Komite Nominasi Remunerasi dan SDM <i>Supervising and advising on policies and plans in the areas of Nomination, Remuneration and HR as well as Legal Information Technology and Marketing.</i> <i>As well as the Chairman of the Nomination, Remuneration and HR Committee</i>



Nama Name	Uraian Tugas Job Description
Virgo Ernesta Jaya Komisaris <i>Commissioner</i>	- Melaksanakan pengawasan dan memberi nasihat atas Kebijakan dan rencana di bidang Pengembangan Bisnis dan Portofolio serta Teknologi Informasi. - Sebagai Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola. <i>Supervising and providing advice on policies and plans in the areas of Business Development and Portfolio as well as Information Technology.</i> <i>Serving as the Vice Chairman of the Risk and Governance Monitoring Committee.</i>
Lathifah Shohib Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	- Melaksanakan pengawasan dan memberi nasihat atas kebijakan dan rencana di bidang Manajemen Risiko, Kebijakan Mutu dan Penerapan GCG. - Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola <i>Carry out supervision and provide advice on policies and plans in the field of Risk Management, Quality Policy and GCG Implementation.</i> <i>As well as the Chairman of the Risk Monitoring and Governance Committee.</i>

Rapat Dewan Komisaris

Meetings of the Board of Commissioners

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 35 kali, terbagi dalam 15 kali rapat internal Dewan Komisaris, 17 kali Rapat Gabungan bersama Direksi, dan 3 kali Rapat Tematik.

In line with their duties and responsibilities, the Board of Commissioners held 35 meetings throughout 2023, consisting of 15 internal Board of Commissioners meetings, 17 Joint Meetings with the Board of Directors, and 3 Thematic Meetings.

Tabel Kehadiran Rapat Dewan Komisaris 2023

Table of Attendance of Board of Commissioners Meeting 2023

Nama/Jabatan Name/Position	Rapat Komisaris Board of Commissioners Meeting			Rapat Gabungan Joint Meeting		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
R. Harry Hikmat Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	15	15	100%	17	17	100%
M. Amperawan Komisaris <i>Commissioner</i>	15	15	100%	17	17	100%
Indra Iskandar Komisaris <i>Commissioner</i>	15	15	100%	17	17	100%
Virgo Ereasta Jaya Komisaris <i>Commissioner</i>	15	15	100%	17	17	100%
Lathifah Shohib* Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	15	15	100%	17	17	100%



Rincian realisasi capaian KPI Dewan Komisaris tahun 2023

Details of the realization of the Board of Commissioners' KPI achievements in 2023

No.	Aspek dan Parameter Aspects and Parameters	Periode Period	Satuan Unit	Rencana Plan	Bobot (%) Weight (%)	Tahun 2023 Year 2023	
						Realisasi Realization	Skor Score
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat <i>Supervision and Advisory Aspects</i>							
1.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris Tahun 2024 <i>Develop Work Plan and Budget, and KPIs for the Board of Commissioners for 2024</i>	Tahunan <i>Annually</i>	Dokumen <i>Document</i>	1	5	1	5
2.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: <i>Provide responses/recommendations to Shareholders regarding:</i>						
a.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) <i>Company Work Plan and Budget (RKAP)</i>	Tahunan <i>Annually</i>	Surat <i>Letters</i>	1	5	1	5
b.	Laporan Tahunan Perusahaan (audited) <i>Company Annual Report (audited)</i>	Tahunan <i>Annually</i>	Surat <i>Letters</i>	1	5	1	5
c.	Analisis Kinerja Triwulanan Perusahaan <i>Analysis of the Quarterly Performance of the Company</i>	Triwulanan <i>Quarterly</i>	Surat <i>Letters</i>	3	15	3	15
3.	Persetujuan/Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas usulan aksi korporasi oleh Direksi <i>Approval/Written Response of the Board of Commissioners on the proposal of corporate action by the Board of Directors</i>	Setahun <i>One Year</i>	Hari Kerja* <i>Working Day*</i>	14	10	14	10
4.	Rapat Dewan Komisaris <i>Meeting of the Board of Commissioners</i>						
a.	Jumlah Rapat dan Tersedianya Risalah Rapat <i>Number of Meetings and Availability of Meeting Minutes</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	Kali <i>Times</i>	12	12	35	35
b.	Kehadiran Rapat <i>Meeting Attendance</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	%	100	5	100	5
5.	Monitoring tindak lanjut hasil temuan audit internal/eksternal (KAP, SPI, GCG) <i>Monitoring follow-up of internal/external audit findings (KAP, SPI, GCG)</i>	Tahunan <i>Annually</i>	Dokumen <i>Document</i>	3	6	3	6
6.	Kunjungan kerja Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners working visit</i>	Tahunan <i>Annually</i>	Kunjungan <i>Visit</i>	6	5	10	8
Sub Total I					68		94
II. Aspek Pelaporan <i>Reporting Aspects</i>							
1.	Laporan Kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris atas pemenuhan portal ITMS <i>Performance Report of the Board of Directors by the Board of Commissioners on the fulfillment of the ITMS portal</i>	Tahunan <i>Annually</i>	Dokumen <i>Document</i>	1	5	1	5
2.	Laporan Pengawasan dan Realisasi Pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Triwulanan <i>Supervision Report and Realization of KPI Implementation of the Board of Commissioners Quarterly</i>	Tahunan <i>Annually</i>	Laporan <i>Report</i>	3	6	3	6
3.	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Supervision Report</i>	Tahunan <i>Annually</i>	Laporan <i>Report</i>	1	10	1	10
4.	Evaluasi Hasil Kinerja KAP <i>Evaluation of KAP Performance Results</i>	Tahunan <i>Annually</i>	Laporan <i>Report</i>	1	5	1	5
Sub Total II					26		26



No.	Aspek dan Parameter <i>Aspects and Parameters</i>	Periode <i>Period</i>	Satuan <i>Unit</i>	Rencana <i>Plan</i>	Bobot (%) <i>Weight (%)</i>	Tahun 2023 <i>Year 2023</i>	
						Realisasi <i>Realization</i>	Skor <i>Score</i>
I. Aspek Dinamis/Lain-lain <i>Dynamic/Other Aspects</i>							
1.	Peningkatan kompetensi melalui seminar, <i>workshop</i> , dll. <i>Competency improvement through seminars, workshops, etc.</i>	Setahun <i>One Year</i>	Kali <i>Times</i>	4	3	6	5
2.	Target GCG Dewan Komisaris <i>GCG target from the Board of Commissioners</i>	Setahun <i>One Year</i>	Poin <i>Point</i>	32,5	3	32,7	3
Sub Total III					6	8	
Total I+II+III					100	128	

Realisasi Anggaran Dewan Komisaris

Realisasi Anggaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, realisasi program dan kegiatan sepanjang tahun 2023 sebesar Rp951.770.484 atau 95,2% dari anggaran Dewan Komisaris tahun 2023.

Realization of the Board of Commissioners Budget

The realization of the budget for the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners, the realization of programs and activities throughout 2023 amounted to Rp951,770,484 or 95.2% of the Board of Commissioners budget in 2023.

Remunerasi Dewan Komisaris**Remuneration of the Board of Commissioners**

Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada Komisaris atas peran yang diberikan untuk pengurusan dan pengawasan perseroan. Melalui Surat Keputusan Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) nomor DU.053/KP.310/KI-22 tanggal 16 September 2022 dan sesuai surat Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur Nomor SR-21/Wk1.MBU.F/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia Tahun 2023, jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris pada tahun 2023 sebesar Rp1.296.770.310.

Remuneration is the reward provided to the Board of Commissioners for carrying out their duties for the management and supervision of the Company. Through the Decree of the Directors of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) number DU.053/KP.310/KI-22 dated September 16, 2022 and according to the letter of the Assistant Deputy for the Manufacturing Industry Number SR-21/Wk1.MBU.F/07/2022 dated July 27, 2022 regarding the Determination of Salary of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) in 2023, the amount of remuneration received by the Board of Commissioners in 2023 is Rp1,296,770,310.



Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris

Education and/or training of the Board of Commissioners

Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa program peningkatan kompetensi dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2023 the Board of Commissioners has participated in several competency improvement programs with the following details:

No.	Nama Name	Program Peningkatan Kompetensi Competency Improvement Program	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
1	R. Harry Hikmat	<i>Sustainability For Long-Term Value Creation and ASEAN GCG Scorecard</i>	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)	26 Juli 2023 s.d. 28 Juli 2023
		<i>Sustainability for Long-Term Value Creation and ASEAN GCG Scorecard</i>		July 26, 2023 until July 28, 2023
		Manajemen Risiko Strategis tentang Penerapan Manajemen Risiko BUMN dan Anak Perusahaan BUMN	IDSurvey Institute	09 Agustus 2023
		<i>Strategic Risk Management on the Implementation of Risk Management of SOEs and SOE Subsidiaries</i>		August 09, 2023
2	M. Amperawan	Manajemen Risiko Strategis tentang Penerapan Manajemen Risiko BUMN dan Anak Perusahaan BUMN	IDSurvey Institute	09 Agustus 2023
		<i>Strategic Risk Management on the Implementation of Risk Management of SOEs and SOE Subsidiaries</i>		August 09, 2023
3	Indra Iskandar	<i>Sustainability For Long-Term Value Creation and ASEAN GCG Scorecard</i>	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)	26 Juli 2023 s.d. 28 Juli 2023
		<i>Sustainability For Long-Term Value Creation and ASEAN GCG Scorecard</i>		July 26, 2023 until July 28, 2023
		<i>GRC Integrated Information For Supervisory Board</i> <i>GRC Integrated Information For Supervisory Board</i>	BUMN Leadership & Management Institute	5 Oktober 2023 October 5, 2023
4	Lathifah Shohib	<i>Finon & Sustainability Reporting for Executive Level-Applied Financial Statement Analysis and Sustainability Reporting for Non Financial Background</i>	Pusat Rengembangan Akuntansi (PPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia	22 Juni 2023 s.d. 23 Juni 2023
		<i>Finon & Sustainability Reporting for Executive Level-Applied Financial Statement Analysis and Sustainability Reporting for Non Financial Background</i>	Centre for Accounting Development (PPA) Faculty of Economics and Business, University of Indonesia	June 22, 2023 until June 23, 2023
		Manajemen Risiko Strategis tentang Penerapan Manajemen Risiko BUMN dan Anak Perusahaan BUMN	IDSurvey Institute	09 Agustus 2023
		<i>Strategic Risk Management on the Implementation of Risk Management of SOEs and SOE Subsidiaries</i>		August 09, 2023
5	Virgo Eresta Jaya	Manajemen Risiko Strategis tentang Penerapan Manajemen Risiko BUMN dan Anak Perusahaan BUMN	IDSurvey Institute	09 Agustus 2023
		<i>Strategic Risk Management on the Implementation of Risk Management of SOEs and SOE Subsidiaries</i>		August 09, 2023
		<i>GRC Integrated Information For Supervisory Board</i> <i>GRC Integrated Information For Supervisory Board</i>	BUMN Leadership & Management Institute	5 Oktober 2023 October 5, 2023



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2023

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2023

Pada tahun 2023 Dewan Komisaris telah bertugas mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi demi kepentingan Perseroan, Pemegang Saham serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan tujuan perusahaan, arahan Pemegang Saham dan anggaran Dasar Perusahaan, dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In 2023 the Board of Commissioners has carried out supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the benefit of the Company, Shareholders and interested parties in general. The Board of Commissioners is responsible for ensuring that the Board of Directors, in all circumstances, is able to perform its duties. The Board of Commissioners regularly monitors the effectiveness of the implementation of policies and decision-making processes carried out by the Board of Directors so that they are always in accordance with the objectives of the company, the direction of the Shareholders and the Articles of Association of the Company, in carrying out its duties, the Board of Commissioners always complies with the Articles of Association and applicable laws and regulations.

Realisasi Program Kerja Dewan Komisaris 2023

Realisation of the Board of Commissioners Work Program in 2023

No	Kegiatan/Program Kerja Activity/Work Program	Bulan Ke- Month											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Analisis Kinerja Keuangan dan Operasional Perusahaan <i>Analysis of the Company's Financial and Operational Performance</i>												
2	Analisis Risiko dan Tata Kelola Perusahaan <i>Analysis of Risk and Corporate Governance</i>												
3	Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan <i>Analysis of the Company's Human Resources (HR)</i>												
4	Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris <i>Implementation of the Board of Commissioners Meeting</i>												
a.	Rapat Internal Dewan Komisaris <i>Internal Meeting of the Board of Commissioners</i>												
b.	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi <i>Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors</i>												
c.	Rapat Dewan Komisaris dengan Komite <i>Meeting of the Board of Commissioners with the Committee</i>												
d.	Rapat dengan Pemegang Saham <i>Meeting with Shareholders</i>												
e.	Pertemuan Dewan Komisaris dengan Divisi <i>Board of Commissioners Meeting with Division</i>												
5	Melakukan Pembahasan terkait Bidang Internal PT BKI <i>Conduct discussions related to the internal affairs of PT BKI</i>												
a.	Pengawasan Bidang Sistem Teknologi Informasi <i>Supervision of Information Technology Systems</i>												



No	Kegiatan/Program Kerja Activity/Work Program	Bulan Ke- Month											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	b. Pengawasan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa <i>Supervision of Goods and Services Procurement</i>												
	c. Pengawasan Bidang Mutu dan Pelayanan <i>Supervision of Quality and Services</i>												
	d. Pengawasan Bidang Sistem Pengendalian Internal <i>Supervision of Internal Control System</i>												
	e. Pengawasan Bidang Penerapan GCG <i>Supervision of GCG Implementation</i>												
	f. Pengawasan Bidang Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan <i>Supervision of Accounting Policy and Preparation of Financial Statements</i>												
	g. Pengawasan Bidang Kepatuhan Perusahaan dalam Menjalankan Peraturan <i>Supervision of the Company's Compliance in Implementing Regulations</i>												
6	Melakukan Evaluasi atas Hal-Hal yang Membutuhkan Persetujuan Dewan Komisaris <i>Evaluating Matters Requiring Board of Commissioners Approval</i>												
7	Proses Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2023 <i>KAP Appointment Process for Financial Statement Audit Year 2023</i>												
8	Monitoring Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit Internal/ Eksternal <i>Monitoring Follow-up of Internal/External Audit Results/ Findings</i>												
9	Melakukan Evaluasi Kinerja Direksi dan Pengusulan Remunerasi Direksi <i>Evaluating the Performance of the Board of Directors and Proposing the Remuneration of the Board of Directors</i>												
10	Menyusun dan Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024 <i>Preparing and Submitting the Board of Commissioners Work Plan and Budget for 2024</i>												
11	Menyampaikan Laporan/Pendapat/Saran Kepada Pemegang Saham/RUPS <i>Submitting Reports/Opinions/Suggestions to Shareholders/ RUPS</i>												
12	Menyampaikan Laporan tentang Tugas Pengawasan <i>Submit a Report on Supervisory Duties</i>												
13	Kunjungan Kerja/Monitoring/Evaluasi Kinerja Cabang <i>Working Visit/Monitoring/Evaluation of Branch Performance</i>												
14	Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris <i>Competency development of the Board of Commissioners</i>												
15	Melakukan Pembahasan atas Pengelolaan Holding Jasa Survei <i>Discussing the Management of Survey Services Holding</i>												



Direksi

Board of Directors

Direksi adalah salah satu organ Perseroan dalam struktur tata kelola PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal mengelola Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Tiap anggota Direksi dapat mengambil keputusan sesuai pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas oleh anggota Direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama. Kedudukan anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

The Board of Directors is one of the Company's organs in the governance structure of PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero. The Board of Directors is responsible for collegially managing the Company and representing the Company both inside and outside the court. Each member of the Board of Directors is allowed to make decisions in accordance with the division of duties and authority, but the implementation of duties by members of the Board of Directors remains a collective responsibility. The position of the members of the BOD including the President Director is equal. The President Director coordinates the activities of the Board of Directors.

Komposisi Direksi

Composition of the Board of Directors

Melalui keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor SK-177/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, susunan Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) per 31 Desember 2023 adalah:

Through the decision of the Minister of State-Owned Enterprises acting as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia number SK-177/MBU/07/2023 dated July 4, 2023 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Company's Board of Directors (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, the composition of the Board of Directors of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) as of December 31, 2023 is:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Arisudono	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri BUMN No. 288/MBU/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 Decree of the Minister of SOEs No. 288/MBU/12/2022 dated December 12, 2022
R Benny Susanto	Direktur Operasi Director of Operations	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. 234/MBU/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) no. 234/MBU/10/2022 dated October 21, 2022
Rozainbahri Noor	Direktur Pengembangan Sumber Daya Director of Resource Development	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.SK-226/MBU/06/2021 tanggal 2 Juli 2021 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) No.SK-226/MBU/06/2021 dated July 2, 2021
Sinung Triwulandari	Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Administration and Risk Management	Keputusan Menteri BUMN No. SK-177/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 Decree of the Minister of SOEs No. SK-177/MBU/07/2023 dated July 4, 2023
Andry Tanudjaja	Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	Keputusan Menteri BUMN No. SK-177/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 Decree of the Minister of SOEs No. SK-177/MBU/07/2023 dated July 4, 2023



Independensi Direksi

Independence of the Board of Directors

Setiap anggota Direksi wajib berpegang teguh pada prinsip independensi dalam mengambil keputusan dan memimpin jalannya Perseroan dengan mengutamakan kepentingan BKI. Untuk menjamin independensi Direksi, Perseroan memiliki Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan dan memberikan nasihat/rekomendasi kepada Direksi.

Each member of the Board of Directors must adhere to the principle of independence in making decisions and leading the course of the Company by prioritizing the interests of BKI. To ensure the independence of the Board of Directors, the Company has a Board of Commissioners that supervises and provides advice/recommendations to the Board of Directors.

Dasar Pengangkatan Direksi

Legal Basis for the Appointment of the Board of Directors

Pengangkatan Anggota Direksi didasarkan pada:

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor SK-226/MBU/06/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;
3. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor SK-234/MBU/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
4. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor SK-288/MBU/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor SK-177/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.
6. Anggaran Dasar Perusahaan

Komposisi, jumlah dan pengangkatan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis Perseroan, serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan

The appointment of members of the Board of Directors is based on :

1. *Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*
2. *Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Number SK-226/MBU/06/2021 dated July 2, 2021 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;*
3. *Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Number SK-234/MBU/10/2022 dated October 21, 2022 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);*
4. *Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Number SK-288/MBU/12/2022 dated December 13, 2022 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);*
5. *Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Number SK-177/MBU/07/2023 dated July 4, 2023 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.*
6. *Articles of Association of the Company.*

The composition, number and appointment of members of the Board of Directors are determined by the GMS by taking into account the vision, mission and strategic plan of the Company, as well as fulfilling



Anggaran Dasar Perusahaan. Struktur dan jumlah keanggotaan Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri lebih dari satu orang anggota Direksi, seorang di antaranya menjadi Direktur Utama.

the requirements set forth in the Company's Articles of Association. The structure and number of members of the Board of Directors are adjusted to the needs of the Company. In the event that the Board of Directors consists of more than one member, one of them shall be the President Director.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Duties, Authorities and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 100 UUPT, yaitu:

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi.
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan
3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.

The Board of Directors is obliged to perform and execute several duties during its term of office in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (Company Law) Article 100 of the Company Law, namely:

1. *Preparing the register of shareholders, special register, minutes of GMS and minutes of board of directors meetings.*
2. *Preparing the annual report and financial documents of the Company*
3. *Maintain all registers, minutes and financial documents of the Company.*

Sesuai dengan Pasal 102 UUPT tugas Direksi yang harus mendapat persetujuan dari RUPS dalam pengurusan kekayaan Perseroan adalah:

1. Mengalihkan kekayaan Perseroan.
2. Menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang.

In accordance with Article 102 of the Company Law, the duties of the Board of Directors that must be approved by the GMS in managing the Company's assets are:

1. *Transferring the Company's assets.*
2. *To pledge the Company's assets as debt collateral.*

Direksi wajib melaporkan saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya di Perusahaan dan perusahaan lain untuk dicatat dalam daftar khusus.

The Board of Directors must report the shares they and/or their families own in the Company and other companies to be recorded in a special register.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan mengacu peraturan eksternal baik dari Pemegang Saham maupun regulator, serta ketentuan internal mencakup Anggaran Dasar dan *Board Manual*.

The duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors in managing the Company refer to external regulations from both Shareholders and regulators, as well as internal provisions including the Articles of Association and Board Manual.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas Perusahaan, bertindak secara cermat, berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan. Direksi menggunakan wewenang dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan semata-mata hanya untuk kepentingan Perusahaan.

In carrying out its duties, the Board of Directors pays attention to the balance of interests of all parties related to the Company's activities, acts carefully, cautiously and considers various important relevant aspects. The Board of Directors uses the authority and resources of the Company solely for the benefit of the Company.



Tugas Utama Direksi

Main Duties of the Board of Directors

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.3. Menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang sehat dalam perusahaan.4. Bertugas sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS serta peraturan lainnya.5. Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS | <ol style="list-style-type: none">1. <i>Lead and manage the company in accordance with the company's purpose and objectives.</i>2. <i>Improve the efficiency and effectiveness of the company.</i>3. <i>Implement healthy corporate governance practices in the company.</i>4. <i>Perform duties in accordance with the Company's Articles of Association, GMS resolutions and other regulations.</i>5. <i>The Board of Directors is responsible to the shareholders through the GMS</i> |
|---|--|

Wewenang Direksi

Authority of the Board of Directors

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.2. Mempergunakan saran profesional.3. Menetapkan kebijakan dan ketentuan dalam kepemimpinan dan pengurusan Perusahaan.4. Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. | <ol style="list-style-type: none">1. <i>Represent the Company in and out of court.</i>2. <i>To utilize professional advice.</i>3. <i>Establish policies and provisions in the leadership and management of the Company.</i>4. <i>Perform all actions and deeds both regarding management and ownership, in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.</i> |
|--|--|

Kewajiban Direksi

Obligations of the Board of Directors

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perusahaan.2. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.3. Menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. | <ol style="list-style-type: none">1. <i>Devote their full energy, thoughts, attention and devotion to their duties, obligations and the achievement of the company's objectives.</i>2. <i>Prepare the Company's Long-Term Plan (RJPP) which is a strategic plan that contains the company's goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years, which has been signed together with the Board of Commissioners, submitted to the GMS for ratification.</i>3. <i>Prepare the draft of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) which is an annual elaboration of the RJPP and subsequently submitted to the GMS for ratification.</i> |
|--|--|



- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan. 5. Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. 6. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, dan pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. 7. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan jalannya perusahaan berupa laporan kegiatan perusahaan termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini serta setiap kali diminta oleh RUPS. 8. Menyiapkan susunan organisasi perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya. 9. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau diminta anggota Dewan Komisaris. 10. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | <ol style="list-style-type: none"> 4. To organize and maintain the company's bookkeeping and administration in accordance with the prevailing customs for a company. 5. Within 5 (five) months after the company's financial year is closed, submit the annual report signed by the Board of Directors and the Board of Commissioners to the GMS for ratification. 6. Prepare an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, and recording, storage and supervision. 7. Provide accountability and all information about the state of the company's operations in the form of reports on the company's activities including financial reports both in the form of periodic reports according to the manner and time specified in these Articles of Association and whenever requested by the GMS. 8. Prepare the company's organizational structure complete with details and duties. 9. Provide an explanation of all matters stated or requested by members of the Board of Commissioners. 10. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in these Articles of Association and those stipulated by the GMS based on the prevailing laws and regulations. |
|---|--|

Pembagian Tugas Direksi

Division of Duties of the Board of Directors

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi bertugas sesuai dengan latar belakang profesi, pengetahuan, pengalaman dan kapasitas anggota Direksi. Berdasarkan SK Direksi : DU .226c/KP008/KI-21 tanggal 7 Juli 2021 sebagai penyempurnaan dari DU 211b-KP008-KI.17 tanggal 29 Desember 2017 maka pembagian tugas Direksi sebagai berikut:

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors is assigned in accordance with the professional background, knowledge, experience and capacity of the members of the Board of Directors. Based on the Decree of the Board of Directors: DU.226c/KP008/KI-21 dated July 7, 2021 as an improvement of DU 211b-KP008-KI.17 dated December 29, 2017, the division of duties of the Board of Directors is as follows:



Pembagian Tugas Direksi sebagai berikut:

The division of Duties of the Board of Directors is as follows:

Nama Name	Uraian tugas Job Description
Arisudono Soerono Direktur Utama <i>President Director</i>	1. Penanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan perusahaan; 2. Memberikan arahan dan mengendalikan kebijakan, visi, misi, dan strategi perusahaan; 3. Mengkoordinasikan pemecahan masalah eksternal perusahaan, kebijakan perencanaan, pengendalian, pencapaian sasaran jangka panjang perusahaan, kebijakan audit peningkatan kultur dan citra perusahaan; 4. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal perusahaan; 5. Memimpin dan pembuatan kebijakan, dalam pengelolaan dan pelaporan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Program TJSL BUMN) yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan; 6. Memimpin, menyiapkan, mengarahkan, menempatkan dan melakukan pembinaan di bidang aspek legal/hukum dan kehumasan, sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan; 7. Memilah dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan/<i>stakeholders</i> atas segala sesuatu tentang perusahaan; 8. Mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan berdasarkan persetujuan anggota Direksi lainnya pada Rapat Direksi; 9. Menentukan Keputusan Direksi, apabila didalam <i>voting</i> pada Rapat Direksi terdapat jumlah suara yang sama banyak antara suara yang setuju dengan tidak setuju; 10. Memimpin dan mengkoordinator para anggota Direksi dalam melaksanakan keputusan Direksi dan mengesahkan semua Keputusan Direksi; 11. Memberikan arahan atas pengelolaan Dana Pensiun Pegawai perusahaan untuk Program Manfaat Pasti atau Juran Pasti. 1. <i>In charge of the overall management of the Company;</i> 2. <i>Providing direction and controlling the Company's policy, vision, mission and strategy;</i> 3. <i>Coordinating efforts to solve the Company's external problems, planning policies, controlling, achieving the Company's long-term goals, auditing policies, improving the Company's culture and image;</i> 4. <i>Leading and directing the implementation of the company's internal supervision and control;</i> 5. <i>Leading and making policies, in the management and reporting of SOE's Social and Environmental Responsibility programs (SOE TJSL Program) which represents the Company's commitment to sustainable development;</i> 6. <i>Leading, preparing, directing, placing and conducting guidance in the field of legal/legal aspects and public relations, in accordance with established policies;</i> 7. <i>Sorting out and providing information to stakeholders on all matters concerning the Company;</i> 8. <i>Representing the Company in and out of court based on the approval of other members of the Board of Directors at the Board of Directors Meeting;</i> 9. <i>Determining the decision of the Board of Directors, if in the voting at the Meeting of the Board of Directors there are an equal number of votes in favor and against;</i> 10. <i>Leading and coordinating the members of the Board of Directors in implementing the decisions of the Board of Directors and ratifying all decisions of the Board of Directors;</i> 11. <i>Providing guidance on the management of the company's Employee Pension Fund for Defined Benefit or Defined Contribution Programs.</i>
R. Benny Susanto Direktur Operasi <i>Director of Operations</i>	1. Bertanggung jawab atas pengelolaan aspek teknis dan operasional segmen usaha klasifikasi dan komersil perusahaan; 2. Merancang strategi teknis dan operasional usaha perusahaan berdasarkan prioritas, ketersediaan sumber daya, teknologi, dan prospek bisnis; 3. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan teknis dan operasional sesuai rencana strategi perusahaan; 4. Memimpin dan mengelola, serta mengendalikan aspek teknis dan kegiatan produksi/operasi jasa klasifikasi dan komersil secara efektif dan efisiensi dengan mengacu kepada perencanaan dan strategi perusahaan; 5. Mengelola dan mengawasi perencanaan, pengendalian serta evaluasi atas penerapan aspek teknis dan operasional pengelolaan perusahaan; 6. Membina dan mengawasi kegiatan unit kerja dan unit produksi khususnya untuk kegiatan teknik dan operasional serta menjamin lerpeliharanya peralatan produksi dan fasilitas pendukungnya; 7. Melaksanakan koordinasi dengan para pengguna jasa untuk kelancaran operasional perusahaan; 8. Memimpin dan mengarahkan seluruh aktifitas dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. 1. <i>In charge of managing the technical and operational aspects of the Company's classification and commercial business segments;</i> 2. <i>Designing technical and operational strategies for the Company's business based on priorities, availability of resources, technology, and business prospects;</i> 3. <i>Leading and directing the implementation of technical and operational activities in accordance with the company's strategic plan;</i> 4. <i>Leading and managing, as well as controlling the technical aspects and production/operation activities of classification and commercial services effectively and efficiently with reference to the company's planning and strategy;</i> 5. <i>Managing and supervising the planning, control and evaluation of the implementation of technical and operational aspects of company management;</i> 6. <i>Fostering and supervising the activities of work units and production units, especially for technical and operational activities and ensuring the maintenance of production equipment and supporting facilities;</i> 7. <i>Coordinating with service users for the smooth operation of the company;</i> 8. <i>Leading and directing all activities with regard to occupational safety and health aspects.</i>



Nama Name	Uraian tugas Job Description
Rozainbahri Noor Direktur Pengembangan Sumber Daya <i>Director of Resource Development</i>	1. Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan SDM; 2. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi & keahlian SDM khususnya yang terkait dengan pengembangan segmen jasa klasifikasi dan komersil serta pengembangan usaha sesuai peraturan yang berlaku; 3. Memimpin, menyiapkan, mengarahkan, menempatkan dan melakukan pembinaan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia, Administrasi SDM dan Organisasi sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan; 4. Mengkoordinasikan pembinaan karyawan serta peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia perusahaan khususnya dibidang teknologi; 5. Memimpin dan mengarahkan transformasi organisasi perusahaan; 6. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan kesehatan karyawan dan purna bhakti; 7. Memimpin dan mengelola kegiatan penelitian pasar serta menyiapkan konsep strategi usaha; 8. Menyiapkan dan melakukan pembinaan serta menyelenggarakan program pemasaran merancang dan melaksanakan serta mengendalikan kegiatan pengembangan kegiatan segmen usaha klasifikasi dan komersil; 9. Mengelola dan mengoptimalkan upaya-upaya pemasaran dan penjualan produk jasa yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan perencanaan dan strategi perusahaan; 10. Melakukan upaya penciptaan pasar baru dan unit-unit usaha baru, melakukan penetrasi pasar dan meningkatkan penguasaan pangsa pasar yang telah dikuasai perusahaan; 11. Memimpin dan mengendalikan kegiatan usaha baik yang dikelola secara langsung oleh perusahaan maupun melalui kerja sama sekaligus melakukan kegiatan sinergi usaha/kemitraan baik dengan badan klas asing maupun perusahaan/instansi lainnya yang terkait sesuai strategi yang ditetapkan perusahaan; 12. Memimpin, mengarahkan, dan mengelola aktifitas perencanaan serta kegiatan penelitian & pengembangan khususnya kegiatan pengkajian, penerapan, dan pengembangan peraturan teknik yang terkait dengan segmen klasifikasi dan komersil; 13. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan serta pengembangan aplikasi teknologi informasi yang disesuaikan dengan perkembangan usaha. 1. <i>In charge of HR management and development;</i> 2. <i>Providing guidance and improvement of HR competencies & expertise, especially those related to the development of classification and commercial services segments and business development in accordance with applicable regulations;</i> 3. <i>Leading, preparing, directing, placing and providing guidance in the field of Human Resources development, HR Administration and Organization in accordance with established policies;</i> 4. <i>Coordinating employee development and improving the ability and competence of the company's human resources, especially in the field of technology;</i> 5. <i>Leading and directing the transformation of the company's organization;</i> 6. <i>Conducting guidance on employee health management and purna bhakti;</i> 7. <i>Leading and managing market research activities and preparing business strategy concepts;</i> 8. <i>Preparing and conducting guidance and organizing marketing programs to design, implement and control the development activities of classification and commercial business segment activities;</i> 9. <i>Managing and optimizing marketing efforts and sales of service products produced by the company in accordance with the company's planning and strategy;</i> 10. <i>Making efforts to create new markets and new business units, penetrating the market and increasing the control of market share that has been controlled by the company;</i> 11. <i>Leading and controlling business activities both directly managed by the company and through cooperation as well as conducting business synergy/partnership activities both with foreign class bodies and other related companies/agencies in accordance with the strategy set by the company;</i> 12. <i>Leading, directing, and managing planning activities as well as research & development activities, especially the assessment, application, and development of technical regulations related to the classification and commercial segments;</i> 13. <i>Leading and directing the management and development of information technology applications adapted to business development.</i>



Nama Name	Uraian tugas Job Description
Sinung Triwulandari Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance, Administration & Risk Management</i>	1. Penanggung jawab atas pengelolaan aspek keuangan dan umum perusahaan; 2. Memimpin dan mengendalikan, pembuatan kebijakan, pengelolaan dan pelaporan keuangan mencakup kegiatan fungsi akuntansi, administrasi keuangan, dan pendanaan guna peningkatan kinerja perusahaan; 3. Melaksanakan dan pengendalian seluruh kebijakan keuangan sesuai keputusan Direksi serta melaksanakan efisiensi dan efektifitas fungsi-fungsi keuangan perusahaan; 4. Mengkoordinasikan penyusunan RKAP serta pengendalian akuntansi atas biaya-biaya, pendapatan, keuntungan/laba, dan tingkat investasi perusahaan serta menyiapkan rencana penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; 5. Mengkonsolidasikan, serta mengendalikan, dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan arus kas perusahaan berdasarkan RKAP dalam rangka usaha peningkatan efisiensi; 6. Mengarahkan dan membina pengelola keuangan perusahaan meliputi kebijakan anggaran, administrasi keuangan, akuntansi, investasi, dan pendanaan; 7. Memimpin, menyiapkan, mengarahkan, menempatkan dan melakukan pembinaan di bidang kesejahteraan, kerumahausahaan dan perlengkapan kantor sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan; 8. Mengendalikan sarana dan prasarana perusahaan secara efisien dan efektif; 9. Mengendalikan kegiatan pengelolaan <i>asset</i> perusahaan; 10. Memimpin dan mengarahkan aktifitas keamanan dan pengamanan lingkungan perusahaan; 11. Memimpin dan mengarahkan seluruh aktifitas dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja; 12. Menetapkan, mengendalikan dan melaporkan hasil pembinaan kegiatan kerja manajemen risiko dan tata kelola perusahaan (GCG); 13. Memimpin, mengarahkan, dan mengelola aktifitas manajemen risiko. 1. <i>In charge of managing the financial and general aspects of the Company;</i> 2. <i>Leading and controlling, policy making, financial management and reporting including accounting, financial administration, and funding function activities to improve the Company performance;</i> 3. <i>Implementing and controlling all financial policies in accordance with the decision of the Board of Directors and implementing the efficiency and effectiveness of the Company's financial functions;</i> 4. <i>Coordinating the preparation of the RKAP and accounting control over costs, revenue, profit, and investment levels of the company as well as preparing a plan for implementing a quality management system in accordance with established policies;</i> 5. <i>Consolidating, controlling, and supervising the preparation and implementation of the Company's cash flow based on the RKAP in order to improve efficiency;</i> 6. <i>Directing and fostering the company's financial managers including budget policies, financial administration, accounting, investment, and funding;</i> 7. <i>Leading, preparing, directing, placing and providing guidance in the field of welfare, housekeeping and office equipment in accordance with established policies;</i> 8. <i>Controlling the Company's facilities and infrastructure efficiently and effectively;</i> 9. <i>Controlling the company's asset management activities;</i> 10. <i>Leading and directing security activities and securing the company's environment;</i> 11. <i>Leading and directing all activities with regard to occupational safety and health aspects;</i> 12. <i>Establishing, controlling and reporting the results of guidance on risk management and corporate governance (GCG) work activities;</i> 13. <i>Leading, directing, and managing risk management activities.</i>
Andry Tanudjaja Direktur Hubungan Kelembagaan <i>Director of Institutional Relations</i>	1. Pembina entitas perusahaan yang berada dalam <i>holding</i> IDSurvey dalam bidang riset, pemasaran, dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); 2. Memberikan arah strategis jangka pendek maupun panjang, dan menerapkan kebijakan <i>holding</i> IDSurvey sesuai bidang dalam butir 1 di atas yang selaras dengan visi, misi, dan tata nilai IDSurvey, serta arah strategi korporasi IDSurvey; 3. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas implementasi arah strategis IDSurvey sesuai bidang dalam butir 1 di atas dalam rangka pemastian pertumbuhan serta keberlangsungan bisnis IDSurvey yang selaras dengan strategi dan target kinerja IDSurvey; 4. Meminta dan mengakses data dan dokumen Anak Perusahaan dalam rangka menjalankan peran IDSurvey sebagai <i>strategic holding</i> sesuai lingkup di bawah kewenangannya, sesuai Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemegang Saham Seri A. 5. Memimpin pengelolaan operasional kegiatan di bidang riset, pemasaran, dan TJSL PT BKI (Persero); 6. Melakukan koordinasi dan memastikan keselarasan peran dan pelaksanaan tugas Direksi Anak Perusahaan IDSurvey yang membawahi bidang riset, pemasaran, dan TJSL, dengan arah strategi dan kebijakan pengelolaan IDSurvey yang telah ditetapkan; 7. Berperan sebagai <i>Functional Director</i> dalam memimpin dan melakukan pembinaan pada fungsi riset, pemasaran, dan hubungan pelanggan di BKI Operasi; 8. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan riset di lingkungan IDSurvey, baik terkait riset bisnis, riset standar/regulasi bisnis, dan riset teknologi baru penunjang bisnis, baik dalam lingkup nasional maupun internasional; 9. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan riset pasar/<i>marketing intelligent</i>, kegiatan pemasaran dan hubungan pelanggan di lingkungan IDSurvey dalam rangka melakukan pemastian pencapaian target pendapatan secara konsolidasi;



Nama Name	Uraian tugas Job Description
	10. Memberikan arahan dan melakukan pengaturan atas upaya penciptaan produk dan layanan, penciptaan pasar dan unit-unit usaha baru, melakukan penetrasi pasar dan meningkatkan penguasaan pangsa pasar IDSURVEY, baik dalam lingkup nasional maupun internasional; 11. Membangun, membina, dan meningkatkan hubungan dengan Kementerian/Lembaga, Mitra Bisnis, Pelanggan Kunci, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendorong optimalisasi strategi bisnis dan peningkatan target produksi/komersial IDSURVEY; 12. Mengatur pembagian pelaksanaan pekerjaan unit produksi/komersial di lingkungan <i>Holding</i> yang berasal dari Pelanggan Kunci IDSURVEY; 13. Menyetujui dan/atau melakukan kemitraan strategis dengan BUMN, pihak swasta, maupun pihak institusi internasional dalam rangka pemastian pencapaian target bisnis IDSURVEY; 14. Memastikan terjadinya keberlanjutan penugasan Pemerintah yang telah berjalan, diperolehnya penugasan Pemerintah yang baru di lingkungan IDSURVEY; 15. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan TJSL di lingkungan IDSURVEY yang meliputi perancangan strategi, kebijakan, integrasi sistem dan proses serta pelaporan program TJSL BUMN; 16. Mengelola Komite TJSL <i>Holding</i> dalam rangka melakukan pemetaan dan penyusunan program TJSL <i>Holding</i>, serta melakukan evaluasi program TJSL di lingkungan IDSURVEY; 17. Membangun, membina, dan meningkatkan hubungan dengan BUMN lain, Perusahaan terafiliasi BUMN, Badan Usaha atau Badan Hukum lainnya dalam mengoptimalkan program TJSL BUMN dalam bentuk pembiayaan usaha, pemberian bantuan dan/atau pembinaan UMK. 1. <i>Supervising corporate entities within the IDSURVEY holding company in the areas of research, marketing, and Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER);</i> 2. <i>Providing both short-term and long-term strategic direction, implementing IDSURVEY holding policies in the aforementioned areas, in alignment with the vision, mission, and core values of IDSURVEY, as well as its corporate strategy;</i> 3. <i>Monitoring, evaluating, and controlling the implementation of IDSURVEY's strategic direction in the specified areas to ensure growth and business sustainability in accordance with IDSURVEY's strategy and performance targets;</i> 4. <i>Requesting and accessing data and documents from subsidiaries to fulfil IDSURVEY's role as a strategic holding, within the scope of its authority as per the Special Power of Attorney granted by Series A Shareholders;</i> 5. <i>Leading the operational management of activities in research, marketing, and CSER at PT BKI (Persero);</i> 6. <i>Coordinating and ensuring the alignment between the roles and duties of the Directors of IDSURVEY subsidiaries responsible for research, marketing, and CSER, with the established strategic direction and management policies of IDSURVEY;</i> 7. <i>Acting as the Functional Director in leading and nurturing the research, marketing, and customer relations functions at BKI Operations;</i> 8. <i>Leading and directing the management of research within IDSURVEY, encompassing business research, business standards/regulatory research, and new business-supporting technology research, both nationally and internationally;</i> 9. <i>Leading and directing the management of market research/marketing intelligence, marketing activities, and customer relations within IDSURVEY to ensure the achievement of consolidated revenue targets;</i> 10. <i>Providing direction and oversight for the creation of products and services, market creation and new business units, market penetration, and the enhancement of IDSURVEY's market share, both nationally and internationally;</i> 11. <i>Building, fostering, and enhancing relationships with Ministries/Institutions, Business Partners, Key Customers, and other stakeholders to optimise business strategies and improve IDSURVEY's production/commercial targets;</i> 12. <i>Managing the distribution of tasks within the Holding's production/commercial units arising from Key Customers of IDSURVEY;</i> 13. <i>Approving and/or engaging in strategic partnerships with State-Owned Enterprises (SOEs), private parties, and international institutions to ensure the achievement of IDSURVEY's business targets;</i> 14. <i>Ensuring the continuity of existing government assignments and secures new government assignments within the IDSURVEY environment;</i> 15. <i>Leading and directing the management of CSER within IDSURVEY, including strategy formulation, policy integration, system and process integration, and reporting of the CSER programme of SOEs;</i> 16. <i>Managing the CSER Holding Committee to map out and develop the Holding's CSER programme and evaluates CSER programmes within the IDSURVEY environment;</i> 17. <i>Building, fostering, and enhancing relationships with other SOEs, SOE-affiliated companies, and other business or legal entities to optimise the SOE CSER programme in the form of business financing, assistance provision, and/or SME development.</i>



Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi Tahun 2023

Education and/or Training of Directors in 2023

No	Nama Name	Program Peningkatan Kompetensi Competency Improvement Program	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
1	Arisudono Soerono	Forum Executive Discussion: Manajemen Risiko Strategis	IDSurvey Institute	09 Agustus 2023 August 09, 2023
		Best Practises in Stewardship And Portfolio Management	Stewardship ASIA & TEMASEK	7-9 November 2023 November 7-9, 2023
2	Rozainbahri Noor	Forum Executive Discussion: Manajemen Risiko Strategis	IDSurvey Institute	09 Agustus 2023 August 09, 2023
		GRC Integrated Information For Supervisory Board	BUMN Leadership & Management Institute	5 Oktober 2023 October 5, 2023
		Best Practises in Stewardship And Portfolio Management	Stewardship ASIA & TEMASEK	7-9 November 2023 November 7-9, 2023
3	R. Beny Susanto	Forum Executive Discussion: Manajemen Risiko Strategis	IDSurvey Institute	09 Agustus 2023 August 09, 2023
		GRC Integrated Information For Supervisory Board	BUMN Leadership & Management Institute	5 Oktober 2023 October 5, 2023
4	Sinung Triwulandari	Forum Executive Discussion: Manajemen Risiko Strategis	IDSurvey Institute	09 Agustus 2023 August 09, 2023
		GRC Integrated Information For Supervisory Board	BUMN Leadership & Management Institute	5 Oktober 2023 October 5, 2023
5	Andry Tanudjaja	Forum Executive Discussion: Manajemen Risiko Strategis	IDSurvey Institute	09 Agustus 2023 August 09, 2023
		GRC Integrated Information For Supervisory Board	BUMN Leadership & Management Institute	5 Oktober 2023 October 5, 2023

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Rapat direksi sekurang-kurangnya dilakukan satu (1) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perseroan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perseroan. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Sekretaris Perusahaan. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani pimpinan rapat dan anggota Direksi yang hadir. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat.

Board of Directors meetings are held at least once a month and at any time deemed necessary to discuss various issues and the Company's business and evaluate the Company's performance. The invitation to the meeting of the Board of Directors is made in writing by the Corporate Secretary. The call for the meeting shall include the agenda, date, time and venue. All meetings of the Board of Directors are chaired by the President Director. In the event that the President Director is absent or unable to attend, the meeting of the Board of Directors shall be chaired by another member of the Board of Directors appointed by the President Director. All decisions in the BOD meetings are made by deliberation to reach a consensus. Minutes of each meeting of the Board of Directors shall be drawn up. The minutes of the meeting shall be signed by the chairman of the meeting and the members of the Board of Directors present. Each member of the Board of Directors is entitled to receive a copy of the minutes of the Board of Directors meeting, even if he/she is not present at the meeting.



Tabel Kehadiran Rapat Direksi 2023

Table of Attendance of the Board of Directors Meeting 2023

Nama/Jabatan Name/Position	Rapat Direksi Board of Directors Meeting			Rapat Gabungan Joint Meeting		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Arisudono Direktur Utama President Director	15	15	100%	17	17	100%
R. Benny Susanto Direktur Operasi Director of Operations	15	15	100%	17	17	100%
Rozainbahri Noor Direktur Pengembangan Sumber Daya Director of Resource Development	15	15	100%	17	17	100%
Sinung Triwulandari Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Administration and Risk Management	15	15	100%	17	17	100%
Andry Tanudjaja Direktur Hubungan Kelembagaan Director of Institutional Relations	15	15	100%	17	17	100%

Penilaian Kinerja Direksi

Board of Directors Performance Assessment

Penilaian terhadap kinerja Direksi ditetapkan dalam RUPS berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) Direksi. Penilaian kinerja Direksi juga dapat dilakukan secara individu yang diajukan oleh Komite Remunerasi Komisaris atau oleh Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam RUPS, setidaknya mencakup:

1. Penyusunan KPI pada awal tahun dan evaluasi pencapaiannya.
2. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris.
3. Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perusahaan.
4. Keterlibatannya dalam penugasan-penugasan tertentu.
5. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
6. Pencapaian target perusahaan yang tertuang dalam RKAP dan Kontrak Manajemen.

Assessment of the performance of the BOD is determined in the GMS based on the Key Performance Indicator (KPI) of the BOD. The performance assessment of the BOD can also be carried out individually proposed by the Remuneration Committee of the BOC or by the BOC to be determined in the GMS, at least including:

1. Preparation of KPIs at the beginning of the year and evaluation of their achievement.
2. The level of attendance at Board of Directors Meetings and meetings with the Board of Commissioners.
3. His/her contribution to the Company's business activities.
4. His involvement in certain assignments.
5. His/her commitment in advancing the interests of the Company.
6. Achievement of company targets as stated in the RKAP and Management Contract.



Tabel Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2023

Key Performance Indicator (KPI) in Achievement 2023

No.	KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Audited 2022	
						Realisasi Realization	Skor Score
A. Economic and Social Value for Indonesia							
1	EBITDA	Rp miliar <i>Rp Billion</i>	1.415,00	Maximize	10	1.198,84	8,47
2	ROIC>=WACC	%	4,32	Maximize	5	2,76	3,19
3	BOPO	%	86,08	Maximize	5	88,04	4,89
4	Peningkatan operasional <i>excellence</i> melalui efisiensi <i>shared services</i> dari: 1. Pengadaan Bersama 2. Integrasi Lab dan Kantor Cabang 3. <i>Human Capital</i> 4. R&D Layanan Jasa	Rp Miliar <i>Rp Billion</i>	8,75	Maximize	5	10,03	5,50
	<i>Improved operational excellence through shared services efficiency from:</i> 1. <i>Joint Procurement</i> 2. <i>Lab and Branch Office Integration</i> 3. <i>Human Capital</i> 4. <i>R&D Services</i>						
5	Kolaborasi dengan pemerintah melalui dukungan program sertifikasi UMK <i>Collaboration with the government through support for MSE certification program</i>	Jumlah <i>Amount</i>	550,00	Maximize	5	1.190,00	5,50
B. Business Model Innovation							
6	Optimasi model <i>Holding</i> : 1. Transformasi menjadi <i>strategic holding</i> 2. <i>Streamlining</i> anak dan cucu	Waktu <i>Time</i>	31-Oct-23	Minimize	10	1-Sep-23	11,00
	<i>Holding model optimisation:</i> 1. <i>Transformation into strategic holding</i> 2. <i>Streamlining of subsidiaries and grandchildren</i>						
7	Pendapatan yang diperoleh dari fokus sektor: <i>Green Economy</i> , Jasa Pendukung Program TKDN, dan Pertambangan Minerba (<i>Good Mining Practice</i>) <i>Revenue generated from sector focus: Green Economy, TKDN Programme Support Services, and Good Mining Practice.</i>	Rp Miliar <i>Rp Billion</i>	123,00	Maximize	10	134,32	10,92
8	Pendapatan yang berasal dari pengembangan dan pengayaan jasa <i>End to End Service</i> sesuai <i>refocusing</i> bisnis <i>Revenue derived from the development and enrichment of End to End Services in accordance with business refocusing</i>	Rp Miliar <i>Rp Billion</i>	123,00	Maximize	10	134,32	10,92
C. Technology Leadership							
9	Tahap Lanjutan Integrasi ERP-Integrasi <i>Customer Relation Management</i> (CRM) IDSurvey <i>Advanced Stage of ERP Integration-IDSurvey Customer Relation Management (CRM) Integration</i>	Waktu <i>Time</i>	30-Sep-23	Minimize	5	29-Sep-23	5,25
10	Pendapatan yang berasal dari pengembangan bisnis melalui Digitalisasi dan <i>advanced technology</i> <i>Revenue derived from business development through Digitalisation and advanced technology</i>	Rp Miliar <i>Rp Billion</i>	106,60	Maximize	5	112,97	5,30
11	Pendapatan yang berasal dari Produk dan Layanan Digital <i>Revenue derived from Digital Products and Services</i>	Rp Miliar <i>Rp Billion</i>	38,50	Maximize	5	42,44	5,50
D. Energize Investment							
12	Pendapatan yang berasal dari kemitraan strategis pada sektor sekunder dan tersier <i>Revenue derived from strategic partnerships in the secondary and tertiary sectors</i>	Rp Miliar <i>Rp Billion</i>	123,03	Maximize	10	131,16	10,66
13	Go Global-Peningkatan Pendapatan dari <i>Representatives Offices</i> , Kantor Cabang, Anak Perusahaan di Luar Negeri <i>Go Global-Increased Revenue from Representatives Offices, Branch Offices, Overseas Subsidiaries</i>	Rp Miliar <i>Rp Billion</i>	298,73	Maximize	10	323,46	10,83



No.	KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Audited 2022	
						Realisasi Realization	Skor Score
E. <i>Unleashed Talent</i>							
14	a. Rasio milenial (<42 tahun) dalam <i>Nominal Talent</i> <i>Ratio of millennials (<42 years old) in Nominated Talent</i>	%	22,50	<i>Maximize</i>	2	30,60	2,20
	b. Rasio perempuan dalam <i>Nominated Talent</i> <i>Ratio of women in Nominated Talent</i>	%	20,50	<i>Maximize</i>	2	22,60	2,20
15	Penyelesaian <i>Roadmap</i> Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti <i>Completion of Defined Benefit Pension Fund Restructuring Roadmap</i>	Waktu <i>Time</i>	31-Dec-23	<i>Minimize</i>	3	20-Dec-23	5,06
16	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi) <i>Organ Qualification Fulfilment Ratio Risk Management (Qualification Ratio)</i>	%	90,00	<i>Maximize</i>	3	91,49	3,05
TOTAL					100	103,26	

Pencapaian Skor KPI Perseroan sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 *Audited* yaitu sebesar 103,26.

The achievement of the Company's KPI Score up to the fourth quarter of 2023 Audited is 103.26.

Remunerasi Direksi

Remuneration of the Board of Directors

Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada Direksi atas peran yang diberikan dalam pengelolaan Perseroan. Melalui Surat Keputusan Direksi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) nomor DU.053/KP.310/KI-22 tanggal 16 September 2022 dan sesuai surat Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur Nomor SR-21/Wk1. MBU.F/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun 2023, jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi pada tahun 2023 sebesar Rp9.143.200.000.

Remuneration is a reward given to the Board of Directors for their role in managing the Company. Through the Decree of the Directors of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) number DU.053/KP.310/KI-22 dated September 16, 2022 and according to the letter of the Assistant Deputy for the Manufacturing Industry Number SR-21/Wk1. MBU.F/07/2022 dated July 27, 2022 regarding the Determination of Salary of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) in 2023, the amount of remuneration received by the Board of Commissioners in 2023 is Rp9,143,200,000.

Selain remunerasi dan tunjangan perumahan, Direksi juga mendapat:

In addition to remuneration and housing allowances, Directors also receive:

1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
2. Asuransi Purna Jabatan.

1. *Religious holiday allowance;*
2. *After Position Insurance.*

Fasilitas yang diberikan kepada Direksi adalah:

Facilities provided to the Board of Directors are:

1. Fasilitas Kendaraan;
2. Fasilitas Kesehatan;
3. Fasilitas Bantuan Hukum.

1. *Vehicle facilities;*
2. *Health Facilities;*
3. *Legal Aid Facility.*

Implementation of the Board of Directors Work Program

Throughout 2023 the Company has implemented the work program which includes the Holding Work Program and the BKL Parent Work Program. The BKL Parent Work Program includes the Classification and Statutory Business Program, as well as the Functional Program, namely Research & Development and Information Technology.

Holding Work Program

The Holding Work Program includes the SDU Program, Strategic Mapping, Strategic Programs, Game Play Management, Monitoring and Evaluation (Money) IDSurvey Entities, and Events.

Sector Focus Strategic Program

No	Program Kerja <i>Work Program</i>	Realisasi <i>Realization</i>
1	Pendapatan dari <i>Green Economy</i> (fokus sektor bisnis BKI) <i>Revenue from Green Economy (BKI business sector focus)</i>	Realisasi pendapatan dari green economy hingga Desember 2023 adalah Rp6,29 Miliar. <i>The realization of revenue from green economy until December 2023 is Rp6.29 billion.</i>
2	Pendapatan dari Tata Kelola Pertambangan (fokus sektor bisnis SUCOFINDO) <i>Revenue from Mining Governance (focus of SUCOFINDO business sector)</i>	Realisasi Pendapatan Tata Kelola Pertambangan s.d. Desember 2023 sebesar Rp32,2 Miliar. <i>Realization of Mining Governance Revenue up to December 2023 amounted to Rp32.2 Billion.</i>
3	Pendapatan dari TKDN (fokus sektor bisnis Surveyor Indonesia) <i>Revenue from TKDN (Surveyor Indonesia business sector focus)</i>	Realisasi Pendapatan TKDN sd Desember 2023 mencapai Rp95,83 Miliar. <i>Realization of TKDN Revenue up to December 2023 reached Rp95.83 Billion.</i>

Strategic Mapping

No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Dekarbonisasi	1. Pengesahan PMO Dekarbonisasi 2. Pengadaan 4 personil tenaga ahli 3. Pekerjaan selesai: Pelindo, Mind ID (total pendapatan sebesar Rp557 Juta) 4. Penawaran/perolehan pekerjaan: Pertamina Power Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company, PTPN III, Mind ID, dsb 5. <i>Strategic Partnership</i> perdagangan karbon dengan Bursa Efek Indonesia (MoU dengan BEI telah dilaksanakan 27 Feb 2023)
	Decarbonization	1. <i>Endorsement of Decarbonization PMO</i> 2. <i>Hiring 4 experts</i> 3. <i>Work completed: Pelindo, Mind ID (with a total revenue of Rp557 Million)</i> 4. <i>Job bidding/acquisition: Pertamina Power Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company, PTPN III, Mind ID, etc.</i> 5. <i>Strategic Partnership on carbon trading with Indonesia Stock Exchange (MoU with IDX has been executed Feb 27, 2023)</i>



No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
2	<i>Submission IACS Membership</i>	1. Penguatan BKI sebagai RO 2. Perolehan <i>Statement of Compliance</i> (SoC) ACB 3. <i>Submission IACS membership</i> 4. Pembentukan PMO IACS dan pembuatan analisa <i>Cost & Benefit</i> IACS 5. External audit Cab. Singapore, Bitung dan Samarinda 6. VCA Cab. Batam dan Samarinda 7. Koordinasi dengan Pem RI (Hubla) terkait submisi <i>rules</i> GBS-IMO 8. <i>Level of adoption IACS technical resolution</i> ke dalam prosedur internal
	<i>Submission IACS Membership</i>	1. <i>Strengthening BKI as RO</i> 2. <i>Acquisition of ACB Statement of Compliance (SoC)</i> 3. <i>Submission of IACS membership</i> 4. <i>Establishment of IACS PMO and creation of IACS Cost & Benefit analysis.</i> 5. <i>External audit at Singapore, Bitung and Samarinda branch offices.</i> 6. <i>VCA at Batam and Samarinda branch offices.</i> 7. <i>Coordination with the Indonesian Government (Hubla) regarding the submission of GBS rules-IMO</i> 8. <i>Level of adoption of IACS technical resolution into into internal procedures</i>
3	<i>Cross Selling</i>	1. Inklusi target ke dalam KPI Unit Produksi 2. Aktifitas <i>cross-selling</i> 3. Prosedur <i>cross selling</i> diterbitkan 4. Sosialisasi metode dan prosedur telah dilaksanakan 5. BKI <i>Cross-Selling Product Workshop</i>
	<i>Cross Selling</i>	1. <i>Inclusion of targets into Production Unit KPIs</i> 2. <i>Cross-selling activities</i> 3. <i>Cross-selling procedure published</i> 4. <i>Socialization of methods and procedures has been carried out</i> 5. <i>BKI Cross-Selling Product Workshop</i>
4	Jasa Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca	1. SUCOFINDO telah mendapatkan Surat Keputusan Akreditasi untuk Perluasan Ruang Lingkup LVV NEK pada 31 Agustus 2023, saat ini telah ada dalam tahap komersialisasi 2. Total pendapatan dari jasa LVV adalah sebesar Rp3,6 Miliar
	<i>Greenhouse Gas Verification and Validation Services</i>	1. <i>SUCOFINDO has obtained an Accreditation Decree for LVV NEK Scope Expansion on August 31, 2023, currently in the commercialization stage.</i> 2. <i>Total revenue from LVV services amounted to Rp3.6 Billion</i>
5	Pengembangan Bisnis <i>Life Science</i>	1. Pengembangan Jasa <i>Air Quality Monitoring System</i> (ARMS): saat ini sedang dalam penyusunan dokumen riset dan penyempurnaan prototype berdasarkan hasil coba sebelumnya; 2. Pengembangan jasa <i>Smart Health Care Monitoring System</i> (SHCM-System) dilanjutkan dengan rencana pertemuan dengan potensial mitra kerja; 13 No. Program Kerja Realisasi 3. Rapat koordinasi dengan Lab Cibitung dalam mendukung pembuatan kajian potensi jasa baru di sektor <i>life</i>
	<i>Life Science Business Development</i>	1. <i>Development of Air Quality Monitoring System (ARMS) Services: currently in the preparation of research documents and refinement of prototypes based on previous trial results;</i> 2. <i>Development of Smart Health Care Monitoring System (SHCM-System) services continued with a meeting plan with potential partners;</i> 3. <i>Coordination meeting with Cibitung Lab to support the creation of a study of potential new services in the life sector</i>
6	Pengembangan Bisnis Pengujian Baterai Mobil Listrik	Riset potensial mitra atau penyedia jasa yang memiliki keahlian dalam membaca konsumsi baterai dan penggunaan kendaraan listrik, khususnya yang bergerak dalam bidang GPS <i>Tracker</i> /sensor dan proses pengembangan <i>mockup</i> /prototype, serta analisis kebutuhan riset untuk alat/konsep tersebut.
	<i>Electric Car Battery Testing Business Development</i>	<i>Research potential partners or service providers who have expertise in reading battery consumption and use of electric vehicles, especially those engaged in the GPS Tracker/sensor and mockup/prototype development process, as well as analyzing research needs for these tools/concepts.</i>



No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
7	Pengembangan Lab Pelumas & Lingkungan	Lab Pelumas Pencapaian <i>Strategic Mapping</i> Pengembangan Lab Pelumas pada tahun 2023 sebesar 100%. Pencapaian ini dipengaruhi oleh telah terbitnya peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 4057 tahun 2020 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib. <i>Milestone</i> dan fokus selanjutnya program ini, yaitu: 1. Penetrasi pasar sertifikasi produk pelumas 2. Komersialisasi jasa sertifikasi produk pelumas 3. Pemenuhan target hasil tahun 2023 Lab Lingkungan Pencapaian <i>Strategic Mapping</i> Pengembangan Lab Lingkungan pada tahun 2023 sebesar 100%. Pencapaian ini dipengaruhi oleh telah tersedianya peralatan dan fasilitas lab lingkungan di Cabang Balikpapan dan Cabang Makassar. <i>Milestone</i> dan fokus selanjutnya program ini, yaitu: 1. <i>Training</i>, sertifikasi kompetensi & rekrutmen personal. 2. Pemenuhan target hasil tahun 2023 <i>Lubricants & Environment Lab Development</i> Lubricants Lab The achievement of <i>Strategic Mapping</i> of Lubricant Lab Development in 2023 was 100%. This achievement was influenced by the issuance of the Ministry of Industry regulation No. 4057 of 2020 concerning the Appointment of Conformity Assessment Institutions in the Framework of Mandatory Implementation of Indonesian National Standards. The next milestones and focus of this program are: 1. Market penetration of lubricant product certification 2. Commercialization of lubricant product certification services 3. Fulfillment of 2023 target results Environmental Lab The achievement of the Environmental Lab Development <i>Strategic Mapping</i> in 2023 was 100%. This achievement is influenced by the availability of environmental lab equipment and facilities in Balikpapan Branch and Makassar Branch. The next milestones and focus of this program are: 1. Training, competency certification & personal recruitment. 2. Fulfillment of 2023 results target
8	Verifikasi Teknis Halal Impor	Pencapaian <i>Strategic Mapping</i> Verifikasi Teknis Produk Halal Impor pada tahun 2023 sebesar 100%. Pencapaian ini dipengaruhi oleh telah selesainya Proses Bisnis Verifikasi Teknis Produk Halal Impor. <i>Technical Verification of Imported Halal</i> The achievement of <i>Strategic Mapping</i> of Technical Verification of Imported Halal Products in 2023 is 100%. This achievement was influenced by the completion of the Business Process for Technical Verification of Imported Halal Products.
9	Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM)	Pencapaian <i>Strategic Mapping</i> Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) pada tahun 2023 sebesar 100%. Pencapaian ini dipengaruhi oleh telah dimulainya target utama I-SIM yaitu Komersialisasi Jasa I-SIM dengan diperolehnya kontrak <i>Traceability</i> Produk Kelapa Sawit dengan <i>European Forest Institute</i> (EFI). <i>Milestone</i> dan fokus selanjutnya program ini, yaitu: 1. <i>Branding & Pemasaran</i>: Diversifikasi layanan dan penguatan kompetensi 2. Pengembangan komersialisasi Bisnis 3. Pengembangan Platform <i>Traceability</i> Kopi 4. Pemenuhan target hasil komersialisasi tahun 2023 sebesar Rp40 Miliar. <i>Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM)</i> The achievement of <i>Strategic Mapping</i> Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) in 2023 was 100%. This achievement was influenced by the commencement of the main target of I-SIM, namely the Commercialization of I-SIM Services by obtaining a Palm Oil Product Traceability contract with the European Forest Institute (EFI). The next milestones and focus of this program are: 1. Branding & Marketing: Diversification of services and strengthening competencies 2. Business commercialization development 3. Development of Coffee Traceability Platform 4. Fulfillment of the 2023 commercialization result target of Rp40 Billion.



Program Kerja BKI Induk

Program kerja BKI Induk terdiri dari:

1. Program Bisnis: meliputi kegiatan Klasifikasi dan Statutoria
2. Program Fungsional meliputi:
 - 2.1. Program Teknologi Informasi, dan
 - 2.2. Program Riset & Pengembangan

1. Program Bisnis Klasifikasi & Statutoria

BKI Parent Entity Work Program

The BKI Parent Entity work program consists of:

1. Business Program: includes Classification and Statutory activities
2. Functional Program, divided into two programs:
 - 2.1. Information Technology programs, and
 - 2.2. Research & Development

1. Classification & Statutory Business Program

No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Kegiatan Survei yaitu a. Jangkauan Peraturan b. Jangkauan Operasi	Kegiatan Survei yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023, antara lain: a. Jangkauan Peraturan sebanyak 23.368 kegiatan; b. Jangkauan Operasi sebanyak 29.014 kegiatan. Kapal yang berlaku atau aktif pada posisi Tahun 2023 berjumlah 15.383 unit. Dalam kegiatan survei di lapangan, BKI menerima 24.805 permintaan survei yang terdiri dari 1.479 survei dalam rangka penerimaan klas dan 23.326 survei dalam rangka mempertahankan klas. Hal ini mencerminkan efektifnya penerapan <i>Automatic Class Suspension</i> dengan aktif menginformasikan survei status secara elektronik maupun pengiriman surat. <i>Survey activities are</i> a. <i>Regulatory Reach</i> b. <i>Operation Reach</i>
2	Aktivitas Approval, Audit dan Survey Statutoria yaitu: 1. ISM Code-Doc Pre Issued 2. ISM Code-SMC Pre Issued 3. ISM Code-Doc Inisial Audit 4. ISM Code-Doc Renewal Audit 5. ISM Code-Doc Annual Audit 6. ISM Code-Intermediate Audit 7. ISM Code-Doc Additional 8. ISM Code-Doc Appro/Rev 9. ISM Code-SMC Inisial 10. ISM Code-SMC Renewal 11. ISM Code-SMC Intermediate 12. ISM Code-SMC Additional 13. ISPS-Pre/Issued 14. ISPS-Inisial 15. ISPS-Renewal 16. ISPS-Intermediate 17. ISPS-Additional 18. ISPS-Appro/SSP 19. Load Line	Aktivitas <i>approval</i> , audit dan <i>Survey Statutoria</i> terealisasi yaitu: 1. ISM Code-Doc Pre Issued 23 Aktivitas 2. ISM Code-SMC Pre Issued 198 Aktivitas 3. ISM Code-Doc Inisial Audit 26 Aktivitas 4. ISM Code-Doc Renewal Audit 19 Aktivitas 5. ISM Code-Doc Annual Audit 84 Aktivitas 6. ISM Code-Intermediate Audit 0 Aktivitas 7. ISM Code-Doc Additional 15 Aktivitas 8. ISM Code-Doc Appro/Rev 39 Aktivitas 9. ISM Code-SMC Inisial 187 Aktivitas 10. ISM Code-SMC Renewal 126 Aktivitas 11. ISM Code-SMC Intermediate 146 Aktivitas 12. ISM Code-SMC Additional 85 Aktivitas 13. ISPS-Pre/Issued 19 Aktivitas 14. ISPS-Inisial 11 Aktivitas 15. ISPS-Renewal 10 Aktivitas 16. ISPS-Intermediate 6 Aktivitas 17. ISPS-Additional 3 Aktivitas 18. ISPS-Appro/SSP 58 Aktivitas 19. Load Line 14.200 Aktivitas <i>Statutory Approval, Audit and Survey activities are:</i> 1. <i>ISM Code-Pre-issued documents</i> 2. <i>ISM Code-SMC Pre Issued</i> 3. <i>ISM Code-Initial Audit Document</i> 4. <i>ISM Code-Audit Document Update</i>



No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
5.	ISM Code-Annual Audit Document Audit	5. ISM Code-Doc Annual Audit 84 Activities
6.	ISM Code-Intermediate Audit	6. ISM Code-Intermediate Audit 0 Activities
7.	ISM Code-Additional Document	7. ISM Code-Additional Documents 15 Activities
8.	ISM Code-Appro/Rev Document	8. ISM Code-Doc Appro/Rev 39 Activities
9.	ISM Code-Initial SMC	9. ISM Code-SMC Initial 187 Activities
10.	ISM Code-SMC Update	10. ISM Code-SMC Update 126 Activities
11.	ISM Code-Intermediate SMC	11. ISM Code-Intermediate SMC 146 Activities
12.	ISM Code-Additional SMC	12. ISM Code-Additional SMC 85 Activities
13.	ISPS-Pre/Published	13. ISPS-Pre/Published 19 Activities
14.	ISPS-Initial	14. ISPS-Initial 11 Activities
15.	ISPS-Update	15. ISPS-Renewal 10 Activities
16.	ISPS-Intermediate	16. ISPS-Intermediate 6 Activities
17.	ISPS-Supplementary	17. ISPS-Additional 3 Activities
18.	ISPS-Appro/SSP	18. ISPS-Appro/SSP 58 Activities
19.	Load Line	19. Loading Lines 14,200 Activities

2. Program Fungsional

2.1. Teknologi Informasi

2.1.1. Pengembangan aplikasi untuk internal

No	Program Kerja Work Program	Progres Pelaksanaan Implementation Progress	Keterangan Description
1	Sikom V2	100%	Go Live
2	Helpdesk	100%	Go Live
3	Monitoring Data Hubla	100%	Sudah Go Live Already Go Live
4	CRM v1	100%	Sudah Go Live Already Go Live
5	E-Certificate	100%	Pengembangan sudah selesai ----- Trial oleh user ----- Development has been completed ----- Trial by user
6	NOGS Tahap 1 NOGS Phase 1	100%	E-Reporting untuk PKBB dan Periodik untuk semua jenis kapal kecuali untuk jenis kapal Tanker, Bulk Carrier, Gas Carrier, Fixed Offshore Structure dan Floating Offshore Structure Full. ----- E-Reporting for PKBB and Periodic for all ship types except for Tanker, Bulk Carrier, Gas Carrier, Fixed Offshore Structure and Floating Offshore Structure Full ship types. Implementasi diberlakukan untuk agenda survei kapal periodik dan PKBB yang ditutup pada dan setelah 01 Januari 2024. ----- Implementation applies to periodic vessel survey and PKBB agendas closed on and after January 01, 2024.
7	Dashboard Management v1.5	100%	Pengembangan sudah Development already ----- Data yang sudah live antara lain data operasi, financial highlight, kinerja laba rugi, kinerja cabang serta monitoring piutang. ----- Live data includes operating data, financial highlights, profit and loss performance, branch performance and accounts receivable monitoring.



No	Program Kerja Work Program	Progres Pelaksanaan Implementation Progress	Keterangan Description
8	CRM v2	95%	Penyesuaian format <i>invoice</i> <i>Adjustment of invoice format</i> Testing dengan SAP <i>Testing with SAP</i> Persiapan <i>testing</i> produksi <i>Preparation for production testing</i>
9	BKI TIME v2	90%	Modul absensi sudah selesai <i>Attendance module has been completed</i> Penyelesaian modul lainnya <i>Completion of other modules</i>
10	HRMS	90%	Ditargetkan <i>Go Live</i> di triwulan I 2024 <i>Targeted Go Live in the first quarter of 2024</i>
11	E-Reporting (Motion)	80%	Full Cycle Test <i>Full Cycle Test</i> Penyesuaian Modul PRB <i>DRR Module Adjustment</i>
12	RICO	80%	Full Cycle Test <i>Full Cycle Test</i> Penyesuaian Modul PRB <i>DRR Module Adjustment</i>
13	Pelahun	75%	Sudah dilakukan demo ke <i>user</i> <i>Demo has been done to the user</i> Penyesuaian alur proses <i>Process flow adjustment</i>
14	Aplikasi PAD	10%	Aplikasi di <i>hold</i> , menunggu <i>dashboard</i> manajemen selesai <i>Application on hold, waiting for management dashboard to be completed</i>

2.1.2. Pengembangan aplikasi untuk eksternal

2.1.2. Application development for external

No	Program Kerja Work Program	Progres Pelaksanaan Implementation Progress	Keterangan Description
1	Platform Green Port	100%	<i>Go Live</i>
2	CRM Holding	100%	Pengetesan aplikasi <i>Application testing</i> Review migrasi data <i>Data migration review</i>
3	MyBKI	90%	Review Aplikasi Review data migrasi Application Review <i>Review of migration data</i>
4	SIMLAB	60%	Progres Aplikasi 90% Pengerjaan di <i>hold</i> menunggu penyelarasan kode jasa HJS 90% Application Progress <i>Work on hold pending alignment of HJS service codes</i>



2.1.3. Program kerja dan progres pelaksanaan operasional TI

2.1.3 Work program and progress of IT operational implementation

No	Program Kerja Work Program	Progres Pelaksanaan Implementation Progress	Keterangan Description
1	Pengadaan ATS SAP <i>SAP ATS Procurement</i>	100%	Proses pengadaan telah selesai dilakukan <i>Procurement process has been completed</i>
2	Genset Khusus Data Center BKi <i>BKi Data Centre Dedicated Genset</i>	100%	Sudah Terpasang dan dilakukan pengetesan pada tgl 25 Januari 2023 <i>Installed and conducted the testing on January 25, 2023</i>
3	Maintenance PAC Data Center <i>Data Centre PAC Maintenance</i>	100%	Proses pengadaan telah selesai dilakukan <i>The procurement process has been completed</i>
4	Maintenance Fire Suppression Data Center <i>Maintenance of Fire Suppression Data Center</i>	100%	Proses pengadaan telah selesai dilakukan <i>The procurement process has been completed</i>
5	Maintenance UPS Data Center <i>Maintenance of UPS Data Center</i>	100%	Proses pengadaan telah selesai dilakukan <i>The procurement process has been completed</i>
6	Peremajaan Access Switch dan Access Point <i>Access Switch and Access Point Rejuvenation</i>	100%	Pemasangan access point dan switch <i>Installation of access points and switches</i>
7	Implementasi BKi Cloud Drive <i>BKi Cloud Drive Implementation</i>	100%	Implementasi telah dilakukan <i>Implementation has been done</i>
8	Perpanjangan Cloud AWS SAP <i>SAP AWS Cloud Renewal</i>	100%	Perpanjangan AWS SAP selama 3 tahun <i>AWS SAP renewal for 3 years</i>
9	Implementasi SDWAN & Astinet <i>SDWAN & Astinet Implementation</i>	100%	Implementasi SDWAN & Astinet di 23 Cabang <i>SDWAN & Astinet implementation in 23 branches</i>
10	Maintenance Server Fujitsu & IBM <i>Fujitsu & IBM Server Maintenance</i>	100%	Maintenance telah Selesai dilakukan <i>Maintenance has been completed</i>
11	Perpanjangan Manage Operation SAP <i>SAP Manage Operation Extension</i>	100%	Pekerjaan telah Selesai dilakukan <i>Work has been completed</i>
12	Pengadaan Laptop Tahap 1 <i>Procurement of Laptop Phase 1</i>	100%	Pekerjaan telah Selesai dilakukan <i>Work has been completed</i>
13	Pengadaan Join Development <i>Procurement of Join Development</i>	100%	Kajian dan TOR telah dilakukan, menunggu proses pengadaan vendor joint development oleh Divisi Umum <i>Study and TOR have been conducted, waiting for the procurement process of vendor joint development by General Division</i>
14	Pentest Aplikasi <i>Application Pentest</i>	100%	Pentest Firewall CRM, Sikom sedang dilakukan <i>Pentest Firewall CRM, Sikom is being conducted</i>
15	Pengadaan Laptop Tahap 2 <i>Laptop Procurement Phase 2</i>	100%	Proses Instalasi <i>Installation Process</i>
16	Renewal Office 365 <i>Office 365 Renewal</i>	100%	Penyusunan TOR dan Kajian <i>Preparation of TOR and Study</i>
17	Implementasi SOC Tools <i>SOC Tools Implementation</i>	100%	POC telah selesai <i>POC has been completed</i> Proses pengadaan di Divisi Umum <i>Procurement process in General Division</i>
18	Pengadaan NAS DRC <i>Procurement of NAS DRC</i>	100%	Penyusunan TOR dan Kajian <i>Preparation of TOR and Study</i> Aanwijzing <i>Bidding</i>



No	Program Kerja Work Program	Progres Pelaksanaan Implementation Progress	Keterangan Description
19	Penambahan <i>Node</i> HCI DC-DRC <i>DC-DRC HCI Node Addition</i>	80%	Penyusunan TOR dan Kajian <i>Preparation of TOR and Study</i> Menunggu proses pengadaan di Divisi Pengadaan dan Manajemen Aset <i>Awaiting procurement process in Procurement and Asset Management Division</i>
20	Desain Jaringan Wifi Cabang <i>Branch Wifi Network Design</i>	100%	50% cabang sudah mengirimkan <i>layout</i> kantor cabang <i>50% of branches have submitted branch office layouts</i>

2.1.4. Program Kerja dan Progres Pelaksanaan Organisasi TI

2.1.4 Work Program and Implementation Progress of IT Organization

No	Program Kerja Work Program	Progres Pelaksanaan Implementation Progress	Keterangan Description
1	Pembentukan IT <i>Steering Committee</i> <i>Establishment of IT Steering Committee</i>	100%	IT <i>Steering Committee</i> telah dibentuk dan ditandatangani tangani oleh Direksi <i>IT Steering Committee has been established and endorsed by the Board of Directors.</i>
2	<i>Review Master Plan TI</i> <i>Review of IT Master Plan</i>	100%	<i>Review</i> telah selesai dilakukan <i>Review has been completed</i>
3	Audit Eksternal ISO 20001:2018 <i>ISO External Audit 20001:2018</i>	100%	Audit telah selesai dilakukan <i>Audit has been completed</i> BKI mempertahankan ISO 20001:2018 <i>BKI maintains ISO 20001:2018</i>
4	Audit Eksternal ISO 27001:2013 <i>ISO External Audit 27001:2013</i>	100%	Audit telah selesai dilakukan <i>Audit completed</i> BKI mempertahankan ISO 27000:2013 <i>BKI maintains ISO 27000:2013</i>
5	MoU ID Survey-BSSN <i>MoU ID Survey-BSSN</i>	95%	Penandatanganan terdiri dari 2 PKS dan 1 MoU yang dilakukan dengan metode <i>desk to desk</i> <i>The signing consisted of 2 PKS and 1 MoU which was carried out by the desk-to-desk method</i> PKS Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik sudah dilakukan <i>Agreement on the Utilisation of Electronic Certificates on Electronic Systems has been carried out</i> PKS Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber sudah diserahkan ke BSSN untuk ditandatangani <i>Cybersecurity Capability Improvement MCC has been submitted to BSSN for signing</i>
6	Pembentukan CSIRT <i>CSIRT Establishment</i>	0%	Menunggu MoU ID Survey dan BSSN selesai <i>Waiting for the MoU between ID Survey and BSSN to be completed</i>



2.2 Program Riset & Pengembangan

2.2 Research & Development Program

2.2.1 Kegiatan Penelitian

2.2.1 Research Activities

No	Judul Kegiatan Penelitian Title of Research Activity
A. Kegiatan Penelitian yang Belum Selesai atau Masih Berlangsung: <i>Unfinished or Ongoing Research Activities:</i>	
1	Kajian Potensi Sertifikasi dan Asesmen Galangan beserta Industri Komponen Material (10%) <i>Assessment and Certification Potential Study of Shipyard and Material Component Industry (10%)</i>
2	Pengembangan bisnis <i>ship recycle</i> untuk pemenuhan HKC (10%) <i>Ship recycle business development for HKC fulfilment (10%)</i>
3	Kegiatan riset dukungan kesiapan sertifikasi galangan dan industri maritime (16%) <i>Research activities supporting the readiness of shipyard certification and the maritime industry (16%)</i>
4	Pengembangan bisnis Green Shipping Advisory Program di Indonesia (20%) <i>Green Shipping Advisory Program business development in Indonesia (20%)</i>
5	Pengembangan Bisnis Klasifikasi Kapal Domestik (70%) <i>Domestic Ship Classification Business Development (70%)</i>
6	Pengembangan EQUATR Apps dan dukungan teknis pengembangan bisnis serta kerjasama strategis layanan Dekarbonisasi IDSurvey (70%) <i>EQUATR Apps development and business development technical support as well as strategic cooperation of IDSurvey Decarbonisation service (70%)</i>
7	Kegiatan kerjasama penelitian Kriteria <i>Crashworthiness</i> untuk kapal patroli perikanan (70%) <i>Cooperative research activities on Crashworthiness Criteria for fisheries patrol vessels (70%)</i>
8	<i>Outlook</i> Bisnis LSPro SNI Sektor Kemaritiman (70%) <i>LSPro SNI Business Outlook for Maritime Sector (70%)</i>
9	Pengelolaan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) untuk Terminal Khusus dan Terminal Untuk Keperluan Sendiri (70%) <i>Management of SBNP (Navigational Aids) for Special Terminals and Terminals for Own Use (70%)</i>
10	Kegiatan kerjasama penelitian Pengukuran emisi gas buang kapal dengan menggunakan Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA)-Skema KEDAIREKA (80%) <i>Research cooperation activities Measurement of ship exhaust emissions using Unmanned Aircraft (PUTA)-KEDAIREKA Scheme (80%)</i>
B. Kegiatan Penelitian yang Telah Selesai: (100%) <i>Completed Research Activities: (100%)</i>	
1	Studi <i>safety regulation</i> kapal pengangkut <i>Electric Vehicle</i> pada kapal roro-roto ferry maupun kargo (baterai) <i>Safety regulation study of Electric Vehicle carriers on roro- roro ferry and cargo (battery) vessels</i>
2	Circular penanganan dan pemeriksaan kapal terbakar kelas BKI <i>Circular on the handling and inspection of BKI class burning ships</i>
3	Kegiatan riset kerja sama BKI Orela Shipyard terkait kapal Dual Fuel <i>BKI Orela Shipyard cooperation research activities related to Dual Fuel ships</i>
4	Pembimbingan mahasiswa dari beberapa universitas dalam penyelesaian tugas akhir (S1 & S2) <i>Mentoring students from several universities in completing their final assignments (S1 & S2)</i>
5	Pengembangan Bisnis <i>Convention for Safe Containers 1972</i> <i>Convention for Safe Containers 1972 Business Development</i>
6	Pengembangan Bisnis Sertifikasi Kapal/Boat Material Non Baja (PE) <i>Ship/Boat Certification Business Development Non-Steel Material (PE)</i>
7	Pengembangan Tata Kelola Inovasi (Perancangan Probis) <i>Development of Innovation Governance (Probis Design)</i>

2.2.2. Pengembangan Peraturan & Pengembangan Aplikasi yang Belum Selesai

2.2.2 Regulatory Development & Unfinished Application Development

No	Nama <i>Working Group</i> Working Group Name	Progres Progress
1	<i>NE 2023 Guidelines for the Design, Construction and Testing of Pumps (Pt.1 Vol.V)</i>	25%
2	NE 2024 Petunjuk Penilaian Risiko Kapal Domestik <i>NE 2024 Domestic Vessel Risk Assessment Guidelines</i>	45%

2.2.3. Pengembangan Peraturan & Pengembangan Aplikasi
yang Telah Selesai2.2.3. Regulatory Development & Development of Completed
Application

No	Nama Working Group Working Group Name	Progres Progress
1	IACS Monitoring tahun 2023 <i>IACS Monitoring in 2023</i>	100%
2	Pemutakhiran Prosedur PPA (PRO B-32) <i>PPA Procedure Update (PRO B-32)</i>	100%
3	<i>Guidance on Review and Approval of Novel Design (Pt.1, Vol.Z)</i>	100%
4	<i>Guidance for Design Wave Loads on Ship Structures (Pt.1, Vol. AA)</i>	100%
5	<i>Guidance for Sloshing Assessment (Pt.1, Vol. AB)</i>	100%
6	Peraturan Kapal Kayu (Bag.3 Vol.VI) <i>Timber Vessel Regulations (Part.3 Vol.VI)</i>	100%
7	New 2023 Petunjuk Penilaian Risiko Kapal Domestik (Bag.8 Vol. A) <i>New 2023 Domestic Ship Risk Assessment Directive (Pt.8, Vol.A)</i>	100%
8	Obsolete 2023 Petunjuk Masuk Ruang Tertutup (Pt.0, Vol.A) <i>Obsolete 2023 Enclosed Space Entry Directive (Pt.0, Vol.A)</i>	100%
9	<i>RCN 2 2023 Rules for Classification and Survey (Pt.1, Vol.I)</i>	100%
10	<i>RCN 3 2023 Rules for Hull (Pt.1, Vol.II)</i>	100%
11	<i>RCN 3 2023 Rules for Machinery Installations (Pt.1, Vol.III)</i>	100%
12	<i>RCN 2 2022 Rules for Electrical Installations (Pt.1 Vol. IV)</i>	100%
13	<i>RCN 3 2022 Rules for Materials (Pt.1, Vol.V)</i>	100%
14	<i>NE 2023 Rules for Ships Carrying Dangerous Chemical in Bulk (Pt.1, Vol.X)</i>	100%
15	<i>RCN 2 2023 Rules for Approval of Manufactures and Service Suppliers (Pt. 1, Vol. XI)</i>	100%
16	<i>RCN 2 2023 Rules for Bulk Carrier and Oil Tanker (Pt.1, Vol.XVII)</i>	100%
17	<i>GCN 1 2023 Guidance for the Corrosion Protection and Coating System (Pt. 1, Vol. G)</i>	100%
18	<i>Obsolete 2023 Guidance for Mass Produced Engine (Pt.1, Vol.K)</i>	100%
19	<i>GCN 3 2023 Guidance for the Approval and Type Approval of Materials & Equipment for Marine Use (Pt. 1 Vol. W)</i>	100%
20	<i>GCN No. 3 2023 Guidance for Code and Convention Interpretations (Pt. 1, Vol. Y)</i>	100%
21	<i>RCN 1 2023 Rules for High Speed Craft (Pt.3, Vol.III)</i>	100%
22	<i>GCN 1 2023 Guidelines for Certification of Loading Computer System (Pt. 4, Vol. 1)</i>	100%
23	<i>Guidelines for Maritime Cybersecurity (Pt.4, Vol.4)</i>	100%
24	<i>RCN 2 2023 Rules for Classification and Survey (Pt.5, Vol.I)</i>	100%
25	<i>Corr 1 2023 Rules for Mobile Offshore Unit (Pt.5, Vol.VI)</i>	100%
26	<i>Guidance for Marine Industry (Pt.1, Vol.AC)</i>	100%
27	<i>CE 2024 Rules for Classification and Survey (Pt.1, Vol.I)</i>	100%
28	<i>CE 2024 Rules for Hull (Pt.1, Vol.II)</i>	100%
29	<i>CE 2024 Rules for Machinery Installations (Pt.1, Vol.III)</i>	100%
30	<i>CE 2024 Rules for Electrical Installations (Pt.1 Vol. IV)</i>	100%
31	<i>CE 2024 Rules for Materials (Pt.1, Vol.V)</i>	100%
32	<i>CE 2024 Rules for Welding (Pt.1, Vol.VI)</i>	100%
33	<i>CE 2024 Rules for Automation (Pt.1, Vol.VII)</i>	100%
34	<i>RCN 1 2023 Rules for Container Ships (Pt.1, Vol.XVIII)</i>	100%



No	Nama Working Group Working Group Name	Progres Progress
35	CE 2023 Rules for Bulk Carrier and Oil Tanker (Pt.1, Vol.XVII)	100%
36	NE 2024 Guidance for Class Notations (Pt.0 Vol.B)	100%
37	NE 2023 Rules for Mobile Offshore Units (Pt.5 Vol.VI)	100%
38	RCN 3 2023 Rules for Classification and Surveys (Pt.1, Vol.I)	100%
39	RCN 3 2023 Rules for Hull (Pt.1 Vol. II)	100%
40	RCN 4 2023 Rules for Machinery Installations (Pt.1, Vol.III)	100%
41	RCN 4 2023 Rules for Electrical Installations (Pt.1, Vol. IV)	100%
42	RCN 4 2023 Rules for Materials (Pt.1, Vol. V)	100%
43	Corr. 1 2023 Rules for Welding (Pt.1, Vol. VI)	100%
44	RCN 1 2023 Rules for Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (Pt. 1, Vol. IX)	
45	RCN 1 2023 Rules for Bulk Carrier and Oil Tanker (Pt.1 Vol. XVII)	
46	RCN 2 2023 Rules for Classification and Surveys (Pt.5, Vol.I)	
47	GCN 4 2023 Guidelines for the Uses of Gas as Fuel for Ships (Pt. 1, Vol. 1)	100%
48	GCN 4 2023 Guidelines for the Approval and Type Approval of Materials and Equipment for Marine Use (Pt. 1 Vol. W)	100%
49	GCN 2 2023 Guidance for Code and Convention Interpretation (Pt.1 Vol. Y)	100%
50	New 2024 Guidelines for Thermoplastic Vessels (Pt.3 Vol.2)	100%
51	CE 2024 Rules for Classification and Survey (Pt.5, Vol.I)	100%
Aplikasi Klasifikasi: Classification Applications:		
1	UT Report Software	5%
2	Dewaruci Structure/Machinery	12%
3	Rules Management System (RMS) v3.0	100%
4	E-reporting	100%
5	BKI iSee	100%
6	Zee for Class (ver.2)	100%

2.2.4. Kegiatan Dukungan dan Lainnya yang Dilaksanakan dan diikuti oleh Personil PPA

2.2.4. Support and Other Activities Implemented and Participated in by PPA Personnel

No	Kegiatan Dukungan Support Activities	Unit Kerja/Instansi Terkait Related Work Units/Agencies
1	Agent of Change (AOC), Kiper Budaya, Covid Ranger Agent of Change (AOC), Culture Keeper, Covid Ranger	MHC
2	Investigator input PPA (Perkembangan Aturan IACS) PPA input investigator (IACS Rule Development)	PPA R&D
3	Investigasi & penelitian terkait kecelakaan kapal/bang. apung Investigation & research related to ship/floating building accidents	Riset R&D
4	ISSC Committee III.1 Ultimate Strength ISSC Committee III.1 Ultimate Strength	R&D
5	Reviewer investigasi masukan teknik/nota dinas dari unit lain Reviewer of investigation of technical input/official memorandum from other units	PPA R&D



No	Kegiatan Dukungan Support Activities	Unit Kerja/Instansi Terkait Related Work Units/Agencies
6	Kajian HDPE Boat <i>HDPE Boat Study</i>	Riset R&D
7	Tim 9 PKB <i>Team 9 PKB</i>	SP BKI
8	Tim penelitian <i>2nd generation intact stability</i> <i>2nd generation intact stability research team</i>	Riset R&D
9	Studi mesin tempel untuk kapal $L \leq 24$ m <i>Outboard engine study for vessels $L \leq 24$ m</i>	Riset R&D
10	Asesor SiPAT <i>SiPAT Assessor</i>	R&D
11	Penelitian Kajian Teknis terkait Tebal Pelat lambung kapal RI <i>Research on Technical Studies related to the Thickness of Indonesian ship hull Plates</i>	Riset R&D
12	Tim Penelitian Kapal Kayu <i>Wooden Ship Research Team</i>	Riset R&D
13	Tim penelitian <i>Load Respon</i> <i>Load Response research team</i>	Riset R&D
14	Kajian perpanjangan klas kapal material FRP <i>FRP material ship class extension study</i>	Riset R&D
15	Publikasi produk klasifikasi <i>Classification product publication</i>	PPA R&D
16	Mengajar di BKI Academy/Institusi lain <i>Teaching at BKI Academy/other institutions</i>	BKI Academy
17	Pengelolaan RMS & Peraturan Teknik <i>Management of RMS & Technical Regulations</i>	PPA R&D
18	Penyusunan form survei offshore <i>Preparation of offshore survey form</i>	Survei
19	Tim Penelitian <i>Cybersecurity</i> <i>Cybersecurity Research Team</i>	Riset, Statutori
20	Tim Penelitian AIS-ITS <i>AIS-ITS Research Team</i>	Riset, ITS
21	Penelitian non <i>Metallic Material</i> (FRP) <i>Non Metallic Material (FRP) Research</i>	Riset R&D
22	Kajian terhadap Pengembangan Teknologi/Konversi Bahan Bakar Diesel <i>Dual Fuel</i> (PERTAMINA) <i>Study on the Development of Dual Fuel Diesel Technology/Conversion (PERTAMINA)</i>	Cabut Tj. Priok
23	WG IMO GBS 2020 (Sub-Team Gap Analysis) <i>WG IMO GBS 2020 (Sub-Team Gap Analysis)</i>	R&D
24	Tim pengadaan dan pemeliharaan <i>software Organizing</i> Divisi RnD <i>Software procurement and maintenance team Organising RnD Division</i>	R&D dan Divisi Umum
25	Panitia KOMTEK <i>KOMTEK Committee</i>	R&D
26	Anggota TIM WG. <i>Circular</i> <i>Circular WG Team Member</i>	PRB & Survey
27	Penyusunan RSNi bidang maritim <i>Preparation of RSNi in the maritime sector</i>	Kemenperin
28	Tim <i>Host</i> <i>Host Team</i>	R&D



No	Kegiatan Dukungan Support Activities	Unit Kerja/Instansi Terkait Related Work Units/Agencies
29	PIC Laporan Bulanan <i>Monthly Report PIC</i>	R&D
30	PIC analisa beban kerja bagian PPA R&D <i>PIC of workload analysis of PPA R&D section</i>	R&D
31	RSNI Kapal Perikanan (Narasumber) <i>RSNI Fishery Vessel (Resource Person)</i>	Kementerian Kelautan & Perikanan
32	Tim Penyusun PTK Kemaritiman Buku II tentang Fasilitas Terminal Hulu Minyak dan Gas Bumi <i>Compilation Team of PTK Kemaritiman Book II on Upstream Oil and Gas Terminal Facilities</i>	SKK MIGAS
33	Tim analisa <i>Mooring Buoy</i> Strunami BPPT <i>BPPT Strunami Mooring Buoy analysis team</i>	Cabut Tj. Priok
34	Tim proyek kapal Pandu dan kapal tunda PT JAI <i>Project team for PT JAI's pilot boat and tugboat</i>	SBU M&O
35	Riset HLA <i>HLA Research</i>	Riset R&D
36	<i>Nice incubation</i> <i>Nice incubation</i>	PPRB R&D
37	Tim project CRM-MyBKI-RICO (Sistem operasi klas yang baru) <i>CRM-MyBKI-RICO project team (New class operating system)</i>	Divisi LIST
38	Kajian iBoat <i>iBoat study</i>	BKI & ITS
39	RPP industri maritim <i>RPP for maritime industry</i>	BKI & Kemenperin
40	Evaluasi dokumen <i>Fatigue analysis</i> SPM Sukowati <i>Fatigue analysis document evaluation of SPM Sukowati</i>	SBU M&O
41	<i>Ferrocement Buoy</i> <i>Ferrocement Buoy</i>	SBU M&O



Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Dewan Komisaris membentuk komite yang bertugas membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Sampai pada Desember 2023 Dewan Komisaris memiliki beberapa komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola, serta Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia.

The Board of Commissioners establishes committees to assist the Board of Commissioners' supervisory function. As of December 2023, the Board of Commissioners has several committees, namely the Audit Committee, the Risk Monitoring and Governance Committee, and the Nomination, Remuneration and Human Resources Committee.

Komite Audit

Audit Committee

Perusahaan membentuk Komite Audit yang secara struktural berada di bawah Dewan Komisaris untuk membantu dan memperkuat Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.

The Company established an Audit Committee that is structurally under the Board of Commissioners to assist and strengthen the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function.

Dasar Hukum pembentukan Komite Audit mengacu pada:

The Legal Basis for the establishment of the Audit Committee refers to:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262);
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 263);
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.03/DEKOM.BKI/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Pengangkatan Ketua Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK-12/DEKOM.BKI/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Perpanjangan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.3/DEKOM.BKI/IV/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Piagam Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK-12/DEKOM.BKI/XI/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Perpanjangan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.04/DEKOM.BKI/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.

1. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 262);*
2. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-03/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 263);*
3. *Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Number: SK.03/DEKOM.BKI/V/2019 dated May 8, 2019 concerning the Appointment of the Chairman of the Audit Committee of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;*
4. *Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Number: SK-12/DEKOM.BKI/X/2021 dated October 1, 2021 concerning the Extension of the Appointment of Audit Committee Members of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;*
5. *Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Number: SK.3/DEKOM.BKI/IV/2022 dated April 1, 2022 concerning the Audit Committee Charter of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;*
6. *Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Number: SK-12/DEKOM.BKI/XI/2022 dated November 30, 2022 concerning the Extension of the Appointment of Audit Committee Members of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;*
7. *Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Number: SK.04/DEKOM.BKI/VI/2023 dated June 23, 2023 concerning the Appointment of Audit Committee Members of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.*



Hingga akhir 2023 susunan Komite Audit PT Biro Klasifikasi Indonesia adalah sebagai berikut :

Until the end of 2023, the composition of the Audit Committee of PT Biro Klasifikasi Indonesia is as follows:

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Legal Basis for Appointment
Ketua Komite <i>Chairman of the Committee</i>	M. Amperawan	SK.03/DEKOM.BKI/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 <i>SK.03/DEKOM.BKI/V/2019 dated May 8, 2019</i>
Anggota <i>Member</i>	Bangun Tiroi Ruhut Hutagalung	SK-12/DEKOM.BKI/XI/2022 tanggal 30 November 2022 <i>SK-12/DEKOM.BKI/XI/2022 dated November 30, 2022</i>
Anggota <i>Member</i>	Guido Anwar	SK.04/DEKOM.BKI/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 <i>SK.04/DEKOM.BKI/VI/2023 dated June 23, 2023</i>

Profil Singkat Ketua Komite Audit

Profil Ketua Komite Audit dapat dilihat di Bab Profil Perusahaan hal 26.

Brief Profile of the Chairman of the Audit Committee

The profile of the Chairman of the Audit Committee can be seen in the Company Profile Chapter on page 26.

Masa Jabatan Komite Audit

- Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari dan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
- Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.
- Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai anggota Komite Audit adalah maksimal selama 5 (lima) tahun.
- Anggota Komite Audit yang berasal dari dan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir atau karena hal-hal yang menyebabkannya berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti karena:
 - Masa jabatannya berakhir;
 - Meninggal dunia;
 - Mengundurkan diri; atau
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Term of Office of Audit Committee

- The Chairman and members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.*
- The term of office of Audit Committee members who come from and are members of the Company's Board of Commissioners is in accordance with their term of office as members of the Board of Commissioners.*
- The term of office of Audit Committee members who are not members of the Company's Board of Commissioners shall be a maximum of 3 (three) years and may be extended once for 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.*
- The accumulated term of office of a person as a member of the Audit Committee is a maximum of 5 (five) years.*
- Members of the Audit Committee who come from and are members of the Board of Commissioners of the Company shall cease to exist when their term of office as a member of the Board of Commissioners expires or due to matters that cause them to cease to exist as a member of the Board of Commissioners based on the provisions of the Articles of Association and/or prevailing laws and regulations.*
- Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners of the Company shall cease to exist due to:*
 - His/her term of office ends;*
 - Death;*
 - Resigns; or*
 - Dismissed based on the decision of the Board of Commissioners.*



7. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
8. Dalam hal anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan berhenti, maka Dewan Komisaris mengangkat penggantinya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung yang bersangkutan mulai berhenti sebagai anggota Komite Audit.

7. *In the event that a member of the Board of Commissioners who serves as Chairman of the Audit Committee resigns as a member of the Board of Commissioners, the Chairman of the Audit Committee shall be replaced by another member of the Board of Commissioners within 30 (thirty) days at the latest.*
8. *In the event that a member of the Audit Committee who is not a member of the Board of Commissioners of the Company ceases to be a member of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners shall appoint his/her replacement no later than 60 (sixty) days from the date he/she ceases to be a member of the Audit Committee.*

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, membantu Dewan Komisaris antara lain untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN yang bersangkutan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bersangkutan lainnya.
6. Melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Komite audit sebagai organ pengelola Risiko di bawah Dewan Komisaris memiliki fungsi Audit Intern dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BUMN terkait dengan tugas dan fungsi komite audit.
 - b. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan Audit Intern dan Audit Ekstern.
 - c. Memastikan objektivitas dan independensi auditor internal auditor internal dan Auditor Eksternal.
 - d. Memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan BUMN yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian komite audit.

Authority, Duties and Responsibilities of the Audit Committee

In fulfilling its functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities to assist the Board of Commissioners:

1. *Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the performance of internal and external auditors.*
2. *Evaluating the activities and audit results conducted by both internal and external auditors.*
3. *Providing recommendations on improving the management control system and its implementation.*
4. *Ensuring satisfactory evaluation procedures are in place for all information released by the SOE concerned.*
5. *Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners/Supervisory Board of the SOE and other duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board of the SOE concerned.*
6. *Performing tasks related to risk management as regulated by laws and regulations.*
7. *As a risk management organ under the Board of Commissioners, the Audit Committee has the following internal audit functions, authorities, duties, and responsibilities:*
 - a. *Accessing all relevant information about the SOE related to the tasks and functions of the Audit Committee.*
 - b. *Monitoring and reviewing the effectiveness of internal and external audits.*
 - c. *Ensuring the objectivity and independence of internal and external auditors.*
 - d. *Ensuring the credibility and objectivity of the SOE's financial statements to be issued to external parties and regulatory bodies, including following up on complaints and/or records of irregularities in the reports during the audit committee's review period.*



- e. Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal.
- f. Memastikan SPI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Auditor Eksternal.
- g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SPI.
- h. Mengevaluasi laporan auditor internal berkala dan merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SPI.
- i. Mengevaluasi kinerja SPI.
- j. Memastikan SPI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
- k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SPI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- l. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan Audit Intern BUMN Induk maupun Anak Perusahaan BUMN.
- m. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi pelaporan keuangan dan kesesuaian antara kebijakan Audit Intern BUMN Induk dan Audit Intern Anak Perusahaan BUMN.
- n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
- o. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

- e. *Monitoring and reviewing the financial reporting process audited by the external auditor.*
- f. *Ensuring that the Internal Audit Unit communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners, and external auditors.*
- g. *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of the audit plan, scope, and budget of the Internal Audit Unit.*
- h. *Evaluating periodic internal auditor reports and recommending corrective actions to address control weaknesses, fraud, compliance issues with policies and regulations, or other issues identified and reported by the Internal Audit Unit.*
- i. *Evaluating the performance of the Internal Audit Unit.*
- j. *Ensuring the Internal Audit Unit upholds integrity in carrying out its duties.*
- k. *Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the overall annual remuneration and performance awards for the Internal Audit Unit.*
- l. *Monitoring and evaluating the alignment of financial policies and internal audits of the parent SOE and its subsidiaries.*
- m. *Providing recommendations to the Board of Commissioners on matters supporting the effectiveness and accuracy of financial reporting and the alignment between the internal audit policies of the parent SOE and its subsidiaries.*
- n. *Monitoring and evaluating the performance of other internal audit functions in accordance with laws and regulations, the articles of association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders/Minister.*
- o. *Exercising other authorities, duties, and responsibilities related to its functions.*

Kode Etik Komite Audit

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional berlandaskan kode etik:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Hal ini juga tetap berlaku walaupun anggota Komite Audit sudah tidak menjabat lagi.
3. Tidak menggunakan aset dan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan serta jabatannya untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.

Audit Committee Code of Ethics

The Audit Committee carries out its duties, responsibilities, and authority in a professional manner based on the code of ethics:

1. *Uphold integrity, professionalism, and professional standards in carrying out its duties and responsibilities.*
2. *Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information obtained, both from internal and external parties and only used for the purpose of carrying out its duties. This also applies even though the Audit Committee members are no longer in office.*
3. *Not to use assets and important information related to the Company and its position for personal interests outside the provisions of laws and regulations and applicable Company policies.*



4. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, *Board Manual* Perusahaan (Pedoman Perilaku dan Tata Kelola Perusahaan), serta kebijakan-kebijakan Perseroan.

Penanganan Pengaduan

1. Komite Audit akan melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan pelaporan tersebut.
2. Penanganan pengaduan akan mengikuti mekanisme yang telah disusun dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
2. Komite Audit dapat mengadakan rapat di luar jadwal rapat berkala untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/atau mendesak.
3. Komite Audit dapat mengundang satuan/unit kerja yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan Sekretaris Dewan Komisaris.
4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang dari anggota Komite Audit yang hadir.
5. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Risalah rapat disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris.

Tabel Kehadiran Rapat Komite Audit 2023

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran% Attendance%
M Amperawan	Ketua Chairman	15	100%
Bangun Tiroi Ruhut Hutagalung	Anggota Member	15	100%
Guido Anwar	Anggota Member	15	100%

4. *Prohibited from taking personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.*
5. *Comply with the prevailing laws and regulations, the Articles of Association, the Company's Board Manual (Code of Conduct and Corporate Governance), and the Company's policies.*

Complaint Handling

1. *The Audit Committee will review complaints or violations related to the accounting and financial reporting process and follow up on the steps that have been taken in connection with the reporting.*
2. *Handling of complaints will follow the mechanism that has been prepared and approved by the Board of Commissioners.*

Audit Committee Meeting

1. *The Audit Committee shall hold regular meetings at least once a month.*
2. *The Audit Committee may hold meetings outside the periodic meeting schedule to discuss matters deemed necessary and/or urgent.*
3. *The Audit Committee may invite units/work units related to the meeting material to attend the meeting with the knowledge of the Secretary of the Board of Commissioners.*
4. *Audit Committee meetings are chaired by the Chairman of the Audit Committee. In the event that the Chairman of the Audit Committee is absent, the meeting shall be chaired by one of the Audit Committee members present.*
5. *Audit Committee meeting decisions are made based on deliberation for consensus.*
6. *Each meeting of the Audit Committee shall be set forth in the minutes of the meeting, including any dissenting opinions, signed by all members of the Audit Committee present. The minutes of the meeting shall be submitted to the Secretary of the Board of Commissioners.*

Table of Audit Committee Meeting Attendance 2023



Pertanggungjawaban Komite Audit

Komite Audit wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Dewan Komisaris yang disampaikan dalam bentuk:

1. Laporan bulanan, triwulanan dan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit;
2. Laporan untuk setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang memuat kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait. Laporan disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesainya penugasan.

Audit Committee Accountability

The Audit Committee shall make a written accountability report to the Board of Commissioners submitted in the form of:

1. *Monthly, quarterly and annual reports on the implementation of Audit Committee activities;*
2. *Report for each assignment given by the Board of Commissioners containing activities that have been carried out, problems found and related recommendations. The report is submitted no later than 14 (fourteen) days after the completion of the assignment.*

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola *Risk Monitoring and Governance Committee*

Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola menyusun dan menyampaikan program Kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan yang diselaraskan dengan rencana kerja tahunan dan kebijakan manajemen risiko perusahaan yang dikelola oleh Direksi, melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugasnya.

The Risk Monitoring and Governance Committee is collective and functions to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties, is independent both in carrying out its duties and in reporting and is directly responsible to the Board of Commissioners. The Risk Monitoring and Governance Committee prepares and submits an annual work program to the Board of Commissioners to be determined which is aligned with the annual work plan and risk management policies of the company managed by the Board of Directors, reporting in writing to the Board of Commissioners on each implementation of its duties.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262);
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 263);
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.13/DEKOM.BKI/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.1/DEKOM.BKI/IV/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Perubahan Nomenklatur Komite Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;

The Legal Basis

1. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 262);*
2. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-03/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 263);*
3. *Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Number: SK.13/DEKOM.BKI/XI/2021 dated November 15, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Risk Management Committee of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;*
4. *Decree of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Number: SK.1/DEKOM.BKI/IV/2022 dated April 1, 2022 concerning Changes in the Nomenclature of the Risk Management Committee of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;*



5. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.4/DEKOM.BKI/IV/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.8/DEKOM.BKI/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
7. Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.03/DEKOM.BKI/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
8. Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.06/DEKOM.BKI/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.

Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola

- a. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- c. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota yaitu 1 (satu) orang komisaris merangkap sebagai ketua dan 1 (satu) orang anggota.
- d. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola paling lama 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu, Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diperpanjang masa jabatannya satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan.

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Komisi Pemantau Risiko & Tata Kelola

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola.
2. Melakukan komunikasi dengan kepala unit kerja dan pihak lain dalam BUMN untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.

Organizational Structure and Membership of the Risk Monitoring and Governance Committee

- a. The Risk Monitoring and Governance Committee is established by the Board of Commissioners.
- b. The appointment of members of the Risk Monitoring and Governance Committee is made by the Board of Commissioners based on the Resolution of the Board of Commissioners Meeting.
- c. The Risk Monitoring and Governance Committee shall consist of at least 2 (two) members, namely 1 (one) commissioner concurrently serving as chairman and 1 (one) member.
- d. The term of office of members of the Risk Monitoring and Governance Committee shall be a maximum of 3 (three) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time, Members of the Risk Monitoring and Governance Committee whose term of office has expired, may be extended their term of office once for 2 (two) years.

Authority, Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring and Governance Committee

1. Access all relevant information related to the duties and functions of the Risk Monitoring and Governance Committee.
2. Communicating with the heads of work units and other parties within the SOE to obtain information, clarification and request the necessary documents and reports.



3. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik BUMN Induk maupun Anak Perusahaan.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Perusahaan dan Anak Perusahaan.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan.
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
7. Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan dan Anak Perusahaan.
9. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.
11. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan Manajemen Risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.
12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
13. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola

Susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola sampai pada akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Composition of Risk Monitoring and Governance Committee Members

The composition of the Risk Monitoring and Governance Committee until the end of 2023 is as follows:

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of appointment
Ketua Komite Chairman of the Committee	Lathifah Shohib	SK.8/DEKOM.BKI/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 SK.8/DEKOM.BKI/X/2022 dated October 10, 2022
Anggota Member	Virgo Eresta Jaya	SK.06/DEKOM.BKI/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 SK.06/DEKOM.BKI/VII/2023 dated July 6, 2023
Anggota Member	Diane Christina	SK.13/DEKOM.BKI/XI/2021 tanggal 15 November 2021 SK.13/DEKOM.BKI/XI/2021 dated November 15, 2021
Anggota Member	Evan Oktavianus	SK.03/DEKOM.BKI/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 SK.03/DEKOM.BKI/V/2023 dated May 26, 2023



Profil Singkat Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola dapat dilihat di Profil Perusahaan hal 25.

Brief Profile of the Chairman of the Risk Monitoring and Governance Committee

The profile of the Chairman of the Risk Monitoring and Governance Committee can be seen in the Company Profile page 25.

Rapat Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola

- Rapat Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.
- Rapat Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola dan dari mayoritas jumlah tersebut merupakan Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola serta 1 (satu) orang Anggota Komite yang membawahi bidang manajemen risiko.
- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota komite senior yang ditunjuk/disepakati dalam rapat.
- Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite dan didokumentasikan dengan baik.
- Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam butir d tersebut di atas disampaikan secara tertulis oleh Komite Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Sekretaris Dewan Komisaris.

Risk Monitoring and Governance Committee Meeting

- Risk Monitoring and Governance Committee meetings are held in accordance with the needs of the Company, at least 4 (four) times a year.
- Meetings of the Risk Monitoring and Governance Committee can only be held if attended by a majority of the members of the Risk Monitoring and Governance Committee and of the majority is the Chairman of the Risk Monitoring and Governance Committee and 1 (one) Committee Member in charge of risk management.
- The meeting shall be chaired by the Chairman of the Risk Monitoring and Governance Committee and if the Chairman of the Committee is absent, the meeting shall be chaired by a senior committee member appointed/agreed upon in the meeting.
- The results of the Risk Monitoring and Governance Committee Meeting shall be set forth in a minutes of meeting signed by all members of the Committee and well documented.
- Minutes of the meeting as referred to in point d above shall be submitted in writing by the Risk Management Committee to the Board of Commissioners with a copy to the Secretary of the Board of Commissioners.

Tabel Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola

Table of Attendance of Risk Monitoring and Governance Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran % Attendance %
Lathifah Shohib	Ketua Chairman	15	100%
Virgo Eresta Jaya	Anggota Member	15	100%
Diane Christina	Anggota Member	15	100%
Evan Oktavianus	Anggota Member	15	100%



Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia

Nomination, Remuneration and Human Resources Committee

Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Nomination, Remuneration and Human Resources Committee works collectively and functions to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties, is independent both in carrying out its duties and in reporting and is directly responsible to the Board of Commissioners.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262);
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 263);
3. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.6/DEKOM.BKI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan Sumber Daya Manusia PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero);
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.9/DEKOM.BKI/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Komite Nominasi, Remunerasi, dan Sumber Daya Manusia, dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.11/DEKOM.BKI/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Sumber Daya Manusia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.9/DEKOM.BKI/X/2021 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan SDM dan Pengalihan Tugas Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan SDM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia;

Legal Basis

1. *Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 262);*
2. *Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-03/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 263);*
3. *Decree of the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprise PT Biro Klasifikasi Indonesia Number: SK.6/DEKOM.BKI/XII/2020 dated December 18, 2020, concerning the Charter of the Nomination, Remuneration, and Human Resources Committee of PT Biro Klasifikasi Indonesia;*
4. *Decree of the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprise PT Biro Klasifikasi Indonesia Number: SK.9/DEKOM.BKI/VII/2021 dated August 2, 2021, concerning the Dismissal of the Chairperson and Secretary of the Nomination, Remuneration, and Human Resources Committee, and the Appointment of the Chairperson and Members of the Nomination, Remuneration, and Human Resources Committee of PT Biro Klasifikasi Indonesia;*
5. *Decree of the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprise PT Biro Klasifikasi Indonesia Number: SK.11/DEKOM.BKI/IX/2021 dated September 1, 2021, concerning the Appointment of the Deputy Chairperson of the Nomination, Remuneration, and Human Resources Committee of PT Biro Klasifikasi Indonesia;*
6. *Decree of the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprise PT Biro Klasifikasi Indonesia Number: SK.9/DEKOM.BKI/X/2021 dated October 10, 2022, concerning the Dismissal of the Chairperson of the Nomination, Remuneration, and Human Resources Committee and the Transfer of Duties of the Deputy Chairperson of the Nomination, Remuneration, and Human Resources Committee of PT Biro Klasifikasi Indonesia;*



7. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor: SK.07/DEKOM.BKI/IX/2023 tanggal 7 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.

7. Decree of the Board of Commissioners of the State-Owned Enterprise PT Biro Klasifikasi Indonesia Number: SK.07/DEKOM.BKI/IX/2023 dated September 7, 2023, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Nomination, Remuneration, and Human Resources Committee of PT Biro Klasifikasi Indonesia.

Susunan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Sumber Daya Manusia

Susunan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola sampai pada akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Composition of Nomination, Remuneration, and Human Resources Committee Members

The composition of the Risk Monitoring and Governance Committee until the end of 2023 is as follows:

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Ketua Komite Committee Chairman	Indra Iskandar	SK.9/DEKOM.BKI/X/2021 tanggal 10 Oktober 2022 SK.9/DEKOM.BKI/X/2021 dated October 10, 2022
Anggota Member	Diana Hady	SK.9/DEKOM.BKI/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 SK.9/DEKOM.BKI/VII/2021 dated August 2, 2021
Anggota Member	Herry Sudradjat	SK.07/DEKOM.BKI/IX/2023 tanggal 7 September 2023 SK.07/DEKOM.BKI/IX/2023 dated September 7, 2023

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi, Remunerasi, dan Sumber Daya Manusia

- Melakukan tinjauan secara berkala atas sistem Manajemen Talenta BUMN serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya.
- Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi BUMN.
- Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi yang dilakukan oleh Direksi.
- Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
- Melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi.
- Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Authority, Duties and Responsibilities of the Nomination, Remuneration and Human Resources Committee

- Conducting periodic reviews of the BUMN Talent Management System, as well as supervising and evaluating its implementation.
- Evaluating the systems and procedures for Talent classification conducted by the BUMN Board of Directors.
- Validating and calibrating the Selected Talent identified by the Board of Directors.
- Evaluating candidates for company representatives proposed as members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of subsidiaries, before submission to the General Meeting of Shareholders (GMS) or the Minister.
- Evaluating the proposed individual KPIs for Board of Directors members.
- Preparing proposals for the individual performance evaluation system for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.



7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
9. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi BUMN mengenai struktur organisasi BUMN.
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris terkait fungsi nominasi, remunerasi dan SDM.

7. Preparing proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
8. Evaluating remuneration policies for employees requiring approval or feedback from the Board of Commissioners.
9. Evaluating the BUMN Board of Directors' proposals regarding the organizational structure of the BUMN.
10. Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners related to the nomination, remuneration, and HR functions

Tabel Kehadiran Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia

Table of Attendance of Nomination, Remuneration, and Human Resources Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran % Attendance %
Indra Iskandar	Ketua Chairman	15	100%
Diana Hady	Anggota Member	15	100%
Herry Sudradjat	Anggota Member	15	100%

Profil singkat ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia

Brief Profile of the Chairman of the Nomination, Remuneration, and Human Resources Committee

Profil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia dilihat di Profil Perusahaan hal 28.

The profile of the Chairman of the Nomination, Remuneration, and Human Resources Committee can be seen in the Company Profile page 28.



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Dalam pelaksanaannya *Corporate Secretary* bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama dan bertanggung jawab secara fungsional kepada *Corporate Governance Committee*.

Tugas dan tanggung jawab fungsi *Corporate Secretary* dalam penerapan GRC di IDSURVEY adalah sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan semua pelaksanaan *Corporate Governance* di IDSURVEY;
2. Memastikan hierarki kebijakan dan prosedur diadopsi oleh seluruh unit organisasi IDSURVEY;
3. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Utama terkait dengan tata kelola terintegrasi kepatuhan di IDSURVEY.

Sesuai dengan SK No. DU.055/KP.503/KI-23 tanggal 22 Mei 2023 Tentang Pengangkatan Sdr. Tony Andrianto Sebagai VP Sekretaris Perusahaan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

In its operations, the Corporate Secretary is structurally accountable to the President Director and functionally accountable to the Corporate Governance Committee.

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary in implementing GRC at IDSURVEY are as follows:

1. *Coordinating all Corporate Governance implementations at IDSURVEY;*
2. *Ensuring that the hierarchy of policies and procedures is adopted by all organizational units of IDSURVEY;*
3. *Reporting periodically to the President Director regarding integrated governance and compliance at IDSURVEY.*

In accordance with Decree No. DU.055/KP.503/KI-23 dated May 22, 2023 Regarding the Appointment of Mr. Tony Andrianto as VP Corporate Secretary of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Profil Singkat Sekretaris Perusahaan

Brief Profile of the Corporate Secretary



Nama <i>Name</i>	Tony Andrianto
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Yogyakarta, 8 Februari 1976 <i>Yogyakarta, February 8 1976</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• S2 Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia (2002-2004) • S1 Teknik Industri, Universitas Trisakti • <i>Master of Communication University of Indonesia</i> • <i>Bachelor Engineering in Industrial Engineering, Trisakti University</i>
Pengalaman <i>Experience</i>	• 2015-2023, Kepala Sekretaris Perusahaan Terintegrasi MNC Group/Head Integrated Corporate Secretary MNC Group • 2014-2015, Kepala Hubungan Korporasi untuk Indonesia, PT Sygenta AG <i>Head Corporate Affairs Indonesia PT Sygenta AG</i> • 2012-2014, Senior Manager Corporate Image PT Bluebird Group Tbk • 2009- 2012, Co-Founder/Senior Consultant, PT HALMA STRATEGIC (PR Consultant) • 2007-2009, Manajer Korporasi PT Direct Vision-ASTRO Indonesia <i>Corporate Affairs Manager PT Direct Vision-ASTRO Indonesia</i> • 2003 2007, Corporate Communication PT Surveyor Indonesia



Satuan Pengawasan Internal

Internal Audit Unit

Perusahaan telah memelihara sistem pengendalian internal keuangan yang menjamin keandalan sistem akuntansi. Sistem pengendalian internal keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam hubungannya dengan menjaga aset dari penyalahgunaan dan peralihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi dan keandalan informasi keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan dalam Perusahaan maupun yang dipublikasikan. Pelaksanaan tugas pengendalian internal merupakan tanggung jawab seluruh unit/satuan kerja. Perusahaan menetapkan Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai unit yang bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian internal.

The company has maintained an internal financial control system that ensures the reliability of the accounting system. This financial control system is implemented to provide reasonable assurance in relation to safeguarding assets from misuse and unauthorized transfer of ownership, maintaining the validity of accounting records, and ensuring the reliability of financial information used within the company and published externally. The responsibility for executing internal controls lies with all units/work divisions. The company has established the Internal Audit Unit (SPI) as the unit responsible for the effectiveness of the internal control system.

Dalam pelaksanaannya, Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Komite Audit. Struktur Satuan Pengawas Internal IDSurvey adalah sebagai berikut:

In its operations, the Internal Audit Unit is structurally accountable to the President Director and functionally accountable to the Audit Committee. The structure of IDSurvey's Internal Audit Unit are as follows:

1. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Intern yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama IDSurvey.
2. Kepala Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Audit Intern setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Audit Intern tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan internal Perusahaan dan peraturan perundangan.
4. Auditor dan jajaran Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Audit Intern.

1. *The Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit, who reports directly to the President Director of IDSurvey.*
2. *The Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.*
3. *The President Director may dismiss the Head of Internal Audit, with the approval of the Board of Commissioners, if the Head of Internal Audit does not meet the requirements stipulated by the company's internal regulations and statutory provisions.*
4. *Auditors and the ranks of the Internal Audit Unit report directly to the Head of Internal Audit.*

Fungsi Satuan Pengawas Internal IDSurvey adalah sebagai berikut:

The function of IDSurvey's Internal Audit Unit are as follows:

1. Menentukan strategi pelaksanaan Audit Intern Anak Perusahaan BUMN;
2. Merumuskan prinsip Audit Intern yang mencakup metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu; dan
3. Memantau pelaksanaan Audit Intern pada masing-masing Anak Perusahaan BUMN.

1. *Determine the strategy for implementing Internal Audit of SOE Subsidiaries;*
2. *Formulate Internal Audit principles that include audit methodology and quality control implementation steps; and*
3. *Monitor the implementation of Internal Audit at each SOE Subsidiary.*

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawas Internal dalam penerapan GRC di IDSurvey adalah sebagai berikut:

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit in implementing GRC at IDSurvey are as follows:

1. Membantu Direksi dan *Audit Committee* dalam penerapan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC);
2. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Audit Intern tahunan berdasarkan hasil analisis risiko (*risk-based audit*);
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Komite Audit; dan
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (*corrective action*) perbaikan yang telah disarankan.

1. *Assisting the Board of Directors and the Audit Committee in implementing Governance, Risk Management, and Compliance (GRC);*
2. *Developing and executing the annual Internal Audit work plan based on risk analysis (risk-based audit);*
3. *Testing and evaluating the implementation of internal controls and the risk management system in accordance with company policies;*
4. *Providing improvement suggestions and objective information about the activities being audited at all management levels;*
5. *Preparing audit reports and submitting these reports to the President Director and the Audit Committee;*
6. *Monitoring, analyzing, and reporting on the implementation of corrective actions recommended for improvement.*



Akuntan Publik

Public Accountant

Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan kegiatan audit secara eksternal dan memberikan opini atas laporan keuangan yang telah disusun oleh Direksi.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 27 Januari 2023 memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris kepada Direksi untuk menunjuk KAP yang akan bertindak sebagai auditor independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahun buku 2023 melalui surat No. A.30/DK.BKI/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023.

Berdasarkan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan/PKF sebagai auditor atas Laporan Keuangan PT BKI Tahun Buku 2023.

Akuntan Publik terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perseroan, serta perseroan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketepatan, keazasan dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

The Company appoints a Public Accounting Firm (KAP) to conduct external audit activities and provide opinions on the financial statements prepared by the Board of Directors.

This is in accordance with the decision of the GMS dated January 27, 2023 granting power to the Board of Commissioners to the Board of Directors to appoint a KAP who will act as an independent auditor to audit the Company's Consolidated Financial Report and the Financial Report for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 financial year through letter No. A.30/DK.BKI/VII/2023 dated July 26, 2023.

Based on the procurement process in accordance with applicable regulations and GCG principles, the Board of Commissioners has appointed the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat Arsono, Retno, Palilingan and Partners/PKF as the auditor of PT BKI's Financial Statements for the 2023 Financial Year.

The Public Accountant is free from the influence of the Board of Commissioners, Board of Directors and interested parties in the company, and the company is obliged to provide all accounting records and supporting data required by the external auditor so as to enable the external auditor to give his opinion on the fairness, compliance, fairness and conformity of the company's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards.

KAP yang Melakukan Audit Laporan Keuangan BKI

KAP that Audits BKI's Financial Statements

Tahun Year	KAP Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Biaya Fee
2023	Paul Hadiwinata, Hidajat Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan/PKF	Yusef Kresna Budi, CAP	Rp705.906.000 termasuk PPN 11% Rp705.906.000 including 11% VAT
2022	Paul Hadiwinata, Hidajat Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan/PKF	Yusef Kresna Budi, CAP	Rp654.900.000,- termasuk PPN 11% Rp654,900,000,- including 11% VAT
2021	Paul Hadiwinata, Hidajat Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan/PKF	Yusef Kresna Budi, CAP	Rp746.700.000,- termasuk PPN 10% Rp746,700,000,- including 10% VAT
2020	Paul Hadiwinata, Hidajat Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan/PKF	Yusef Kresna Budi, CAP	Rp605.000.000,- termasuk PPN 10% Rp605,000,000,- including 10% VAT
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, mawar & Rekan	Benny Andria	Rp514.800.000,- termasuk PPN 10% Rp514,800,000,- including 10% VAT



Manajemen Risiko

Risk Management

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya Holding Jasa Survei berkomitmen menjadikan manajemen risiko sebagai bagian dari proses bisnis dan pengambilan keputusan. IDSURVEY memahami bahwa setiap kegiatan memiliki risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi. Penerapan Manajemen Risiko merupakan salah satu bagian tidak terpisahkan dari praktik tata Kelola Perusahaan yang baik. Dengan komitmen ini, IDSURVEY mengelola risiko secara terencana, sistematis dan terstruktur guna meminimalkan potensi kerugian dan mengoptimalkan peluang dalam rangka mencapai sasaran yg ditetapkan. IDSURVEY berkomitmen menerapkan manajemen risiko dengan target capaian antara lain:

1. Mencapai tingkat kematangan risiko (*risk maturity level*) sebesar 3,00 (tahap definisi) untuk tahun 2023.
2. Menyediakan dan mengelola sumber daya dengan mempertimbangkan aspek risiko di setiap tingkatan Manajemen.
3. Melakukan tinjauan ulang dan perbaikan yang berkelanjutan secara periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektifitas implementasi Manajemen Risiko.

In conducting its business activities, Holding Jasa Survei is committed to integrating risk management into its business processes and decision-making. IDSURVEY understands that every activity carries risks that can impact the achievement of its vision and mission. Implementing Risk Management is an integral part of good corporate governance practices. With this commitment, IDSURVEY manage risks in a planned, systematic, and structured manner to minimize potential losses and optimize opportunities to achieve the set goals. IDSURVEY is committed to implementing risk management with the following targets:

1. *Achieving a risk maturity level of 3.00 (definition stage) for the year 2023.*
2. *Providing and managing resources with consideration of risk aspects at every management level.*
3. *Conducting periodic reviews and continuous improvements to ensure the suitability, adequacy, and effectiveness of Risk Management implementation.*

Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko

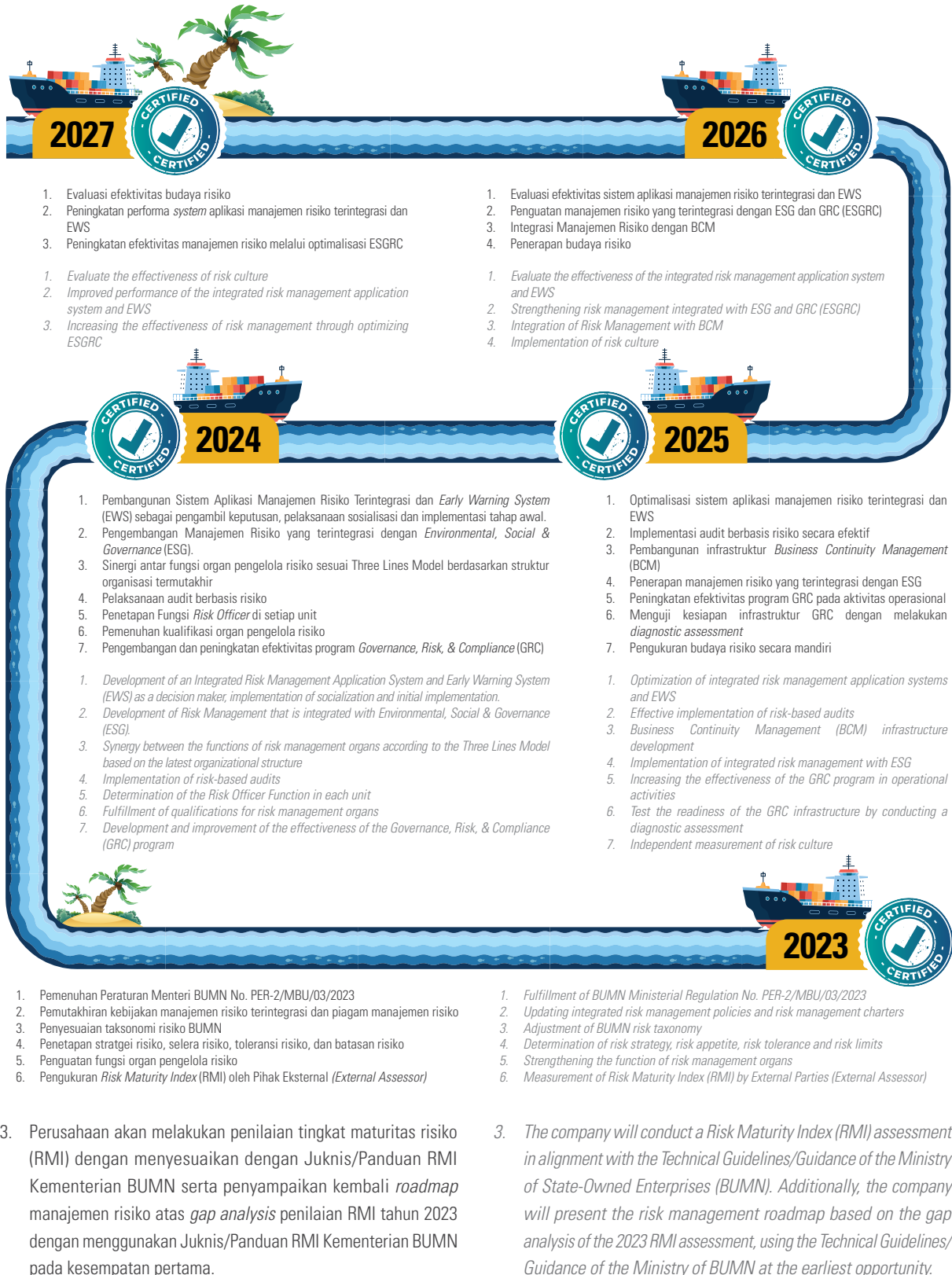
Evaluation of Risk Management Implementation

Implementasi manajemen risiko selama tahun 2023 telah berjalan cukup efektif, terbukti perusahaan telah melakukan pemenuhan atas Aspirasi Pemegang Saham Fungsi Manajemen Risiko antara lain:

1. Perusahaan telah melakukan penilaian tingkat maturitas risiko (RMI) tahun 2022 secara mandiri (*self-assessment*), namun belum berdasarkan SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di lingkungan BUMN. Adapun peraihan skor RMI tahun 2022 telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 3,0 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT BKI (Persero) = 3,14
 - b. PT Sucofindo = 3,28
 - c. PT Surveyor Indonesia = 3,18
2. *Roadmap* Manajemen Risiko yang disusun sebagai upaya perbaikan penerapan manajemen risiko yang akan dijalankan untuk rentang waktu dari tahun 2023 sd 2027 telah ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan gap analysis hasil penilaian RMI Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

The implementation of risk management throughout 2023 has been quite effective, as evidenced by the company's fulfillment of the Shareholders' Aspirations for the Risk Management Function, including:

1. *The company conducted a self-assessment of the Risk Maturity Index (RMI) for 2022, although it was not yet based on SK-8/DKU.MBU/12/2023 concerning the Technical Guidelines for the Risk Maturity Index Assessment within State-Owned Enterprises (BUMN). The RMI scores for 2022 met the set target of 3.0, with the following details:*
 - a. *PT BKI (Persero) = 3.14*
 - b. *PT Sucofindo = 3.28*
 - c. *PT Surveyor Indonesia = 3.18*
2. *The Risk Management Roadmap, developed as an effort to improve the implementation of risk management to be carried out from 2023 to 2027, has been established by the company based on the gap analysis of the 2022 RMI assessment results, as follows:*





Kebijakan Selera dan Toleransi Risiko

Risk Appetite and Risk Tolerance Policy

Direksi IDSurvey menetapkan selera dan toleransi risiko guna memberikan kejelasan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai sikap perusahaan terhadap risiko. Sikap tersebut menjadi batasan kesediaan perusahaan dalam menerima atau mengelola risiko demi pencapaian sasaran atau tujuan yang ingin dicapai.

IDSurvey's Board of Directors sets risk appetite and risk tolerance to provide clear information to stakeholders about the company's attitude towards risk. This attitude is the limit of the company's willingness to accept or manage risk in order to achieve the goals or objectives to be achieved.

Selera Risiko

Risk Appetite

Selera Risiko (*Risk Appetite*) merupakan suatu batasan dari risiko, di mana nilai dari risiko tersebut merupakan nilai maksimal yang masih dapat diterima oleh organisasi apabila risiko tersebut terjadi. *Risk Appetite* tersebut ditetapkan oleh Direksi IDSurvey mempertimbangkan kemampuan IDSurvey dalam memahami, menerima, dan mengendalikan risiko

Risk Appetite is a limit of risk, where the value of the risk is the maximum value that can still be accepted by the organization if the risk occurs. Risk Appetite is set by IDSurvey's Board of Directors by considering IDSurvey's ability to understand, accept and control risk.

Pernyataan Selera Risiko

Risk Appetite Statement

Skala	Pernyataan Statement
Tinggi <i>High</i>	IDSurvey bersedia mengambil lebih banyak risiko dalam rangka mencapai tujuan IDSurvey. <i>IDSurvey is willing to take more risks in order to achieve IDSurvey's goals.</i>
Menengah <i>Medium</i>	IDSurvey bersedia mengambil risiko, hanya jika risiko yang diambil lebih besar manfaatnya daripada kerugiannya bagi pencapaian tujuan IDSurvey. <i>IDSurvey is willing to take risks, only if the risks taken outweigh the benefits to the achievement of IDSurvey's objectives.</i>
Rendah <i>Low</i>	IDSurvey akan mengambil risiko sesedikit mungkin atau bahkan tidak mengambil risiko apapun untuk memastikan tercapainya tujuan IDSurvey. IDSurvey memastikan aspek keselamatan dan kepatuhan berada dalam risiko rendah. <i>IDSurvey will take as little or no risk as possible to ensure the achievement of IDSurvey's objectives. IDSurvey ensures safety and compliance aspects are low risk.</i>

Selera Risiko Berdasarkan *Strategic Initiative*

Risk Appetite Based on Strategic Initiative

Inisiatif Strategis <i>Strategic Initiative</i>	Level Selera Risiko <i>Risk Appetite Level</i>	Pernyataan Selera Risiko <i>Risk Appetite Statement</i>
Nilai Ekonomi Sosial untuk Indonesia <i>Social Economic Value for Indonesia</i>	<i>Low (L)</i>	IDSurvey mengutamakan dan memastikan aktivitas bisnis yang dapat memberikan kontribusi terhadap Negara. <i>IDSurvey prioritizes and ensures business activities that can contribute to the state.</i>
	<i>Medium (M)</i>	IDSurvey mengambil risiko menengah dalam menciptakan kontribusi bisnis terintegrasi untuk pembangunan berkelanjutan guna kepentingan ekonomi dan harapan sosial. <i>IDSurvey takes moderate risks in creating integrated business contributions to sustainable development for the benefit of economic and social expectations.</i>
	<i>Low (L)</i>	IDSurvey tidak memberikan toleransi terhadap kerusakan lingkungan dalam kegiatan usaha yang dilakukan dan berupaya meminimalkan disrupti dampak perubahan iklim. <i>IDSurvey does not tolerate environmental destruction in its business activities and strives to minimize the disruption of climate change impacts.</i>



Inisiatif Strategis Strategic Initiative	Level Selera Risiko Risk Appetite Level	Pernyataan Selera Risiko Risk Appetite Statement
	Low (L)	IDSURVEY mengambil risiko rendah dalam permasalahan proyek berupa keterlambatan pengerjaan, kelebihan penggunaan anggaran maupun kualitas pekerjaan. <i>IDSURVEY takes low risk in project problems such as delays, budget overruns, and quality of work and quality of work.</i>
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation	Medium (M)	IDSURVEY mengambil risiko menengah dalam upaya pengembangan dan pengayaan jasa guna meningkatkan pendapatan IDSURVEY. <i>IDSURVEY takes medium risk in efforts to develop and enrich services to increase IDSURVEY's revenue.</i>
	Medium (M)	IDSURVEY mengambil risiko menengah terhadap upaya pelaksanaan transformasi <i>Holding</i> Jasa Survei dalam mencapai sasaran IDSURVEY. <i>IDSURVEY takes medium risk in the implementation of the Survey Services Holding transformation efforts in achieving IDSURVEY's goals.</i>
	Low (L)	IDSURVEY tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang dapat mengancam reputasi Perusahaan <i>IDSURVEY does not tolerate violations of rules and regulations that could threaten the Company's reputation.</i>
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	High (H)	IDSURVEY mengutamakan dan memastikan atas keamanan informasi, kehandalan infrastruktur IT dan kesiapan teknologi siber. <i>IDSURVEY prioritizes and ensures information security, IT infrastructure reliability and cyber technology readiness.</i>
Peningkatan Investasi Increased Investment	Medium (M)	IDSURVEY mengambil risiko menengah untuk peningkatan investasi yang menjamin kesinambungan pertumbuhan IDSURVEY dan daya saing dalam industri TIC. <i>IDSURVEY takes medium risk to increase investment that ensures IDSURVEY's sustainable growth and competitiveness in the TIC industry.</i>
Pengembangan Talenta Talent Development	Medium (M)	IDSURVEY mengambil risiko menengah untuk pengembangan talenta yang mampu bertahan dalam memenangkan persaingan dalam industri TIC. <i>IDSURVEY takes medium risk for the development of talents that are able to survive in winning the competition in the TIC industry.</i>

Risk Appetite Metrics

IDSURVEY menyusun *risk appetite metrics* berdasarkan Taksonomi dengan memperhatikan kebijakan selera risiko Kementerian BUMN dengan menjadikan *threshold* KRI bersamaan *risk appetite* sebagai berikut:

Risk Appetite Metrics

IDSURVEY develops *risk appetite metrics* based on *Taxonomy*, taking into account the *risk appetite policy* of the *Ministry of State-Owned Enterprises (Kementerian BUMN)*, with the *KRI threshold* aligned with the *risk appetite* as follows:

No	Risk Appetite Statement	Sasaran Target	Kategori Risiko Risk Category	KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	Risk Limit
1	IDSURVEY mengutamakan dan memastikan aktivitas bisnis yang dapat memberikan kontribusi terhadap Negara. <i>IDSURVEY prioritize and make sure business activities which can give contribution to Country.</i>	EBITDA	Strategis Strategic	Penurunan <i>Market shares</i> <i>Market shares decline</i>	<5%	>5%-7%	7%-10%
			Kuangan Finance	Penurunan NPM <i>Decrease in NPM</i>	>1-1,5%	>1,5-2,5	>2,5-3,5%
2	IDSURVEY mengutamakan dan memastikan aktivitas bisnis yang dapat memberikan kontribusi terhadap Negara. <i>IDSURVEY prioritize and make sure business activities which can give contribution to Country.</i>	CFO	Kuangan Finance	Rata-rata jumlah hari pelunasan (<i>collecting</i>) piutang tahun berjalan	<50 hari	50-60 hari	>60-70 hari
				Average number of days for receivables to be paid off (<i>collected</i>) for the current year	<50 days	50-60 days	>60-70 days



No	Risk Appetite Statement	Sasaran Target	Kategori Risiko Risk Category	KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	Risk Limit
3	IDSurvey mengutamakan dan memastikan aktivitas bisnis yang dapat memberikan kontribusi terhadap Negara. <i>IDSurvey prioritize and make sure business activities which can give contribution to Country.</i>	BOPO	Keuangan Finance	Total Biaya operasi dan Biaya SGA lebih besar dari anggaran <i>Total operating costs and SGA costs are greater than the budget</i>	>1-1,5%	>1,5-2%	>2-2,7%
4	IDSurvey mengambil risiko menengah dalam menciptakan kontribusi bisnis terintegrasi untuk pembangunan berkelanjutan guna kepentingan ekonomi dan harapan sosial. <i>IDSurvey takes moderate risks in creating integrated business contributions to sustainable development for the benefit of economic and social expectations.</i>	Sertifikasi UMK MSE Certification	Operasional Operational	Ketidaktercapaian Pemberian Sertifikasi UMKM <i>Failure to achieve MSME certification</i>	0	0	0
5	IDSurvey tidak memberikan toleransi terhadap perusakan lingkungan dalam kegiatan usaha yang dilakukan dan berupaya meminimalkan disrupsi dampak perubahan iklim. <i>IDSurvey has zero tolerance for environmental destruction in its business activities and strives to minimize the disruptive impact of climate change.</i>	Pelanggaran terhadap perusakan lingkungan <i>Violation of environmental destruction</i>	Reputasi Reputation	Jumlah pelanggaran/kasus perusakan lingkungan. <i>Number of violations/cases of environmental damage.</i>	0	0	0
6	IDSurvey mengambil risiko rendah dalam permasalahan proyek berupa keterlambatan pengerjaan, kelebihan penggunaan anggaran maupun kualitas pekerjaan. <i>IDSurvey takes a low risk in project problems in the form of work delays, budget overruns and quality of work.</i>	Pelaksanaan proyek sesuai kontrak dan anggaran <i>Project execution according to contract and budget</i>	Keuangan Finance	Hilangnya profit margin <i>Loss of profit margin</i>	>1-2%	>1-2%	>2-3%
			Operasional Operational	Tingkat keluhan pelanggan <i>Complaint rate</i>	>1-2%	>2-5%	>2,5-5%
7	IDSurvey mengambil risiko menengah dalam upaya pengembangan dan pengayaan jasa guna meningkatkan pendapatan IDSurvey. <i>IDSurvey takes a medium risk in developing and enriching its services to increase IDSurvey's revenue.</i>	Pengembangan Pengayaan Jasa <i>Service Enrichment Development</i>	Operasional Operational	Prosentase Penurunan Indeks Kepuasan pelanggan <i>Percentage decrease in customer satisfaction index</i>	>3-5%	>5-10%	>10-15%
8	IDSurvey mengambil risiko menengah terhadap upaya pelaksanaan transformasi Holding Jasa Survei dalam mencapai sasaran IDSurvey. <i>IDSurvey takes medium risk towards the implementation of the Survey Services Holding transformation efforts in achieving IDSurvey's goals.</i>	Restrukturisasi Restructuring	Strategis Strategic	Pelaksanaan transformasi holding melalui reorganisasi melebihi waktu yang ditetapkan <i>Implementation of holding transformation through reorganization exceeded the stipulated timeline</i>	0	0	0



No	Risk Appetite Statement	Sasaran Target	Kategori Risiko Risk Category	KRI	Risk Appetite	Risk Tolerance	Risk Limit
9	IDSURVEY tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang dapat mengancam reputasi Perusahaan. <i>IDSURVEY does not tolerate violations of rules and regulations that could threaten the Company's reputation.</i>	Kepatuhan perundang-undangan <i>Statutory compliance</i>	Reputasi <i>Reputation</i>	Jumlah kasus hukum menyangkut perusahaan <i>Number of legal cases involving the company</i>	0	0	0
10	IDSURVEY mengambil risiko menengah untuk peningkatan investasi yang menjamin kesinambungan pertumbuhan IDSURVEY dan daya saing dalam industri TIC. <i>IDSURVEY takes medium risk for increased investment that ensures IDSURVEY's continued growth and competitiveness in the TIC industry.</i>	Investasi <i>Investment</i>	Keuangan <i>Finance</i>	Nilai investasi tidak terserap <i>Investment value Not absorbed</i>	<5%	>5-10%	>10-15%
11	IDSURVEY mengutamakan dan memastikan atas keamanan informasi, kehandalan infrastruktur IT dan kesiapan teknologi siber. <i>IDSURVEY prioritizes and ensures information security, IT infrastructure reliability and cyber technology readiness.</i>	Keamanan informasi <i>Information security</i>	Operasional <i>Operational</i>	Server tidak dapat diakses <i>Server inaccessible</i>	>3-6 jam <i>>3-6 hours</i>	>6-12 jam <i>>6-12 hours</i>	>12-24 jam <i>>12-24 hours</i>
12	IDSURVEY mengambil risiko menengah untuk pengembangan talenta yang mampu bertahan dalam memenangkan persaingan dalam industri TIC. <i>IDSURVEY is taking a medium risk for the development of talents who can survive to win the competition in the TIC industry.</i>	Pengembangan Talenta muda & talenta perempuan <i>Young talent & female talent development</i>	Operasional <i>Operational</i>	Prosentase Penurunan Index Kepuasan Pegawai <i>Percentage of the decrease in employee satisfaction index</i>	>5-10%	>10-15%	>15-20%

Toleransi Risiko

Risk Tolerance

Toleransi risiko (*Risk Tolerance*) ditetapkan oleh Direksi IDSURVEY dengan tujuan untuk menjadi batasan besaran risiko yang masih dapat diterima atau diambil oleh Direksi IDSURVEY dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang tidak akan mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Toleransi risiko merupakan batasan maksimal besaran risiko yang masih dapat diterima atau diambil oleh Direksi IDSURVEY dan disesuaikan dengan kemampuan organisasi.

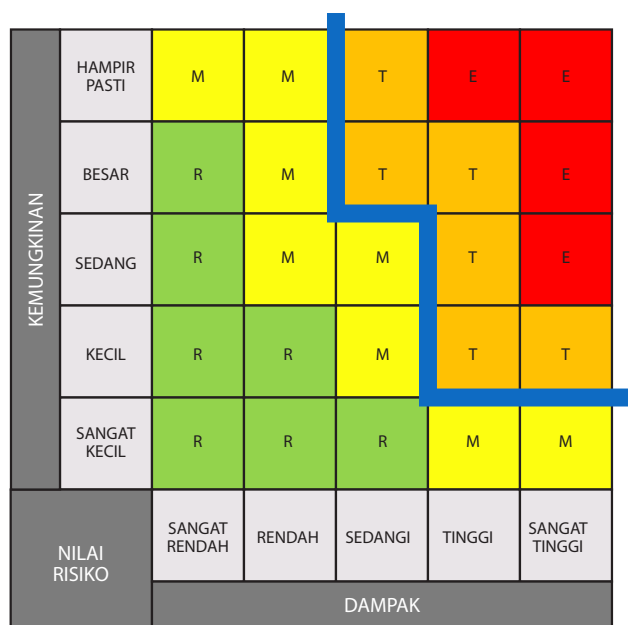
Risk Tolerance is set by the IDSURVEY Board of Directors with the aim of being a limit to the amount of risk that can still be accepted or taken by the IDSURVEY Board of Directors in the implementation of operational activities that will not interfere with the achievement of overall organizational goals. Risk tolerance is the maximum limit of the amount of risk that can still be accepted or taken by the IDSURVEY Board of Directors and adjusted to the capabilities of the organization.

Peta Risiko

Risk Map

Peta risiko adalah gambaran secara visual risiko-risiko yang dihadapi organisasi IDSURVEY, dalam suatu matriks kemungkinan dan dampak. Peta risiko berfungsi sebagai *dashboard* bagi manajemen dan Direksi IDSURVEY, yang memperlihatkan posisi risiko pada kondisi *inherent*, *existing* dan *residual*. Dengan memetakan risiko, Direksi IDSURVEY dapat melihat kapabilitas organisasi untuk mengelola risiko sampai tingkat risiko yang dapat diterima sesuai kapasitas.

A risk map is a visual depiction of the risks faced by the IDSURVEY organization, in a matrix of likelihood and impact. The risk map serves as a dashboard for IDSURVEY's management and Board of Directors, showing the risk position at *inherent*, *existing* and *residual* conditions. By mapping risks, IDSURVEY's Board of Directors can see the organization's capability to manage risks to an acceptable level of risk according to capacity.



Toleransi Risiko | Risk Tolerance

Kriteria Risiko

Risk Criteria

Kriteria Kemungkinan Risiko

Kriteria kemungkinan Risiko merupakan acuan yang dipergunakan dalam proses penilaian risiko dalam bentuk batas ukuran kemungkinan yang mempengaruhi sasaran perusahaan.

Risk Likelihood Criteria

Risk likelihood criteria is a reference used in the risk assessment process in the form of a limit to the size of the possibility that affects the company's goals.



Kemungkinan Risiko <i>Risk Likelihood</i>	Nilai <i>Value</i>	Kriteria Kuantitatif <i>Quantitative Criteria</i>	Kriteria Kualitatif <i>Qualitative Criteria</i>
Hampir Pasti <i>Highly Likely</i>	5	Kemungkinan 81%-100% <i>Likelihood 81%-100%</i>	Sangat mungkin pasti terjadi/sering <i>Very likely to happen/often</i>
Besar <i>Likely</i>	4	Kemungkinan 61%-80% <i>Likelihood 61%-80%</i>	Kemungkinan besar terjadi <i>Most likely to happen</i>
Sedang <i>Possible</i>	3	Kemungkinan 41%-60% <i>Likelihood 41%-60%</i>	Sama kemungkinannya terjadi & tidak terjadi <i>Equally likely to happen & not happen</i>
Kecil <i>Unlikely</i>	2	Kemungkinan 21%-40% <i>Likelihood 21%-40 %</i>	Kemungkinan kecil terjadi <i>Less likely to happen</i>
Sangat Kecil <i>Highly Unlikely</i>	1	Kemungkinan 1%-20% <i>Likelihood 1%-20 %</i>	Cenderung tidak mungkin terjadi <i>Unlikely to happen</i>

Kriteria Dampak Risiko

Kriteria dampak risiko merupakan acuan yang dipergunakan dalam proses penilaian risiko dalam bentuk batas ukuran dampak yang memengaruhi sasaran perusahaan.

Risk Impact Criteria

Risk impact criteria are references used in the risk assessment process in the form of impact size limits that affect company goals.

Dampak Risiko Kepatuhan

Perseroan menggolongkan dampak risiko sebagai berikut:

Compliance Risk Impact

The Company classifies the risk impact as follows:

DAMPAK RISIKO KEPATUHAN <i>IMPACT OF COMPLIANCE RISK</i>					
Sangat Besar <i>Severe</i>	5	Ketidakpatuhan terhadap peraturan/standar perundang-undangan yang berlaku <i>Non-compliance with applicable laws and regulations/standards</i>	Opini Laporan Keuangan Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>) <i>Not Expressing Opinion on Financial Statement (Disclaimer)</i>	Skor GCG tercapai <50% <i>GCG score achieved <50%</i>	Tidak mendapat Sertifikasi atau Akreditasi ISO <i>Failed to receive ISO Certification or Accreditation</i>
Besar <i>Significant</i>	4	Ketidakpatuhan terhadap perjanjian dengan komunitas sekitar yang berlaku <i>Non-compliance with applicable agreements with neighboring communities</i>	Opini Laporan Keuangan Tidak Wajar (<i>Adverse</i>) <i>Unfair (Adverse) Financial Statement Opinion</i>	Skor GCG tercapai 51%-59% <i>GCG score between 51%-59%</i>	Mendapat Sertifikasi atau Akreditasi ISO dengan temuan major (ditangguhkan) <i>Received ISO Certification or Accreditation with major findings (deferred)</i>
Sedang <i>Moderate</i>	3	Ketidakpatuhan terhadap perjanjian dengan pihak pengguna jasa/pemberi kerja yang berlaku <i>Non-compliance with agreements with applicable service users/employers</i>	Opini Laporan Keuangan Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified</i>) <i>Qualified Financial Statement Opinion</i>	Skor GCG tercapai 60%-74% <i>GCG score between 60%-74%</i>	Mendapat Sertifikasi atau Akreditasi ISO dengan pengurangan lingkup Sertifikasi yang diajukan <i>Received ISO Certification or Accreditation with a reduction in the scope of the proposed Certification</i>
Kecil <i>Minor</i>	2	Ketidakpatuhan terhadap peraturan/kebijakan perusahaan yang berlaku <i>Non-compliance with applicable company regulations/policies</i>	Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified</i>) <i>Unqualified Opinion on Financial Statement</i>	Skor GCG tercapai 75%-85% <i>GCG score between 75%-85%</i>	Mendapat Sertifikasi atau Akreditasi ISO dengan temuan minor dan tidak ada temuan major <i>Received ISO Certification or Accreditation with minor findings and no major findings</i>
Sangat Kecil <i>Negligible</i>	1	Ketidakpatuhan terhadap SOP dan dokumen setara lainnya yang berlaku <i>Non-compliance with applicable SOPs and other equivalent documents</i>	Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified</i>) <i>Unqualified Opinion on Financial Statement</i>	Skor GCG tercapai >85% <i>GCG score achieved >85%</i>	Mendapat Sertifikasi atau Akreditasi ISO tanpa temuan minor <i>Achieved ISO Certification or Accreditation without minor findings</i>



Dampak Risiko Hukum

Legal Risk Impact

DAMPAK RISIKO HUKUM LEGAL RISK IMPACT			
Sangat Besar	5	Adanya Tuntutan Pidana kepada Personil/Perusahaan.	Gugatan hukum kepada personil/perusahaan dan kalah dalam persidangan berdampak pada dihentikannya kegiatan operasional
Severe		<i>Received Criminal Charges to Personnel/the Company.</i>	<i>Lawsuits against personnel/companies and losing the trial resulted in the cessation of operational activities.</i>
Besar	4	Adanya Tuntutan Perdata, (Hukuman denda, Pengembalian Dana, Pekerjaan Ulang) kepada personil/Perusahaan.	Gugatan hukum kepada personil/Perusahaan dan kalah dalam persidangan
Significant		<i>Receive Civil Charges, (Fines, Refunds, Re-work) to personnel/Companies.</i>	<i>Lawsuits against personnel/companies and lost in the trial.</i>
Sedang	3	Mendapat Somasi kepada karyawan/Perusahaan	Gugatan hukum kepada personil/Perusahaan dan masuk dalam persidangan/pengadilan
Moderate		<i>Received Somation to the employee/company</i>	<i>Lawsuits against personnel/company and must be in trial/court</i>
Kecil	2	Mendapat teguran tertulis dari <i>stakeholder</i> eksternal kepada karyawan/Perusahaan	Adanya pelaporan/gugatan hukum, dan ditangani oleh pihak kepolisian/ yang berwajib
Minor		<i>Received written warning from external stakeholder to employees/companies</i>	<i>Reporting/lawsuits, and handled by the police/authorities</i>
Sangat Kecil	1	Mendapat teguran lisan dari <i>stakeholder</i> eksternal kepada karyawan/Perusahaan	Adanya pengaduan/Laporan kepada personil/Perusahaan, namun dapat diselesaikan oleh Perusahaan
Negligible		<i>Received verbal warning from external stakeholder to the employee/company</i>	<i>Complaints/Reports to personnel/Company, but can be resolved by the Company</i>

Dampak Risiko Reputasi

Impact of Reputation Risk

DAMPAK RISIKO REPUTASI IMPACT OF REPUTATION RISK			
Sangat Besar	5	Hilangnya kepercayaan <i>Stakeholder</i> eksternal disertai pemutusan hubungan kerja sama dan/atau tuntutan	Pemberitaan negatif dalam lingkup media nasional dan internasional
Severe		<i>Loss of trust of external stakeholders along with termination of cooperation and/or demands</i>	<i>Negative publicity in the national and international media</i>
Besar	4	Adanya keluhan yang terdokumentasi secara berulang dari <i>stakeholder</i> internal dan/atau eksternal terhadap pelayanan/ kinerja operasional perusahaan	Pemberitaan negatif dalam lingkup media nasional dan atau adanya pemberitaan negatif di media sosial sesuai fakta
Significant		<i>Receiving documented complaints on a recurring basis from internal and/or external stakeholders about the company's services/operational performance</i>	<i>Negative publicity in the national media and/or negative coverage on social media in accordance with the facts</i>
Sedang	3	Adanya keluhan yang terdokumentasi dari <i>stakeholder</i> eksternal terhadap pelayanan/kinerja operasional Perusahaan	Pemberitaan negatif dalam lingkup media regional/daerah
Moderate		<i>Receiving documented complaints from external stakeholders about the Company's operational services/performance</i>	<i>Negative publicity within the regional/regional media</i>


DAMPAK RISIKO REPUTASI
IMPACT OF REPUTATION RISK

Kecil	2	Adanya keluhan yang terdokumentasi dari <i>stakeholder</i> internal terhadap pelayanan/kinerja operasional Perusahaan	Pemberitaan negatif dalam lingkup komunitas usaha sejenis
Minor		<i>Receive documented complaints from internal stakeholders about the Company's operational services/performance</i>	<i>Negative publicity within similar business communities.</i>
Sangat Kecil	1	Adanya keluhan yang bersifat administratif yang terdokumentasi secara tertulis ke Perusahaan.	Adanya pemberitaan negatif dalam lingkup internal
Negligible		<i>Receive documented administrative complaints in writing to the Company.</i>	<i>Negative publicity within the internal scope</i>

Dampak Risiko Strategis
Strategic Risk Impact
DAMPAK RISIKO STRATEGIS
STRATEGIC RISK IMPACT

Sangat Besar	5	<i>Market share</i> berkurang >30% <i>Market share reduced by >30%</i>	Ketidakselarasan visi misi, RJPP dan KPI Holding <i>Misalignment of Holding's vision and mission, RJPP and KPIs</i>
Besar	4	<i>Market share</i> berkurang 20%-30% <i>Market share reduced by 20%-30%</i>	Ketidakselarasan visi misi, RJPP dan KPI Departemen <i>Misalignment of mission and vision, RJPP and KPI of the Department</i>
Sedang	3	<i>Market share</i> berkurang 15%-20% <i>Market share reduced by 15%-20%</i>	Ketidakselarasan visi misi, RJPP dan KPI Divisi <i>Misalignment of mission vision, RJPP and KPI Division</i>
Kecil	2	<i>Market share</i> berkurang 10%-15% <i>Market share reduced by 10%-15%</i>	Ketidakselarasan visi misi, RJPP dan KPI Unit <i>Misalignment of mission vision, RJPP and KPI Unit</i>
Sangat Kecil	1	<i>Market share</i> berkurang <10% <i>Market share reduced <10%</i>	Ketidakselarasan KPI Unit <i>Misalignment of KPI Unit</i>

Dampak Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Impact of Occupational Health and Safety (OHS) Risks
DAMPAK RISIKO K3 (KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA)
IMPACT OF OHS (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY) RISKS

Sangat Besar	5	Terluka berat/cacat permanen yang mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja kembali, gangguan kesehatan emosional, <i>stress</i> /depresi/trauma berat	
Severe		<i>Seriously injured/permanently disabled, resulting in a person unable to return to work, emotional health disorder, severe stress/depression/trauma</i>	
Besar	4	Terluka berat yang mengakibatkan cacat permanen, namun dapat bekerja kembali, gangguan kesehatan emosional, <i>stress</i> /depresi/trauma berat	
Significant		<i>Seriously injured resulting in permanent disability, but able to work again, yet experiencing health and emotional disorders, severe stress/depression/trauma</i>	
Sedang	3	Terluka berat, gangguan kesehatan, emosional, <i>stress</i> /depresi/trauma	
Moderate		<i>Severely injured, and suffering from health and emotional disorders, stress/depression/trauma</i>	
Kecil	2	Terluka berat, gangguan kesehatan, emosional, rawat inap	
Minor		<i>Severely injured, and experiencing health and emotional disorders, Hospitalization</i>	
Sangat Kecil	1	Terluka, gangguan kesehatan, rawat jalan	
Negligible		<i>Injured, health impairment, outpatient</i>	



Dampak Risiko Operasional Kerja

Impact of Operational/Performance Risk

DAMPAK RISIKO OPERASIONAL/KINERJA IMPACT OF OPERATIONAL/PERFORMANCE RISK						
Sangat Besar	5	Kepuasan Pelanggan 75% < 80%	KPI Korporat/Unit < 80%	Aktivitas terhenti > 5 hari	Posisi/jabatan/kompetensi yang wajib tidak terpenuhi > 6 bulan.	Server tidak dapat diakses > 48 jam
Severe		Customer Satisfaction 75% < 80%	Corporate/Unit KPI < 80%	Activity halted > 5 days	Mandatory position/job title/competency is unfulfilled > 6 months.	Server inaccessible > 48 hours
Besar	4	Kepuasan Pelanggan 80% < 85%	KPI Korporat/Unit > 80% - 85%	Aktivitas terhenti > 3-5 hari	Posisi/jabatan/kompetensi yang wajib tidak terpenuhi 4 sampai dengan < 6 bulan	Server tidak dapat diakses 24-48 jam
Significant		Customer Satisfaction 80% < 85%	Corporate/Unit KPI > 80% - 85%	Downtime > 3-5 days	Mandatory position/position/competency is unfulfilled 4 to < 6 months	Server inaccessible 24 hours-48 hours
Sedang	3	Kepuasan Pelanggan 85% < 90%	KPI Korporat/Unit > 85% - 90%	Aktivitas terhenti > 1-3 hari	Posisi/jabatan/kompetensi yang wajib tidak terpenuhi 2 sampai dengan < 4 bulan	Server tidak dapat diakses 12-24 jam
Moderate		Customer Satisfaction 85% < 90%	Corporate/Unit KPI > 85% - 90%	Downtime > 1-3 days	Mandatory position/position/competency is unfulfilled 2 to < 4 months	Server inaccessible 12-24 hours
Kecil	2	Kepuasan Pelanggan 90% < 95	KPI Korporat/Unit > 90% - 95%	Aktivitas terhenti > 4 jam sampai dengan 1 hari	Posisi/jabatan/kompetensi yang wajib tidak terpenuhi 1 sampai dengan < 2 bulan.	Server tidak dapat diakses 3-12 jam
Minor		Customer Satisfaction 90% < 95	Corporate/Unit KPI > 90% - 95%	Downtime > 4 hours to 1 day	Mandatory position/position/competency is unfulfilled 1 to < 2 months.	Server inaccessible 3-12 hours
Sangat Kecil	1	Kepuasan Pelanggan > 95%	KPI Korporat/Unit > 95%	Aktivitas terhenti 2-4 jam	Posisi/jabatan/kompetensi yang wajib tidak terpenuhi < 1 bulan.	Server tidak dapat diakses < 3 jam.
Negligible		Customer Satisfaction > 95%	Corporate/Unit KPI > 95%	Downtime activity 2-4 hours	Mandatory position/position/competency is unfulfilled < 1 month.	Server inaccessible < 3 hours.

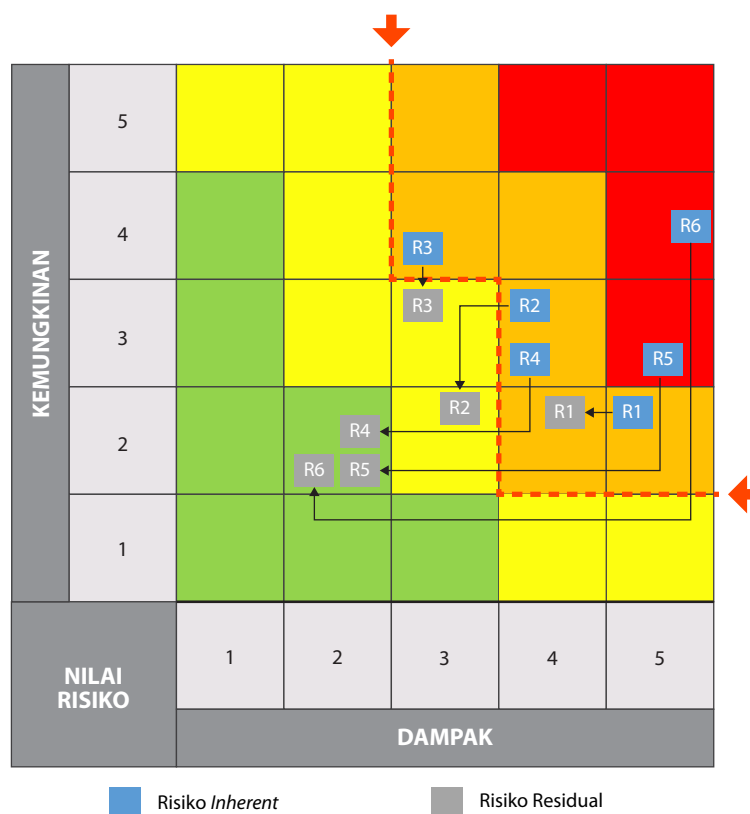
Dampak Risiko Finansial

Impact of Financial Risk

DAMPAK RISIKO FINANSIAL IMPACT OF FINANCIAL RISK						
Sangat Besar	5	Ketidaktercapaian target pendapatan korporasi > 5%	Ketidaktercapaian target pendapatan korporasi > 5%	Ketidaktercapaian sasaran BOPO > 2,7% RKAP	Kehilangan profit margin/EBITDA > 5% dari RKAP	
Severe		Failure to achieve corporate revenue target > 5%	Failure to achieve corporate revenue target > 5%	Failure to achieve BOPO target > 2.7% RKAP	Loss of profit margin/EBITDA > 5% of RKAP	
Besar	4	Ketidaktercapaian target pendapatan korporasi > 4-5%	Ketidaktercapaian target pendapatan korporasi > 4-5%	Ketidaktercapaian sasaran BOPO > 2-2,7% RKAP	Kehilangan profit margin/EBITDA > 4-5% dari RKAP	
Significant		Failure to achieve corporate income target > 4-5%	Failure to achieve corporate income target > 4-5%	Failure to achieve BOPO target > 2-2.7% RKAP	Loss of profit margin/EBITDA > 4-5% of RKAP	
Sedang	3	Ketidaktercapaian target RKAP pendapatan korporasi > 3-4%	Ketidaktercapaian target RKAP pendapatan korporasi > 3-4%	Ketidaktercapaian sasaran BOPO > 1,5-2% RKAP	Kehilangan profit margin/EBITDA > 3-4% dari RKAP	
Moderate		Failure to achieve RKAP target of corporate income > 3-4%	Failure to achieve RKAP target of corporate income > 3-4%	Failure to achieve BOPO target > 1.5-2% RKAP	Loss of profit margin/EBITDA > 3-4% of RKAP	
Kecil	2	Ketidaktercapaian target pendapatan korporasi > 2-3%	Ketidaktercapaian target pendapatan korporasi > 2-3%	Ketidaktercapaian sasaran BOPO > 1-1,5% RKAP	Kehilangan profit margin/EBITDA > 2-3% dari RKAP.	
Minor		Failure to achieve corporate income target > 2-3%	Failure to achieve corporate income target > 2-3%	Failure to achieve BOPO target > 1-1.5% RKAP	Loss of profit margin/EBITDA > 2-3% of RKAP	
Sangat Kecil	1	Ketidaktercapaian target pendapatan korporasi > 1-2%	Ketidaktercapaian target pendapatan korporasi > 1-2%	Ketidaktercapaian sasaran BOPO > 0,5-1% RKAP	Kehilangan profit margin/EBITDA > 1-2% dari RKAP.	
Negligible		Failure to achieve corporate income target > 1-2%	Failure to achieve corporate income target > 1-2%	Failure to achieve BOPO target > 0.5-1% RKAP	Loss of profit margin/EBITDA > 1-2% from RKAP.	

Peta Risiko Awal dan Residual Perseroan

Map of The Company's Initial and Residual Risks



Risiko Utama

Top Risks

No.	Sasaran Target	Kategori Risiko Risk Category	Peristiwa Risiko Risk Event	Realisasi Perlakuan Risiko Realization of Risk Treatment
1.	EBITDA	Risiko Strategis	Adanya Pencabutan/Perubahan Regulasi/kebijakan Pemerintah/ <i>stakeholder</i> lainnya maupun perubahan situasi politik/ekonomi/sosial yang berpengaruh atas pendelegasian tugas, pokok dan Fungsi terkait bisnis dan pengembangan IDSurvey.	1. Penetapan KPI Regional dan KPI Sinergi 2. Melakukan <i>oversight</i> dengan Kementerian terkait 3. Perpanjangan PKS antara Kemenhub RI dengan BKI dengan durasi 2 tahun
		Strategic Risk	<i>The revocation/change of regulations/government policies/other stakeholders as well as changes in the political/economic/social situation that affect the delegation of duties, principal and functions related to the business and development of IDSurvey.</i>	1. <i>Establishment of Regional KPIs and Synergy KPIs</i> 2. <i>Conduct oversight with relevant Ministries</i> 3. <i>Extension of PKS between the Ministry of Transport and BKI with a duration of 2 years</i>



No.	Sasaran Target	Kategori Risiko Risk Category	Peristiwa Risiko Risk Event	Realisasi Perlakuan Risiko Realization of Risk Treatment
2.	CFO	Risiko Keuangan <i>Financial Risk</i>	Piutang tak tertagih lebih dari 1 tahun <i>Non-collectible receivables of more than 1 year</i>	Telah dibentuk PMO penagihan piutang <i>A PMO for accounts receivable collection has been appointed.</i>
3.	BOPO	Risiko Keuangan <i>Financial Risk</i>	Kenaikan biaya operasional dikarenakan kenaikan harga BBM, suku bunga dan nilai dolar Amerika <i>Increase in operating costs due to rising fuel prices, interest rates and the value of the US dollar</i>	Pengendalian dan perencanaan RAB yang lebih akurat <i>More accurate control and planning of RAB</i>
4.	Pengembangan dan pengayaan jasa <i>End to End Service</i> sesuai refocusing bisnis <i>End to End Service development and enrichment in accordance with business refocusing</i>	Risiko Operasional <i>Operational Risk</i>	Keluhan pelanggan, menurunnya kepuasan pengguna jasa <i>Customer complaints, decreased service user satisfaction</i>	Melakukan <i>mapping account planning</i> , melakukan penyusunan penetapan KPI Regional dan KPI Sinergi <i>Mapping Account Planning, preparing the determination of Regional KPIs and Synergy KPIs</i>
5.	Keamanan informasi <i>Information security</i>	Risiko Operasional <i>Operational Risk</i>	1. Data penting perusahaan bocor atau rusak 2. <i>Sistem Down</i> 1. <i>Important company data is leaked or damaged</i> 2. <i>System down</i>	Telah menggunakan UPS, Genset khusus pendukung IT dan <i>Data Center</i> , dan telah dilakukan sertifikasi ISO 27000 <i>Has used UPS, special generators to support IT and Data Centre, and ISO 27000 certification has been carried out.</i>
6.	Pengembangan Talenta Muda & Talenta Perempuan <i>Young Talent & Female Talent Development</i>	Risiko Strategis <i>Strategic Risks</i>	1. Demotivasi 2. Penurunan produktivitas pegawai 1. <i>Demotivation</i> 2. <i>Decrease in employee productivity</i>	Telah dilakukan perencanaan program pelatihan bersama, dan melakukan penyesuaian struktur organisasi <i>Joint training programmes have been planned, and organisational structure adjusted.</i>

Catatan Kejadian Kerugian (*Loss Event Database*)

Loss Event Database

Untuk catatan kejadian kerugian sampai akhir tahun 2023 tidak terdapat *loss event database* di level *holding* yang tercermin pada tabel dibawah ini:

Until the end of 2023, there is no loss event database at the holding level as reflected in the table below:

No.	Peristiwa Risiko Risk Event	Dampak Risiko Risk Impact	Nilai Kerugian Peristiwa Risiko Loss Value of Risk Event
1.	Nil	Nil	Nil



Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance

Tata kelola terintegrasi merupakan rangkaian kebijakan, aturan, atau kerangka kerja yang digunakan memitigasi Risiko untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Integrated governance is a set of policies, rules, or frameworks used to mitigate risks to achieve the Company's objectives.

Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Sebagai BUMN dengan Klasifikasi Risiko Sistemik A, Perusahaan wajib memiliki Organ Pengelola Risiko yang terdiri dari:

1. Direksi
2. Direktur yang Membidangi Manajemen Risiko
3. Dewan Komisaris
4. Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola
5. Satuan Pengawasan Internal (SPI)
6. Divisi Manajemen Risiko

Integrated Governance Structure

As an SOE with Systemic Risk Classification A, the Company is required to have a Risk Management Organ consisting of:

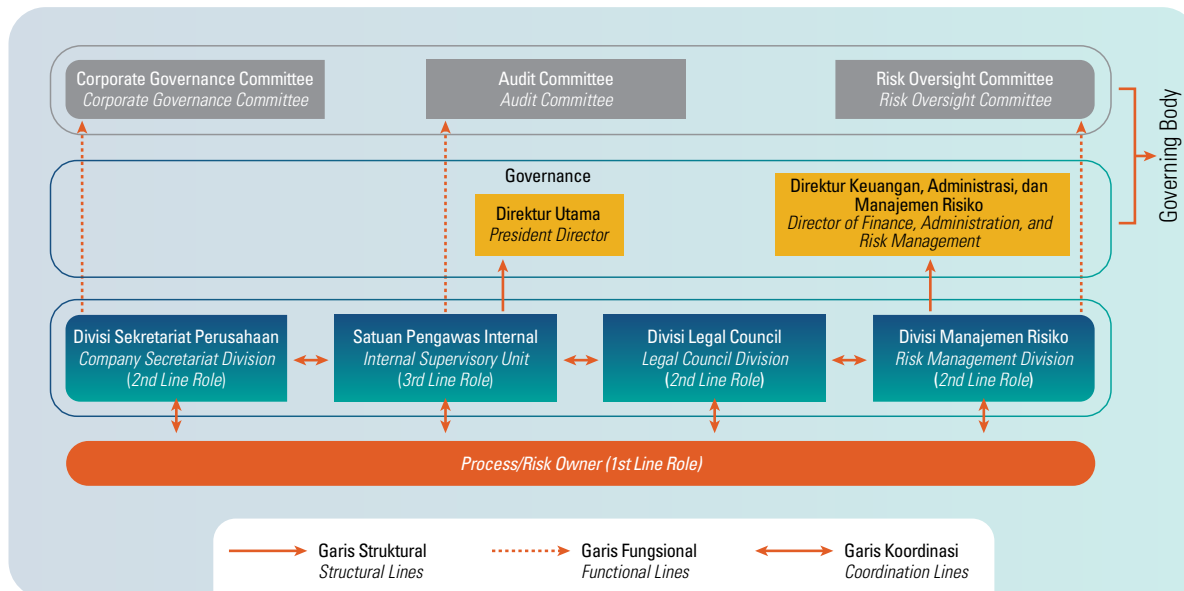
1. *Board of Directors*
2. *Director in charge of Risk Management*
3. *Board of Commissioners*
4. *Risk Monitoring & Governance Committee*
5. *Internal Audit Unit (SPI)*
6. *Risk Management Division*

Untuk membuktikan kompetensi mereka, Seluruh Organ Pengelola Risiko Perusahaan telah memperoleh berbagai sertifikasi yang relevan dan diakui dalam bidang manajemen risiko. Beberapa sertifikasi yang dimiliki oleh anggota Organ Pengelola Risiko, yaitu Profesional Tata Kelola Berkualifikasi lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis. Beberapa sertifikasi yang dimiliki oleh anggota Organ Pengelola Risiko, yaitu Profesional Tata Kelola Berkualifikasi/*Qualified Risk Governance Professional (QRGP)*.

All Company Risk Management Organs have obtained various relevant and recognised certifications in the field of risk management, showcasing their competence. These certifications encompass a wide range of skills and knowledge necessary for effectively managing risk in a complex and ever-changing business environment. Members of the Risk Management Organ hold certifications such as Qualified Risk Governance Professional (QRGP).

Sesuai dengan Keputusan Direksi tentang Pedoman *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) atau Tata Kelola Terintegrasi, maka IDSURVEY telah menetapkan struktur organisasi GRC, yang diadopsi dari *3 Lines Model Institute of Internal Audit (IIA)*, mencakup adopsi dari fungsi *1st line*, *2nd line*, dan *3rd line*. Perusahaan telah melakukan penilaian tingkat maturitas risiko (RMI) tahun 2022 secara mandiri (*self-assessment*), namun belum berdasarkan SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di lingkungan BUMN.

In accordance with the Decree of the Board of Directors on the Guidelines for Governance, Risk, and Compliance (GRC) or Integrated Governance, IDSURVEY has established a GRC organizational structure, which is adopted from the 3 Lines Model of the Institute of Internal Audit (IIA), including the adoption of 1st line, 2nd line, and 3rd line functions. The company conducted a self-assessment of the Risk Maturity Index (RMI) for 2022, although it was not yet based on SK-8/DKU.MBU/12/2023 concerning the Technical Guidelines for the Risk Maturity Index Assessment within State-Owned Enterprises (BUMN).



Berdasarkan struktur GRC diatas, IDSurvey telah menetapkan fungsi penerapan GRC adalah:

1. Seluruh proses/*risk owner* sebagai *1st line role*,
2. Divisi Sekretariat Perusahaan sebagai *2nd line role* Tata Kelola dan Kepatuhan,
3. Divisi Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen *holding* sebagai *2nd line role* Manajemen Risiko, dan
4. Satuan Pengawas Internal sebagai *3rd line role*.

Based on the GRC structure above, IDSurvey has determined the functions of implementing GRC are:

1. All process/*risk owners* as *1st line role*,
2. Corporate Secretariat Division as *2nd line role* of Governance and Compliance,
3. Risk Management Division and Holding Management Department as the *2nd line role* of Risk Management, and
4. Internal Audit Unit as *3rd line role*.

Proses Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance Process





Untuk mendukung penerapan GRC di IDSURVEY, Perusahaan telah menetapkan bahwa Departemen Manajemen Holding bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi fungsi Manajemen Risiko Holding dan Entitas Anak dengan menghadiri *joint session* bersama dengan *Risk Oversight Committee* dan fungsi Manajemen Risiko dalam rangka evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di IDSURVEY. Departemen Manajemen Holding berada di bawah Direktur Utama.

Di bawah Departemen Manajemen Holding terdapat bagian Konsolidasi Keuangan dan Manajemen Risiko yang bertugas untuk:

1. Melakukan koordinasi dalam rangka Manajemen Risiko Holding.
2. Koordinator praktik GRC di IDSURVEY.

Dalam pelaksanaannya *Corporate Secretary* bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama dan bertanggung jawab secara fungsional kepada *Corporate Governance Committee*.

Tugas dan tanggung jawab fungsi *Corporate Secretary* dalam penerapan GRC di IDSURVEY adalah sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan semua pelaksanaan *Corporate Governance* di IDSURVEY; dan
2. Memastikan hierarki kebijakan dan prosedur diadopsi oleh seluruh unit organisasi IDSURVEY.
3. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Utama terkait dengan pengelolaan kepatuhan di IDSURVEY.

Dalam penerapan GRC di IDSURVEY, Divisi Manajemen Risiko berperan sebagai *2nd Line*. Dalam pelaksanaannya, Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dan bertanggung jawab secara fungsional kepada *Risk Oversight Committee*. Tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko dalam penerapan GRC di IDSURVEY adalah sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan risiko yang dilakukan oleh *Risk Owner*; dan
2. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko terkait dengan pengelolaan risiko di IDSURVEY.

Dalam penerapan GRC di IDSURVEY, Bagian Legal berperan sebagai *2nd Line*. Dalam pelaksanaannya, Divisi Legal bertanggung jawab secara struktural kepada Divisi Sekretaris Perusahaan dan bertanggung jawab secara fungsional kepada *Corporate Governance Committee*.

To support the implementation of GRC in IDSURVEY, the Company has stipulated that the Holding Management Department is responsible for coordinating the Risk Management function of the Holding and Subsidiaries by attending joint sessions with the Risk Oversight Committee and the Risk Management function in order to evaluate the implementation of risk management in IDSURVEY. The Holding Management Department is under the President Director.

Under the Holding Management Department is the Financial Consolidation and Risk Management section responsible for:

1. *Coordinating in the framework of Holding Risk Management.*
2. *Coordinator of GRC practices in IDSURVEY.*

In its implementation, the Corporate Secretary is structurally responsible to the President Director while functionally responsible to the Corporate Governance Committee.

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary function in implementing GRC at IDSURVEY are as follows:

1. *Coordinating all implementation of Corporate Governance at IDSURVEY; and*
2. *Ensure the hierarchy of policies and procedures are adopted by all organizational units of IDSURVEY.*
3. *Report periodically to the President Director regarding compliance management at IDSURVEY.*

In implementing GRC at IDSURVEY, the Risk Management Division acts as the 2nd Line of Defense. In its implementation, the Risk Management Division is structurally responsible to the Director of Finance and Risk Management and functionally responsible to the Risk Oversight Committee. The duties and responsibilities of the Risk Management Division in implementing GRC at IDSURVEY are as follows:

1. *Coordinating all risk management activities carried out by the Risk Owner; and*
2. *Reporting periodically to the Director of Finance and Risk Management related to risk management at IDSURVEY.*

In the implementation of GRC at IDSURVEY, the Legal Division acts as the 2nd Line. In its implementation, the Legal Division is structurally responsible to the Corporate Secretary Division and functionally responsible to the Corporate Governance Committee.



Tugas dan tanggung jawab Divisi Legal dalam penerapan GRC di IDSurvey adalah sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan kepatuhan yang dilakukan oleh *Compliance Owner*; dan
2. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Utama, melalui Divisi Sekretaris Perusahaan, terkait dengan pengelolaan kepatuhan di IDSurvey.

Dalam penerapan GRC di IDSurvey, Satuan Pengawas Internal berperan sebagai *3rd Line*. Dalam pelaksanaannya, Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama dan bertanggung jawab secara fungsional kepada *Audit Committee*.

Struktur dan kedudukan fungsi Audit Intern IDSurvey adalah sebagai berikut:

1. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Intern yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama IDSurvey.
2. Kepala Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Audit Intern setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Audit Intern tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
4. Auditor dan jajaran Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Audit Intern.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawas Internal dalam penerapan GRC di IDSurvey adalah sebagai berikut:

1. Membantu Direksi dan *Audit Committee* dalam penerapan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC)
2. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Audit Intern tahunan berdasarkan hasil analisis risiko (*risk-based audit*);
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Komite Audit; dan
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (*corrective action*) perbaikan yang telah disarankan.

The duties and responsibilities of the Legal Division in implementing GRC at IDSurvey are as follows:

1. *Coordinating all compliance management activities carried out by the Compliance Owner; and*
2. *Reporting periodically to the President Director, through the Corporate Secretary Division, regarding compliance management at IDSurvey.*

In the implementation of GRC at IDSurvey, the Internal Audit Unit acts as the 3rd Line. In its implementation, the Internal Audit Unit is structurally responsible to the President Director and functionally responsible to the Audit Committee.

The structure and position of IDSurvey's Internal Audit function are as follows:

1. *The Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit who in carrying out his duties is directly responsible to the President Director of IDSurvey.*
2. *The Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.*
3. *The President Director may dismiss the Head of Internal Audit after obtaining approval from the Board of Commissioners, if the Head of Internal Audit does not meet the requirements as stipulated by the Company's internal regulations and laws and regulations.*
4. *Auditors and staff of the Internal Audit Unit are directly responsible to the Head of Internal Audit.*

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit in implementing GRC at IDSurvey are as follows:

1. *Assist the Board of Directors and Audit Committee in the implementation of Governance, Risk Management, and Compliance (GRC).*
2. *Prepare and implement an annual Internal Audit work plan based on the results of risk analysis (risk-based audit);*
3. *Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with company policies;*
4. *Provide suggestions for improvement and objective information about the activities examined at all levels of management;*
5. *Prepare an audit report and submit the report to the President Director and the Audit Committee; and*
6. *Monitor, analyze and report on the implementation of corrective actions that have been suggested.*



Hasil Tata Kelola Terintegrasi

IDSURVEY menyelaraskan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pemenuhan kepatuhan (*Governance, Risk, dan Compliance/GRC*) sebagai salah satu bentuk penerapan Kinerja Berprinsip. Dalam rangka mencapai tujuan IDSURVEY yakni *Top 5 Leader* Penyedia Layanan *Testing, Inspection, dan Certification (TIC)* di Asia Pasifik, Perusahaan berkomitmen untuk melibatkan berbagai fungsi meliputi *People, Process, Technology*, dan *Information* yang harus beroperasi bersamaan.

Dalam kegiatan operasional, IDSURVEY menggunakan berbagai data yang sama dan berkontribusi dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang berbeda, namun menggunakan prinsip utama yang sama dan memberikan kontribusi informasi secara keseluruhan untuk satu tujuan Perusahaan. Penerapan GRC di lingkungan IDSURVEY memiliki tujuan untuk :

1. Meningkatkan pencapaian sasaran dan peningkatan kinerja;
2. Memastikan kegiatan perusahaan memenuhi aturan etika dan tidak mengandung benturan kepentingan;
3. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif (*early warning system*);
4. Meningkatkan kepatuhan kepada kebijakan dan peraturan internal dan eksternal;
5. Memastikan tindakan dan pengendalian intern yang tepat telah diterapkan untuk mengatasi ketidakpastian;
6. Memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan tepat untuk personel berwenang sesuai dengan kebutuhan;
7. Memastikan penetapan tujuan Perusahaan telah sesuai dengan rencana jangka panjang Perusahaan;
8. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi; dan
9. Menciptakan Perusahaan yang tangguh dan kompetitif dalam menghadapi tantangan.

Hingga saat ini, infrastruktur GRC IDSURVEY dan Anak Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman *Governance, Risk & Compliance*;
2. Prosedur Manajemen Risiko dan Kepatuhan;
3. *Board Manual*;
4. Pedoman Pola Hubungan Induk Anak;
5. Pedoman WBS;
6. Standar berbasis ISO;
7. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Integrated Governance Results

IDSURVEY aligns the implementation of governance, risk management, and compliance (Governance, Risk, and Compliance/GRC) as a form of principled performance. In order to achieve IDSURVEY's goal of Top 5 Leader in Testing, Inspection, and Certification (TIC) Service Provider in Asia Pacific, the Company is committed to involving various functions including People, Process, Technology, and Information that must operate simultaneously.

In its operational activities, IDSURVEY utilizes the same data and contributes to data collection in different ways, but utilizes the same key principles and contributes overall information to the Company's goals. The implementation of GRC within IDSURVEY aims to:

1. *Enhance goal achievement and performance improvement;*
2. *Ensure that the company's activities meet ethical rules and do not contain conflicts of interest;*
3. *Encouraging proactive and anticipatory management (early warning system);*
4. *Improve compliance with internal and external policies and regulations;*
5. *Ensure appropriate internal measures and controls are in place to address uncertainties;*
6. *Ensure the availability of accurate and appropriate information to authorized personnel as required;*
7. *Ensuring the establishment of the Company's objectives is in accordance with the Company's long-term plan;*
8. *Improving the effectiveness of the allocation and efficiency of the use of organizational resources; and*
9. *Creating a resilient and competitive Company in the face of challenges.*

To date, the GRC infrastructure of IDSURVEY and its subsidiaries include the following:

1. *Governance, Risk & Compliance Guidelines;*
2. *Risk Management and Compliance Procedures;*
3. *Board Manual;*
4. *Parent Child Relationship Pattern Guidelines;*
5. *WBS Guidelines;*
6. *ISO based standards;*
7. *Anti-bribery Management System (SMAP).*



Dengan dukungan dari semua *stakeholder*, penerapan GRC di IDSurvey dan Anak Perusahaan telah membawa hasil antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja IDSurvey dan Anak Perusahaan dari tahun ke tahun.
2. Pencapaian target-target yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham.
3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya.
4. Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 dan 2021, membawa Bendera Indonesia berperforma sangat baik atau *White List* berdasarkan Tokyo MoU.
5. Menangkap peluang-peluang bisnis/*opportunity* baru yang sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain: dekarbonisasi, BMDTP COVID, PPNBM 0% dan lain-lain.
6. Berbagai penghargaan, antara lain: GCG Award dan *Digital Culture Excellence Award*

With the support of all stakeholders, the implementation of GRC in IDSurvey and its subsidiaries has brought the following results:

1. *Improved performance of IDSurvey and its subsidiaries from year to year.*
2. *Achievement of targets set by the Shareholders.*
3. *Unqualified Opinion for the Financial Statements of 2021 and previous years.*
4. *During the COVID-19 pandemic in 2020 and 2021, carrying a very good performing Indonesian Flag or White List based on the Tokyo MoU.*
5. *Capturing new business opportunities in line with government policies related to National Economic Recovery (PEN), including: decarbonization, BMDTP COVID, 0% VATBM and others.*
6. *Various awards, among others: GCG Award and Digital Culture Excellence Award*

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil *Assessment* GCG Tahun Sebelumnya pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Pada tahun 2023 PT BKI (Persero) telah melaksanakan penilaian atas kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui asesor eksternal independen dengan skor 88,99 dengan klasifikasi kualitas penerapan "Sangat Baik". Dari hasil asesmen tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilakukan tindak lanjut atas *Area of Improvement* (AOI) dengan rincian sebagai berikut:

Follow-up Recommendations on the Results of the Previous Year's GCG Assessment at PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

In 2023 PT BKI (Persero) has carried out an assessment of the quality of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) through an independent external assessor with a score of 88.99 with a classification of "Very Good" implementation quality. From the assessment results, there are several recommendations that must be followed up on the Area of Improvement (AOI) with the following details:

No	Aspek Aspect	Jumlah AOI Number of AOI	Tindak Lanjut Follow-up	Status Tindak Lanjut Status of Follow-up
1	Aspek komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan <i>Aspects of commitment to the implementation of sustainable governance</i>	1	1	Sesuai rekomendasi <i>In accordance with recommendations</i>
2	Aspek RUPS/Pemilik Modal <i>Aspect of GMS/Capital Owner</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>	-
3	Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>Aspects of the Board of Commissioners/Supervisory Board</i>	9	9	Sesuai rekomendasi <i>In accordance with recommendations</i>



No	Aspek Aspect	Jumlah AOI Number of AOI	Tindak Lanjut Follow-up	Status Tindak Lanjut Status of Follow-up
4	Aspek Direksi <i>Aspects of the Board of Directors</i>	11	5	- Terdapat 5 temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi - Terdapat 6 temuan yang masih dalam proses tindak lanjut - <i>There are 5 findings that have not been followed up according to recommendations</i> - <i>There are 6 findings that are still in the follow-up process</i>
5	Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Aspects of Disclosure and Transparency</i>			- Terdapat 2 temuan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi - Terdapat 5 temuan yang masih dalam proses tindak lanjut - <i>There are 2 findings that have not been followed up according to recommendations</i> - <i>There are 5 findings that are still in the follow-up process</i>
6	Aspek Lain-lain <i>Other Aspects</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>	-



Kode Etik

Code of Conduct

Penerapan Kode Etik atau Kode Perilaku (*Code of Conduct*) adalah salah satu komitmen PT BKI (Persero) untuk melakukan bisnis yang sah dan beretika untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kode Etik Perseroan disusun sebagai acuan dan pedoman etika dan tingkah laku bagi seluruh individu yang bekerja di dalam lingkungan PT BKI (Persero).

Kode Etik merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG secara konsisten. PT BKI (Persero) memiliki sistem nilai yang menentukan etika kerja dan etika bisnis. Etika kerja merujuk pada nilai perusahaan sehingga menjadi pedoman perilaku. Etika bisnis mengatur hal-hal terkait:

1. Integritas dalam berusaha;
2. Data perusahaan dan kerahasiaan informasi;
3. Pernyataan palsu, klaim palsu, dan konspirasi;
4. Penyelewengan dan penyimpangan;
5. Benturan kepentingan
 - a. Benturan dalam hasil survei;
 - b. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
 - c. Benturan kepentingan dalam aktivitas sampingan.

The implementation of the Code of Ethics, or Code of Conduct, is one of PT BKI (Persero) commitments to conduct business legally and ethically in achieving the targets set. The Company's Code of Ethics is prepared to serve as a reference and guideline for ethics and behavior for all individuals working within PT BKI (Persero).

The Code of Conduct is a manifestation of the Company's commitment to implementing GCG consistently. PT BKI (Persero) has a value system that determines work ethics and business ethics. Work ethics refer to the company's values so that they become guidelines for behavior. Business ethics refer to:

1. *Integrity in business;*
2. *Company data and information confidentiality*
3. *False statements, false claims, and conspiracy;*
4. *Misappropriation and irregularities;*
5. *Conflict of interest*
 - a. *Conflict of interest in survey results;*
 - b. *Conflict of interest in procurement;*
 - c. *Conflict of interest in side activities.*

Integritas dalam Berusaha

Integrity in Business

Pada Agustus 2014, telah diterbitkan penyempurnaan *manual handbook GCG Code*, sekaligus diterbitkan *handbook* Pedoman penanganan Gratifikasi dan *Whistleblower System* (WBS). Perusahaan telah mensosialisasikan pedoman ini dan mendistribusikan *Handbook* tersebut kepada seluruh pegawai BKI sebagai pedoman dalam bekerja dalam rangka mempertahankan kejujuran, transparansi, independensi, akuntabilitas, integritas, dan keadilan dalam proses kerja dan transaksi di lingkungan masing-masing. Perusahaan telah menerapkan fungsi pengawasan dengan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar tindakan-tindakan ilegal, tidak *fair* dan pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi, baik administrasi, maupun perdata. Perseroan telah menetapkan kebijakan melarang anggota Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perusahaan dan pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG. Pengertian yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG digunakan untuk menggambarkan

In 2014, the Company published an enhanced GCG Code handbook, as well as a handbook on the Guidelines for Handling Gratuities and the Whistleblower System (WBS). The Company has socialized this guideline and distributed the Handbook to all BKI employees as a guideline in working in order to maintain honesty, transparency, independence, accountability, integrity and fairness in the work process and transactions in their respective environments. The Company has implemented a supervisory function by using audits based on correct and generally accepted principles and always strives so that illegal, unfair actions and violations of applicable norms and regulations can be sanctioned, both administrative and civil. The Company has established a policy prohibiting members of the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees of the Company and related parties from conducting transactions that are contrary to the law and GCG principles. The definition of contrary to the law and GCG principles is used to describe any business transaction that is categorized as unlawful or contrary to



setiap transaksi bisnis yang dikategorikan melawan hukum atau bertentangan dengan integritas Perseroan. Transaksi tersebut, antara lain pemberian atau penerimaan suap dan hadiah yang diberikan dalam upaya mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan.

Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Integritas dalam Berusaha

- Board Manual GCG
- Prosedur Penanganan Gratifikasi
- Prosedur Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS)
- Petunjuk Kerja Tata Kelola
- Panduan Kode Etik
- Pakta integritas
- Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan beserta prosedur terkait
- Penerbitan Surat Edaran Larangan Gratifikasi Dalam Rangka Momen Hari Raya

the integrity of the Company. Such transactions include the giving or receiving of bribes and gifts given in an effort to influence decisions relating to the Company's business.

Guidelines and Procedures for Implementing Integrity in Business

- GCG Board Manual
- Gratification Handling Procedure
- Whistleblowing System* (WBS) Violation Reporting Procedures
- Governance Work Guidelines
- Code of Ethics Guidelines
- Integrity pact
- Anti-Bribery Management System Guidelines and related procedures
- Issuance of Circular Letter on the Prohibition of Gratuities in the Context of Holiday Moments

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Perseroan menjunjung tinggi transparansi serta keterbukaan informasi dan data kepada masyarakat, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. IDSURVEY telah memiliki laman www.idsurvey.id yang menampilkan halaman kanal berbagai informasi maupun data terkait Perseroan.

The Company upholds transparency and disclosure of information and data to the public, in accordance with Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. IDSURVEY has a website www.idsurvey.id which displays channel pages for various information and data related to the Company.

Perkara Penting

Legal Cases

Sepanjang tahun 2023 Perseroan tidak menghadapi perkara penting yang dapat mempengaruhi jalannya Perseroan atau menimbulkan kerugian signifikan, finansial atau non finansial.

Throughout 2023, the Company did not have any important cases that could affect the running of the Company or cause significant losses, financial or non-financial.



07

Tanggung Jawab Sosial & KINERJA KEBERLANJUTAN

Social Responsibility & Sustainability Performance





Kebijakan Keberlanjutan

Sustainability Policy

Makna Keberlanjutan bagi Perseroan

Meanings of Sustainability for The Company

Sebagai perusahaan jasa survei, bersama dengan perusahaan lain di bawah ID Survey, BKI memainkan peran penting dalam memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi di berbagai industri. Perusahaan jasa survei menyediakan layanan inspeksi, verifikasi, pengujian, dan sertifikasi yang membantu bisnis mematuhi peraturan, meningkatkan kinerja, dan memenuhi harapan pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, penekanan pada keberlanjutan menjadi semakin relevan bagi perusahaan jasa survei, yang mempengaruhi operasi, penawaran layanan, dan posisi pasar.

Keberlanjutan telah menjadi perhatian penting bagi bisnis secara global, didorong oleh meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan, perubahan peraturan, dan pergeseran preferensi konsumen. Bagi perusahaan jasa survei, seperti BKI, mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam operasi dan penawaran layanan sangat penting karena beberapa alasan:

1. **Kepatuhan terhadap Peraturan**
Pemerintah dan badan-badan internasional menerapkan peraturan lingkungan yang lebih ketat. Perusahaan jasa survei harus memastikan klien mereka mematuhi peraturan ini untuk menghindari hukuman hukum dan meningkatkan reputasi pasar mereka.
2. **Permintaan Pasar**
Konsumen dan bisnis memprioritaskan keberlanjutan, mencari produk dan layanan yang meminimalkan dampak lingkungan. Perusahaan jasa survei dapat membantu klien memenuhi permintaan ini dengan menyediakan penilaian dan sertifikasi keberlanjutan.
3. **Efisiensi Operasional**
Praktik-praktik berkelanjutan sering kali mengarah pada peningkatan efisiensi operasional. Dengan mengadopsi langkah-langkah penghematan energi, mengurangi limbah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perusahaan jasa survei dapat menurunkan biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas.
4. **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)**
Perusahaan semakin bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan mereka. Perusahaan jasa survei dapat mendukung inisiatif CSR klien mereka dengan menawarkan layanan yang mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan dan berkontribusi pada hasil sosial yang positif.

Seiring dengan meningkatnya fokus global pada keberlanjutan, perusahaan jasa survei akan terus memainkan peran penting dalam mendukung tujuan lingkungan dan sosial bisnis. Dengan memperluas

As a survey services company, together with other companies under ID Survey, BKI plays a crucial role in ensuring quality, safety, and efficiency across various industries. Survey services companies provide inspection, verification, testing, and certification services that help businesses adhere to regulations, enhance performance, and meet customer expectations. In recent years, the emphasis on sustainability has become increasingly relevant to Survey services companies, influencing the operations, service offerings, and market positioning.

Sustainability has become a pivotal concern for businesses globally, driven by increasing awareness of environmental issues, regulatory changes, and shifting consumer preferences. For survey services companies, such as BKI, integrating sustainability into their operations and service offerings is essential for several reasons:

1. **Regulatory Compliance**
Governments and international bodies are implementing stricter environmental regulations. Survey services companies must ensure their clients comply with these regulations to avoid legal penalties and enhance their market reputation.
2. **Market Demand**
Consumers and businesses are prioritizing sustainability, seeking products and services that minimize environmental impact. Survey services companies can help clients meet these demands by providing sustainability assessments and certifications.
3. **Operational Efficiency**
Sustainable practices often lead to improved operational efficiency. By adopting energy-saving measures, reducing waste, and optimizing resource use, survey services companies can lower operational costs and enhance profitability.
4. **Corporate Social Responsibility (CSR)**
Companies are increasingly held accountable for their social and environmental impact. Survey services companies can support their clients' CSR initiatives by offering services that promote sustainable practices and contribute to positive social outcomes.

As the global focus on sustainability intensifies, survey services companies will continue to play a critical role in supporting businesses' environmental and social goals. By expanding sustainability services,



layanan keberlanjutan, perusahaan jasa survei tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan klien mereka yang terus berkembang, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi global yang lebih berkelanjutan dan tangguh.

Bagi BKI, pemerapan prinsip keberlanjutan bukan hanya sebuah tren, melainkan harus menjadi suatu perubahan mendasar dalam cara bisnis beroperasi. Perusahaan jasa survei harus berada di garis depan dalam transformasi ini, membantu klien menavigasi kompleksitas keberlanjutan dan mencapai tujuan lingkungan dan sosial mereka. Melalui keahlian dan komitmen terhadap keberlanjutan, perusahaan jasa survei membuka jalan menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

survey services companies can not only meet the evolving needs of their clients but also contribute to a more sustainable and resilient global economy.

For BKI, the application of sustainability principles is not just a trend, but must be a fundamental change in the way businesses operate. Survey services companies should be at the forefront of this transformation, helping clients navigate the complexities of sustainability and achieve their environmental and social objectives. Through expertise and commitment to sustainability, survey services companies are paving the way for a greener, more sustainable future.

Strategi Keberlanjutan Sustainability Strategy

Strategi keberlanjutan mengacu pada rencana atau pendekatan komprehensif yang diadopsi oleh Perseroan dalam mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan ke dalam operasinya, dengan demikian menangani pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Strategi ini menguraikan langkah-langkah dan inisiatif yang akan diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai keseimbangan antara memenuhi kebutuhan saat ini dan memastikan kesejahteraan generasi mendatang.

A sustainability strategy refers to a comprehensive plan or approach adopted by the Company to integrate sustainable practices into its operations, thereby addressing environmental, social, and economic considerations. This strategy outlines the steps and initiatives an organization intends to take to achieve a balance between meeting its present needs and ensuring the well-being of future generations.

Pada dasarnya, elemen-elemen kunci dari strategi keberlanjutan mencakup hal-hal berikut ini:

1. Penata-layanan Lingkungan;
2. Tanggung Jawab Sosial;
3. Kelayakan Ekonomi;
4. Inovasi dan Teknologi;
5. Keterlibatan Pemangku Kepentingan;
6. Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
7. Metrik dan Pelaporan;
8. Pendidikan dan Pelatihan;
9. Integrasi ke dalam Budaya Perusahaan;
10. Perbaikan Berkesinambungan.

Basically, the key elements of a sustainability strategy include the following:

1. *Environmental Stewardship;*
2. *Social Responsibility;*
3. *Economic Viability;*
4. *Innovation and Technology;*
5. *Stakeholder Engagement;*
6. *Compliance and Risk Management;*
7. *Metrics and Reporting;*
8. *Education and Training;*
9. *Integration into Corporate Culture;*
10. *Continuous Improvement.*

Perseroan percaya bahwa strategi keberlanjutan yang dikembangkan dengan baik tidak hanya memberikan kontribusi terhadap dampak positif organisasi terhadap lingkungan dan masyarakat, namun juga meningkatkan reputasi, menarik investor dan pelanggan yang memiliki kepedulian sosial, serta menumbuhkan ketahanan bisnis jangka panjang.

The Company believes that a well-developed sustainability strategy not only contributes to the organization's positive impact on the environment and society but also enhances its reputation, attracts socially conscious investors and customers, and fosters long-term business resilience.



Tata Kelola Keberlanjutan

Sustainability Governance

Governansi keberlanjutan adalah kerangka kerja sistematis dalam mengelola dan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam perencanaan strategis, operasi, dan proses pengambilan keputusan Perseroan. Hal ini meliputi pembentukan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawaban yang bertujuan untuk memastikan bahwa pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi diatasi dan seimbang dengan baik. Governansi keberlanjutan melibatkan keterlibatan pemangku kepentingan, penetapan target keberlanjutan, pemantauan kinerja, dan pelaporan hasil secara transparan kepada pemangku kepentingan.

Pentingnya governansi keberlanjutan tidak bisa dianggap remeh dalam lanskap bisnis saat ini. Di saat masyarakat dunia semakin menuntut praktik bisnis yang bertanggung jawab dan etis, perusahaan-perusahaan yang memprioritaskan governansi keberlanjutan akan mendapatkan keunggulan kompetitif.

Governansi yang efektif tidak hanya mengurangi risiko yang terkait dengan dampak lingkungan dan sosial, tetapi juga mendorong inovasi, ketahanan, dan penciptaan nilai jangka panjang. Dengan menyelaraskan tujuan bisnis dengan tujuan keberlanjutan, kami dapat meningkatkan reputasi kami, menarik investasi, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga menjamin keberlanjutan kami di tengah lanskap regulasi yang terus berubah dan perubahan preferensi konsumen.

Sebagai warga korporat yang sadar akan tanggung jawab serta menjalankan bisnis dengan penuh kesadaran, BKI berupaya untuk senantiasa menerapkan Governansi Keberlanjutan. Komitmen ini tidak hanya sebatas mematuhi otoritas yang telah ditetapkan atau kerangka hukum; melainkan dipacu oleh pemahaman bahwa governansi yang efektif adalah penentu penting untuk meningkatkan kinerja dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Bagi BKI, tujuan utama penerapan Governansi Keberlanjutan adalah untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan sambil dengan cermat mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari upaya Perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, Tata Kelola Keberlanjutan menganut berbagai prinsip dan komponen penting, yang meliputi:

1. Komitmen Pemimpin

Para pemimpin perusahaan dituntut untuk menunjukkan dedikasi yang teguh terhadap keberlanjutan dan menjadi teladan melalui tindakan mereka. Sangat penting bagi mereka untuk mengartikulasikan visi dan misi berkelanjutan yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai perusahaan.

Sustainability governance is the systematic framework in managing and integrating sustainability principles into strategic planning, operations, and decision-making processes. It encompasses the establishment of policies, procedures, and accountability mechanisms aimed at ensuring that environmental, social, and economic considerations are adequately addressed and balanced. Sustainability governance involves engaging stakeholders, setting sustainability targets, monitoring performance, and transparently reporting outcomes to stakeholders.

The importance of sustainability governance cannot be overstated in today's business landscape. As societies worldwide increasingly demand responsible and ethical business practices, organizations that prioritize sustainability governance gain a competitive edge.

Effective governance not only mitigates risks associated with environmental and social impacts but also fosters innovation, resilience, and long-term value creation. By aligning business objectives with sustainability goals, we can enhance our reputation, attract investment, and contribute positively to society and the environment, thus securing our viability in the face of evolving regulatory landscapes and shifting consumer preferences.

As a conscientious corporate citizen with conscientious business operation, BKI diligently endeavors to adopt Sustainability Governance. This commitment goes beyond mere compliance with established authorities or legal frameworks; rather, it is fueled by the understanding that effective governance is a crucial determinant for enhancing performance and attaining sustainable competitive advantages. For BKI, the primary goal of implementing Sustainability Governance is to create sustainable value while carefully considering the social, environmental and economic impacts of the Company's efforts.

In its execution, Sustainability Governance adheres to various critical principles and components, encompassing:

1. Leader Commitment

The Company leaders are required to demonstrate unwavering dedication to sustainability and set the precedent through their actions. It is imperative for them to articulate a sustainable vision and mission that align with the organization's goals and values.



2. Keterlibatan Pihak Berkepentingan

Perseroan harus secara aktif melibatkan dan berkomunikasi dengan individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan atau kepentingan dalam hasil atau keputusan Perusahaan tersebut, untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka terkait keberlanjutan.

3. Kebijakan dan Strategi Berkelanjutan

Perseroan harus mengembangkan kebijakan dan strategi yang memasukkan aspek-aspek keberlanjutan dalam operasi mereka. Ini mencakup pengurangan dampak lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan prinsip-prinsip etika.

4. Pengukuran Kinerja

Perseroan harus mengukur dan memantau kinerja keberlanjutan mereka secara teratur. Ini termasuk pengukuran dampak lingkungan, pengelolaan risiko, dan pencapaian tujuan keberlanjutan.

5. Pelaporan Keberlanjutan

Perseroan harus mempublikasikan informasi tentang kinerja mereka dalam hal keberlanjutan. Pelaporan keberlanjutan adalah cara untuk membagikan pencapaian dan tantangan yang dihadapi.

6. Kepatuhan dan Kepatuhan Regulasi

Perseroan harus mematuhi peraturan dan regulasi terkait keberlanjutan yang berlaku. Ini termasuk peraturan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

7. Inovasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Perseroan harus berusaha untuk terus meningkatkan praktik dan inisiatif keberlanjutan mereka. Ini mencakup inovasi dalam teknologi, proses, dan produk.

2. Stakeholder Engagement

The Company should actively involves and communicates with individuals, groups, or entities that have an interest or stake in the outcomes or decisions of that Company, in order to understand their needs and expectations regarding sustainability.

3. Sustainability Policies and Strategies

The Company should develop policies and strategies that incorporate aspects of sustainability in their operations. This includes environmental impact reduction, corporate social responsibility, and ethical principles.

4. Performance Measurement

The Company should measure and monitor their sustainability performance regularly. This includes measurement of environmental impacts, risk management, and achievement of sustainability goals.

5. Sustainability Reporting

The Company should publish information about their performance on sustainability. Sustainability reporting is a way to share achievements and challenges faced.

6. Regulatory Compliance and Adherence

The Company must comply with applicable sustainability-related rules and regulations. This includes environmental, social and corporate governance regulations.

7. Innovation and Continuous Improvement:

The Company should strive to continuously improve their sustainability practices and initiatives. This includes innovations in technology, processes, and products.

Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Legal Basis of Social and Environmental Responsibility

Dalam melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang menjadi bagian dari Kebijakan Keberlanjutan, Perseroan senantiasa berpedoman pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Program-program CSR Perseroan berkaitan dengan lingkungan, kemasyarakatan (sosial) dan ketenagakerjaan (ekonomi). CSR menjadi bagian investasi jangka Panjang Perseroan demi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Dasar pelaksanaan Program Keberlanjutan Perseroan berlandaskan pada aspek hukum, yakni:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

In implementing Corporate Social Responsibility (CSR) activities as part of the Sustainability Policy, the Company always adheres to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

The Company's CSR programs are related to environmental, societal (social), and economic (employment) aspects. CSR is part of the Company's long-term investment for business growth and sustainability.

The implementation basis of the Company's Sustainability Programs is grounded in legal aspects, namely:

1. Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety and Health;
2. Law No. 23 of 1992 concerning Health;



3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 9. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 10. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
3. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower;
 4. Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation;
 5. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
 6. Law No. 25 of 2007 concerning Investment;
 7. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management;
 8. Government Regulation No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits;
 9. Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems;
 10. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning the Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
 11. Minister of Manpower Regulation No. 05/Men/1996 concerning Occupational Safety and Health Management Systems (SMK3).

Tujuan Penerapan

Purpose of Implementation

Sejak didirikan, BKI senantiasa memegang teguh komitmennya untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), karena menganggapnya sebagai elemen yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan bisnisnya. Oleh karena itu, Perseroan berdedikasi untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, dengan tujuan untuk:

1. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan serta mewujudkan nilai tambah bagi Pemegang Saham untuk jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan Pemangku Kepentingan lainnya;
2. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pemangku Kepentingan Perusahaan;
3. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan;
4. Mengelola sumber daya dengan lebih amanah;
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan;
6. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan; dan
7. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai.

Since its establishment, BKI is unwavering in its commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG), recognizing it as an indispensable element for ensuring the sustainability of its business. Consequently, the Company is dedicated to the consistent application of GCG principles, aiming to:

1. *Achieving maximum growth and yields so as to increase the prosperity of the Company and create added value for Shareholders in the long term without neglecting the interests of other Stakeholders.*
2. *Controlling and directing good relations between Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors and all of the Company's Stakeholders.*
3. *Supporting the Company's internal control and development activities.*
4. *Managing resources more reliably.*
5. *Increasing accountability to Stakeholders.*
6. *Improving the Company's work culture; and*
7. *Making the Company a value-added by increasing the welfare of all its employee.*

Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan

Compliance with Laws and Regulations [GRI 2-27]

Selama 2023, tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi BKI, baik pidana, perdata maupun tata usaha negara yang mempengaruhi kinerja Perusahaan.

In 2023, there were be no legal issues faced by the BKI, whether criminal, civil or state administration that affect the Company's performance.



Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement of Goods and Services

BKI menjamin proses pengadaan barang/jasa dengan memberikan perlakuan sama bagi seluruh calon penyedia barang/jasa tanpa ada perlakuan khusus bagi salah satunya. Perseroan juga berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dengan mematuhi kaidah yang dituangkan di dalam *ESG Management* serta selalu fokus menjadi Perusahaan yang berintegritas melalui upaya peningkatan secara berkelanjutan.

BKI guarantees the goods/services procurement process by providing equal treatment for all prospective goods/services providers without any special treatment for one of them. The Company is also committed to carrying out Goods and Services Procurement activities by complying with the rules outlined in ESG Management and always focusing on becoming a Company with integrity through continuous improvement efforts.

Anti Korupsi

Anti-Corruption [GRI 205-1] [GRI 205-2] [GRI 205-3]

Menyadari besarnya dampak negatif yang timbul akibat tindak pidana korupsi dan suap, Perseroan dengan tegas melarang seluruh karyawannya melakukan korupsi dan suap dan berupaya menumbuhkan integritas yang tinggi di antara para karyawan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Seluruh karyawan, mulai dari level teratas hingga level junior, dituntut untuk memiliki komitmen mentaati peraturan perundangan yang berlaku, dan tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, serta menerima suap, dan tidak akan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan.

Recognizing the negative impact of corruption and bribery, the Company strictly prohibits all employees from committing corruption and bribery and strives to foster high integrity among employees to prevent violations of the law. All employees, from the top level to the junior level, are required to have a commitment to comply with applicable laws and regulations, and not to commit corruption, collusion, nepotism, and accept bribes, and will not abuse their positions for personal, family, or group interests.

Prinsip-Prinsip GCG

GCG Principles

Penerapan GCG di BKI merujuk pada prinsip-prinsip GCG, yakni:

1. *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. *Akuntabilitas (accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. *Kemandirian (independency)*, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

At BKI; the GCG implementation refers to the principles of GCG, namely:

1. *Transparency, namely openness in carrying out the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information about the company;*
2. *Accountability, namely the clarity of functions, implementation and accountability of organs so that the management of the company is carried out effectively;*
3. *Responsibility, namely conformity in the management of the company to laws and regulations and sound corporate principles;*
4. *Independency, which is a condition in which the company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with laws and regulations and sound corporate principles;*



5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dalam menegakkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan sentiasa berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan para *stakeholders* dengan kepentingan bisnis Perseroan. Dengan prinsip tersebut perusahaan bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan nantinya berpengaruh positif pada pertumbuhan usaha secara berkesinambungan.

5. *Fairness, which is justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising based on agreements and laws and regulations.*

In upholding the principles of Good Corporate Governance, the Company always strives to balance the interests of stakeholders with the Company's business interests. With this principle, the company can carry out its responsibilities well and later have a positive effect on sustainable business growth.

Penerapan GCG

Implementation of GCG

Secara umum, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) kini semakin penting karena adanya peningkatan ekspektasi dari para pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan di berbagai sektor. Oleh karena itu, BKI berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sebagai langkah penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

Komitmen ini terlihat dari upaya Perseroan dalam menanamkan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip GCG kepada seluruh karyawan. Selain itu, Perseroan juga berupaya untuk menetapkan kebijakan dan menjalankan operasional sesuai pedoman yang jelas, yang mencakup hal-hal seperti etika bisnis, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan pemegang saham.

Komitmen kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik membantu Perseroan dalam menjaga reputasi, mengurangi risiko, dan meningkatkan keberlanjutan jangka panjang. Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam standar yang tinggi mendukung Perseroan dalam menghadapi setiap tantangan bisnis yang berat.

Efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik terlihat dari keselarasan tiga aspek sistem tata kelola (*governance system*) yaitu struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil dari pelaksanaannya (*governance outcomes*).

Praktik GCG di Perseroan dilakukan sejalan dengan tujuan ke-16 Pembangunan Berkelanjutan yaitu membangun lembaga yang efektif dan akuntabel dengan target *zero tolerance* terhadap korupsi dan fraud. Untuk itu, Perseroan selalu menerapkan praktik-praktik GCG secara berkesinambungan.

In general, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is becoming increasingly important due to the rising expectations of stakeholders regarding corporate performance across various sectors. Therefore, BKI is committed to adopting the principles of Good Corporate Governance as a crucial step to ensure the long-term success and sustainability of the company.

This commitment is evident in the company's efforts to instill a comprehensive understanding of GCG principles among all employees. Additionally, the company strives to establish policies and conduct operations in accordance with clear guidelines, encompassing aspects such as business ethics, transparency, accountability, and protection of shareholder interests.

The strong commitment to implementing the principles of Good Corporate Governance assists the company in maintaining its reputation, reducing risks, and enhancing long-term sustainability. The effective implementation of Good Corporate Governance standards supports the company in facing any significant business challenges.

The effectiveness of implementing Good Corporate Governance can be seen in the alignment of three aspects of the governance system: governance structure, governance process, and governance outcomes.

The practice of GCG in the company is aligned with Sustainable Development Goal 16, which aims to build effective, accountable institutions with a zero-tolerance approach to corruption and fraud. Therefore, the company consistently implements GCG practices in a sustainable manner.



Struktur dan Infrastruktur

Structure and Infrastructure [GRI 2-9, GRI 2-11]

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), struktur tata kelola Perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ Perusahaan.

Lebih jauh lagi, sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, fungsi dan posisi Organ Perseroan Utama adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran Dasar.
2. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar.
3. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing organ Perusahaan tersebut menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara independen untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perusahaan, dan ketentuan lain yang berlaku. Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai Organ Utama dibantu oleh Organ-organ Pendukung. Organ pendukung Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit; Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola; Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia.

Sedangkan organ pendukung di bawah Direksi terdiri dari Satuan Pengawas Intern/Unit Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan.

Struktur ini memastikan adanya pemisahan yang jelas antara fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan dalam Perseroan. Ketiga organ tersebut bertanggung jawab membangun kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Perseroan, dan memimpin pelaksanaan dan pengawasan tata kelola perusahaan untuk kepentingan perusahaan. Untuk mendukung kerangka kerja tata kelola, terdapat rangkaian mekanisme yang saling terkait untuk memastikan penerapan tata kelola yang konsisten dan efektif di seluruh organisasi dan dilakukan oleh seluruh karyawan yang ada di dalamnya.

In compliance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (PT Law), the Company's governance structure consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors as the Company's organs.

Furthermore, in accordance with Law No. 40 of 2017 concerning Limited Liability Companies, the functions and positions of the Main Company Organs are as follows:

1. *General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of the Company that has authority that is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or the Articles of Association.*
2. *The Board of Directors is an organ of the Company that is authorised and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.*
3. *The Board of Commissioners is an organ of the Company in charge of conducting general and/or special supervision in accordance with the Articles of Association as well as providing advice to the Board of Directors.*

In its implementation, each organ of the Company carries out its duties, functions and responsibilities independently for the benefit of the Company in accordance with laws and regulations, the Company's articles of association, and other applicable provisions. To support the implementation of its duties, the Board of Commissioners and the Board of Directors as the Main Organ are assisted by Supporting Organs. Supporting organs of the Board of Commissioners consist of the Audit Committee; Risk Monitoring and Governance Committee; Nomination, Remuneration and Human Resources Committee.

Meanwhile, the supporting organs under the Board of Directors consist of the Internal Supervisory Unit/Internal Audit Unit and the Corporate Secretary.

This structure guarantees a distinct division between supervisory and decision-making functions within the Company. The three entities board, executive management, and shareholders play a crucial role in establishing a robust corporate governance framework and overseeing its implementation for the Company's benefit. In tandem with this governance structure, a set of interconnected mechanisms is in place to ensure the uniform and effective application of governance practices across the entire organization, involving all employees.



Penjelasan Lainnya

Other Details

Uraian dan pengungkapan informasi yang lebih lengkap mengenai Tata Kelola Perusahaan; kriteria nominasi dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris; kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; serta Piagam Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan ini [GRI 2-9; 2-10; 2-15; 2-17; 2-18; 2-19]

Detailed description and disclosure of information regarding Corporate Governance; nomination and remuneration criteria for Board of Directors (BoD) and Board of Commissioners (BoC); authorities of the General Meeting of Shareholders (GMS); duties and responsibilities of Board of Directors and Board of Commissioners; as well as Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee Charter are presented in Corporate Governance chapter in this Report [GRI 2-9; 2-10; 2-15; 2-17; 2-18; 2-19]

Kinerja Keberlanjutan

Sustainability Performance

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) mengemban misi Pemerintah dan memiliki tanggung jawab sebagai katalisator penggerak perekonomian nasional. Hal tersebutkan diwujudkan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh Perseroan. Program ini diharapkan mampu memberi dampak positif secara berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah operasional Perseroan, dalam jangka panjang baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanggung jawab sosial juga merupakan wujud kesadaran PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dalam upaya meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan lingkungan.

As one of the State-Owned Enterprises (BUMN) whose entire capital comes from separated state assets, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) carries out the Government's mission and has the responsibility as a catalyst for driving the national economy. This is manifested in the implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility (CSR) through the Partnership and Community Development Program (PKBL) carried out by the Company. This program is expected to have a sustainable positive impact on the community in the Company's operational areas, in the long term both directly and indirectly. Social responsibility is also a form of awareness of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) to improve its relationship with society and the environment.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai salah satu BUMN jasa survei dan sertifikasi kapal satu-satunya di Indonesia dengan reputasi global, PT BKI memiliki komitmen terhadap penerapan standar TJSL yang berlaku secara internasional, yaitu ISO 26000 *Guidance on social responsibility*".

PT BKI as one of the only state-owned ship survey and certification services in Indonesia, with a global reputation, is committed to the implementation of internationally applicable CSR standards, namely ISO 26000 Guidance on social responsibility.

TJSL dalam ISO 26000 memiliki tujuan nyata untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals* SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Elemen esensial TPB adalah *planet, people, dignity, prosperity, justice, dan partnership*.

TJSL in ISO 26000 has a real goal of achieving sustainable development in line with the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) as stipulated in Presidential Regulation Number 59 of 2017. The essential elements of SDGs are planet, people, dignity, prosperity, justice, and partnership.

Perseroan juga memandang dimensi sosial memberikan pengaruh terhadap setiap aktivitas bisnis. Dimensi sosial bukan sesuatu yang terpisah melainkan berjalan bersama untuk meningkatkan keberlanjutan proses bisnis perusahaan. Perseroan menyadari peran sebagai agen

The Company also views the social dimension as influencing every business activity. The social dimension is not something separate but goes together to improve the sustainability of the company's business processes. The Company realizes its role as a development



pembangunan yang memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam meminimalisir dampak negatif sekaligus memaksimalkan dampak positif. Perseroan meyakini dengan menjadi perusahaan yang bertanggung jawab terhadap aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan akan memunculkan nilai bersama yang bermanfaat bagi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan.

agent that has social responsibility to the community. Social responsibility to the community is part of the Company's strategy in minimizing negative impacts while maximizing positive impacts. The Company believes that being a responsible company in the aspects of health, education, economy and environment will create shared values that are beneficial to the company and all stakeholders.

Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran *Preparation and Implementation of Budget Work Plan*

Perseroan menyusun program Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan ISO 26000 *Guidance on social responsibility* yang sejalan dengan SDGs 2030 sebagai standar landasan operasional, sehingga semua nilai yang dimiliki oleh para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dapat didayagunakan serta ditingkatkan secara optimal serta menghasilkan pola hubungan yang saling menguntungkan.

The Company prepares the Work Plan and Budget (RKA) program based on ISO 26000 Guidance on social responsibility in line with SDGs 2030 as a standard operational basis, so that all values owned by Stakeholders can be utilized and improved optimally and produce a mutually beneficial relationship pattern.

Penyusunan dan perencanaan program TJSL disusun sebagai bentuk partisipasi aktif perusahaan untuk pencapaian tujuan SDGs 2030 berdasarkan empat pilar, yaitu:

The preparation and planning of the TJSL program was prepared as a form of active participation of the company to achieve the goals of SDGs 2030 based on four pillars, namely:

a. Pilar Sosial: Target TPB 3 dan 4

Pilar sosial bertujuan mencapai pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pada Pilar Sosial terdapat tujuan SDGs yakni pengentasan kemiskinan; mengakhiri kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; pendidikan berkualitas; dan kesetaraan *gender*.

a. Social Pillar: SDG 3 and 4

The social pillar aims to achieve the fulfillment of quality basic human rights in a fair and equitable manner to improve welfare for all people. The Social Pillar contains the following SDGs goals: no poverty; zero hunger; good health and well-being; quality education; and gender equality.

b. Pilar Ekonomi: Target TPB 7, 8, dan 17

Pilar ekonomi merupakan upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui peluang kerja dan usaha berkelanjutan, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Di dalam Pilar Ekonomi terdapat lima tujuan SDGs yaitu energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.

b. Economic Pillar: SDG 7, 8, and 17

The economic pillar is an effort to achieve quality economic growth through employment opportunities and sustainable businesses, innovation, inclusive industries, adequate infrastructure, affordable clean energy and supported by partnerships. Within the Economic Pillar, there are five SDGs goals, namely affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation, and infrastructure, reduced inequality, and partnerships for the goals.

c. Pilar Pembangunan Lingkungan: Target TPB 6, 11

Pilar Pembangunan Lingkungan bertujuan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai

c. Environmental Development Pillar

The Environmental Development Pillar aims to achieve sustainable management of natural resources and the environment as the



penyangga seluruh kehidupan. Di dalam pilar ini terdapat enam tujuan SDGs yaitu air bersih dan sanitasi layak, kota dan pemukiman layak, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, dan ekosistem darat.

support of all life. Within this pillar, there are six SDGs goals, namely clean water and sanitation, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, and life on land.

D. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola: Target TPB 16
Pilar ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan tercapainya negara berdasarkan hukum. Di dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola terdapat satu tujuan dalam SDGs yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.

D. Legal and Governance Development Pillar:
This pillar aims to realize legal certainty and effective, transparent, accountable and participatory governance to create security stability and achieve a state based on law. Within the Legal and Governance Development Pillar, there is one goal in the SDGs, namely peace, justice and strong institutions.

Tabel Realisasi Program TJSL 2023

Table Overview of Realization TJSL Program 2023

TPB	RKA Tahun 2023				Realisasi Tahun 2023				%Realisasi terhadap RKA			
	PUMK	CID	Non CID	Total	PUMK	CID	Non CID	Total	PUMK	CID	Non CID	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5:1	10=6:2	11=7:3	12=8:4
PILAR SOSIAL	-	1.750.000	-	1.750.000	-	1.747.157	-	1.747.157	-	99,84	-	99,84
TPB 3	-	575.000	-	575.000	-	573.875	-	573.875	-	99,80	-	99,80
TPB 4	-	1.175.000	-	1.175.000	-	1.173.282	-	1.173.282	-	99,85	-	99,85
PILAR EKONOMI	1.500.000	672.000	-	2.172.000	900.000	671.429	-	1.571.429	-	99,92	-	72,35
TPB 7	-	48.000	-	48.000	-	48.000	-	48.000	-	100,00	-	100,00
TPB 8	1.500.000	624.000	-	2.124.000	900.000	623.429	-	1.523.429	-	99,91	-	71,72
PILAR LINGKUNGAN	-	678.000	-	678.000	-	677.396	-	677.396	-	99,91	-	99,91
TPB 12	-	678.000	-	678.000	-	677.396	-	677.396	-	99,91	-	99,91
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TPB 16	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.500.000	3.100.000	50.000	4.650.000	900.000	3.095.982	-	3.995.983	60,00	99,87	-	85,94

Keseluruhan Realisasi Tahun 2023 terkait Program TJSL adalah sebesar Rp3.995.982.567,- atau 85,94% dari RKA Tahun 2023 yang terdiri dari:

1. Program TJSL Pendanaan UMK Tahun 2023 yang bersumber dari dana bergulir yang berkolaborasi dengan BRI. Dan sampai dengan triwulan III belum ada pengalihan dana Program PUMK ke BRI.
2. Program TJSL Non PUMK yang dijalankan unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (CID) bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.095.982.567,- atau 99,87% dari RKA Program TJSL Non PUMK Tahun 2023.
3. Prognosa Program TJSL Non CID yang dijalankan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) di luar unit CID yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada laporan Perusahaan tahun 2023 adalah belum terealisasi.

Overall realization in 2023 related to the TJSL Program is Rp3,995,982,567,- or 85.94% of the 2023 RKA which consists of:

1. *TJSL Program Funding for MSEs in 2023 comes from revolving funds in collaboration with BRI. And until the third quarter there has been no transfer of PUMK Program funds to BRI.*
2. *Non-PUMK TJSL Program run by the Community Involvement and Development unit (CID) is sourced from the budget which is calculated as the Company's annual costs 2023, which amounted Rp3,095,982,567,- or 99.87% of the RKA for the Non-PUMK TJSL Program for the year 2023.*
3. *The prognosis of the Non CID TJSL Program carried out by PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) outside the CID unit which is sourced from the budget that is calculated as a cost in the Company's 2023 report is that it has not been realized.*



Program Prioritas Tahun 2023

Priority Program 2023

Program prioritas merupakan kegiatan yang mendukung aspek-aspek yang diprioritaskan berdasarkan aspirasi Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2023. Program prioritas tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Priority programs are activities that support aspects that are prioritized based on the aspirations of Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) in 2023. Priority programs for 2023, with details as follows:

1. Program Prioritas di Bidang Pendidikan

1. Priority Program in Education

No	Program Program	RKA 2023	Realisasi 2023 Realization	%
1	Beasiswa Pendidikan Education Scholarship	400.000.000	386.500.000	96,62
2	Fasilitas Pendidikan Education Facilities	60.000.000	53.544.000	89,24
3	Perhitungan Dampak Program TJSL dengan Metode SROI Calculation of the Impact of the TJSL Program with the SROI Method	150.000.000	148.503.222	99,00
TOTAL		610.000.000	588.547.222	96,48

2. Program Prioritas di Bidang Lingkungan

2. Priority Program in Environmental

No	Program Program	RKA 2023	Realisasi 2023 Realization	%
1	Penanaman Pohon Tree Planting	100.000.000	93.163.500	93,16
2	Perluasan Terumbu Karang Coral Reef Extension	150.000.000	126.050.000	84,03
3	Pengelolaan Limbah Kerang Hijau Green Shell Waste Management	60.000.000	50.839.000	84,73
4	Penanaman Mangrove Mangrove Planting	50.000.000	26.810.000	53,62
5	Life Jacket	100.000.000	94.950.000	94,95
6	Stunting	60.000.000	56.732.000	94,55
TOTAL		520.000.000	448.544.500	86,26

3. Program Prioritas di Bidang Pengembangan UMK

3. Priority Programs in MSE Development

No	Program Program	RKA 2023	Realisasi 2023 Realization	%
1	Pameran Exhibition	160.000.000	152.450.000	95,28
2	Pelatihan UMK Training MSE	410.000.000	400.717.667	97,74
3	Sertifikasi Halal Halal Certification	50.000.000	40.276.799	80,55
TOTAL		620.000.000	593.444.466	95,72



Program *Creating Shared Value* (CSV) Tahun 2023

Creating Shared Value (CSV) Program 2023

Program CSV merupakan program yang dijalankan untuk mendukung bisnis inti Perusahaan dan menciptakan manfaat bersama antar pemangku kepentingan. Realisasi program CSV tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

The CSV program is a program that is carried out to support the company's core business and create shared benefits among stakeholders. Realization of CSV program in 2023, with details as follows:

No	Program	RKA 2023	Realisasi 2023	%
1	Pelatihan & Sertifikasi Juru Las (Welder) <i>Training & Certification Welder</i>	550.000.000	530.784.500	96,51

Realisasi Program Kemitraan

Realization of Partnership Program

1. Hingga Triwulan IV realisasi jumlah pengembalian pinjaman Mitra Binaan Program PUMK Tahun 2023 sebesar Rp953.039.080,-
2. Berdasarkan rekomendasi Surat Menteri BUMN Nomor S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Kerja sama Program PUMK terdapat dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyebutkan bahwa seluruh saldo dana yang tersedia dan dana pengembalian pinjaman oleh UMK Binaan disalurkan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. Nilai Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 kerja sama Penyaluran Program PUMK dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebesar Rp1.500.000.000,-.
4. Pada tahun 2023 tidak ada penyaluran Program PUMK secara mandiri. Kegiatan dalam Program PUMK lebih difokuskan pada aktivitas pemantauan dan penagihan pinjaman dari dana yang disalurkan tahun sebelumnya.

1. *Until the fourth quarter, the realized loan repayment amount for the 2023 PUMK Program Partners is Rp953,039,080,-.*
2. *Based on the recommendation of the Minister of SOEs Letter Number S-721/MBU/11/2022 dated November 10, 2022 concerning the PUMK Program Cooperation with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, it is stated that all available fund balances and loan repayment funds by Assisted MSEs are channeled through PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
3. *The value of the 2023 Budget Work Plan (RKA) for the cooperation of the PUMK Program Distribution with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk is Rp1,500,000,000,-.*
4. *In 2023 there will be no independent distribution of the PUMK Program. Activities in the PUMK Program are more focused on monitoring and collecting loans from funds disbursed in the previous year.*



Program TJSL BKI Secara Holding

BKI'S CSR Program at The Holding Level

Sebagai bagian dari IDSURVEY, holding BUMN jasa survey di Indonesia, BKi juga menjalankan programnya sesuai dengan standar program TJSL IDSURVEY, yakni ISO 26000 *Guidance on social responsibility*. ISO 26000 dirancang untuk membantu perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mendorong mereka untuk melampaui kepatuhan hukum dan mengadopsi praktik-praktik yang bertanggung jawab secara sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Sesuai Surat Edaran Deputy Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Nomor : S-348/MBU/DSI/11/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Penyusunan Program TJSL BUMN Tahun 2021, maka prioritas program TJSL yang dilaksanakan oleh IDSURVEY harus disinergikan dengan Program CSV (*Creating Shared Value*), dengan kerangka kerja sebagai berikut:

1. Prioritas TPB 3: Berkaitan dengan Kehidupan Sehat dan Sejahtera
2. Prioritas TPB 4: Berkaitan dengan pendidikan Berkualitas
3. Prioritas TPB 5: Berkaitan dengan Kesenjangan Gender
4. Prioritas TPB 7: Berkaitan dengan Energi Bersih dan Terjangkau
5. Prioritas TPB 8: Berkaitan dengan Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi
6. Prioritas TPB 12: Berkaitan dengan Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab
7. Prioritas TPB 16: Berkaitan dengan Perdamaian, keadilan dan Kelembagaan.

As a part of IDSURVEY, the state-owned enterprise holding company for survey services in Indonesia, BKi conducts its programs in alignment with the standards of IDSURVEY's Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, following the ISO 26000 *Guidance on social responsibility*. ISO 26000 is designed to assist companies in contributing to sustainable development by encouraging them to go beyond legal compliance and adopt socially responsible practices that benefit both society and the environment.

In accordance with the Circular Letter from the Deputy for Human Resources, Technology, and Information No: S-348/MBU/DSI/11/2020, dated November 18, 2020, regarding the Formulation of CSR Programs for State-Owned Enterprises (SOEs) for the year 2021, IDSURVEY's CSR program priorities must be synergized with the Creating Shared Value (CSV) program framework, as follows:

1. TPB Priority 3: Related to Good Health and Well-Being
2. TPB Priority 4: Related to Quality Education
3. TPB Priority 5: Related to Gender Equality
4. TPB Priority 7: Related to Affordable and Clean Energy
5. TPB Priority 8: Related to Decent Work and Economic Growth
6. TPB Priority 12: Related to Responsible Consumption and Production
7. TPB Priority 16: Related to Peace, Justice, and Strong Institutions.

Pencapaian Program TJSL IDSURVEY tahun 2023

Achievements of IDSURVEY's CSR Program in 2023

Dari sisi alokasi dana dan realisasinya, pencapaian Program TJSL IDSURVEY di sepanjang tahun 2023 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

In terms of fund allocation and its realization, the achievements of IDSURVEY's CSR Program throughout 2023 can be seen in the table below:

Kinerja Program TJSL

Performance of the TJSL Program

Tabel Anggaran TJSL PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Table of TJSL Budget of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

(dalam rupiah penuh/in full rupiah)

No	Pilar Pillar	Audit 2022 (Rp)	RKA 2023 (Rp)	Audit 2023 (Rp)	%	
		1	2	3	3:2	3:1
1	Sosial Social	1.163.436.962	1.747.500.000	1.747.156.222	99,98	150,17
2	Ekonomi Economy	2.018.388.949	2.171.500.000	1.571.429.466	72,37	77,86
3	Lingkungan Environment	718.310.000	681.000.000	680.921.379	99,99	94,79
4	Hukum & Tata Kelola Law & Governance	-	50.000.000	-	-	-
Total		3.900.135.911	4.650.000.000	3.999.507.567	86,01	102,55



Tabel Anggaran TJSL PT Sucofindo

Table of TJSL Budget of PT Sucofindo

(dalam rupiah penuh/in full rupiah)

No	Pilar Pillar	Audit 2022 (Rp)	RKA 2023 (Rp)	Audit 2023 (Rp)	%	
		1	2	3	3:2	3:1
1	Sosial Social	4.072.625.608	3.637.880.000	3.659.089.207	100,5	89,7
2	Ekonomi Economy	17.142.980.474	10.384.000.000	9.918.663.707	95,5	57,9
3	Lingkungan Environment	778.241.895	850.000.000	379.201.666	44,6	48,7
4	Hukum & Tata Kelola Law & Governance	189.675.415	190.000.000	129.360.000	68,1	68,2
Total		22.183.523.392	15.061.880.000	14.086.314.580	93,5	63,5

Tabel Anggaran TJSL PT Surveyor Indonesia

Table of TJSL Budget of PT Surveyor Indonesia

(dalam rupiah penuh/in full rupiah)

No	Pilar Pillar	Audit 2022 (Rp)	RKA 2023 (Rp)	Audit 2023 (Rp)	%	
		1	2	3	3:2	3:1
1	Sosial Social	978.033.500	1.235.000.000	1.138.510.583	92,19	116,41
2	Ekonomi Economy	2.964.492.339	3.195.000.000	2.846.552.957	89,09	96,02
3	Lingkungan Environment	1.111.994.161	970.000.000	1.042.936.460	107,52	93,79
4	Hukum & Tata Kelola Law & Governance	241.680.000	180.000.000	180.000.000	100,00	74,48
Total		5.296.200.000	5.580.000.000	5.208.000.000	93,33	98,33

Sementara, pencapaian program TJSL IDSurvey Non PUMK dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Meanwhile, the achievements of the IDSurvey Non PUMK TJSL program can be seen in the tables below

Kinerja Program TJSL-Non PUMK

TJSL-Non PUMK Program Performance

● **PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)**

● **PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)**

a. Program Prioritas di bidang Pendidikan

a. Priority Programs in Education

(dalam rupiah penuh/in full rupiah)

No	Program	RKA 2023	Audited 2023	%
1	Beasiswa Pendidikan Scholarships	400.000.000	386.500.000	96,62
2	Fasilitas Pendidikan Education Facilities	60.000.000	53.544.000	89,24
3	Perhitungan Dampak Program TJSL dengan Metode SROI The Calculation of the Impact of the TJSL Program with the SROI Method	150.000.000	148.503.222	99,00
TOTAL		610.000.000	588.547.222	96,48



b. Program Prioritas di bidang Lingkungan

b. Priority Programs in the Environment

No	Program	RKA 2023	Audited 2023	%
1	Penanaman Pohon <i>Tree Planting</i>	100.000.000	93.163.500	93,16
2	Perluasan Terumbu Karang <i>Coral Reef Expansion</i>	150.000.000	126.050.000	84,03
3	Pengelolaan Limbah Kerang Hijau <i>Green Shell Waste Management</i>	60.000.000	50.839.000	84,73
4	Penanaman Mangrove <i>Mangrove Planting</i>	50.000.000	26.810.000	53,62
5	<i>Life Jacket</i>	100.000.000	94.950.000	94,95
6	<i>Stunting</i>	60.000.000	56.732.000	94,55
TOTAL		520.000.000	448.544.500	86,26

c. Program Prioritas di bidang Pengembangan UMK

c. Priority Programs in SMEs Development

No	Program	RKA 2023	Audited 2023	%
1	Pameran <i>Exhibition</i>	160.000.000	152.450.000	95,28
2	Pelatihan UMK <i>MSE Training</i>	410.000.000	400.717.667	97,74
3	Sertifikasi Halal <i>Halal Certification</i>	50.000.000	40.276.799	80,55
TOTAL		620.000.000	593.444.466	95,72

d. Program *Creating Shared Value* (CSV)d. *Creating Shared Value* (CSV) Program

No	Program	RKA 2023	Audited 2023	%
1	Pelatihan & Sertifikasi Juru Las (<i>Welder</i>) <i>Welder Training & Certification</i>	550.000.000	530.784.500	96,51
TOTAL		550.000.000	530.784.500	96,51

• PT Sucofindo

• PT Sucofindo

a. Program Prioritas di bidang Pendidikan

a. Priority Programs in Education

(dalam rupiah penuh/in full rupiah)

No.	Program	Anggaran Tahun 2023 (Rp) <i>Budget for 2023 (Rp)</i>	Realisasi Tahun Berjalan (Rp) <i>Current Year Realization (Rp)</i>
1	Beasiswa Program Pendidikan Berkelanjutan <i>Continuing Student Scholarship</i>	503.128.000	343.912.500
2	Pengembangan Fasilitas Pendidikan yang berkualitas <i>Development of Quality Educational Facilities</i>	650.000.000	921.601.667
3	Hibah Beasiswa ke Yayasan BUI <i>Scholarship Grant to BUI Foundation</i>	600.000.000	600.000.000
Total		1.753.128.000	1.865.514.167



b. Program Prioritas di bidang Lingkungan

b. Priority Programs in the Environment

(dalam rupiah penuh/in full rupiah)

No.	Program	Anggaran Tahun 2023 (Rp) Budget for 2023 (Rp)	Realisasi Tahun Berjalan (Rp) Current Year Realization (Rp)
1	Pengolahan Limbah & Polusi <i>Waste & Pollution Management</i>	400.000.000	200.000.000
2	Program Penghijauan Lingkungan <i>Environmental Greening Program</i>	300.000.000	179.201.666
3	Pemanfaatan EBT <i>EBT Utilization</i>	200.000.000	248.000.000
4	Pengukuran Dampak SROI <i>SROI Impact Measurement</i>	150.000.000	-
Total		1.050.000.000	627.201.666

c. Program Prioritas di bidang Pengembangan UMK

c. Priority Programs in SMEs Development

(dalam rupiah penuh/in full rupiah)

No.	Program	Anggaran Tahun 2023 (Rp) Budget for 2023 (Rp)	Realisasi Tahun Berjalan (Rp) Current Year Realization (Rp)
1	Kegiatan promosi, eksibisi dan Pameran <i>Promotional and Exhibition Activities</i>	344.000.000	361.863.929
2	Miniplan Biogas Peternakan <i>Livestock Biogas Miniplan</i>	110.000.000	-
3	Pemberdayaan Kaum Wanita <i>Women Empowerment</i>	50.000.000	-
4	Peningkatan Kapasitas UMK <i>Capacity Building of SMEs</i>	630.000.000	219.759.778
Total		1.134.000.000	581.623.707

d. Program *Creating Shared Value* (CSV)

d. *Creating Shared Value* (CSV) Program

(dalam rupiah penuh/in full rupiah)

No.	Program	Anggaran Tahun 2023 (Rp) Budget for 2023 (Rp)	Realisasi Tahun Berjalan (Rp) Current Year Realization (Rp)
1	Pemanfaatan EBT <i>EBT Utilization</i>	200.000.000	248.000.000
2	Sarana dan Prasarana Air Bersih <i>Clean Water Facilities and Infrastructure</i>	180.000.000	138.355.877
3	Sertifikasi Halal <i>Halal Certification</i>	100.000.000	90.000.000
Total		480.000.000	476.355.877



● PT Surveyor Indonesia

a. Program Prioritas di bidang Pendidikan

No	Program	Uraian Dampak Program Description of Program Impact	Rp
1	Pemberian Taman Bacaan <i>Provision of Library</i>	Pemberian 30 buku taman bacaan di SMA 7 Jakarta, 20 buku bacaan SMA 26 Jakarta dan 20 buku bacaan SMA 7 Balikpapan Kalimantan Timur, dan pemberian laptop bacaan di 4 perangkat desa di Pangalengan, 4 perangkat di Kampus Makassar, dan 3 perangkat kampung di Carita. <i>Providing 30 reading park books at SMA 7 Jakarta, 20 reading books at SMA 26 Jakarta and 20 reading books at SMA 7 Balikpapan East Kalimantan, and providing reading laptops at 4 village officials in Pangalengan, 4 officials at Makassar Campus, and 3 village officials in Carita.</i>	304.584.800
2	Pelatihan terhadap Dampak Bantuan <i>Training on the Impact of Assistance</i>	Adanya peningkatan hasil jumlah ikan dari 1000 bibit penanaman trumbu karang di Carita, bantuan pemasangan listrik gratis bagi 80 RT untuk peningkatan ekonomi rumah tangga dan pendidikan bagi anak-anak sekolah dan putus sekolah dan pemanfaatan air bersih dalam hal kegiatan aktifitas harian rumah tangga dalam 250 RT di buat 20 air komunal pemberian air bersih di Labuan Bajo Papagarang NTT. <i>An increase in the number of fish from 1000 coral reef planting seeds in Carita, free electricity installation assistance for 80 RTs to improve the household economy and education for school children and dropouts and the use of clean water in terms of daily household activities in 250 RTs made 20 communal water supply in Labuan Bajo Papagarang NTT.</i>	137.886.000
3	Pelatihan/ Beasiswa bagi Masyarakat Difabel atau Disabilitas <i>Training/ Scholarships for People with Disabilities</i>	Adanya 35 peserta difabel/disabilitas (15 untuk kuliner dan 20 untuk kerajinan) dari berbagai wilayah Bandung dan Bogor dalam pelatihan pengembangan usaha kuliner dan kerajinan berbahan bambu di Mitra Binaan Virageawie Academy Bandung, dengan menghasilkan 3 jenis produk makanan kering sebanyak 60 toples dan 3 jenis kerajinan tangan sebanyak 50 seperti tumbler, gelas, toples. <i>There were 35 participants with disabilities (15 for culinary and 20 for handicrafts) from various areas of Bandung and Bogor in the training of culinary business development and crafts made from bamboo at Virageawie Academy Bandung's Assisted Partners, by producing 3 types of dry food products totaling 60 jars and 3 types of handicrafts totaling 50 such as tumblers, glasses, jars.</i>	50.000.000

b. Program Prioritas di bidang Lingkungan

b. Priority Programs in the Environment

No	Program	Uraian Dampak Program Description of Program Impact	Rp
1	Penyediaan Air Bersih bagi Warga 3T <i>Provision of Clean Water for 3T Residents</i>	Penyediaan air bersih bagi warga sekitar Cianjur untuk penyaluran bagi 200 RT, Magelang, Yogyakarta bagi 80 warga dari kekeringan, dan Pamijahan Kab Bogor bagi 200 RT sekitarnya <i>Provision of clean water for residents around Cianjur for distribution to 200 neighborhoods, Magelang, Yogyakarta for 80 residents from drought, and Pamijahan, Bogor Regency for 200 neighborhoods.</i>	117.102.333
2	Pengelolaan & Penampungan Sampah <i>Waste Management & Shelter</i>	Pembuatan 3 selter penampungan sampah 1 di sekolah dan 2 di kantor serta pelatihan bagi pengelolaan dan <i>management</i> sampah di kantor operasional dan warga sekitarnya Balikpapan. <i>Construction of 3 waste collection shelters 1 in school and 2 in the office as well as training for waste management and management in operational offices and surrounding Balikpapan residents.</i>	134.193.589
3	Program Pemberian Pupuk Kopi <i>Coffee Fertilizer Program</i>	Pemberian pupuk organik cair dan serabut bagi 75 petani kopi di wilayah Pangalengan, 35 petani kopi di Rancamaya, dan 50 petani kopi di Ciwidey untuk peningkatan hasil kopi berbasis pupuk organik <i>Providing liquid organic fertilizer and fibers for 75 coffee farmers in the Pangalengan area, 35 coffee farmers in Rancamaya, and 50 coffee farmers in Ciwidey to increase coffee yields based on organic fertilizers.</i>	185.977.200



c. Program Prioritas dibidang Pengembangan UMK

c. Priority Programs in SMEs Development

No	Program	Uraian Dampak Program Description of Program Impact	Rp
1	Pelatihan dan Peningkatan <i>Digital Marketing</i> <i>Digital Marketing Training and Improvement</i>	Diikuti 35 peserta Mitra Binaan di Yogyakarta dengan berbagai produksi kuliner dan <i>fashion</i> , dan 50 peserta Mitra Binaan di Yogyakarta sekitar Borobudur dalam peningkatan usaha Jasa <i>Photographer</i> , serta 20 warga di Temanggung semua hal peningkatan promosi penjualan dan usaha. <i>Participated by 35 participants of Fostered Partners in Yogyakarta with various culinary and fashion productions, and 50 participants of Fostered Partners in Yogyakarta around Borobudur in increasing the Photographer Services business, as well as 20 residents in Temanggung all in terms of increasing sales and business promotion.</i>	124.469.107
2	Peningkatan Kapasitas UMK <i>MSE Capacity Building</i>	Peningkatan hasil produk bagi 2 Mitra Binaan di Kota Bogor dalam hal produksi <i>Helmet Survey</i> dengan 50 karyawan dan <i>Skincare</i> kesehatan kulit dengan 20 karyawan. <i>Increased product output for 2 Fostered Partners in Bogor City in terms of Helmet Survey production with 50 employees and Skincare skin health with 20 employees</i>	108.288.000
3	Pameran UMK <i>MSE Exhibition</i>	Mengikuti pameran INACRAFT Jakarta di ikuti 3 Mitra Binaan, pameran di Balikpapan di ikuti 2 Mitra Binaan, dan pameran Luar Negeri di Australia di ikuti 1 Mitra Binaan <i>Participated in the INACRAFT Jakarta exhibition followed by 3 Fostered Partners, an exhibition in Balikpapan followed by 2 Fostered Partners, and an overseas exhibition in Australia followed by 1 Fostered Partner.</i>	410.795.850

d. Program *Creating Shared Value (CSV)*

d. *Creating Shared Value (CSV) Program*

No	Program	Uraian Dampak Program Description of Program Impact	Rp
1	Pelatihan NDT bagi warga sekitar kantor operasi <i>NDT training for residents around the operation office</i>	Adanya 30 peserta yang terdiri 10 karyawan lapangan untuk peningkatan <i>skill</i> dan 20 masyarakat sekitar wilayah operasional kerja yang mana rata-rata pendidikan rendah dan putus sekolah, dimana bertujuan dapat meningkatkan taraf perekonomian bagi warga sekitar dalam pemahaman mengenai pekerjaan NDT. <i>There are 30 participants consisting of 10 field employees for skill improvement and 20 communities around the work operational area where the average education is low and dropping out of school, which aims to improve the economic level for local residents in understanding NDT work.</i>	34.500.000
2	Pelatihan Auditor Halal bagi Masyarakat/ Pelaku Usaha <i>Halal Auditor Training for Communities/ Businesses</i>	Adanya pelatihan pendampingan halal berkolaborasi dengan startup bagi para pelaku usaha maupun masyarakat sebanyak 150 peserta di 2 wilayah. <i>Halal mentoring training in collaboration with startups for business people and the community as many as 150 participants in 2 regions.</i>	60.650.000
3	Traceability Kopi <i>Coffee Traceability</i>	Adanya 30 peserta tani kopi pelatihan bagi peningkatan penanaman kopi dalam hal pupuk organik di Ciwidey bandung dan 20 peserta tani kopi di Rancamaya dalam hal <i>re-planting</i> kopi di green house, serta pemberian 2 alat pengering kopi di sekolah Manggarai NTT, Sesuai dengan portofolio perusahaan, terdapat portofolio <i>traceability</i> kopi. <i>The existence of 30 coffee farmer participants training for improving coffee planting in terms of organic fertilizer in Ciwidey, Bandung and 20 coffee farmer participants in Rancamaya in terms of re-planting coffee in the green house, as well as providing 2 coffee dryers in Manggarai NTT schools, In accordance with the company's portfolio, there is a coffee traceability portfolio.</i>	185.977.200



Lembar Umpan Balik

Feedback Form

Laporan Keberlanjutan BKI 2023 ini memberikan gambaran kinerja keberlanjutan Perseroan di tahun 2023.

This BKI 2023 Sustainability Report provides an overview of the Company's sustainability performance in 2023.

Untuk penyempurnaan laporan ini di tahun mendatang, kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara.

For the improvement of this report in the coming year, we look forward to hearing your input, criticism and suggestions from you.

1. Laporan ini mudah dimengerti

This report is easy to understand

☐ Tidak Setuju/Disagree

☐ Netral/Neutral

☐ Setuju/Agree

2. Laporan ini sudah menggambarkan informasi aspek material Perusahaan, baik dari sisi positif dan negatif

This report has described the information on the material aspects of the Company, both from the positive and negative sides

☐ Tidak Setuju/Disagree

☐ Netral/Neutral

☐ Setuju/Agree

3. Topik material apa yang paling penting bagi anda: (nilai 1 = paling tidak penting s/d 4 = paling penting)

What material topics are most important to you: (score 1 = least important to 4 = most important)

- Kinerja Ekonomi/Economic Performance ()
- Kualitas Produk dan Layanan/Product and Service Quality ()
- Perlindungan Informasi Nasabah/Protection of Customer Information ()
- Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Indirect Economic Impact ()
- Reputasi Perusahaan/Company reputation ()
- Pendidikan dan Pelatihan Karyawan/Education and training for Employee ()
- Keberagaman dan Kesempatan Kerja/Diversity and Job Opportunities ()
- Emisi/Emissions ()
- Komunitas Lokal/Local Community ()
- Antikorupsi/Anti Corruption ()
- Energi/Energy ()
- Praktik Pengadaan/Procurement Practices ()
- Ketenagakerjaan/Employment ()
- Limbah dan Efluen/Waste and Effluent ()

4. Mohon berikan saran/usul/komentar Anda atas laporan ini.

Please provide your suggestions/suggestions/comments on this report.

.....

.....

.....

.....

.....



5. Profil Anda

Your profile :

Nama Lengkap :
Full name

Pekerjaan :
Profession

Nama Lembaga/Perusahaan :
Institution/Company Name

6. Golongan Pemangku Kepentingan

Stakeholders Group

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Investor/ <i>Investors</i> | ☐ Nasabah/ <i>Customer</i> | ☐ Karyawan/ <i>Employees</i> |
| ☐ Komunitas Lokal/ <i>Local Community</i> | ☐ Regulator/ <i>Regulator</i> | ☐ Lainnya/ <i>Others</i> |

Mohon kirimkan kembali lembar umpan balik kepada:

Please send the feedback sheet back to

Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Jl. Yos Sudarso Kav. 38-40 Tanjung Priok Jakarta-14320, Indonesia

Atau, kirim via email ke:

Or send via email to

crc@bki.co.id





08

Laporan KEUANGAN

Financial Report





ID Survey

Testing · Inspection · Certification

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK / *AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
FOR YEARS ENDED DECEMBER 31ST, 2023 AND 2022



#BuildingYourTrust

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

DAFTAR ISI

Pernyataan Direksi

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

**Halaman/
Page**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

1

Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

2

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian

3

Laporan Arus Kas Konsolidasian

4

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

5 - 77

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

CONTENTS

Directors' Statement

***The Consolidated Financial Statements
As of December 31, 2023 and 2022***

Consolidated Statements of Financial Position

*Consolidated Statements of Profit or Loss and
Other Comprehensive Income*

Consolidated Statements of Changes in Equity

Consolidated Statements of Cash Flows

Notes to Consolidated Financial Statements

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) DAN
ENTITAS ANAK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023**

**STATEMENT OF DIRECTORS
ABOUT
RESPONSIBILITY TO THE FINANCIAL STATEMENTS
PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) AND
ITS SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama : Arisudono
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso
No. 38-39-40, Tanjung Priok,
Jakarta
Alamat Rumah : Jl. Bunga Kamboja No. 1,
Cipete Selatan, Jakarta
Nomor Telepon : (021) 4301017 / (021) 4361903
Jabatan : Direktur Utama

1. Name : Arisudono
Office Address : Jl. Yos Sudarso
No. 38-39-40, Tanjung Priok,
Jakarta
Residential Address : Jl. Bunga Kamboja No. 1,
Cipete Selatan, Jakarta
Telephone : (021) 4301017 / (021) 4361903
Title : President Director

2. Nama : Sinung Triwulandari
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso
No. 38-39-40, Tanjung Priok,
Jakarta
Alamat Rumah : Jl. Tebet Timur Dalam X F
No. 1, Tebet, Jakarta
Nomor Telepon : (021) 4301017 / (021) 4361903
Jabatan : Direktur Keuangan,
Administrasi & Manajemen
Risiko

2. Name : Sinung Triwulandari
Office Address : Jl. Yos Sudarso
No. 38-39-40, Tanjung Priok,
Jakarta
Residential Address : Jl. Tebet Timur Dalam X F
No. 1, Tebet, Jakarta
Telephone : (021) 4301017 / (021) 4361903
Title : Finance, Administration &
Risk Management Director

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan dengan basis akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;
2. The consolidated financial statement have been prepared and presented on the basis of accounting in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements;
b. The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;
4. We are responsible for Group's internal control systems.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*
Jakarta, 23 Februari 2024 / *February 23, 2024*



Direktur Utama /
President Director

Direktur Keuangan, Administrasi & Manajemen Risiko /
Finance, Administration & Risk Management Director



PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

No. 00125/2.1133/AU.1/05/0345-4/1/II/2024

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris,
dan Dewan Direksi
PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)**

***The Shareholders, Boards of Commissioners
and Board of Directors
PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)***

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We are also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*



PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

**Kantor Akuntan Publik/ Registered Public Accountants
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**

Yosef Kresna Budi, CPA



Surat Izin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No.AP.0345

Izin Usaha/Business License No.855/KM.1/2017

23 Februari 2024/ February 23, 2024

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2023
dan 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
THE CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL
POSITION**

As of December 31, 2023
and December 31, 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember 2023 December 31, 2023 Rp	31 Desember 2022 December 31, 2022 Rp	
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	5	3.357.575.663.468	3.046.844.772.886	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - bersih	6	972.168.999.643	834.412.150.567	Trade receivables - net
Piutang lain-lain - bersih	7	15.897.251.372	38.148.322.459	Other receivables - net
Persediaan	8	26.191.406.320	34.097.432.010	Inventories
Biaya dibayar di muka	9	147.343.993.000	97.349.033.573	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	10.a	87.481.580.933	85.456.951.445	Prepaid taxes
Uang muka	11	52.508.640.359	34.985.610.703	Advances
Pendapatan akan diterima	12	714.663.133.352	507.712.855.175	Accrued revenues
Aset lancar lainnya		1.072.791.711	1.043.860.752	Other current assets
Jumlah aset lancar		5.374.903.460.158	4.680.050.989.570	Total current assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Piutang lain-lain		3.004.950.401	3.004.950.402	Other receivable
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	13	41.171.003.358	26.350.242.118	Investment in associates and joint venture
Properti investasi - bersih	14	126.169.003.277	130.981.882.600	Investment properties - net
Aset tetap - bersih	15	2.875.422.521.406	2.799.824.372.486	Fixed assets - net
Goodwill	16	2.544.027.851	2.544.027.851	Goodwill
Aset pajak tangguhan	10.d	184.748.914.916	206.169.489.182	Deferred tax assets
Jaminan	17	20.375.394.576	19.924.089.867	Deposits
Aset tidak lancar lainnya	18	72.827.228.695	77.467.544.847	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		3.326.263.044.480	3.266.266.599.353	Total non-current assets
JUMLAH ASET		8.701.166.504.638	7.946.317.588.923	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha	19	336.831.900.636	213.768.388.229	Trade payables
Biaya yang masih harus dibayar	20	580.870.876.897	540.923.888.674	Accrued expenses
Utang pajak	10.b	142.749.837.710	104.858.821.327	Taxes payable
Pendapatan diterima di muka	21	87.584.762.255	89.984.707.676	Unearned revenue
Liabilitas sewa jangka pendek		2.320.415.317	948.966.241	Lease liabilities - current portion
Liabilitas jangka pendek lainnya	22	70.790.796.797	59.282.814.387	Other current liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek		1.221.148.589.612	1.009.767.586.534	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Utang afiliasi	33	10.343.255.468	10.343.255.468	Affiliated payables
Liabilitas sewa jangka panjang		35.010.416.634	37.248.110.236	Lease liabilities - non-current portion
Liabilitas imbalan pasca kerja	23	664.277.717.873	743.149.440.909	Post-employment benefits liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	10.d	27.901.037.361	23.644.081.122	Deferred tax liabilities
Utang jaminan		2.004.807.687	1.934.809.178	Deposit payables
Liabilitas jangka panjang lainnya		5.204.723.143	--	Other non-current liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang		744.741.958.166	816.319.696.913	Total Non-current Liabilities
Jumlah liabilitas		1.965.890.547.778	1.826.087.283.447	Total liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham	24	7.012.393.000.000	7.012.393.000.000	Capital stock
Tambahan modal disetor	25	(2.630.821.280.243)	(2.630.821.280.243)	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lainnya		153.215.395.509	184.214.278.614	Other comprehensive income
Saldo laba:				Retained earnings :
Telah ditentukan penggunaannya		1.133.249.521.743	613.945.066.213	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		697.086.815.337	605.554.454.542	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		6.365.123.452.346	5.785.285.519.126	Equity attributable to the owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	27	370.152.504.514	334.944.786.350	Non-controlling interests
Jumlah ekuitas		6.735.275.956.860	6.120.230.305.476	Total equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		8.701.166.504.638	7.946.317.588.923	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to consolidated financial statements are
an integral part of the consolidated financial statements.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
THE CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Years Ended on
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember 2023 December 31, 2023 Rp	31 Desember 2022 December 31, 2022 Rp	
PENDAPATAN	28	5.913.103.080.419	5.545.831.425.942	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	29	(4.145.941.194.327)	(3.980.782.359.068)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		1.767.161.886.092	1.565.049.066.874	GROSS PROFIT
Beban penjualan	30	(34.797.682.559)	(31.609.331.314)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	31	(1.022.802.668.154)	(952.914.931.175)	General and administrative expenses
Bagian laba bersih ventura bersama	13	270.061.543.256	261.688.846.905	Share in profit of joint venture
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	32	57.526.988.275	39.080.250.629	Other income (expenses) - net
LABA SEBELUM PAJAK		1.037.150.066.910	881.293.901.919	PROFIT BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	10.c	(218.824.660.856)	(158.008.035.409)	Current
Tangguhan		(34.767.581.166)	(34.899.924.763)	Deferred
LABA TAHUN BERJALAN		783.557.824.888	688.385.941.747	NET PROFIT FOR THE PERIOD YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - setelah pajak		(32.228.361.432)	(84.899.582.945)	Remeasurement of employee benefits liabilities - Net of tax
Selisih kurs atas penjabaran mata uang asing		31.500.000	(21.380.098)	Foreign currency translation differences
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		751.360.963.456	603.464.978.704	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		737.839.141.662	646.304.455.530	Owners of parent entity
Kepentingan non-pengendali		45.718.683.226	42.081.486.217	Non-controlling interests
JUMLAH		783.557.824.888	688.385.941.747	TOTAL
LABA KOMPREHENSIF TAHUN				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		706.840.258.557	566.618.520.902	Owners of parent entity
Kepentingan non-pengendali	27	44.520.704.899	36.846.457.802	Non-controlling interests
JUMLAH		751.360.963.456	603.464.978.704	TOTAL

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to consolidated financial statements are
an integral part of the consolidated financial statements.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal

31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

For the Years Ended on

December 31, 2023 and 2022

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk /Equity attributable to the owners of the Company							Kepentingan non- pengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah ekuitas/ Total equity
	Saldo laba/Retained earnings			Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income					
	Modal saham/ Capital stock	Tambahan modal disetor/ Additional/ paid-in capital	Ditetukan penggunaanya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaanya/ Unappropriated	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Difference in foreign currency	Revaluasi aset/ Asset revaluation	Remeasurement of employee benefits liabilities	Jumlah / Total	
Saldo 31 Desember 2021/ Balance December 31, 2021	7.012.393.000.000	(2.630.821.280.243)	516.434.383.671	107.510.682.542	2.759.096.286	253.216.815.575	7.924.301.380	5.269.416.999.211	301.320.177.261
Laba tahun berjalan/Profit for the year	--	--	--	646.304.455.530	--	--	--	646.304.455.530	42.081.486.217
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan pascakerja/ Remeasurement of employee benefits liabilities	--	--	--	--	--	--	(79.666.755.824)	(79.666.755.824)	(5.232.827.121)
Selisih kurs atas penjabaran mata uang asing/ Foreign currency translation differences	--	--	--	--	(19.178.803)	--	--	(19.178.803)	(2.201.295)
Dividen tunai/Cash dividend	--	--	--	(50.750.000.988)	--	--	--	(50.750.000.988)	(3.221.848.712)
Penyisihan cadangan umum/ General reserve	--	--	97.510.682.542	(97.510.682.542)	--	--	--	--	--
Saldo 31 Desember 2022/ Balance December 31, 2022	7.012.393.000.000	(2.630.821.280.243)	613.945.066.213	605.554.454.542	2.739.917.483	253.216.815.575	(71.742.454.444)	5.785.285.519.126	334.944.786.350
Laba Periode Berjalan/ Profit for the period	--	--	--	737.839.141.662	--	--	--	737.839.141.662	45.718.683.226
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan pascakerja/ Remeasurement of employee benefits liabilities	--	--	--	--	--	--	(31.027.139.865)	(31.027.139.865)	(1.201.221.567)
Selisih kurs atas penjabaran mata uang asing/ Foreign currency translation differences	--	--	--	--	28.256.760	--	--	28.256.760	3.243.240
Dividen tunai/Cash dividend	--	--	--	(127.002.325.337)	--	--	--	(127.002.325.337)	(9.312.986.735)
Penyisihan cadangan umum/ General reserve	--	--	519.304.455.530	(519.304.455.530)	--	--	--	--	--
Saldo 31 Desember 2023/ Balance December 31, 2023	7.012.393.000.000	(2.630.821.280.243)	1.133.249.521.743	697.086.815.337	2.768.174.243	253.216.815.575	(102.769.594.309)	6.365.123.452.346	370.152.504.514
									6.735.275.956.860

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an
integral part of the consolidated financial statements.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2023 December 31, 2023 Rp	31 Desember 2022 December 31, 2022 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	5.608.124.563.273	5.520.692.491.890	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada karyawan dan pemasok	(4.169.645.588.274)	(4.573.434.838.002)	Cash paid to suppliers and employees
Pembayaran kas kepada pihak ketiga	(727.281.388.422)	(98.238.420.445)	Cash paid to third parties
Pembayaran kas untuk beban operasional dan lainnya	(115.613.623.414)	(120.996.042.923)	Cash paid to operating expenses and others
Penyaluran kas Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	(2.863.745.062)	(2.445.135.911)	Cash payment for funding Micro and Small Business
Penerimaan bunga	60.431.739.275	36.655.122.521	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan	(178.807.282.685)	(170.111.265.524)	Income taxes paid
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	474.344.674.691	592.121.911.606	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dividen dari ventura bersama	245.377.340.161	261.169.526.846	Dividend receipt from joint venture
Perolehan aset tetap	(257.595.105.930)	(245.760.828.211)	Acquisitions of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	184.337.236	39.371.499	Proceeds from fixed assets
Perolehan aset lainnya	(7.689.183.859)	(28.502.098.120)	Acquisitions of other assets
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(19.722.612.392)	(13.054.027.986)	Net cash provided by (used in) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran dividen	(136.315.312.072)	(53.971.849.700)	Payment of cash dividends
Biaya sewa	(4.943.905.774)	(4.942.600.431)	Rent expenses
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(141.259.217.846)	(58.914.450.131)	Net cash used in financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	313.362.844.453	520.153.433.489	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	3.046.844.772.886	2.511.471.507.592	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(2.631.953.871)	15.219.831.805	Effect on foreign exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	3.357.575.663.468	3.046.844.772.886	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR

Tambahan informasi transaksi non kas diungkapkan dalam Catatan 38.

Additional non-cash transaction information is disclosed in Notes 38.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), selanjutnya disebut "Perusahaan" merupakan peralihan dari PN Biro Klasifikasi Indonesia yang didirikan tanggal 1 Juli 1964. Peralihan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1977. Akta pendirian Perusahaan dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 57 tahun 1977 tanggal 21 April 1977 yang diperbaiki dengan Akta No. 35 tanggal 19 Oktober 1978 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/345/19 tanggal 7 November 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11 tahun 1979 tanggal 6 Februari 1979 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tahun 1999).

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 35 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ruli Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S988/MBU/12/2021 tertanggal 16 Desember 2021 perihal perubahan Struktur Permodalan dan Anggaran Dasar Perusahaan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Perubahan tersebut menyetujui penambahan modal, penambahan bidang usaha pada pasal 3 ayat (1) dan (2), dan perubahan kegiatan usaha pada pasal 3 ayat (3). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0001478.AH.01.02.TH.2022 tanggal 7 Januari 2022.

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan kegiatan usaha Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang holding jasa survei, jasa klasifikasi dan registrasi kapal, survei, verifikasi, inspeksi, sertifikasi, konsultasi dan supervisi, pengelolaan manajemen serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan dan/atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Kantor Pusat Perusahaan berdomisili di Jl. Yos Sudarso No.38-40, Tanjung Priok Jakarta Utara, 14320.

Grup memiliki 16 unit bisnis dan 69 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), hereinafter referred to as the "Company" is a transition from the PN Biro Klasifikasi Indonesia which was established on July 1, 1964. This transition was based on Government Regulation No. 1 of 1977. The Company's deed was made of by Notary Imas Fatimah, S.H., No. 57 of 1977 dated April 21, 1977 which was amended by Deed No. 35 dated October 19, 1978 and was ratified by Decree of the Minister of Justice No. Y.A.5/345/19 dated November 7, 1978 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 11 of 1979 dated February 6, 1979 (Additional State Gazette of the Republic of Indonesia No. 58 of 1999).

The Articles of Association of the Company have been amended several times most recently with Deed No. 35 dated December 16, 2021 made by Ruli Iskandar, S.H., Notary in Jakarta. These changes are a follow-up to Letter of Minister of Owned Enterprises No. S-988/MBU/12/2021 dated December 16, 2021 regarded the amendment to the Articles of Association of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia. The amendment approves the addition of capital and addition business activities in article 3 paragraph (1) and (2) and change in business activities in article 3 paragraph (3). The amendment was approved by the Minister of Law and Republic of Human Rights Indonesia with decree No. AHU-0001478.AH.01.02.TH.2022 dated January 7, 2022.

In accordance with the Company's Articles of Association the company activities are to conduct the business activities in survey service holding, the field of ship classification and registration services, survey, verification, inspection, certification consulting and supervision services, management and optimization of utilization of resources owned by the Company to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness, to obtain/pursue jurisdiction to increase the value of the Company by applying the principles of Company.

The Company Head Office is domiciled at Yos Sudarso street No. 38-40 Tanjung Priok, North Jakarta, 14320.

The Group has 16 business units and 69 branches spread throughout Indonesia and abroad.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Pengalihan saham dari Pemerintah Republik Indonesia

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2021 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia dari pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada:

- Perusahaan Perseroan (Persero) PT Surveyor Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia (Persero) untuk pendirian Perseroan Terbatas dalam bidang jasa pemeriksaan Pra-Pengapalan barang-barang impor Indonesia di luar negeri; dan
- Perusahaan Perseroan (Persero) PT Superintending Company of Indonesia, yang selanjutnya Perusahaan Perseroan dimaksud dalam Anggaran Dasar disingkat SUCOFINDO yang didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Perekonomian No. 11.460a/M tanggal 20 September 1956 tentang pendirian sebuah *mixed-enterprise*.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 291/KMK.06/2021 tentang penetapan nilai penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.

Dengan adanya Akta No. 35 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ruli Iskandar, S.H., yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0001478.AH.01.02.TH.22 tanggal 7 Januari 2022, tentang Perubahan Stuktur Permodalan dan Anggaran Dasar PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), maka seluruh Saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada PT SUCOFINDO dan PT SI dialihkan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai penambahan modal negara.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

**a. Establishment and General Information
(continued)**

Transfer of shares from Republic of Indonesia

With the issuance of Government Regulation No. 66 in 2021 about the addition of the Republic of Indonesia's state equity participation into the share capital of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) from the transfer of all share series B owned by The Republic of Indonesia in:

- PT Surveyor Indonesia (Persero) which was established based on Government Regulation No. 45 in 1991 about Republic Indonesia's capital investment for the establishment of a Limited Company in the field of Pre-shipment inspection services for Indonesian imported goods abroad; and
- PT Superintending Company of Indonesia (Persero), hereinafter referred to in the Articles of Association abbreviated as SUCOFINDO, which was established based on the Decree of the Minister of the Economy No. 11.460a/M dated September 20, 1956, regarding the establishment of a *mixed-enterprise*.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 291/KMK.06/2021 about the determination of the additional Republic Indonesia's capital investment into the share capital of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

With Deed No. 35 dated December 16, 2021, drawn up before Notary Ruli Iskandar, S.H., which has been ratified by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-0001478.AH.01.02.TH.2022 dated January 7, 2022, regarding Changes in the Capital Structure and Articles of Association of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), then all Series B Shares owned by the Republic of Indonesia in PT SUCOFINDO and PT SI were transferred to PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) as additional capital.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit

Sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-178/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, memutuskan mengangkat Sdr. Virgo Eresta sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.

Sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-177/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bandung Pardede sebagai Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK 304/MBU/12/2018 tanggal 19 Desember 2018 jo. SK-226/MBU/06/2021 tanggal 2 Juli 2021.

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	-	Direktur Hubungan Kelembagaan

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia sebagai berikut:

1. Sdri. Sinung Triwulandari sebagai Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko
2. Sdr. Andry Tanudjaja sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan.

Sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-227/MBU/10/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Memberhentikan Sdr. Agung Kuswandono sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Dwi Budi Sutrisno sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-17/MBU/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 dan No. SK-15/MBU/01/2018 tanggal 16 Januari 2018.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Audit Committee

In accordance with the Copy of Decree Minister of State Owned Enterprises No. SK-178/MBU/07/2023 dated July 4, 2023 concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, decided to appointment Mr. Virgo Eresta as Commissioners of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.

In accordance with the Copy of Decree Minister of State Owned Enterprises No. SK-177/MBU/07/2023 dated July 4, 2023 concerning the Dismissal, Changes on Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, decided that:

1. Respectfully dismissed Mr. Bandung Pardede as Director of Finance, Administration, and Risk Management of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) who was appointed based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-304/ MBU/12/2018 dated December 19, 2018 jo. SK-226/MBU/06/2021 dated July 2, 2021.

2. Changes on board of directors member nomenclature of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) is as follow:

No.	Before	After
1.	-	Director of Institutional Relations

3. Appointing those name below as members of the Board of Directors in PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero):

1. Mrs. Sinung Triwulandari as Director of Finance, Administration, and Risk Management
2. Mr. Andry Tanudjaja as Director of Institutional Relations.

In accordance with a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-227/MBU/10/2022 concerning Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), decided that:

1. Dismissing Mr. Agung Kuswandono as the President Commissioner and Mr. Dwi Budi Sutrisno as Commissioner who was appointed based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. SK-17/MBU/01/2019 dated January 15, 2019 and No. SK-15/MBU/01/2018 dated January 16, 2018.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit (lanjutan)

2. Mengalihkan penugasan Sdr. Raden Harry Hikmat semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama.
3. Mengangkat Sdr. Lathifah Shohib sebagai Komisaris Independen.

Sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia No. SK-288/MBU/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia memberhentikan dengan hormat Sdr. Rudiyanto sebagai Direktur Utama sekaligus mengangkat Sdr. Arisudono sebagai Direktur Utama.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia No. SK-234/MBU/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia memberhentikan dengan hormat Sdr. Mohamad Cholil sebagai Direktur Operasi sekaligus mengangkat Sdr. R. Benny Susanto sebagai Direktur Operasi.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Raden Harry Hikmat
Komisaris	M. Amperawan
Komisaris	Indra Iskandar
Komisaris	Virgo Eresta Jaya
Komisaris Independen	Lathifah Shohib
Direksi	
Direktur Utama	Arisudono
Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Resiko	Sinung Triwulandari
Direktur Operasi	R. Benny Susanto
Direktur Pengembangan Sumber Daya	Rozainbahri Noor
Direktur Hubungan Kelembagaan	Andry Tanudjaja

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No. 04/DEKOM.BKI/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia, Mengangkat Sdr. Guido Anwar sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Audit Committee (continued)

2. Shifting the assignment of Mr. Raden Harry Hikmat originally as Commissioner to President Commissioner.
3. Appoint Mrs. Lathifah Shohib as Independent Commissioner.

In accordance with the copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as the Shareholders' Meeting of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No. SK-288/MBU/12/2022 dated December 13, 2022 concerning Dismissal and Appointment of members of the Board of Directors of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) respectfully dismissed Mr. Rudiyanto as the President Director and appointed Mr. Arisudono as President Director.

In accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as the Company Shareholders Meeting of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No. SK-234/MBU/10/2022 dated October 21, 2022 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) respectfully dismissed Mr. Mohamad Cholil as Director of Operations and appointed Mr. Benny Susanto as Director of Operations.

The composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2022
Board of Commissioners	
President Commissioner	Raden Harry Hikmat
Commissioner	M. Amperawan
Commissioner	Indra Iskandar
Commissioner	-
Independent Commissioner	Lathifah Shohib
Directors	
President Director	Arisudono
Director of Finance, Administration and Risk and Management	Bandung Pardede
Director of Operations	R. Benny Susanto
Director of Resource Development	Rozainbahri Noor
Director of Institutional Relations	-

Based on the Decree of the Board of Commissioner PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No. 04/DEKOM.BKI/VI/2023 dated June 23, 2023 about Appointment Members of the audit committee of the Company, appointed Mr. Guido Anwar as Members of the audit committee PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit
(lanjutan)**

Susunan Komite Audit pada tanggal
31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai
berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Ketua Komite Audit	M. Amperawan
Anggota	Bangun Tiroi Ruhut Hutagalung Guido Anwar

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro
Klasifikasi Indonesia (Persero) No.
SK.03/DEKOM.BKI/V/2023 tanggal 26 Mei 2023
tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau
Risiko dan Tata Kelola Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia,
mengangkat Sdr. Evan Oktavianus sebagai
Anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro
Klasifikasi Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
No.SK.06/DEKOM.BKI/VII/2023 tanggal 6 Juli
2023 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Komite
Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia,
mengangkat Sdr. Virgo Eresta Jaya sebagai Wakil
Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro
Klasifikasi Indonesia.

Susunan Komite Manajemen Risiko pada tanggal
31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai
berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Ketua Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola	Lathifah Shohib
Wakil Ketua Anggota	Virgo Eresta Jaya Diane Christina Evan Oktavianus

1. GENERAL (continued)

**b. Board of Commissioners, Directors and Audit
Committee (continued)**

As of December 31, 2023 and 2022 the composition of
the audit committee of the Company is as follows:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
M. Amperawan	M. Amperawan	Audit Committee Chairman Members
Nur Abdillah	Nur Abdillah	
Bangun Tiroi Ruhut Hutagalung	Bangun Tiroi Ruhut Hutagalung	

Based on the Decree of the Board of Commissioner
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No.
SK.03/DEKOM.BKI/V/2023 dated May 26, 2023 about
Appointment Members of the Risk Monitoring and
Governance Committee of the Company, appointed Mr.
Evan Oktavianus as Member of the Risk Monitoring and
Governance Committee PT Biro Klasifikasi Indonesia
(Persero).

Based on the Decree of the Board of Commissioner
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
No. SK.06/DEKOM.BKI/VII/2023 dated July, 6 2023
about Appointment of Vice Chairman of the Risk
Monitoring and Governance Committee of the Company,
appointed Mr. Virgo Eresta Jaya as Vice Chairman of the
Risk Monitoring and Governance Committee of
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

As of December 31, 2023 and 2022 the composition of
the Risk Management Committee of the Company is as
follows:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Lathifah Shohib	Lathifah Shohib	Risk Monitoring and Governance Committee Chairman Vice Chairman Members
-	-	
Diane Christina	Diane Christina	

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No. SK.9/DEKOM.BKI /X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia dan Pengalihan Tugas Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), memberhentikan dengan hormat Sdr. Raden Harry Hikmat sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia dan mengalihkan tugas Sdr. Indra Iskandar yang semula menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia menjadi Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No.SK.07/DEKOM.BKI/IX/2023 tanggal 7 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi Sumber Daya Manusia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), memberhentikan dengan hormat Sdri. Dian Rakhmawaty sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia dan mengangkat Sdr. Herry Sudrajat menjadi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia.

Susunan Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, dan Sumber Daya Manusia Anggota	Indra Iskandar Diana Hady Herry Sudrajat

Perusahaan dan entitas anak (Grup) memiliki jumlah karyawan masing-masing sebanyak 3.004 dan 3.187 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Audit Committee (continued)

Based on the Decree of the Board of Commissioner PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No. SK.9/DEKOM.BKI/X/2022 dated October 10, 2022 about Dismissal of Chairman Committee of Nomination, Remuneration, and Human Resource, and Shifting the assignment of Committee of Nominations and Human Resource PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), respectfully dismissed Mr. Raden Harry Hikmat as Chairman of Committee Nomination, Remuneration and Human Resource, and shifting the assignment of Mr. Indra Iskandar from Vice Chairman of Committee Nomination, Remuneration and Human Resource to Chairman Committee of Nomination, Remuneration, and Human Resource PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Based on the Decree of the Board of Commissioner PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No. SK.07/DEKOM.BKI/IX/2023 dated September 7, 2023 about Dismissal and Appointment Members of the Committee of Nomination, Remuneration, and Human Resource PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), respectfully dismiss Mrs. Dian Rakhmawaty Members of the Committee of Nomination, Remuneration, and Human Resource and appointed Mr. Herry Sudrajat Members of the Committee of Nomination, Remuneration, and Human Resource PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

As of December 31, 2023 and 2022 the composition of the Nomination, Remuneration and Human Resource Committee of the Company is as follows:

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nomination, Remuneration, and Human Resource Committee Members	Indra Iskandar Diana Hady -	

The Company and its subsidiaries (Group) have a total employees of 3,004 and 3,187 as of December 31, 2023 and 2022, respectively (unaudited).

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Entitas anak

Rincian entitas anak Grup pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

c. Subsidiaries

Details of the Group's subsidiaries at the end of the reporting period are as follows:

Entitas anak/ Subsidiaries	Jenis usaha/ Nature of business	Domisili/ Domicile	Tahun usaha komersial dimulai/ Commencement of Commercial Operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
				31 Des/Dec,		31 Des/Dec,	
				2023	2022	2023	2022
PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo)	Inspeksi, audit, Konsultasi dan sertifikasi/ <i>Inspection, audit, consultations and Certification</i>	Jakarta	1958	94,99%	94,99%	4.642.115.505.952	4.282.209.187.355
PT Surveyor Indonesia (SI)	Surveyor, Inspeksi dan sertifikasi/ <i>Surveyor, Inspection and Certification</i>	Jakarta	1991	85,11%	85,11%	2.341.611.542.696	2.127.061.771.023
Kepemilikan tidak langsung/Indirect ownership							
PT Sucofindo Advisory Utama (SAU) ^{a)}	Jasa/Services	Jakarta	2000	91,43%	91,43%	49.198.264.954	39.358.548.535
PT Sucofindo Episi (EPISI) ^{a)}	Pembangunan, Perdagangan, dan Jasa/ <i>Construction, Trade, and Services</i>	Jakarta	2002	95,00%	95,00%	72.439.771.594	64.928.412.667
PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia (SCCI) ^{b)}	Jasa inspeksi, survey dan uji laboratorium di industri pertambangan batubara/ <i>Inspection services, survey and laboratory testing in the coal mining industry.</i>	Jakarta	2002	99,00%	99,00%	333.456.161.052	304.387.071.300
PT Synergi Tata Internasional (STI) ^{b)}	Pengelolaan air, limbah lainnya, konstruksi bangunan sipil, dan konstruksi khusus / <i>Water management, waste construction of civil buildings, and special construction</i>	Jakarta	2008	60,00%	60,00%	9.946.069.043	11.820.292.238
Surveyor Carbon Consulting Indonesia Vietnam Co., Ltd (SCCI Vietnam) ^{b)}	Jasa arsitektur, geologi, geofisika, dan jasa prospeksi ilmiah lainnya, jasa survei bawah tanah, jasa survei permukaan, pengujian dan analisis teknis, dan jasa konsultasi manajemen/ <i>Architectural service, geological, geophysical, and other scientific prospecting services, underground survey services, surface survey services, Technical testing and analysis and Management consulting services.</i>	Vietnam	2022	100,00%	100,00%	1.479.191.836	1.572.360.005

a) Kepemilikan tidak langsung melalui SUCOFINDO / *Indirect ownership through SUCOFINDO*

b) Kepemilikan tidak langsung melalui SI / *Indirect ownership through SI*

Perusahaan dan entitas anak bersama-sama disebut Grup dalam laporan keuangan konsolidasian.

The Company with its subsidiaries are collectively referred to as the Group in these consolidated financial statements.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The Company's consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI).

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

a. Pernyataan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (lanjutan)

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pertukaran aset.

c. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Amendemen / penyesuaian dan standar baru yang berlaku efektif pada periode berjalan

Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46 : Pajak penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK) (continued)

The presentation currency of the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Group.

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the conducting in exchange for assets.

c. Adoption of New / Revised Standards

Amendments/ adjustments and new standards effective in the current period

The following are amendments and improvements to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding the classification of liabilities as short term or long term;
- Amendments to PSAK 16: Fixed Assets related to Proceeds before Intended Use;
- Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates;
- Amendment to PSAK 46: With-holding Tax regarding Asset - Related Deferred Tax and Liabilities Arising From a Single Transaction.

The implementation of the above standards had no significant effect on the amount reported for the current period or prior financial year.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

c. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

**Standar, amendemen dan interpretasi standar
telah diterbitkan tapi belum diterapkan**

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023, adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2024

- PSAK No. 1, (amendemen), Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- PSAK No. 73 (amendemen), Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa Balik.

Efektif 1 Januari 2025

- PSAK No. 74, tentang "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi" mengenai Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

c. Adoption of New / Revised Standards (continued)

**Standards, Amendments and Interpretations to
Standards Issued not yet adopted**

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following amendments to PSAKs relevant to the Group were issued but not effective, with early application permitted on January 1 2023, are as follows:

Effective January 1, 2024

- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements – Non Current Liabilities with covenant";
- Amendmet to PSAK No. 73, "Rent Liabilities in Sale and Leaseback.

Effective January 1, 2025

- PSAK No. 74 on "Insurance Contract ";
- Amendment to PSAK No. 74 on, "Insurance Contract" regarding the Early Application of PSAK 74 and 71 -Comparative Information.

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the investor controls an investee, if and only if, the investor has all of the following:

- i) Power over the investee, that is existing rights that give the investor current ability to direct the relevant activities of the investee,
- ii) Exposure or rights to variable returns from its involvement with the investee, and
- iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
- ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
- iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

d. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berhenti pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali (KNP), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh saldo akun, transaksi, penghasilan dan beban antar perusahaan yang signifikan dan laba atau rugi hasil transaksi dari intra Grup yang belum direalisasi dan dividen dieliminasi pada saat konsolidasi.

e. Kombinasi Bisnis dan Goodwill

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, kepentingan nonpengendali dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara rugi atau laba yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

d. Principles of Consolidation (continued)

The Group reassesses whether or not it controls an *investee* if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests (NCI), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All significant intra and inter-group balances, transactions, income and expenses and unrealized profits and losses resulting from intra-group transactions and dividends are eliminated on consolidation.

e. Business Combinations and Goodwill

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction.

If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, non-controlling interest and other component of equity, while any resultant gain or loss is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

e. Kombinasi Bisnis dan Goodwill (lanjutan)

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui pada laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen melakukan penilaian atas identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (UPK) dari Grup yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

f. Transaksi dengan pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

1. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

e. Business Combinations and Goodwill (continued)

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's Cash-Generating Units (CGU) that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGUs.

f. Transactions with Related Parties

A related parties is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

1. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
2. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

f. Transaksi dengan pihak-pihak Berelasi
(lanjutan)

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam (1);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam (1) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

g. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Grup melakukan penerapan PSAK No. 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan akuntansi lindung nilai. Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori:

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

f. Transactions with Related Parties
(continued)

- i. The entity and the reporting entity are members of the same Group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Group of which the other entity is a member);
- iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi. The entity is controlled or joint controlled by a person identified in (1);
- vii. A person identified in (1) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity);
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

g. Financial assets and liabilities

Financial assets

The Group has applied PSAK No. 71, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting. The Group classifies its financial assets in the following categories:

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

g. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

- i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain;
- ii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain;
- iii. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan pendapatan akan diterima. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Jika tidak, maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

g. Financial assets and liabilities (continued)

- i. Financial assets at fair value through statements of profit or loss or other comprehensive income;
- ii. Financial assets at fair value through statements of profit or loss or other comprehensive income;
- iii. Financial assets at amortised cost.

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial application.

On December 31, 2023 and 2022, the Group has financial assets classified as financial assets at amortised cost. Financial assets at amortised cost consist of cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, and accrued revenue. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as noncurrent. Financial assets at amortised cost are recognized initially at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assess whether the credit risk on a financial instrument has increase significantly since initial recognition.

When conducting the assessment, the Group use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

To conduct that assessment, the Group compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha, piutang lain-lain, dan pendapatan akan diterima tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Liabilitas keuangan

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- i. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- ii. Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Grup memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang akrual, liabilitas sewa jangka pendek, liabilitas jangka pendek lainnya, utang afiliasi, liabilitas sewa jangka panjang dan utang jaminan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pemberhentian pengakuan atas liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

The Group applied a simplified approach to measure such as expected credit loss for trade receivables, other receivables, and accrued revenue without significant financing component.

Financial liabilities

There are no changes in classification and measurement of financial liabilities.

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows:

- i. Financial liabilities at amortized cost;
- ii. Financial liabilities at fair value through profit and loss (FVTPL) or other comprehensive income (FVOCI).

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

The Group has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortised cost. All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the profit or loss.

On December 31, 2023 and 2022, the Group has financial liabilities measured at amortised cost are trade payables, accrued payables, lease liability – current portion, loan – related parties, lease liability – non-current portion and deposit payables. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Derecognition of financial liabilities

Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognized in the statements of profit or loss.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

Instrumen keuangan disaling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

h. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

i. Persediaan

Persediaan meliputi semua barang/bahan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan jasa operasi dan administrasi Grup, yang terdiri dari bahan operasi dan alat tulis kantor.

Biaya perolehan persediaan dilakukan berdasarkan metode harga perolehan rata-rata. Khusus untuk bahan operasi laboratorium dicatat terlebih dahulu dalam "biaya bahan operasi" (*supplies expense*), dan pada akhir periode untuk kepentingan pelaporan dilakukan penyesuaian untuk barang-barang yang sisa ke dalam akun "persediaan bahan operasi".

Persediaan disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparties.

h. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (current account), and time deposits with maturity periods of 3 months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

i. Inventories

Inventories include all materials and equipment necessary to carry out Group's operations service and administration, which consist of operating materials and stationaries.

Inventory cost is based on average cost method. Materials specific to laboratory operations are initially recorded as supplies expense, and at the end of the period for reporting purposes, unused items will be adjusted into "operational materials inventory" account.

Inventories are recognized at the lower of cost and realizable value.

The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

j. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap nilai tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- (a) jika investasi menjadi entitas anak;
- (b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar; dan
- (c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

k. Pengaturan bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

j. Investments in associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence).

Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in associate is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- (a) if the investment becomes a subsidiary;
- (b) if the retained interest in the former associate is a financial asset, the Company and its subsidiaries measure the retained interest at fair value; and
- (c) when the Company and its subsidiaries discontinue the use of the equity method, the Company and its subsidiaries account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

k. Joint arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group classified joint arrangement as:

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

k. Pengaturan bersama (lanjutan)

1. Operasi Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- Pendapatan dari penjualan bagiannya atas *output* yang dihasilkan dari operasi bersama;
- Beban dari beban bagiannya atas *output* yang dihasilkan dari operasi bersama;
- Bagiannya atas pendapatan dari penjualan *output* oleh operasi bersama.

2. Ventura Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai ventura bersama.

Ventura bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

l. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka adalah saldo pembayaran di muka yang dilakukan dalam suatu periode yang memiliki manfaat di periode yang akan datang. Beban dibayar di muka akan diakui sebagai beban pada tahun berjalan sesuai dengan manfaat pada tahun tersebut dan pada saat masa manfaatnya berakhir. Untuk biaya kontrak, akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui pada setiap periode.

m. Properti investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

k. Joint arrangement (continued)

1. Joint Operation

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

A joint operator recognize in relation to its interest in a joint operation:

- Assets, including its share of any assets held jointly;*
- Liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;*
- Revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;*
- Expense from the expense of its share of the output arising from the joint operation;*
- Share of the revenue from the sale of the output by the joint operation.*

2. Joint Venture

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venture.

A joint venture recognize its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

l. Prepaid expenses

Prepaid expenses are payments made in advances in a period that has benefits in the next period. Prepaid expenses will be paid in the current year in accordance with the benefits in this year and when the benefits expire. For contract costs, will be charged in proportion to the revenue recognized in each period.

m. Investment properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

m. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga-harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain. Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

n. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

m. Investment properties (continued)

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

Maintenance and repairment costs are charged to profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalized.

Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party. Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sale.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal.

Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

n. Fixed assets

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. If the recognition criteria are met, the acquisition cost will include the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognised in profit or loss as incurred.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

n. Aset tetap (lanjutan)

n. Fixed assets (continued)

Kecuali hak atas tanah yang tidak disusutkan, aset tetap disusutkan secara bulanan dimulai sejak awal bulan berikutnya setelah dicatat. Penyusutan aset tetap dilakukan berdasarkan metode garis lurus dengan tarif penyusutan yang sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomik tanpa nilai sisa sejak tanggal aset tersebut siap digunakan dengan penjelasan sebagai berikut:

Except for land rights, fixed assets are depreciated on a monthly basis since it is recorded. Depreciation of fixed assets is calculated using the straight-line method over the estimated useful lives with no residual value since the date the asset is ready for use, as follows:

	Tahun/ Years	
Bangunan	20	Building
Peralatan mesin	5 - 8	Equipment machinery
Kendaraan	4 - 5	Vehicle
Peralatan kantor	3 - 5	Office equipment
Peralatan operasi	3 - 5	Operation equipment
Peralatan laboratorium	4 - 8	Laboratory equipment
Peralatan sistem informasi	3 - 5	Information system tools
Aset hak guna	2 - 4	Right-of-use assets

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated from the start of its operation.

Aset tetap yang sedang dikonstruksi disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Pelaksanaan" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya.

Fixed assets under construction are presented as part of fixed assets as "Assets in Progress" and stated at acquisition cost.

Semua biaya, termasuk biaya pinjaman yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi.

All costs, including borrowing costs incurred in connection with the construction of the asset is capitalized as part of the acquisition cost of property and equipment construction in progress.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Aset tetap berupa tanah dan bangunan dinyatakan sebesar nilai revaluasinya dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Fixed assets in the form of land and building are stated at their revaluation less accumulated depreciation and impairment losses incurred after the date of revaluation.

Perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran tanah dan bangunan berlaku prospektif.

The change of accounting policy from the cost model to the revaluation model in land and building measurement on a prospective basis.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

n. Aset tetap (lanjutan)

Pada penerapan awal metode revaluasi keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tanah dan bangunan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan setelah penerapan awal keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tanah dan bangunan diakui laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai tanah dan bangunan akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya.

Pada saat penghentian aset, surplus revaluasi untuk tanah dan bangunan yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

o. Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis tersebut dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Grup yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi *goodwill* diuji penurunan nilainya secara tahunan, dan ketika terdapat indikasi bahwa unit tersebut mengalami penurunan nilai.

Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama untuk mengurangi jumlah tercatat aset atas setiap *goodwill* yang dialokasikan pada unit dan selanjutnya ke aset lainnya dari unit dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset dalam unit tersebut. Setiap kerugian penurunan nilai *goodwill* diakui secara langsung dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Pada pelepasan unit penghasil kas yang relevan, jumlah yang dapat diatribusikan dari *goodwill* termasuk dalam penentuan laba atau rugi atas pelepasan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

n. Fixed assets (continued)

On initial implementation of the revaluation method, gains or losses arising from changes in the fair value of land and buildings are recognized in other comprehensive income. Meanwhile, after the initial application, gains or losses arising from changes in the fair value of land and buildings are recognized in profit or loss up to the amount of the decline in the value of land and buildings due to revaluation that was previously recognized.

At the time of the termination of the assets, the revaluation surplus for the land and building sold is transferred to retained earnings.

At the end of each reporting period, the Group conducted regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

o. Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business less accumulated impairment losses, if any.

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's cash-generating units expected to benefit from the synergies of the combination. Cash-generating units which have been allocated to goodwill are tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired.

If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. Any impairment loss for goodwill is recognized directly in profit or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in a subsequent period.

On disposal of the relevant cash generating unit, the attributed amount of goodwill is included in the determination of the profit or loss on disposal.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

p. Penurunan nilai aset nonkeuangan kecuali goodwill

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset nonkeuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

q. Imbalan pascakerja

Grup mengakui liabilitas imbalan pascakerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2018), beban imbalan pascakerja ditentukan dengan metode penilaian aktuaris "Projected Unit Credit".

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

p. Impairment of non-financial assets except goodwill

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the assets is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual assets, the Group estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the assets belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the assets (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

q. Post-employment benefit liabilities

The Group recognizes liabilities for non funded post employment benefits obligations in accordance with the Labor Law No. 13/2003, dated March 25, 2003. Under PSAK No. 24 (Revised 2018), post employment benefits expense is determined using the actuarial valuation method with "Projected Unit Credit".

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation is determined by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interest on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

q. Imbalan pascakerja (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Program imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya dihitung dengan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Grup memberikan imbalan penghargaan masa bakti berupa emas.

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Grup melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin;
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut). Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

q. Post-employment benefit liabilities (continued)

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Other long-term employee benefit program

Other long-term employee benefit program calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. The Group provides long service award benefit in form of gold.

r. Revenues and expenses recognition

Revenue from contracts with customers

The Group has applied PSAK 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment as follows:

1. Identify contract(s) with customers;
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in contracts to transfer for services that are distinct;
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct services promised in the contract. Where those are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin;
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services). A performance obligation may be satisfied at the following:

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Pendapatan akan diterima" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan diterima di muka"

Pendapatan jasa dapat diakui secara satu titik maupun secara suatu periode waktu berdasarkan hasil pekerjaan, tergantung kesepakatan dengan pelanggan.

Biaya penambahan yang secara langsung berhubungan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan, biaya tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72 dan diakui sebagai "Biaya Kontrak". Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan jasa yang terkait dengan aset tersebut.

Beban diakui pada saat terjadinya.

s. Perpajakan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

r. Revenues and expenses recognition (continued)

- Point in time (typically for promises to transfer services to a customer); or
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract assets is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Accrued Revenue" and contract liabilities are presented under "Unearned revenue"

Service revenue could be recognized either one time or over the time based on the work result, depending on the arrangement with customers.

The incremental costs that directly relate to obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered are eligible for capitalization under PSAK 72 and recognized as "Contract Costs". Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the services to which such asset relates.

Expenses are recognized when they are incurred.

s. Taxation

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax.

Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset.

Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a. Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan aset pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

s. Taxation (continued)

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Benefits related to tax losses that can be withdrawn to recover current tax of prior periods is recognized as an asset.

Deferred tax asset is recognized for the carry forward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the taxable temporary differences arise from:

- a. The initial recognition of goodwill; or*
- b. The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan Sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara aset untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak tangguhan; dan
- b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. Entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

t. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing selama tahun berjalan dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	31 Desember/ December, 2023
1 Dolar Amerika Serikat	15.416
1 Dolar Singapura	11.711
1 Dong Vietnam	0,640
1 Euro	17.140

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

s. Taxation (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a. The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against deferred tax liabilities; and
- b. The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:
 - i. The same taxable entity; or
 - ii. Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

t. Transactions and balances in foreign currency

Transactions in foreign currencies during the year are recorded in Rupiah at the spot rate between Rupiah and foreign currencies on the transaction date. At the end of the reporting period, monetary items in foreign currencies are translated into Rupiah using the closing rate, which is Bank Indonesia middle rate on 31 December 2023 and 2022 as follows:

	31 Desember/ December, 2022	
15.731	15.731	1 United States Dollar
11.659	11.659	1 Singapore Dollar
0,665	0,665	1 Vietnam Dong
16.713	16.713	1 Euro

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

u. Sewa

Grup melakukan penerapan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya;
- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
- Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

u. Leases

The Group has applied PSAK No. 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'. This policy is applied to contracts entered into or changed, on or after January 1, 2020.

As lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assesses whether:

- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined;
- The Group has the right to operate the asset;
- The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

u. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" dan liabilitas aset hak-guna sebagai bagian dalam "Liabilitas sewa" di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

u. Leases (continued)

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets as part of "Fixed assets" and right-of-use liabilities as part of "Lease liabilities" in the statement of financial position.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Short-term leases

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modification

The Group account for a lease modification as a separate lease if both:

- *The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*
- *The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

u. Sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Sumber estimasi ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

a. Cadangan penurunan nilai piutang

Grup membuat cadangan penurunan nilai berdasarkan analisa atas keterlambatan piutang dan pinjaman yang diberikan dengan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha, piutang lain-lain, dan pendapatan akan diterima tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(continued)

u. Leases (continued)

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- remeasure and allocate the consideration in the modified contract;
- determine the lease term of the modified lease;
- remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;
- decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- make a corresponding adjustment to the right-of-use assets for all other lease modifications.

3. CONSIDERATION AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES

Sources of estimates uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

a. Allowance for impairment of receivables

The Group established allowance for impairment based on the analysis of the collectability of receivables and loans granted using a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables, other receivables, and accrued revenue without significant financing component.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Sumber estimasi ketidakpastian (lanjutan)

Penyisihan dibentuk terhadap pinjaman yang diberikan dan piutang apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi pinjaman yang diberikan dan piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi. Apabila ekspektasi berbeda dari estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang serta biaya piutang tak tertagih pada periode mana perubahan estimasi tersebut terjadi.

- b. Taksiran masa manfaat ekonomik aset tetap dan properti investasi

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Grup atas sejenis. Masa manfaat setiap aset direvisi secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan properti investasi.

- c. Penurunan aset non-keuangan

Aset berwujud dan tidak berwujud, selain *goodwill*, dilakukan uji penurunan nilai ketika terdapat indikasi penurunan nilai. Sedangkan untuk *goodwill*, uji penurunan nilai harus dilakukan minimal setiap tahun, baik ada atau tidak adanya indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

**3. CONSIDERATION AND SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES (continued)**

Sources of estimates uncertainty (continued)

Allowance is established against loans and receivables whenever events or changes in circumstances indicate that the balance will not be collectible. Identification of the uncollectible loans and receivables requires judgment and estimates. If the expectations differ from initial estimates, these differences will impact the carrying value of loans and receivables as well as the cost of bad debts in the period where the change in estimates occurs.

- b. Estimated future economic lives of fixed assets and investment properties

The useful life of assets is determined based on the Group's expected usefulness of the use of the assets. These estimates are determined based on internal technical evaluation and experience of the Group on similar items. The useful life of each asset is reviewed periodically and adjusted when the forecasts differ from previous estimates due to wear and tear, technical and commercial obsolescence, legal or other limitations on the use of assets. It is possible that future results of operations may be significantly affected by changes in the amount and the time of recording of the cost resulting from changes in the factors mentioned above.

Changes in useful lives of fixed assets may affect the amount of depreciation expense recognized and decrease of the carrying value of fixed assets and investment properties.

- c. Impairment of non-financial assets

Tangible and intangible assets, other than goodwill, are tested for impairment when there is indication of impairment. As for the goodwill, an impairment test must be performed at least annually, whether or not there is indication of impairment. Determining the value in use of assets requires estimates of the cash flows expected to result from the use of the asset (cash-generating unit) and the disposition of these assets as well as the appropriate discount rate to determine the present value.

Although the assumptions used in estimating the value in use of assets are reflected in the financial statements is considered appropriate and reasonable, significant changes in the assumptions would have a material effect on the determination of the recoverable amount and consequently the resulting impairment loss will have an impact on the results of operations.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

d. Liabilitas imbalan pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atas perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Grup.

e. Penurunan nilai *goodwill*

Dalam menentukan apakah *goodwill* mengalami penurunan nilai, diperlukan estimasi nilai pakai unit penghasil kas dimana *goodwill* dialokasikan. Perhitungan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk mengestimasi arus kas masa depan yang diharapkan timbul dari unit penghasil kas yang menggunakan tingkat pertumbuhan yang tepat dan tingkat diskonto yang sesuai untuk perhitungan nilai kini. Di mana aktual arus kas masa depan kurang dari yang diharapkan, kerugian penurunan nilai material mungkin timbul.

f. Ketidakpastian kewajiban perpajakan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan penyisihan modal dan beban yang dapat dikurangkan dalam mengestimasi provisi pajak penghasilan Grup. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan lainnya. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang pajaknya tidak dalam kegiatan usaha normal.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Auditor Pemerintah. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak.

Resolusi dari posisi pajak Grup dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi Manajemen untuk arus kas di masa depan.

**3. CONSIDERATION AND SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES (continued)**

d. Post-employment benefit liabilities

The determination of post-employment benefit liabilities depends on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating the amount of the liabilities. Those assumptions include discount rate and rate of salary increase. Realization which differs from the assumptions of the Group is accumulated and amortized over future periods and consequently will affect the amount of the costs and liabilities recognized in the future even though the assumptions of the Group are considered appropriate and reasonable, however, actual significant changes over significant changes in the assumptions used can significantly influence the Group's post-employment benefit liabilities.

e. Impairment of goodwill

In determining whether goodwill is impaired, it is necessary to estimate the use value of the cash-producing unit where goodwill is allocated. The value in use calculation requires management to estimate the future cash flows that are expected to arise from the cash generating units that use the appropriate growth rate and the appropriate discount rate for calculating the present value. Where actual future cash flows are less than expected, impairment losses may arise.

f. Uncertain tax obligation

Judgments and assumptions are required in determining allowance for capital and expenses which may be deducted in estimating the provision of the Group's income tax. In particular, calculation of the Group's income tax expenses includes interpretation of other regulations. There are various transactions and calculations that the tax is not in the normal course of business.

All judgments and assumptions made by the management as described above may be questioned by the Directorate General of Taxation (DJP) or the State Auditor. As a result, there is uncertainty in determining tax liabilities.

The resolution of the Group tax position can take years and it is very difficult to predict the outcome. In the event that there is difference in the tax calculation and the recorded amount, such difference will affect the income tax and deferred tax in the period in which the tax is determined. Assumptions of future taxable profit formation depend on The Management's estimates for future cash flows.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Sumber estimasi ketidakpastian (lanjutan)

Hal ini bergantung pada estimasi rencana anggaran biaya, volume pendapatan, cadangan, beban usaha, dividen dan transaksi Manajemen lainnya di masa depan.

Dalam situasi tertentu, Grup tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena kemungkinan adanya pemeriksaan dari otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57 "Provisi Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". Grup menganalisa semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan liabilitas pajak untuk beban yang belum diakui harus diakui.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari laba rugi fiskal, penyisihan modal dan perbedaan temporer, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat dipulihkan, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan.

4. KOMBINASI BISNIS

**PT Superintending Company of Indonesia
(PT SUCOFINDO)**

Efektif pada tanggal 31 Desember 2021, berdasarkan Akta No. 116 tanggal 31 Desember 2021 dari Ruli Iskandar, S.H., notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No. AHU-0006596.AH.01.02.TH.2022 tanggal 26 Januari 2022. Pemerintah Republik Indonesia mengalihkan 100% kepemilikan atas PT SUCOFINDO atau setara dengan 284.999 saham seri B kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (persero), pihak berelasi, dengan nilai sebesar Rp4.873.486.034.989. Nilai tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 291/KMK.06/2021 tanggal 22 Juli 2021.

Transaksi ini dibukukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" Karena Perusahaan dan PT SUCOFINDO merupakan entitas sepengendali di bawah Pemerintah Republik Indonesia.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. CONSIDERATION AND SIGNIFICANT ACCOUNTING
ESTIMATES (continued)**

Sources of estimates uncertainty (continued)

This depends on the estimated cost budget plan, revenue volume, allowances, operating expenses, dividends and other Management transactions in the future.

In certain circumstances, the Group cannot determine the exact of its current or future tax liabilities because of the possibility of examination by the tax authorities. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of taxable income in the future. In determining the amount to be recognized related to uncertain tax liabilities the Group applied the same considerations that they will use in determining the amount of reserves that must be recognized in accordance with PSAK No. 57, "Provisions of Contingent Liabilities and Contingent Assets". The Group analyzes all tax positions related to income taxes to determine the tax liability for unrecognized expenses which should be recognized.

Deferred tax assets, including those arising from fiscal gain or loss, capital allowances and temporary difference, are recognized only when deemed likely than not that they can be recovered, which depends on the adequacy of future taxable income formation.

4. BUSINESS COMBINATION

**PT Superintending Company of Indonesia
(PT SUCOFINDO)**

Effective on Desember 31, 2021, based on the Deed No. 116, dated Desember 31, 2021 by Ruli Iskandar, S.H., notary in South Jakarta, was approved by Minister Law and Human Right with Letter No. AHU-0006596.AH.01.02.TH.2022 dated January 26, 2022. Government of the Republic of Indonesia transfer 100% ownership of PT SUCOFINDO or the equivalent of 284.999 series B to PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), a related party, with prices amounted to Rp4,873,486,034,989. The value is determined based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 291/KMK.06/2021 dated July 22, 2021.

This acquisition transaction was accounted for using the pooling-of-interests method as required under PSAK No. 38 "Business Combination of Entities under Common Control" since the Company and PT SUCOFINDO are entities under common control of Government of the Republic of Indonesia.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai buku aset bersih PT SUCOFINDO dicatat pada "tambahan modal disetor" dalam ekuitas Grup. Ekuitas dari PT SUCOFINDO pada tanggal 31 Desember 2021 disajikan sebagai "ekuitas *merging entities*" dalam ekuitas Grup. Perhitungan tambahan modal disetor pada tanggal pengalihan saham adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Nilai tercatat aset neto	2.850.144.947.743
Imbalan yang dialihkan	(4.873.486.034.989)
Tambahan modal disetor dari kombinasi bisnis entitas sepengendali	(2.023.341.087.246)

4. BUSINESS COMBINATION (continued)

The difference between the amount of the consideration transferred and the book value of PT SUCOFINDO's net assets is recorded under "additional paid-in capital" in the Group's equity. The equity of PT SUCOFINDO as of December 31, 2021 is presented as "equity merging entities" in the Group's equity. The calculation of additional paid-in capital on the date of transfer of shares is as follows:

Carrying value of net asset
Consideration transferred
Additional paid-in capital from business combination under common control

PT Surveyor Indonesia (PT SI)

Efektif pada tanggal 31 Desember 2021, berdasarkan Akta No. 115 tanggal 31 Desember 2021 dari Ruli Iskandar, S.H., notaris di Jakarta Selatan, yang telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0059576 tanggal 26 Januari 2022. Pemerintah Republik Indonesia mengalihkan 100% kepemilikan atas PT Surveyor Indonesia (SI) atau setara dengan 21.279 saham seri B kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), pihak berelasi, dengan nilai sebesar Rp1.883.906.431.842. Nilai tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 291/KMK.06/2021 tanggal 22 Juli 2021.

Transaksi ini dibukukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" karena Perusahaan dan PT SI merupakan entitas sepengendali dibawah Pemerintah Republik Indonesia.

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai buku aset bersih PT SI dicatat pada "tambahan modal disetor" dalam ekuitas Grup. Ekuitas dari SI pada tanggal 31 Desember 2021 disajikan sebagai "ekuitas *merging entities*" dalam ekuitas Grup. Perhitungan tambahan modal disetor pada tanggal pengalihan saham adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Nilai tercatat aset neto	1.276.426.238.845
Imbalan yang dialihkan	(1.883.906.431.842)
Tambahan modal disetor dari kombinasi bisnis entitas sepengendali	(607.480.192.997)

PT Surveyor Indonesia (PT SI)

Effective on December 31, 2021, based on the Deed No. 115, dated December 31, 2021 by Ruli Iskandar, S.H., notary in South Jakarta, has been recorded in Legal Entity Administration System of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Notification Amendment Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0059576 dated January 26, 2022. Government of the Republic of Indonesia transfer 100% ownership of PT Surveyor Indonesia (SI) or the equivalent of 21,279 series B to PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), a related party, with prices amounted to Rp1,883,906,431,842. The value is determined based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 291/KMK.06/2021 dated July 22, 2021.

This acquisition transaction was accounted for using the pooling-of-interests method as required under PSAK No. 38 "Business Combination of Entities under Common Control" since the Company and PT SI are entities under common control of Government of the Republic of Indonesia.

The difference between the amount of the consideration transferred and the book value of PT SI's net assets is recorded under "additional paid-in capital" in the Group's equity. The equity of SI as of December 31, 2021 is presented as "equity merging entities" in the Group's equity. The calculation of additional paid-in capital on the date of transfer of shares is as follows:

Carrying value of net asset
Consideration transferred
Additional paid-in capital from business combination under common control

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Kas			Cash on hand
Rupiah	2.672.158.604	2.599.403.476	Rupiah
Dolar Singapura	56.658.404	77.913.599	Singapore Dollar
Dolar Amerika Serikat	27.565.871	82.800.848	United States Dollar
	2.756.382.879	2.760.117.923	
Bank			Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 33)			Related parties (Notes 33)
Rupiah	1.341.894.079.448	1.214.520.740.335	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	10.140.223.326	4.935.742.829	United States Dollar
Dolar Singapura	3.974.709.015	2.716.849.691	Singapore Dollar
	1.356.009.011.789	1.222.173.332.855	
Pihak ketiga			Third parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	24.953.180.240	14.464.798.497	PT Bank Pembangunan Daerah Papua
Citibank Indonesia	4.054.402.295	1.325.804.317	Citibank Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	3.219.065.301	969.223.695	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	655.486.869	1.220.352.017	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Jatim Tbk	2.035.001	312.457.218	PT Bank Jatim Tbk
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
Citibank Indonesia	23.924.432.804	9.524.054.655	Citibank Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	6.264.677.771	907.057.011	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	1.326.339.495	9.694.990	PT Bank Permata Tbk
Tien Phong Commercial Joint Stock Bank	1.187.161.032	1.571.731.560	Tien Phong Commercial Joint Stock Bank
<u>Dolar Singapura</u>			<u>Singapore Dollar</u>
United Overseas Bank Ltd.	11.266.754.926	11.012.393.959	United Overseas Bank Ltd.
<u>Vietnam Dong</u>			<u>Vietnamese Dong</u>
Tien Phong Commercial Joint Stock Bank	241.955.787	628.445	Tien Phong Commercial Joint Stock Bank
	77.095.491.521	41.318.196.364	
Uang dalam perjalanan	463.140.000	690.000.000	Deposits in transit
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak Berelasi (Catatan 33)			Related parties (Notes 33)
Rupiah	1.755.751.637.279	1.604.403.125.744	Rupiah
	1.755.751.637.279	1.604.403.125.744	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Jabar Banten Syariah	80.500.000.000	80.500.000.000	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank Jabar Banten Tbk	45.000.000.000	75.000.000.000	PT Bank Jabar Banten Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia	20.000.000.000	--	PT Bank Muamalat Indonesia
PT Bank Permata Tbk	15.000.000.000	15.000.000.000	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mega Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	PT Bank Mega Tbk
	165.500.000.000	175.500.000.000	
Jumlah deposito berjangka	1.921.251.637.279	1.779.903.125.744	Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas	3.357.575.663.468	3.046.844.772.886	Total cash and cash equivalents
Tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka per tahun (%)			Contractual interest rate on time deposit per annum (%)
Rupiah	3,00 %-6,10%	2,50%-3,00%	Rupiah

6. PIUTANG USAHA - BERSIH

6. TRADE RECEIVABLES - NET

a. Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

a. Details of trade receivables per customers are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Pihak berelasi (Catatan 33)	453.492.141.772	370.133.987.449	Related parties (Notes 33)
Pihak ketiga	841.855.524.851	789.562.419.852	Third parties
Subjumlah	1.295.347.666.623	1.159.696.407.301	Subtotal
Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai	(323.178.666.980)	(325.284.256.734)	Less: allowance of impairment losses
Jumlah piutang usaha	972.168.999.643	834.412.150.567	Total trade receivables

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA – BERSIH (lanjutan)

6. TRADE RECEIVABLES – NET (continued)

b. Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

b. Details of aging trade receivables are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
0-180 hari	839.605.141.378	678.408.689.531	0-180 days
181- 365 hari	81.454.424.535	52.434.126.934	181-365 days
366-730 hari	59.088.630.338	105.683.559.505	366-730 days
Lebih dari 730 hari	315.199.470.372	323.170.031.331	More than 730 days
Subjumlah	<u>1.295.347.666.623</u>	<u>1.159.696.407.301</u>	Sub total
Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai	(323.178.666.980)	(325.284.256.734)	Less: allowance of impairment losses
Jumlah piutang usaha - bersih	<u>972.168.999.643</u>	<u>834.412.150.567</u>	Total trade receivables - net

c. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

c. The movements of allowance for impairment losses accounts receivables are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Saldo awal	325.284.256.734	301.890.671.964	Beginning balance
Penambahan tahun berjalan	50.022.487.041	23.393.584.770	Addition for the current year
Penghapusan	(52.128.076.795)	-	Write-off
Saldo akhir	<u>323.178.666.980</u>	<u>325.284.256.734</u>	Ending balance

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian pada tanggal 31 Desember 2023 cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

Management believes that the allowance for expected credit losses on receivables as of December 31, 2023 is sufficient to cover possible losses on uncollectible trade receivables in the future.

7. PIUTANG LAIN-LAIN - BERSIH

7. OTHER RECEIVABLES - NET

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Pihak berelasi (Catatan 33)	7.585.849.397	33.380.214.192	Related parties (Notes 33)
Pihak ketiga			Third parties
Karyawan dan lainnya	9.250.134.879	12.233.728.943	Employees and others
Ventura lainnya	<u>7.037.042.937</u>	<u>1.740.389.501</u>	Other venturers
Subjumlah pihak ketiga	<u>16.287.177.816</u>	<u>13.974.118.444</u>	Subtotal third parties
Jumlah piutang lain	23.873.027.213	47.354.332.636	Total other receivables
Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai	(7.975.775.841)	(9.206.010.177)	Less: allowance of impairment losses
Jumlah piutang lain - bersih	<u>15.897.251.372</u>	<u>38.148.322.459</u>	Total other receivables - net

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian pada tanggal 31 Desember 2023 cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang di kemudian hari.

Management believes that the allowance for expected credit losses on receivables as of December 31, 2023 is sufficient to cover possible losses on uncollectible receivable in the future.

8. PERSEDIAAN

8. INVENTORIES

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Bahan operasi	21.409.960.368	32.213.185.111	Operational materials
Alat tulis dan perlengkapan	<u>4.781.445.952</u>	<u>1.884.246.899</u>	Stationeries and supplies
Jumlah persediaan	<u>26.191.406.320</u>	<u>34.097.432.010</u>	Total inventories

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

9. PREPAID EXPENSES

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Beban proyek berjalan	118.991.400.912	71.637.247.827	Current project expenses
Biaya operasional	13.825.023.022	11.601.071.961	Operating expenses
Sewa	1.166.055.050	949.723.203	Rent
Asuransi	3.987.609.412	4.923.312.599	Insurance
Lain-lain	9.373.904.604	8.237.677.983	Others
Jumlah biaya dibayar dimuka	147.343.993.000	97.349.033.573	Total prepaid expenses

10. PERPAJAKAN

10. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
<u>Entitas induk</u>			<u>Parent entity:</u>
Pajak pertambahan nilai	8.881.044.037	6.734.303.570	Value added tax
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries:</u>
Pajak pertambahan nilai	11.734.275.536	5.980.259.956	Value added tax
Pajak penghasilan:			Income taxes:
Pasal 4(2)	17.587.500	20.270.186	Article 4(2)
Pasal 22	2.512.500	5.592.729	Article 22
Pasal 23	36.330.858.560	48.438.465.629	Article 23
Pasal 28A	30.515.302.800	24.278.059.375	Article 28A
Jumlah pajak dibayar di muka	87.481.580.933	85.456.951.445	Total prepaid taxes

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
<u>Entitas induk</u>			<u>Parent entity:</u>
Pajak pertambahan nilai	17.793.738.411	14.784.973.645	Value added tax
Pajak penghasilan:			Income taxes:
Pasal 21	7.864.320.203	6.704.138.159	Article 21
Pasal 22	20.027.953	22.333.831	Article 22
Pasal 23	398.939.871	266.691.211	Article 23
Pasal 25	1.612.000.000	1.536.000.000	Article 25
Pasal 26	122.377.696	--	Article 26
Pasal 29	19.004.059.739	12.472.824.247	Article 29
Final	50.504.441	121.541.020	Final
Subjumlah	46.865.968.314	35.908.502.113	Subtotal
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries:</u>
Pajak pertambahan nilai	18.925.930.667	9.512.831.404	Value added tax
Pajak penghasilan:			Income taxes:
Pasal 21	18.948.864.664	14.826.236.046	Article 21
Pasal 22	1.101.757.577	776.354.384	Article 22
Pasal 23	2.744.448.288	2.089.629.740	Article 23
Pasal 25	--	4.833.413.599	Article 25
Pasal 26	41.702.436	2.758.638.315	Article 26
Pasal 29	49.907.944.655	31.852.236.778	Article 29
Final	2.723.086.833	301.808.599	Final
Pajak lainnya	1.490.134.276	1.999.170.349	Other taxes
Subjumlah	95.883.869.396	68.950.319.214	Subtotal
Jumlah utang pajak	142.749.837.710	104.858.821.327	Total taxes payable

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

c. Manfaat (beban) pajak penghasilan

c. Income tax benefit (expense)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Beban pajak kini			Current tax
Entitas induk	(48.981.842.550)	(39.121.598.726)	Parent entity
Entitas anak	(169.842.818.306)	(118.886.436.683)	Subsidiaries
Pajak tangguhan			Deferred tax
Entitas induk	(8.340.441.055)	(149.344.108)	Parent entity
Entitas anak	(26.427.140.111)	(34.750.580.655)	Subsidiaries
Jumlah beban pajak penghasilan	(253.592.242.022)	(192.907.960.172)	Total income tax expenses

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.037.150.066.910	881.293.901.919	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba entitas anak sebelum pajak	(709.092.888.959)	(721.246.667.259)	Profit before tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	328.057.177.951	160.047.234.660	Profit before tax of the Company
Beda tetap			Permanent differences
Pendapatan jasa giro	(754.976.574)	(661.751.813)	Giro services revenue
Pendapatan bunga deposito	(18.937.888.361)	(10.678.393.376)	Deposit interest income
Pendapatan sewa	(247.218.989)	(52.180.000)	Rental income
Pendapatan dividen	(117.000.000.000)	--	Dividend income
Pengembangan Perusahaan	12.862.533.546	12.644.900.344	Company development
Kerjasama pihak ketiga	--	582.775.655	Third party cooperation
Rekreasi dan olahraga	2.968.726.036	467.738.985	Recreation and sports
Koreksi beban pendapatan tahun lalu	(291.613.628)	1.436.969.889	Correction of last year's expenses
Listrik, air, telepon	829.473.389	789.329.701	Electricity, water, telephone
Cinderamata	425.338.918	245.712.398	Souvenir
Sumbangan dan biaya duka	703.893.195	1.242.627.566	Grief and donations
Denda pajak	32.579.153	46.951.273	Tax penalty
Jumlah beda tetap	(119.409.153.315)	6.064.680.622	Total permanent differences
Beda waktu			Timing differences
Penyisihan piutang	6.856.766.523	8.885.676.536	Allowance for receivables
Penyisihan pendapatan akan diterima	355.224.553	318.162.079	Allowance for accrued revenue
Provisi imbalan kerja	7.201.132.844	2.590.851.022	Provision for employee benefits
Aset hak guna	2.335.068.269	1.423.838.381	Right of use assets
Penyusutan aset	(2.751.477.961)	(1.504.994.545)	Depreciation assets
Jumlah beda waktu	13.996.714.228	11.713.533.473	Total timing differences
Penghasilan kena pajak	222.644.738.864	177.825.448.755	Taxable income
Taksiran beban pajak penghasilan	48.981.842.550	39.121.598.726	Provision for income tax expenses
Dikurangi kredit pajak:			Less tax credit
PPh Pasal 23	10.785.782.811	9.256.774.479	Income Tax Article 23
PPh Pasal 25	19.192.000.000	17.392.000.000	Income Tax Article 25
Kurang bayar PPh 29	19.004.059.739	12.472.824.247	Under pay income tax 29

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut :

The details of the deferred tax assets and liabilities are as follows :

	1 Januari 2022/ January 1, 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/Credited (charged) to other comprehensive income	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/Adjustment due to changes in tax rates	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Entitas induk						Parent entity:
Liabilitas imbalan kerja	28.942.280.324	1.584.249.226	4.083.484.816	--	34.610.014.366	Post-employee benefit liabilities
Penurunan nilai piutang	24.170.629.736	1.508.488.635	--	(11.419.718.186)	14.259.400.185	Impairment of receivable
Penyisihan pendapatan akan diterima	69.995.657	78.149.402	--	--	148.145.059	Allowance for accrued revenue
Penyusutan aset tetap	(5.406.859.369)	(91.610.132)	--	--	(5.498.469.501)	Depreciation of fixed assets
Revaluasi aset tetap	(71.420.127.470)	--	--	--	(71.420.127.470)	Fixed assets revaluation
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(23.644.081.122)	3.079.277.131	4.083.484.816	(11.419.718.186)	(27.901.037.361)	Total deferred tax liabilities
Entitas anak						Subsidiaries
Liabilitas imbalan kerja	134.796.695.041	(27.778.087.494)	5.006.565.847	--	112.025.173.394	Post-employee benefit liabilities
Penurunan nilai penyisihan piutang	65.653.944.364	13.452.535.126	--	(2.474.785.104)	76.631.694.386	Allowance for impairment of receivable
Depresiasi dan amortisasi	(5.149.090.752)	(6.650.207.873)	--	--	(11.799.298.625)	Depreciation and amortization
Penurunan nilai persediaan	149.157.721	--	--	--	149.157.721	Allowance for impairment of inventory
Beban sewa	653.282.667	(332.006.048)	--	--	321.276.619	Rental expenses
Bonus	2.860.000.000	443.855.806	--	--	3.303.855.806	Bonuses
Rugi fiskal	1.485.500.141	(589.024.228)	--	(9.805)	896.466.108	Fiscal loss
PKUWT	4.400.000.000	(2.499.410.493)	--	--	1.900.589.507	PKUWT
Penurunan nilai investasi	1.320.000.000	--	--	--	1.320.000.000	Impairment of investment
Jumlah aset pajak tangguhan	206.169.489.182	(23.952.345.204)	5.006.565.847	(2.474.794.909)	184.748.914.916	Total deferred tax asset
Jumlah aset pajak tangguhan - neto	182.525.408.060	(20.873.068.073)	9.090.050.663	(13.894.513.095)	156.847.877.555	Total deferred tax asset - net

	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/Credited (charged) to other comprehensive income	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/Adjustment due to changes in tax rates	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Entitas induk						Parent entity:
Liabilitas imbalan kerja	31.442.574.013	569.987.224	(343.959.441)	(2.726.321.472)	28.942.280.324	Post-employee benefit liabilities
Penurunan nilai piutang	22.215.780.898	1.954.848.838	--	--	24.170.629.736	Impairment of receivable
Penyisihan pendapatan akan diterima	--	69.995.657	--	--	69.995.657	Allowance for accrued revenue
Penyusutan aset tetap	(5.389.005.013)	(17.854.356)	--	--	(5.406.859.369)	Depreciation of fixed assets
Revaluasi aset tetap	(71.420.127.470)	--	--	--	(71.420.127.470)	Fixed assets revaluation
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(23.150.777.572)	2.576.977.363	(343.959.441)	(2.726.321.472)	(23.644.081.122)	Total deferred tax liabilities
Entitas anak						Subsidiaries
Liabilitas imbalan kerja	151.445.714.775	(40.939.015.398)	24.289.995.664	--	134.796.695.041	Post-employee benefit liabilities
Penurunan nilai penyisihan piutang	58.206.824.734	7.447.119.630	--	--	65.653.944.364	Allowance for impairment of receivable
Depresiasi dan amortisasi	(9.407.906.019)	(5.868.300.387)	--	10.127.115.654	(5.149.090.752)	Depreciation and amortization
Penurunan nilai persediaan	149.157.721	--	--	--	149.157.721	Allowance for impairment of inventory
Beban sewa	637.879.817	15.402.850	--	--	653.282.667	Rental expenses
Bonus	2.970.000.000	(110.000.000)	--	--	2.860.000.000	Bonuses
Rugi fiskal	2.508.403.143	(1.022.903.002)	--	--	1.485.500.141	Fiscal loss
PKUWT	8.800.000.000	(4.400.000.000)	--	--	4.400.000.000	PKUWT
Penurunan nilai investasi	1.320.000.000	--	--	--	1.320.000.000	Impairment of investment
Jumlah aset pajak tangguhan	216.630.074.171	(44.877.696.307)	24.289.995.664	10.127.115.654	206.169.489.182	Total deferred tax asset
Jumlah aset pajak tangguhan - neto	193.479.296.599	(42.300.718.944)	23.946.036.223	7.400.794.182	182.525.408.060	Total deferred tax asset - net

e. Administrasi

e. Administration

Sesuai dengan Surat KBUMN No. S-6/DKU.MBU/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Penyampaian Informasi Penting Mengenai AUP Information Package TB 2023 serta dalam rangka menunjukkan informasi perbandingan kontribusi BUMN terhadap negara dengan Pendapatan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

In accordance with KBUMN Letter No. S-6/DKU.MBU/02/2024 dated February 12, 2024 regarding the Submission of Important Information regarding the 2023 AUP Information Package as well as in order to show comparative information on the contribution of BUMN to the country with Income Tax and Non-Tax State Revenue (PNBP).

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

e. Administrasi (lanjutan)

e. Administration (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
Kontribusi Pajak PT Biro Klasifikasi Indonesia
(Persero) dan entitas anak ke negara sebagai
berikut:

On December 31, 2023 and 2022, the Tax
Contribution of PT Biro Klasifikasi Indonesia
(Persero) and its subsidiaries to the country is as
follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	400.695.990.169	335.367.052.881	Value added tax (VAT)
PPh	273.498.340.179	239.057.410.512	Income tax
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.310.707.308	1.147.471.284	Property tax
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	8.718.327.500	7.691.335.000	Non-Tax State Revenue
Jumlah	684.223.365.156	583.263.269.677	Total

11. UANG MUKA

11. ADVANCES

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Uang muka operasional	50.970.545.921	32.849.766.578	Advance for operational
Uang muka pembelian	1.538.094.438	1.300.000.000	Advance purchases
Lain-lain	--	835.844.125	Others
Jumlah uang muka	52.508.640.359	34.985.610.703	Total advances

12. PENDAPATAN AKAN DITERIMA

12. ACCRUED REVENUES

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Pihak berelasi (Catatan 33)	498.254.107.786	293.957.590.995	Related parties (Notes 33)
Pihak ketiga			Third parties
PT Baradinamika Citra Lestari	24.581.638.786	24.581.638.786	PT Baradinamika Citra Lestari
PT Amythas	11.693.541.405	--	PT Amythas
PT Medco E&P Natuna Ltd	10.989.912.645	9.160.738.629	PT Medco E&P Natuna Ltd
PT Berau Coal Energy Tbk	10.040.608.844	10.069.122.501	PT Berau Coal Energy Tbk
BP Berau Ltd	8.973.242.209	11.424.543.331	BP Berau Ltd
Medco E&P Grissik Ltd	8.470.905.373	1.396.825.000	Medco E&P Grissik Ltd
PT Sorik Marapi Geothermal Power	4.901.196.000	3.166.656.000	PT Sorik Marapi Geothermal Power
RDMP Balikpapan JO	4.747.743.638	1.254.500.000	RDMP Balikpapan JO
PT Mustika Indah Permai	4.591.535.700	1.310.426.535	PT Mustika Indah Permai
PT Chevron Pacific Indonesia	3.476.745.972	--	PT Chevron Pacific Indonesia
PT Medco E&P Malaka	2.842.918.000	--	PT Medco E&P Malaka
PT Karya Mineral Sejahtera	2.503.200.000	--	PT Karya Mineral Sejahtera
PT Vale Indonesia Tbk	2.263.300.000	3.475.950.000	PT Vale Indonesia Tbk
PT Cahaya Modern Metal Industri	2.066.233.035	--	PT Cahaya Modern Metal Industri
PT IOL Indonesia	2.030.000.000	1.315.000.000	PT IOL Indonesia
Lain-lain (dibawah Rp2.000.000.000)	147.506.037.567	173.650.670.145	Others (below Rp2,000,000,000)
Subjumlah pihak ketiga	251.678.759.174	240.806.070.927	Subtotal third parties
Jumlah pendapatan akan diterima	749.932.866.960	534.763.661.922	Total accrued revenues - net
Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai	(35.269.733.608)	(27.050.806.747)	Less: allowance of impairment losses
Jumlah pendapatan akan diterima - bersih	714.663.133.352	507.712.855.175	Total accrued revenues - net

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Rincian investasi saham pada entitas asosiasi yang dicatat dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

13. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE

Details of investment in associates accounted for under the equity method are as follows:

31 Desember 2023/December 31, 2023						
Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	Saldo Awal/ Beginning balance	Penyesuaian/ Adjustment	Bagian laba bersih/ Share of Net Income (loss)	Dividen/ Dividend	Saldo akhir/ Ending balance	
Penyertaan pada entitas asosiasi/ Investment in associates						
PT SPRINT Konsultan	19%	47.500.000	--	--	47.500.000	
PT Qualitech Perdana	40%	195.400.000	--	--	195.400.000	
Penyisihan		(195.400.000)	--	--	(195.400.000)	
Subjumlah/Subtotal		47.500.000	--	--	47.500.000	
Penyertaan pada ventura bersama/ Investment in joint ventures						
KSO SCISI PSI	50%	15.073.791.584	--	135.030.766.628	(127.172.791.586)	22.931.766.626
KSO SCI - SI	50%	11.228.950.534	--	135.030.776.628	(128.067.990.430)	18.191.736.732
Subjumlah		26.302.742.118	--	270.061.543.256	(255.240.782.016)	41.123.503.358
Jumlah/Total		26.350.242.118	--	270.061.543.256	(255.240.782.016)	41.171.003.358

31 Desember 2022/December 31, 2022						
Persentase Kepemilikan/ Percentage of ownership	Saldo Awal/ Beginning balance	Penyesuaian/ Adjustment	Bagian laba bersih/ Share of Net Income (loss)	Dividen/ Dividend	Saldo akhir/ Ending balance	
Penyertaan pada entitas asosiasi/ Investment in associates						
PT SPRINT Konsultan	19%	47.500.000	--	--	47.500.000	
PT Qualitech Perdana	40%	195.400.000	--	--	195.400.000	
Penyisihan		(195.400.000)	--	--	(195.400.000)	
Subjumlah/Subtotal		47.500.000	--	--	47.500.000	
Penyertaan pada ventura bersama/ Investment in joint ventures						
KSO SCISIPSI	50%	21.569.232.720	--	130.672.791.586	(137.168.232.722)	15.073.791.584
KSO SCI - SI	50%	14.369.192.653	--	130.672.791.586	(133.813.033.705)	11.228.950.534
KSO YODYA - SI	40%	--	1.349.841.632	343.263.733	(1.693.105.365)	--
Subjumlah		35.938.425.373	1.349.841.632	261.688.846.905	(272.674.371.792)	26.302.742.118
Jumlah/Total		35.985.925.373	1.349.841.632	261.688.846.905	(272.674.371.792)	26.350.242.118

KSO PT Yodya Karya (Persero) dan PT Surveyor Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasi No.002.K/YKSI.JARGASMUBA/III/2022 pada tanggal 18 Maret 2022 dengan keikutsertaan modal PT Yodya Karya (Persero) sebesar 60% dan PT Surveyor Indonesia sebesar 40% serta menunjuk PT Yodya Karya (Persero) sebagai perusahaan utama yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.

KSO PT Yodya Karya (Persero) and PT Surveyor Indonesia were formed based on the Joint Operation Agreement (KSO) No.002.K/YKSI.JARGASMUBA/III/2022 dated March 18, 2022 with PT Yodya Karya (Persero) participating in the capital of 60% and PT Surveyor Indonesia of 40% and appointing PT Yodya Karya (Persero) as the main company representing and acting for and on behalf of KSO.

Berdasarkan Surat Perjanjian antara KSO PT Yodya Karya (Persero) dan PT Surveyor Indonesia dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 033.SP/PMC-PPK/JRG2/2022 tanggal 23 Maret 2022, KSO ditunjuk untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi: PMC Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (8.494 SR) dengan nilai kontrak sebesar Rp4.933.844.510 dan jangka waktu kontrak sejak tanggal penandatanganan kontrak (23 Maret 2022) sampai dengan tanggal penyelesaian.

Based on the Letter of Agreement between KSO PT Yodya Karya (Persero) and PT Surveyor Indonesia and the Directorate General of Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources No. 033.SP/PMC-PPK/JRG2/2022 dated March 23, 2022, KSO was appointed to carry out the Consultancy Service Work Package: PMC Construction of Natural Gas Networks for Households Musi Banyuasin Regency, Muara Enim Regency and East Ogan Komering Ulu Regency (8,494 SR) with a contract value of Rp4,933,844,510 and a contract period since the date of signing the contract (March 23, 2022) until the date of completion.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Laporan Pekerjaan Akhir No: 0393.BA/PMC-PPK/JRG2/2022 dan Berita Acara Evaluasi Hasil Akhir Pekerjaan No: 0394.BA/PMC-PPK/JRG2/2022 pada tanggal 22 November 2022 bahwa KSO PT Yodya Karya (Persero) dan PT Surveyor Indonesia telah menyelesaikan pekerjaan 100% serta memenuhi syarat untuk dilakukan serah terima pekerjaan.

**13. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE
(continued)**

Based on the Minutes of Handing Over of Final Work Report No: 0393.BA/PMC-PPK/JRG2/2022 and Minutes of Evaluation of Final Work Results from No: 0394.BA/PMC-PPK/JRG2/2022 on November 22, 2022, that KSO PT Yodya Karya (Persero) and PT Surveyor Indonesia have completed 100% of the work and meet the requirements for handing over the work.

14. PROPERTI INVESTASI - BERSIH

14. INVESTMENT PROPERTIES - NET

31 Desember 2023/December 31, 2023					
	1 Januari/ January, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December, 2023
Biaya perolehan: Bangunan	182.155.820.211	5.765.266	--	1.614.926.993	183.776.512.470
Jumlah	182.155.820.211	5.765.266	--	1.614.926.993	183.776.512.470
Akumulasi penyusutan: Bangunan	(51.173.937.611)	(7.735.971.196)	--	1.302.399.614	(57.607.509.193)
Jumlah	(51.173.937.611)	(7.735.971.196)	--	1.302.399.614	(57.607.509.193)
Jumlah tercatat	130.981.882.600				126.169.003.277
31 Desember 2022/December 31, 2022					
	1 Januari/ January, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December, 2022
Biaya perolehan: Bangunan	179.222.150.737	3.278.177.692	--	(344.508.218)	182.155.820.211
Jumlah	179.222.150.737	3.278.177.692	--	(344.508.218)	182.155.820.211
Akumulasi penyusutan: Bangunan	(46.516.465.247)	(7.521.191.847)	--	2.863.719.483	(51.173.937.611)
Jumlah	(46.516.465.247)	(7.521.191.847)	--	2.863.719.483	(51.173.937.611)
Jumlah tercatat	132.705.685.490				130.981.882.600

Beban penyusutan properti investasi dialokasikan pada beban pokok pendapatan (Catatan 29).

Depreciation of investment property allocated to Cost of revenue (Notes 29).

Manajemen berpendapat tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam nilai wajar aset properti investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sejak tanggal perolehannya.

Management believes there are no significant changes in the fair value of investment property as of December 31, 2023 and 2022 since its acquisition date.

15. ASET TETAP - BERSIH (lanjutan)

15. FIXED ASSETS - NET (continued)

31 Desember 2022/ December 31, 2022						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Surplus revaluasi/ Revaluation surplus	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Nilai revaluasian						
	Tanah	1.579.191.168.887	36.012.736.637	--	--	1.615.203.905.524
Bangunan	854.183.068.481	20.548.626.132	--	--	2.419.322.305	877.151.016.918
Biaya perolehan						
	Peralatan kantor dan perabot	249.849.670.610	29.940.041.868	(1.575.605.155)	--	280.219.180.819
	Kendaraan	23.035.563.903	14.667.794.112	(2.345.846.000)	--	35.372.987.290
	Peralatan operasi dan mesin	1.167.524.617.643	129.319.934.513	(356.199.610)	--	1.297.767.220.933
	Peralatan sistem informasi	105.951.589.844	18.557.296.047	--	--	125.792.100.642
	Aset hak guna	92.945.522.438	30.722.929.877	(39.687.197.816)	--	83.301.687.413
	Aset dalam penyelesaian	17.761.764.378	13.288.239.660	(4.108.902.597)	--	18.526.478.714
	4.090.442.966.184	293.057.598.846	(48.073.751.178)	--	(2.092.235.599)	4.333.334.578.253
Akumulasi penyusutan						
	Bangunan	(147.782.824.060)	(34.400.167.434)	--	--	(184.649.139.583)
	Peralatan kantor dan perabot	(186.650.440.111)	(19.311.896.413)	1.564.600.474	--	(204.067.887.498)
	Kendaraan	(17.873.672.070)	(1.280.727.788)	2.345.845.998	--	(16.824.029.161)
	Peralatan operasi dan mesin	(882.575.489.661)	(97.762.136.991)	356.199.610	--	(987.544.223.697)
Peralatan sistem informasi	(87.261.027.071)	(20.017.107.653)	--	--	(98.528.047.193)	
Aset hak-guna	(49.202.974.200)	(30.901.606.335)	36.565.416.640	--	(1.896.878.635)	
	(1.371.346.427.173)	(203.673.642.614)	40.832.062.722	--	677.801.298	(1.533.510.205.767)
Jumlah	2.719.096.539.011					2.799.824.372.486

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TETAP - BERSIH (lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ Desember 31, 2023	31 Desember 2022/ Desember 31, 2022
	Rp	Rp
Beban pokok pendapatan (Catatan 29)	169.127.842.547	148.952.957.163
Beban umum dan administrasi (Catatan 31)	49.609.447.430	54.487.236.008
Beban penjualan (Catatan 30)	152.167.406	233.449.443
Jumlah	218.889.457.383	203.673.642.614

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi perubahan keadaan yang menyebabkan adanya penurunan nilai atas nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Aset tetap dan persediaan Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 2.045.601.091.257 dan Rp1.583.148.328.939 terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada Asuransi PT Jasa Raharja Putra, PT Asuransi Jasindo, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Bintang, PT Asuransi ASEI Indonesia, PT Bumi Putera, PT Asuransi Intra Asia, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Total Bersama untuk jenis pertanggungan *property all risk*, gempa bumi, dan kebakaran.

16. GOODWILL

Goodwill merupakan saldo yang timbul karena akuisisi kepemilikan atas SCCI dan STI sebagai akibat dari pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas milik SCCI dan STI pada tanggal akuisisi. Nilai bersih goodwill per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Entitas pengakuisisi/ Acquirer Entity	Perolehan saham pada/ Share acquisition in	Tahun Perolehan/Year of acquisition	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
PT Surveyor Indonesia	PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia (SCCI)	2011	2.544.027.851	2.544.027.851
PT Surveyor Indonesia	PT Synerga Tata International (STI)	2013	-	-
Jumlah/Total			2.544.027.851	2.544.027.851

Akuisisi SCCI

Pada tanggal 23 Februari 2011 PT Surveyor Indonesia dan CCI Holding Limited, Australia menandatangani perjanjian pembelian 50% kepemilikan SCCI dengan harga perolehan sebesar Rp7.000.000.000 sehingga total kepemilikan Saham menjadi 100%. Perubahan terakhir pada tanggal 29 Februari 2012, PT Surveyor Indonesia memutuskan menjual kepemilikan saham sebesar 1%, dengan nilai jual Rp160.000.000 sehingga saat ini kepemilikan saham PT Surveyor Indonesia atas SCCI adalah sebesar 99%.

15. FIXED ASSETS - NET (continued)

Depreciation of fixed asset allocated as follows:

Cost of revenue (Notes 29)
General and administration expenses (Notes 31)
Selling expenses (Notes 30)
Total

Management believes that there is no indication of any change in the circumstances that resulted in impairment of the carrying amount of the fixed assets as of December 31, 2023 and 2022.

The Group's fixed assets and inventories as of December 31, 2023 and 2022 are insured with coverage value amounting to Rp2,045,601,091,257 and Rp1,583,148,328,939, respectively against fire risk and other risks under insurance by PT Jasa Raharja Putra, PT Asuransi Jasindo, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Bintang, PT Asuransi ASEI Indonesia, PT Bumi Putera, PT Asuransi Intra Asia, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Total Bersama for coverage of property all risk, earthquake, and fire.

16. GOODWILL

Goodwill represents balance arising from acquisition of ownership in SCCI and STI as a result of fair value measurement of assets and liabilities owned by SCCI and STI at acquisition date. The net value of goodwill as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Acquisition of SCCI

On February 23, 2011, PT Surveyor Indonesia and CCI Holding Limited, Australia entered into agreement to purchase 50% ownership in SCCI amounting to Rp7,000,000,000 hence the total ownership was 100%. However, on the latest amendment, PT Surveyor Indonesia decided in February 29, 2012 to sell 1% of its ownership amounting to Rp160,000,000 and the ownership of PT Surveyor Indonesia in SCCI to date is 99%.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original consolidated financial statements
included here is in Indonesian Language
**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. GOODWILL (lanjutan)

Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

	2011
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	8.891.989.452
Imbalan yang dialihkan (50%)	(4.445.994.726)
Nilai Wajar Imbalan yang dialihkan	7.000.000.000
Goodwill sebelum pengalihan 1% saham	2.554.005.274
Jumlah Aset dialihkan ke pihak lain (1%)	150.022.577
Jumlah Penerimaan atas Aset yang dialihkan	(160.000.000)
Goodwill - Bersih	2.544.027.851

16. GOODWILL (continued)

The fair values of the assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date were as follows:

Fair value of identifiable net asset acquired
Consideration transferred (50%)
Fair value of consideration transferred
Goodwill before transferred 1% share
Asset transferred to other party (1%)
Total receipt from transferred asset
Goodwill - Net

Akuisisi STI

Pada tanggal 11 Februari 2013 PT Surveyor Indonesia melakukan pembelian saham atas nama perorangan sebesar 60% kepemilikan STI dengan harga perolehan sebesar Rp1.527.780.000.

Acquisition of STI

On February 11, 2013, PT Surveyor Indonesia purchased 60% personal ownership in STI amounting to Rp1,527,780,000.

Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

The fair values of the assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date were as follows:

	2013
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	(1.367.632.339)
Imbalan yang dialihkan (60%)	820.544.014
Nilai Wajar Imbalan yang dialihkan	1.527.780.000
Goodwill	2.348.324.014
Penurunan nilai Goodwill (2020)	(365.324.014)
Penurunan nilai Goodwill (2021)	(1.983.000.000)
Goodwill - Bersih	-

Fair value of identifiable net asset acquired
Consideration transferred (60%)
Fair value of consideration transferred
Goodwill
Impairment of Goodwill (2020)
Impairment of Goodwill (2021)
Goodwill - Net

17. JAMINAN

17. DEPOSITS

	31 Desember 2023/ December 31, 2023 Rp	31 Desember 2022/ December 31, 2022 Rp
Sewa kendaraan	16.743.105.375	13.641.663.350
Sewa kantor	1.002.228.267	2.688.494.657
Listrik dan telepon	284.504.464	426.569.464
Bank garansi	80.000.000	250.786.517
Asuransi	--	14.000.000
Lain-lain	3.189.924.527	3.826.943.936
Subjumlah	21.299.762.633	20.848.457.924
Penurunan nilai jaminan	(924.368.057)	(924.368.057)
Jumlah jaminan	20.375.394.576	19.924.089.867

Rent vehicles
Rent office
Electric and telephone
Bank Guarantee
Insurance
Others
Sub total
Impairment of security deposits
Total deposits

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original consolidated financial statements
included here is in Indonesian Language
**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

18. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Nilai perolehan			Acquisition cost
Biaya perolehan renovasi gedung, piranti lunak dan jaringan dan sertifikat	148.066.237.722	142.032.895.600	Building renovation cost, network, software and certification
Aset tidak aktif	28.546.181.626	24.833.411.262	Inactive assets
Biaya ditangguhkan	14.171.359.915	11.007.405.492	Deferred expenses
Hak atas tanah	10.773.101.132	11.373.168.547	Land rights
Lain-lain	5.901.630.800	3.190.337.459	Others
Jumlah nilai perolehan	207.458.511.195	192.437.218.360	Total acquisition cost
Amortisasi			Amortization
Akumulasi penyusutan perolehan renovasi gedung, piranti lunak dan jaringan dan sertifikat	(107.554.956.093)	(91.610.495.261)	Accumulated depreciation of building renovation cost, computer and network software and certification
Penyusutan aset tidak aktif	(27.076.326.407)	(23.359.178.252)	Accumulated depreciation of inactive assets
Jumlah amortisasi	(134.631.282.500)	(114.969.673.513)	Total amortization
Jumlah aset tidak lancar lainnya	72.827.228.695	77.467.544.847	Total other non current assets

19. UTANG USAHA

19. TRADE PAYABLES

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Pihak berelasi (Catatan 33)	24.846.397.691	10.599.954.410	Related parties (Notes 33)
Pihak ketiga	311.985.502.945	203.168.433.819	Third parties
Jumlah utang usaha	336.831.900.636	213.768.388.229	Total trade payables

20. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

20. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Operasional dan produksi	268.244.633.115	296.974.596.231	Operational and production
Personel	218.148.919.690	208.745.100.570	Employee
Fasilitas kerja	22.388.726.899	16.304.505.150	Work facilities
Direksi dan komisaris	15.089.006.188	11.000.000.000	Director and commissioners
Lainnya	56.999.591.005	7.899.686.723	Others
Jumlah biaya yang masih harus dibayar	580.870.876.897	540.923.888.674	Total accrued expenses

21. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

21. UNEARNED REVENUES

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Uang muka pelanggan	63.368.007.859	61.233.678.843	Customer advance
Penerimaan yang belum teridentifikasi	13.229.331.790	17.725.633.228	Unidentified receipt
Pendapatan diterima dimuka - operasi	5.084.921.347	5.262.803.292	Unearned revenue - operation
Uang muka survey	4.871.437.467	4.403.543.498	Survey advance
Pendapatan diterima dimuka - lainnya	1.031.063.792	1.359.048.815	Unearned revenue - others
Jumlah pendapatan diterima dimuka	87.584.762.255	89.984.707.676	Total unearned revenues

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original consolidated financial statements
included here is in Indonesian Language
**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

22. OTHER CURRENT LIABILITIES

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Pembelian aset tetap	33.119.595.577	28.925.035.877	Acquisition of fixed assets
Pegawai	3.181.679.955	7.477.405.758	Employees
Iuran dana pensiun / Astek	2.235.827.245	1.916.906.325	Pension fund / Astek
Utang jaminan	414.377.922	359.092.985	Deposit payables
Lain-lain	31.839.316.098	20.604.373.442	Others
Jumlah liabilitas jangka pendek lainnya	70.790.796.797	59.282.814.387	Total other current liabilities

23. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

23. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

Grup menghitung dan membukukan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2018), Program Jaminan Hari Tua (JHT), Tunjangan Hari Tua (THT), UU No. 13/2003 ("UUK 13/2013") tentang ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan (PP). Perhitungan imbalan pascakerja dilakukan oleh Aktuaris Independen. Perhitungan aktuaris tersebut menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The Group calculates and records defined benefit of post-employment benefits for employees based on PSAK No. 24 (Revised 2018), Old Age Security Program (JHT), Old Age Allowance (THT), Law no. 13/2003 ("Law 13/2013") regarding employment and Company Regulations (PP). Calculation of post-employment benefits is carried out by Independent actuary. The actuary calculation uses the assumptions as follows:

	2023	2022	
Usia pensiun	56 tahun/year	56 tahun/year	Retirement age
Tingkat diskonto	6,28% - 7,00%	6,33% - 7,25%	Discount rate
Imbal hasil dari aktiva program	6,33% - 6,97%	6,33% - 6,97%	Expected return on plan assets
Kenaikan gaji	3% - 8% per tahun/year	3% - 8% per tahun/year	Increase of salary
Tingkat mortalitas	TMI - 2019	TMI - 2019	Mortality rate

Grup mengikuti beberapa program imbalan pascakerja, perhitungan liabilitas imbalan pascakerja menurut aset program yang diikuti yaitu sebagai berikut:

The Group join several post employment benefits programs, the calculation of post employment benefits liabilities according to assets of the respective program are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Program Jaminan Hari Tua dan Tunjangan Hari Tua	351.295.789.210	444.147.048.885	Employee provident fund and annuities program
Program UUK	281.697.000.148	277.051.614.062	Labor law regulation program
Program lainnya	31.284.928.515	21.950.777.962	Other program
Jumlah	664.277.717.873	743.149.440.909	Total

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasi ditentukan sebagai berikut:

The amounts recognized in the consolidated statement of financial position are determined as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Nilai kini cadangan imbalan pasti	1.086.466.206.274	1.145.758.154.131	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	(422.188.488.401)	(402.608.713.222)	Fair value of program assets
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasi	664.277.717.873	743.149.440.909	Liability in the consolidated statement of financial position

23. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA
(lanjutan)

Perhitungan atas aset program tersebut adalah sebagai berikut:

Program THT/JHT

Mutasi aset program manfaat THT/JHT yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

23. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)

The calculation of program assets is as follows:

THT/JHT Programs

Movement of THT/JHT benefit recognized in the consolidated statement of financial position is as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023 Rp	31 Desember 2022/ December 31, 2022 Rp	
Kewajiban bersih pada awal tahun	444.147.048.885	474.265.186.022	Net liabilities at beginning of the year
Penyesuaian akibat perubahan metode atribusi	--	(6.224.760.224)	Adjustment due to change of attribution method
Beban bersih yang diakui pada laba rugi	54.370.631.248	61.762.194.381	Net expenses recognized in the income statement
Biaya yang diakui pada komprehensif lainnya	34.123.404.201	117.960.175.897	The recognized of other comprehensive expense
Pembayaran manfaat	(7.915.086.966)	(166.920.317.363)	Benefit paid
Penyesuaian pajak	--	6.885.237.751	Tax adjustment
Kontribusi yang dibayarkan	(173.430.208.159)	(43.580.667.579)	Contribution paid
Jumlah	351.295.789.210	444.147.048.885	Total

Perhitungan beban imbalan pasca kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The calculation of post employment benefits expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss is as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023 Rp	31 Desember 2022/ December 31, 2022 Rp	
Biaya jasa kini	26.481.656.693	31.951.475.490	Current service cost
Biaya bunga	40.705.535.577	40.227.876.418	Interest cost
Biaya jasa lalu	--	3.156.740.411	Past service cost
Keuntungan aktuarial	--	(697.548.435)	Actuarial gain
Pengembalian aset program yang diharapkan	(12.816.561.022)	(12.876.349.503)	Expected return on plan assets
Jumlah	54.370.631.248	61.762.194.381	Total

Perhitungan beban imbalan pascakerja karyawan program manfaat THT/JHT yang diakui di penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The calculation of post employment benefits expense for program employee provident fund and annuities recognized in the consolidated other comprehensive income is as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023 Rp	31 Desember 2022/ December 31, 2022 Rp	
Kerugian aktuarial	46.672.801.929	111.472.974.124	Actuarial losses for year
Imbal hasil atas aset program	(19.009.139.254)	5.327.525.551	Return on plan assets
Perubahan lainnya	6.459.741.526	1.159.676.222	Other changes
Jumlah	34.123.404.201	117.960.175.897	Total

23. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA
(lanjutan)

Program UUK 13/2013

Mutasi aset program manfaat UUK 13/2013 yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
	Rp	Rp
Kewajiban bersih pada awal tahun	277.051.614.062	329.158.726.426
Beban bersih yang diakui pada laba rugi	47.108.803.119	40.321.117.728
Biaya yang diakui pada komprehensif lainnya	6.936.625.875	(10.482.969.906)
Penyesuaian akibat perubahan metode atribusi	--	(17.923.562.539)
Pembayaran manfaat	(11.806.827.858)	(70.433.315.959)
Penyesuaian	1.191.992.289	6.411.618.312
Kontribusi yang dibayarkan	(38.785.207.339)	--
Jumlah	281.697.000.148	277.051.614.062

Perhitungan beban imbalan pasca kerja karyawan program manfaat UUK 13/2013 yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
	Rp	Rp
Biaya bunga	20.964.978.567	20.256.786.672
Beban jasa kini	28.469.548.607	31.150.219.489
Beban jasa lalu	--	(8.991.606.256)
(Keuntungan)/kerugian	(353.866.931)	--
Pengembalian aset program yang diharapkan	(1.971.857.124)	(2.094.282.177)
Jumlah	47.108.803.119	40.321.117.728

Perhitungan beban imbalan kerja karyawan yang diakui di penghasilan komprehensif lain konsolidasian program manfaat UUK 13/2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
	Rp	Rp
(Keuntungan) aktuarial dari kewajiban	4.846.332.665	(12.235.622.735)
Perubahan lainnya	2.090.293.210	1.752.652.829
Jumlah	6.936.625.875	(10.482.969.906)

23. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)

Program of Labor Law 13/2013

Movements of Labor Law No. 13/2013 benefit plan assets are recognized in the consolidated statement of financial position as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
	Rp	Rp
Net liabilities at the beginning of the year	277.051.614.062	329.158.726.426
Net expenses recognized in the income statement	47.108.803.119	40.321.117.728
The recognized of other comprehensive expense	6.936.625.875	(10.482.969.906)
Adjustment due to change of attribution method	--	(17.923.562.539)
Benefit paid	(11.806.827.858)	(70.433.315.959)
Adjustment	1.191.992.289	6.411.618.312
Contributions paid	(38.785.207.339)	--
Total	281.697.000.148	277.051.614.062

The calculation of post employment benefits expense in accordance with Labor Law No. 13/2013 recognized in the consolidated statement of profit or loss is as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
	Rp	Rp
Interest costs	20.964.978.567	20.256.786.672
Current service expenses	28.469.548.607	31.150.219.489
Past service cost	--	(8.991.606.256)
(Gain) /loss	(353.866.931)	--
Expected return on planned assets	(1.971.857.124)	(2.094.282.177)
Total	47.108.803.119	40.321.117.728

Calculation of employee benefits expense recognized in consolidated ther comprehensive income for benefits program of Labor Law No. 13/2013 is as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
	Rp	Rp
Actuarial gain from liabilities	4.846.332.665	(12.235.622.735)
Other movements	2.090.293.210	1.752.652.829
Total	6.936.625.875	(10.482.969.906)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original consolidated financial statements
included here is in Indonesian Language
**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA
(lanjutan)

Program manfaat lainnya

Mutasi program manfaat lainnya yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023 Rp	31 Desember 2022/ December 31, 2022 Rp
Liabilitas pada awal tahun	21.950.777.962	18.374.907.544
Beban yang diakui pada laba rugi	13.414.579.947	4.131.393.996
Biaya yang diakui pada komprehensif lainnya	--	(395.591.926)
Pembayaran Manfaat	(4.080.429.394)	(159.931.652)
Jumlah	31.284.928.515	21.950.777.962

Perhitungan beban imbalan kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian atas program manfaat lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023 Rp	31 Desember 2022/ December 31, 2022 Rp
Biaya jasa kini	2.892.976.161	1.996.652.193
Biaya bunga	1.463.397.260	1.355.539.420
Biaya jasa lalu	--	779.202.383
Kerugian Aktuarial	9.058.206.526	--
Jumlah	13.414.579.947	4.131.393.996

Perhitungan beban imbalan pascakerja karyawan yang diakui di penghasilan komprehensif lain konsolidasian atas program manfaat lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023 Rp	31 Desember 2022/ December 31, 2022 Rp
Kerugian Aktuarial	--	(395.591.926)
Jumlah	--	(395.591.926)

23. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
(continued)

Other benefit program

Movements in other benefit plans recognized in the consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023 Rp	31 Desember 2022/ December 31, 2022 Rp
Beginning balance of liabilities	21.950.777.962	18.374.907.544
Expenses recognized in the income statements	13.414.579.947	4.131.393.996
The recognized of other comprehensive expense	--	(395.591.926)
Benefit paid	(4.080.429.394)	(159.931.652)
Total	31.284.928.515	21.950.777.962

Calculation of employee benefits expense recognized in the consolidated statement of profit or loss for other benefit programs is as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023 Rp	31 Desember 2022/ December 31, 2022 Rp
Current service cost	2.892.976.161	1.996.652.193
Interest cost	1.463.397.260	1.355.539.420
Past service cost	--	779.202.383
Actuarial losses for year	9.058.206.526	--
Total	13.414.579.947	4.131.393.996

Calculation of post employment benefits expense recognized in the consolidated other comprehensive income for other benefit programs is as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023 Rp	31 Desember 2022/ December 31, 2022 Rp
Actuarial losses for year	--	(395.591.926)
Total	--	(395.591.926)

24. MODAL SAHAM

24. CAPITAL STOCK

Nama Pemegang Saham	31 Desember/December, 2023 dan/and 2022			Name of Stockholders
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital	
Saham seri A Dwiwarna: Pemerintah Republik Indonesia	1	0,00%	1.000.000	Series A Dwiwarna share: Government of the Republic of Indonesia
Saham biasa seri B: Kementerian Badan Usaha Milik Negara	7.012.392	100,00%	7.012.392.000.000	Series B share: Ministry of State-Owned Enterprises
Jumlah	7.012.393	100,00%	7.012.393.000.000	Total

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 16 Desember 2021, dibuat oleh Ruli Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta, perihal penambahan modal, penambahan bidang usaha pada pasal 3 ayat (1) dan (2), dan perubahan kegiatan usaha pada pasal 3 ayat (3). Para pemegang saham memutuskan untuk melakukan peningkatan modal dasar semula 600.000.000 saham ditingkatkan menjadi 28.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000. Modal dasar ditempatkan dan disetor Perusahaan ditingkatkan semula 255.000 saham atau senilai Rp255.000.000.000 menjadi 7.012.393 saham atau senilai Rp7.012.393.000.000. Akta perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0001478.AH.01.02.TH.2022 tanggal 7 Januari 2022.

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor merupakan selisih antara harga pengalihan saham dengan nilai buku atas transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali (Catatan 4) untuk:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
PT Superintending Company of Indonesia	(2.023.341.087.246)	(2.023.341.087.246)	PT Superintending Company of Indonesia
PT Surveyor Indonesia	(607.480.192.997)	(607.480.192.997)	PT Surveyor Indonesia
Jumlah	(2.630.821.280.243)	(2.630.821.280.243)	Total

26. CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN

- Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2023 dengan Risalah Keputusan RUPS tentang Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2022, menyetujui penetapan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk Tahun buku 2022 sebesar Rp646.304.455.530 dengan alokasi sebagai berikut:
 - Dividen sebesar Rp127.000.000.000 atau 19,65% ;
 - Cadangan sebesar Rp519.304.455.530.
- Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2022 dengan Risalah Keputusan RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2021, pemegang saham telah menetapkan:
 - Dividen tunai sebesar Rp10.000.000.000 ;
 - Sisanya ditetapkan sebagai cadangan.

24. CAPITAL STOCK (continued)

Based on Deed No. 35 dated December 16, 2021, from Ruli Iskandar, S.H., notary in Jakarta, regarding the addition of capital, the addition of business fields in Article 3 paragraphs (1) and (2), and changes in business activities in Article 3 paragraph (3). The shareholders decided to increase the authorized capital from 600,000,000 shares to 28,000,000 shares, each with a nominal value of Rp1,000,000. The authorized issued and paid-up capital of the Company was increased from 255,000 shares or Rp255,000,000,000 to 7,012,393 shares or Rp7,012,393,000,000. The Deed was approved by the Minister of Law and Republic of Human Rights Indonesia with decree No. AHU-0001478.AH.01.02.TH.2022 dated January 7, 2022.

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital are the difference between the transfer price of shares and book value of business combination under common control transaction (Notes 4) of:

26. GENERAL RESERVE AND DIVIDENDS

- Based on the Decision of the General Meeting of Shareholders of the Company on June 20, 2023 with Minutes of RUPS Decision concerning Ratification of Consolidated Financial Statements for 2022, approved the determination use the Company's consolidated net profit attributable to the parent for the year 2022 amounting to Rp646,304,455,530 with the following allocation:
 - Dividend amounted to Rp127,000,000,000 or 19.65%;
 - Reserves amounted to Rp519,304,455,530.
- Based on the Decision of the General Meeting of Shareholders of the Company on June 28, 2022 with Minutes of RUPS Decision concerning Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements for 2021, shareholders have determined:
 - Cash dividend amounted to Rp10,000,000,000 ;
 - The rest is set as a reserve setting.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original consolidated financial statements
included here is in Indonesian Language
**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Perubahan kepentingan non-pengendali atas aset bersih dan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain entitas anak adalah sebagai berikut:

27. NON-CONTROLLING INTERESTS

The movement of non-controlling interest in net assets and comprehensive income (loss) of Subsidiaries was as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
	Rp	Rp
Kepentingan non-pengendali atas aset bersih		
SGS S.A	192.849.974.399	174.862.869.650
Sociate Generale De Surveillance Holding A. Geneva	180.206.442.717	164.117.972.049
Koperasi Karyawan Surveyor Indonesia	2.938.596.271	2.539.599.406
Koperasi Pegawai PT Sucofindo Episi	691.930.668	422.643.111
Koperasi Pegawai PT Sucofindo Advisory Utama	442.679.359	36.001.127
Mochamad Sidik Darmawan	(1.744.279.725)	(1.758.574.748)
PT Rizki Anugrah Pratama	(5.232.839.177)	(5.275.724.245)
Jumlah	370.152.504.514	334.944.786.350

Non-controlling interest of net assets	
SGS S.A	
Sociate Generale De Surveillance Holding A. Geneva	
Koperasi Karyawan Surveyor Indonesia	
Koperasi Pegawai PT Sucofindo Episi	
Koperasi Pegawai PT Sucofindo Advisory Utama	
Mochamad Sidik Darmawan	
PT Rizki Anugrah Pratama	
Total	

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
	Rp	Rp
Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) komprehensif entitas anak		
SGS S.A	23.367.313.195	20.741.242.781
Sociate Generale De Surveillance Holding A. Geneva	19.928.859.537	14.466.507.459
Koperasi Pegawai PT Sucofindo Advisory Utama	406.678.232	502.383.746
Koperasi Karyawan Surveyor Indonesia	491.386.284	378.958.788
PT Rizki Anugrah Pratama	42.885.071	407.696.840
Koperasi Pegawai PT Sucofindo Episi	269.287.557	213.769.240
Mochamad Sidik Darmawan	14.295.023	135.898.948
Jumlah	44.520.704.899	36.846.457.802

Non-controlling interest over subsidiaries' comprehensive (loss)/income	
SGS S.A	
Sociate Generale De Surveillance Holding A. Geneva	
Koperasi Pegawai PT Sucofindo Advisory Utama	
Koperasi Karyawan Surveyor Indonesia	
PT Rizki Anugrah Pratama	
Koperasi Pegawai PT Sucofindo Episi	
Mochamad Sidik Darmawan	
Total	

28. PENDAPATAN

28. REVENUES

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
	Rp	Rp
Minyak, Gas dan Energi	1.545.240.393.917	1.438.445.578.153
Mineral dan Batubara	1.382.888.214.081	1.130.503.550.161
Transportasi dan Logistik	746.152.710.002	658.169.032.465
Pemerintah	441.084.213.134	676.624.384.868
Teknologi, Infrastruktur dan Properti	403.787.153.028	326.371.414.020
Laboratorium	402.554.387.880	449.821.169.983
Perindustrian	366.635.415.231	267.736.821.066
Sertifikasi Sistem dan Produk	345.843.441.885	285.360.015.389
Perdagangan	201.055.963.268	251.293.604.409
Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	77.861.187.993	61.505.855.428
Jumlah pendapatan usaha	5.913.103.080.419	5.545.831.425.942

Oil, Gas and Energy	
Mineral and coal's	
Transportation and Logistic	
Government	
Technology, Infrastructure and Property	
Laboratory's	
Industries	
System and Product Certification	
Trading	
Agriculture, Food, Forestry, Maritime and Fisheries	
Total revenues	

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original consolidated financial statements
included here is in Indonesian Language
**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. BEBAN POKOK PENDAPATAN

29. COST OF REVENUES

	31 Desember 2023/ Desember 31, 2023	31 Desember 2022/ Desember 31, 2022	
	Rp	Rp	
Beban langsung			Direct cost
Pegawai	1.508.040.548.643	1.550.920.607.902	Labour
Fasilitas	766.725.455.461	625.604.922.152	Facilities
Operasional	427.083.799.917	380.696.481.262	Operating
Perjalanan dinas	317.717.612.235	299.831.551.119	Business travel
Jasa pihak ketiga	263.652.332.636	267.218.981.232	Third parties service
Tenaga ahli	191.679.845.891	242.446.453.763	Profesional fee
Penyusutan (Catatan 14 dan 15)	145.328.394.128	124.857.313.892	Depreciation (Notes 14 and 15)
Umum, kantor dan diklat	118.357.964.420	117.088.622.196	General, office and training
Perawatan dan perbaikan	16.100.979.695	14.316.657.418	Repair and maintenance
Pengembangan	14.837.339.017	17.619.390.460	Development
Tidak langsung			Indirect cost
Pegawai	250.830.908.848	226.919.748.430	Labour
Operasional	56.680.624.376	6.223.393.298	Operating
Penyusutan (Catatan 14 dan 15)	26.399.365.246	27.673.339.053	Depreciation (Notes 14 and 15)
Fasilitas	21.433.115.904	64.584.802.856	Facilities
Tenaga ahli	12.512.306.186	9.763.657.635	Profesional fee
Perjalanan dinas	6.854.672.437	3.854.609.967	Business travel
Perawatan dan perbaikan	1.705.929.287	1.161.826.433	Repair and maintenance
Jumlah beban pokok pendapatan	4.145.941.194.327	3.980.782.359.068	Total cost of revenues

30. BEBAN PENJUALAN

30. SELLING EXPENSES

	31 Desember 2023/ Desember 31, 2023	31 Desember 2022/ Desember 31, 2022	
	Rp	Rp	
Promosi	11.850.127.383	16.784.499.639	Promotion
Pegawai	8.958.431.219	8.983.142.772	Labour
Fasilitas	1.774.995.900	1.434.724.147	Facilities
Humas	1.734.528.713	1.451.083.675	Public relation
Perjalanan dinas	974.208.036	476.463.745	Business travel
Tenaga ahli	800.280.384	1.054.731.113	Profesional fee
Operasional	266.822.995	235.138.704	Operational
Penyusutan (Catatan 15)	152.167.406	233.449.443	Depreciation (Notes 15)
Lainnya	8.286.120.523	956.098.076	Others
Jumlah beban penjualan	34.797.682.559	31.609.331.314	Total selling expenses

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	31 Desember 2023/ Desember 31, 2023	31 Desember 2022/ Desember 31, 2022	
	Rp	Rp	
Pegawai	599.382.098.891	597.804.476.752	Labour
Fasilitas	89.257.078.694	90.703.229.548	Facilities
Pengembangan	51.128.267.233	39.070.741.557	Development
Penyusutan (Catatan 15)	49.609.447.430	54.487.236.008	Depreciation (Notes 15)
Imbalan kerja	39.706.703.008	31.972.316.511	Employee benefits
Perjalanan dinas	31.403.561.153	19.351.996.594	Business travel
Perawatan dan perbaikan	21.809.719.332	24.114.569.495	Repair and maintenance
Tenaga ahli	19.071.342.642	21.123.391.460	Profesional fee
Operasional	6.080.283.256	5.698.605.315	Operational
Lainnya	115.354.166.515	68.588.367.935	Others
Jumlah beban umum dan administrasi	1.022.802.668.154	952.914.931.175	Total general and administrative expenses

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

*The original consolidated financial statements
included here is in Indonesian Language*
**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
*For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

32. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH

32. OTHER INCOME (EXPENSES) – NET

	31 Desember 2023/ Desember 31, 2023	31 Desember 2022/ Desember 31, 2022	
	Rp	Rp	
Pendapatan (beban) kurs	(3.287.773.985)	16.944.620.361	Gain (loss) on foreign exchange
Penghasilan bunga giro dan deposito	83.635.172.021	52.631.614.093	Interest income from giro and deposito
Laba penjualan aset	184.337.236	244.366.064	Gain on sale of assets
Pendapatan diluar usaha lainnya	11.349.682.945	33.155.823.228	Other non-business incomes
Beban penyisihan	(6.856.766.523)	(8.885.676.536)	Bad debt expense
Lainnya	(27.497.663.419)	(55.010.496.581)	Others
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain bersih	57.526.988.275	39.080.250.629	Total other income (expenses) - net

33. IKHTISAR TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

33. SUMMARY OF RELATED PARTIES TRANSACTION

Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh menteri negara Badan Usaha Milik Negara merupakan pemegang saham mayoritas Grup. Oleh karena itu secara tidak langsung Grup memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

The Government of the Republic of Indonesia which was represented by Minister of State Owned Enterprise is the majority shareholder of the Group. Therefore the Group has indirect affiliation with other stated owned companies through the inclusion of government capital of the Republic of Indonesia.

Rincian sifat dan jenis transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

The nature and types of transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat saldo akun dan transaksi/ <i>Nature of account and transaction</i>
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang saham utama/ <i>Ultimate parent</i>	Pembayaran dividen/ <i>Payment of dividends</i>
Sociate Generale De Surveillance Holding A. Geneva	Pemegang saham entitas anak/ <i>Shareholder of subsidiaries</i>	Utang usaha/ <i>Trade payable</i>
SGS S.A	Pemegang saham entitas anak/ <i>Shareholder of subsidiaries</i>	Utang afiliasi, piutang lain-lain/ <i>Affiliated payables, other receivables</i>
PT SGS Indonesia	Entitas anak dari SGS S.A/ <i>Subsidiary of SGS S.A</i>	Piutang usaha, pendapatan akan diterima/ <i>Trade receivables, accrued revenue</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>
PT Bank Syariah Indonesia	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Penempatan dana/ <i>Fund placement</i>
PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha, pendapatan akan diterima, pendapatan diterima di muka/ <i>Trade receivables, accrued revenue, unearned revenue</i>
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha dan utang usaha/ <i>Trade receivables and Trade payable</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha, pendapatan akan diterima, pendapatan diterima di muka/ <i>Trade receivables, accrued revenue, unearned revenue</i>

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original consolidated financial statements
included here is in Indonesian Language
**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**33. IKHTISAR TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK
BERELASI** (lanjutan)

33. SUMMARY OF RELATED PARTIES TRANSACTION
(continued)

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat saldo akun dan transaksi/ <i>Nature of account and transaction</i>
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha dan pendapatan diterima di muka/ <i>Trade receivables and unearned revenue</i>
PT Pelabuhan Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha, pendapatan diterima di muka/ <i>Trade receivables, unearned revenue</i>
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Utang usaha/ <i>Trade payables</i>
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha, pendapatan akan diterima, pendapatan diterima di muka/ <i>Trade receivables, accrued revenue, unearned revenue</i>
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>
PT Utama Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha, pendapatan akan diterima/ <i>Trade receivables, accrued revenue</i>
PT Waskita Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha, pendapatan diterima di muka, pendapatan akan diterima/ <i>Trade receivables, unearned revenue, accrued revenue</i>
PT Wijaya Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Pendapatan diterima di muka/ <i>Unearned revenue</i>
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Utang usaha/ <i>Trade payables</i>
PT Yodya Karya (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha, pendapatan akan diterima/ <i>Trade receivables, accrued revenue</i>
PT Angkasa Pura I (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Pendapatan diterima di muka/ <i>Unearned revenue</i>
PT Bukit Asam Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha, pendapatan akan diterima/ <i>Trade receivables, accrued revenue</i>
PT Pertamina EP	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Piutang usaha, pendapatan akan diterima/ <i>Trade receivables, accrued revenue</i>
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Pendapatan akan diterima, piutang usaha/ <i>Accrued revenue, trade receivables</i>
PT Kilang Pertamina International	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Pendapatan akan diterima/ <i>Accrued revenue</i>
PT Pertamina Patra Niaga	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Pendapatan akan diterima, piutang usaha/ <i>Accrued revenue, trade receivables</i>
PT Pertamina Gas	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Piutang usaha, pendapatan akan diterima/ <i>Trade receivables, accrued revenue</i>

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

*The original consolidated financial statements
included here is in Indonesian Language*
**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
*For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

**33. IKHTISAR TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**33. SUMMARY OF RELATED PARTIES TRANSACTION
(continued)**

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat saldo akun dan transaksi/ Nature of account and transaction
PT Pertamina Hulu Mahakam	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Piutang usaha, pendapatan akan diterima/ <i>Trade receivables, accrued revenue</i>
PT Patra Drilling Contractor	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Pendapatan akan diterima/ <i>Accrued revenue</i>
PT Pertamina (Persero) RU V	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Pendapatan akan diterima/ <i>Accrued revenue</i>
PT Pertamina EP Cepu	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Pendapatan akan diterima/ <i>Accrued revenue</i>
PT Pertamina EP Asset	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Pendapatan akan diterima/ <i>Accrued revenue</i>
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government related entities</i>	Piutang usaha, pendapatan akan diterima/ <i>Trade receivables, accrued revenue</i>
PT Rekayasa Industri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha, pendapatan akan diterima/ <i>Trade receivables, accrued revenue</i>
PT Indonesia Chemical Alumina	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Control by the Government of Indonesia</i>	Piutang usaha, pendapatan akan diterima, pendapatan diterima di muka/ <i>Trade receivables, accrued revenue, unearned revenue</i>
PT Semen Padang	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>
PT Semen Tonasa	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>
PT Elnusa Tbk	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Piutang usaha, pendapatan akan diterima/ <i>Trade receivables, accrued revenue</i>
PT Indonesia Power	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Piutang usaha, pendapatan akan diterima/ <i>Trade receivables, accrued revenue</i>
Badan Koordinasi Penanaman Modal	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government related entities</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>
PT Patra Badak Arun Solusi	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>
PT Rekadaya ElektriKA	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables</i>
PT Vale Indonesia Tbk	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Pendapatan akan diterima/ <i>Accrued revenue</i>
KSO SCI-SI	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan akan diterima/ <i>Trade receivables, other receivables, accrued revenue</i>
KSO SCI-VTP	Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Piutang lain-lain, utang usaha/ <i>Other receivables, trade payables</i>
PHE OSES Ltd	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan Pemerintah/ <i>Subsidiaries of BUMN controlled by the Government</i>	Pendapatan akan diterima/ <i>Accrued revenue</i>

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original consolidated financial statements
included here is in Indonesian Language
**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**33. IKHTISAR TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**33. SUMMARY OF RELATED PARTIES TRANSACTION
(continued)**

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat saldo akun dan transaksi/ Nature of account and transaction
Koperasi Pegawai PT Sucofindo	Dikendalikan oleh karyawan kunci PT Sucofindo/ Controlled by key PT Sucofindo employees	Piutang usaha, utang usaha, piutang lain- lain/Trade receivables, trade payable, other receivables
Koperasi Pegawai SI (Kopsurindo)	Dikendalikan oleh karyawan kunci PT Surveyor Indonesia/ Controlled by key PT Surveyor Indonesia employees	Piutang lain-lain, utang usaha/Other receivables, trade payables
PT SPRINT Konsultan	Entitas asosiasi/Associate	Piutang lain-lain/Other receivables
PT Survindo Indah Prestasi	Entitas asosiasi/Associate	Piutang lain-lain/Other receivables
PT Survindo Tri Putra	Entitas asosiasi/Associate	Piutang lain-lain/Other receivables
PT Knight Frank Indonesia	Entitas asosiasi/Associate	Piutang lain-lain/Other receivables
PT Kopsurindo Niaga Utama	Entitas asosiasi/Associate	Utang usaha/Trade payables

Saldo signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai
berikut:

Significant balance with related parties are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Rp	Rp	
Kas dan setara kas			Cash and cash equivalent
Bank			Bank
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	582.844.640.838	459.282.860.857	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	396.994.213.740	421.567.648.622	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	362.010.844.732	333.225.234.426	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia	44.380.138	444.996.430	PT Bank Syariah Indonesia
Subjumlah	1.341.894.079.448	1.214.520.740.335	Sub-total
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.728.390.897	3.928.638.861	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.411.832.429	1.003.475.613	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	3.628.355	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Subjumlah	10.140.223.326	4.935.742.829	Sub-total
<u>Dolar Singapura</u>			<u>Singapore Dollar</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.974.709.015	2.716.849.691	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah bank	1.356.009.011.789	1.222.173.332.855	Total bank
Deposito			Time deposits
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	742.000.000.000	740.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia	368.000.000.000	253.000.000.000	PT Bank Syariah Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	345.000.000.000	360.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	117.751.637.279	95.403.125.744	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	60.500.000.000	60.500.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	52.500.000.000	50.500.000.000	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
PT Bank BRI Syariah Tbk	40.000.000.000	30.000.000.000	PT Bank BRI Syariah Tbk
PT Bank DKI	30.000.000.000	15.000.000.000	PT Bank DKI
Jumlah deposito	1.755.751.637.279	1.604.403.125.744	Total time deposits
Jumlah	3.111.760.649.068	2.826.576.458.599	Total

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original consolidated financial statements
included here is in Indonesian Language
**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**33. IKHTISAR TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**33. SUMMARY OF RELATED PARTIES TRANSACTION
(continued)**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
	Rp	Rp
Piutang usaha		
PT Pertamina (Persero)	131.763.489.790	122.866.086.601
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	37.406.790.921	37.671.176.029
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	26.392.423.545	9.140.665.360
PT Pertamina International Shipping	15.031.260.562	16.128.155.627
Konsorsium PT BKL, PT SCL dan PT SI	13.255.127.958	20.800.256.667
PT Pertamina EP	11.761.780.249	6.524.518.532
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	9.443.931.655	9.505.362.824
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	8.208.091.249	6.047.383.804
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	7.929.730.041	1.095.944.990
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	7.063.647.858	8.812.003.949
Pemerintah Pusat	6.177.242.289	800.225.094
Koperasi Pegawai PT Sucofindo	5.845.731.145	5.623.583.759
Pemerintah Daerah	5.424.658.655	4.209.581.486
KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Elnusa Tbk	5.156.779.157	--
PT Rekayasa Industri (Persero)	4.787.005.720	4.920.314.320
SGS Indonesia	4.719.228.119	5.319.857.422
PT Pembangunan Aceh	4.375.342.500	127.572.300
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	3.989.743.924	5.357.539.028
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	3.975.288.955	3.467.456.120
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	3.719.452.440	2.466.881.272
PT Hutama Karya (Persero)	3.468.037.230	3.442.092.718
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	3.466.070.909	4.484.383.703
PT Pertamina Trans Kontinental	3.080.577.805	5.045.175.565
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.019.792.731	3.627.893.218
PT Jasa Armada Indonesia	2.973.471.240	--
PT Pertamina Patra Niaga	2.932.455.873	10.512.152.022
PHE OSES Ltd	2.926.575.136	1.776.448.590
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	2.821.017.243	1.625.860.060
Lain-lain (dibawah Rp2.500.000.000)	112.377.396.873	68.735.416.389
Jumlah	453.492.141.772	370.133.987.449

Trade receivables
PT Pertamina (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
PT Pertamina International Shipping
Konsorsium PT BKL, PT SCL dan PT SI
PT Pertamina EP
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Pemerintah Pusat
Koperasi Pegawai PT Sucofindo
Pemerintah Daerah
KSO PT PP (Persero) Tbk - PT Elnusa Tbk
PT Rekayasa Industri (Persero)
SGS Indonesia
PT Pembangunan Aceh
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
PT Hutama Karya (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Jasa Armada Indonesia
PT Pertamina Patra Niaga
PHE OSES Ltd
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Others (below Rp2,500,000,000)
Total

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
	Rp	Rp
Piutang lain-lain - lancar		
Koperasi Karyawan PT Surveyor Indonesia	7.018.027.874	7.019.059.124
PT Sprint Konsultan	6.417.905.469	6.105.674.161
KSO SCI-SI	504.922.608	25.497.999.441
Lain-lain (dibawah Rp2.000.000.000)	663.021.320	1.775.509.340
Subjumlah	14.603.877.271	40.398.242.066
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang	(7.018.027.874)	(7.018.027.874)
Jumlah	7.585.849.397	33.380.214.192

Other receivables - current
Koperasi Karyawan PT Surveyor Indonesia
PT Sprint Konsultan
KSO SCI-SI
Others (below Rp2,000,000,000)
Subtotal
Less allowance for impairment losses
Total

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
	Rp	Rp
Piutang lain-lain - tidak lancar		
PT Survindo Indah Prestasi	4.745.168.430	4.745.168.430
SGS S.A.	3.004.950.401	3.004.950.401
PT Knight Frank Indonesia	2.412.290.031	2.412.290.031
PT Survindo Tri Putra	1.369.775.574	1.369.775.574
Subjumlah	11.532.184.436	11.532.184.436
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang	(8.527.234.034)	(8.527.234.034)
Jumlah	3.004.950.402	3.004.950.402

Other receivables - non-current
PT Survindo Indah Prestasi
SGS S.A.
PT Knight Frank Indonesia
PT Survindo Tri Putra
Subtotal
Less allowance for impairment losses
Total

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original consolidated financial statements
included here is in Indonesian Language
**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**33. IKHTISAR TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**33. SUMMARY OF RELATED PARTIES TRANSACTION
(continued)**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
	Rp	Rp
Pendapatan akan diterima		
PT Pertamina (Persero)	183.639.710.802	148.214.211.790
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	89.590.486.266	49.199.840.207
Konsorsium PT BKL, PT SCL dan PT SI	54.921.468.027	13.785.472.883
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	47.222.307.316	27.996.800.305
PT Pertamina EP Asset 2	16.771.300.591	14.489.229.500
Konsorsium PT BKL PT SUKOFINDO dan PT SI	14.694.290.408	5.575.000.000
Pemerintah Pusat	12.832.340.856	116.995.000
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	8.848.592.261	5.341.923.448
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	5.372.373.240	3.198.593.745
PT Pertamina EP	3.414.300.000	--
Perum BULOG dan entitas anak	3.345.462.206	191.767.062
PT Gelombang Seismic Indonesia	3.211.451.202	--
PT Pupuk Indonesia (Persero)	3.064.762.729	1.665.094.869
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.049.771.864	3.138.800.000
PT Geo Dipa Energi	2.800.134.235	1.318.670.000
Lain-lain (dibawah Rp2.500.000.000)	45.475.355.783	19.725.192.186
Jumlah	498.254.107.786	293.957.590.995

Accrued revenues
PT Pertamina (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Konsorsium PT BKL, PT SCL dan PT SI
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
PT Pertamina EP Asset 2
Konsorsium PT BKL PT SUKOFINDO dan PT SI
Pemerintah Pusat
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Pertamina EP
Perum BULOG and its subsidiaries
PT Gelombang Seismic Indonesia
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Geo Dipa Energi
Others (below Rp2,500,000,000)
Total

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
	Rp	Rp
Utang usaha		
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	10.122.695.910	4.615.513.350
Koperasi Pegawai PT Sucofindo	7.740.396.059	3.000.280.561
Koperasi Karyawan PT Surveyor Indonesia	2.282.053.688	373.091.656
PT Kopsurindo Niaga Utama	542.447.063	1.045.104.846
Lain-lain (dibawah Rp 1.000.000.000)	4.158.804.971	1.565.963.997
Jumlah	24.846.397.691	10.599.954.410

Trade payables
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)
Koperasi Pegawai PT Sucofindo
Koperasi Karyawan PT Surveyor Indonesia
PT Kopsurindo Niaga Utama
Others (belows Rp 1,000,000,000)
Total

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
	Rp	Rp
Utang afiliasi		
SGS. SA	10.343.255.468	10.343.255.468
Jumlah	10.343.255.468	10.343.255.468

Affiliated payables
SGS. SA
Total

34. PERIKATAN DAN PERJANJIAN PENTING

34. IMPORTANT ENGAGEMENTS AND AGREEMENTS

Entitas induk

Parent entity

1. Perusahaan telah menandatangani kontrak untuk PT Pertamina EP dengan periode pelaksanaan 11 Maret 2022 sampai dengan 9 Maret 2025. Lingkup pekerjaan berupa Jasa Inspeksi dan Resertifikasi (COI & Re-PLO) Fasilitas Produksi PT Pertamina EP Zona 4 dengan nilai kontrak sebesar Rp39.750.459.310.

1. The Company has signed the contract of to PT Pertamina EP for the period March 11, 2022 to March 9, 2025. The scope of work is Inspection and Re-Certification (COI & Re-PLO) Production Facility PT Pertamina EP Zone 4 with amount of contract is Rp39,750,459,310.

34. PERIKATAN DAN PERJANJIAN PENTING
(lanjutan)

Entitas induk (lanjutan)

2. Perusahaan telah menandatangani kontrak untuk Medco E&P Indonesia dengan periode pelaksanaan 5 Agustus 2022 sampai dengan 4 Agustus 2025. Lingkup pekerjaan berupa *Asset & Operating Integrity Services* dengan nilai kontrak sebesar Rp48.324.218.271.
3. Perusahaan telah menandatangani kontrak untuk PT Pertamina Patra Niaga dengan periode pelaksanaan 1 September 2022 sampai dengan 31 Juli 2024. Lingkup pekerjaan berupa Jasa Patroli Jalur Pipa BBM Cilacap-Bandung (Sungai Citandui) dan Cilacap Boyolali dengan nilai kontrak sebesar Rp8.143.355.497.
4. Perusahaan telah menandatangani kontrak untuk PT Palapa Timur Telematika dengan periode pelaksanaan selama 180 bulan. Lingkup pekerjaan berupa Pekerjaan Konsultan Pengawas Independen Proyek Palapa Ring Paket Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp44.000.000.000.
5. Perusahaan telah menandatangani kontrak atas pekerjaan untuk *Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd & Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd* dengan periode pelaksanaan tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 9 Mei 2026. Lingkup pekerjaan berupa Jasa Sertifikasi Peralatan dan Fasilitas dengan nilai kontrak sebesar Rp8.671.345.000.
6. Perusahaan telah menandatangani kontrak atas pekerjaan untuk PT Medco E&P Indonesia dengan periode pelaksanaan tanggal 26 April 2021 sampai dengan 25 April 2024. Lingkup pekerjaan berupa *Jasa Integrity Engineering*, Inspeksi dan Sertifikasi dengan nilai kontrak sebesar Rp29.492.758.899.
7. Perusahaan telah menandatangani kontrak atas pekerjaan untuk PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur dengan periode pelaksanaan tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan 24 Oktober 2024. Lingkup pekerjaan berupa *Independence Marine Surveyor* dengan nilai kontrak sebesar Rp10.500.000.000.

34. IMPORTANT ENGAGEMENTS AND AGREEMENTS
(continued)

Parent entity (continued)

2. The Company has signed the contract of to Medco E&P Indonesia for the period August 5, 2022 to August 4, 2025. The scope of work is *Asset & Operating Integrity Services* with amount of contract is Rp48,324,218,271.
3. The Company has signed the contract of to PT Pertamina Patra Niaga for the period September 1, 2022 to July 31, 2024. The scope of work is *Patroly Service for BBM Pipeline Cilacap-Bandung (Sungai Citandui) and Cilacap Boyolali* with amount of contract is Rp8,143,355,497.
4. The Company has signed the contract of to PT Palapa Timur Telematika for the period 180 months. The scope of work is *Independent Supervisory Consultant for Palapa Ring Paket Timur Project* with amount of contract is Rp44,000,000,000.
5. The Company has signed the contract of to Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd & Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd for the period May 24, 2021 until May 9, 2026. The scope of work is *Equipment & Facilities Certification Services* with amount of contract is Rp8,671,345,000.
6. The Company has signed the contract of to PT Medco E&P Indonesia for the period April 26, 2021 to April 25, 2024. The scope of work is *Integrity Engineering, Inspection and Certification Services* with amount of contract is Rp29,492,758,899.
7. The Company has signed the contract of the PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur for the period October 25, 2019 to October 24, 2024. The scope of work is *Independence Marine Surveyor* with amount of contract is Rp10,500,000,000.

34. PERIKATAN DAN PERJANJIAN PENTING
(lanjutan)

34. IMPORTANT ENGAGEMENTS AND AGREEMENTS
(continued)

PT Superintending Company of Indonesia
(PT SUCOFINDO) – Entitas Anak

PT Superintending Company of Indonesia
(PT SUCOFINDO) - Subsidiaries

1. PT SUCOFINDO mengadakan Perjanjian Fasilitas Bank Garansi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai Addendum Perjanjian Bank Garansi berdasarkan Akta Notaris Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. No. 48 tanggal 26 Juli 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Nilai fasilitas	Rp125.000.000.000	Facilities amount
Tujuan	Penerbitan jaminan tender, jaminan uang muka, pelaksanaan dan pemeliharaan/ <i>Issuance of tender bonds, advance payment bonds, performance bonds and maintenance bonds.</i>	Purpose
Jangka waktu	1 (satu/one) tahun/year (12/06/2023 - 12/06/2024)	Period
Jaminan	Saldo simpanan atas nama debitur di bank sebesar Rp125.000.000.000/ <i>The balance of deposits on behalf of the debtor at the bank is Rp125,000,000,000</i>	Collateral

2. PT SUCOFINDO mengadakan Perjanjian Fasilitas Bank Garansi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai Addendum Perjanjian Bank Garansi berdasarkan Akta Notaris Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. No. 50 tanggal 9 November 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Nilai fasilitas	Rp125.000.000.000	Facilities amount
Tujuan	Penerbitan jaminan tender, jaminan uang muka, pelaksanaan dan pemeliharaan/ <i>Issuance of tender bonds, advance payment bonds, performance bonds and maintenance bonds.</i>	Purpose
Jangka waktu	1 (satu/one) tahun/year (12/06/2022 - 12/06/2023)	Period
Jaminan	Saldo simpanan atas nama debitur di bank sebesar Rp125.000.000.000/ <i>The balance of deposits on behalf of the debtor at the bank is Rp125,000,000,000</i>	Collateral

3. PT SUCOFINDO mengadakan Perjanjian Fasilitas Bank Garansi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai Addendum Perjanjian Bank Garansi berdasarkan Akta Notaris Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. No. 6 tanggal 29 Oktober 2021 dengan jangka waktu sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan 12 Juni 2022.

Pada tahun 2022, berdasarkan Perjanjian kredit bank garansi No. 050 tanggal 9 November 2022, PT SUCOFINDO mengajukan perpanjangan jangka waktu perjanjian sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan 12 Juni 2023.

1. PT SUCOFINDO entered into Bank Guarantee Facility at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk based on Addendum on Bank Guarantee Agreement as stated in Notarial Deed of Notary Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. No. 48 dated July 26, 2023 with the proposed terms and conditions as follows:

2. PT SUCOFINDO entered into . Bank Guarantee Facility at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk based on Addendum on Bank Guarantee Agreement as stated in Notarial Deed of Notary Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. No. 50 dated November 9, 2022 with the proposed terms and conditions as follows:

3. PT SUCOFINDO entered into Bank Guarantee Facility with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk based on Addendum on Bank Guarantee Agreement as stated in Notarial Deed of Notary Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. No. 6 dated October 29, 2021 with a period from June 12, 2021 until June 12, 2022.

In 2022, based on Bank Guarantee Credit agreement No. 050 dated November 9, 2022, PT SUCOFINDO submitted an extension of the term of the agreement from June 12, 2022 to June 12, 2023.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original consolidated financial statements
included here is in Indonesian Language
**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. PERIKATAN DAN PERJANJIAN PENTING
(lanjutan)

34. IMPORTANT ENGAGEMENTS AND AGREEMENTS
(continued)

PT Superintending Company of Indonesia
(PT SUCOFINDO) – Entitas Anak (lanjutan)

PT Superintending Company of Indonesia
(PT SUCOFINDO) – Subsidiaries (continued)

Nilai fasilitas	Rp125.000.000.000	Facilities amount
Tujuan	Penerbitan jaminan tender, jaminan uang muka, pelaksanaan dan pemeliharaan/ <i>Issuance of tender bonds, advance payment bonds, performance bonds and maintenance bonds.</i>	Purpose

Jangka waktu	1 (satu/one) tahun/year (12/06/2022 - 12/06/2023)	Period
--------------	--	--------

Jaminan	Kontrak garansi <i>cash collateral</i> sebesar 100% dari nilai Bank <i>garansi/The cash collateral guarantee contract is 100% of the value of Bank guarantee</i>	Collateral
---------	---	------------

4. PT SUCOFINDO mengadakan Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja berdasarkan Akta Notaris Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. No. 5 tanggal 29 Oktober 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

4. PT SUCOFINDO entered into Working Capital Credit Facility with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk based on Addendum on Working Capital Credit Agreement as stated in Notarial Deed of Notary Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. No. 5 dated October 29, 2021 with the proposed terms and conditions as follows:

Nilai fasilitas	Rp60.000.000.000	Facilities amount
Tujuan	Modal kerja kegiatan usaha/ <i>Operational working capital</i>	Purpose
Jangka waktu	1 (satu/one) tahun/year (12/06/2021 - 12/06/2022)	Period
Tingkat bunga	9,5% p.a	Interest rate
Tingkat denda	2% dari suku bunga/ <i>of the interest rate</i>	Penalty rate

Fasilitas tersebut dijamin dengan:

- Tanah 1.792 m² berikut bangunan kantor 4.997 m² di Jalan Pemuda No. 171 Semarang SHGB No. 314/Sekayu.
- Tanah 1.500 m² dan bangunan kantor 1.034 m² di Jalan Kaligawe KM.8, Semarang SHGB No. 17/Trimulyo.
- Tanah 1.275 m² di Jalan Cumi 33-35 Jakarta Utara SHGB No. 265/Tanjung Priok.
- Tanah 1.285 m² di Jalan Cumi 33-35 Jakarta Utara SHGB No. 768/Tanjung Priok.
- Bangunan seluas 2.560 m² di Jalan Cumi 33-35 Jakarta Utara.
- Piutang usaha dengan nilai jaminan Rp120.000.000.000 berdasarkan sertifikat jaminan fidusia tanggal 10 Oktober 2008 No.W7.016001.HT.04.06.TH.2008/STD.

The collaterals of these facilities is:

- Land of 1,792 m² and office building of 4,997 m² located at Jalan Pemuda No. 171 Semarang with SHGB No. 314/Sekayu.
- Land of 1,500 m² and office building of 1,034 m² located at Jalan Kaligawe KM.8, Semarang with SHGB No. 17/Trimulyo.
- Land of 1,275 m² located at Jalan Cumi 33-35 Jakarta Utara with SHGB No. 265/Tanjung Priok.
- Land of 1,285 m² located at Jalan Cumi 33-35 Jakarta Utara with SHGB No.768/Tanjung Priok.
- Building of 2,560 m² located at Jalan Cumi No. 33-35.
- Trade Receivables with collateral value of Rp120,000,000,000 under fiduciary collateral certificate dated 10 October 2008 No. W7.016001.HT.04.06.TH. 2008/STD.

Pada tahun 2022, perjanjian kredit modal kerja di atas sudah berakhir dan tidak berlaku lagi.

In 2022, the above Working Capital Credit Agreement has expired and no longer valid.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

34. PERIKATAN DAN PERJANJIAN PENTING
(lanjutan)

34. IMPORTANT ENGAGEMENTS AND AGREEMENTS
(continued)

PT Superintending Company of Indonesia
(PT SUCOFINDO) – Entitas Anak (lanjutan)

PT Superintending Company of Indonesia
(PT SUCOFINDO) – Subsidiaries (continued)

5. PT SUCOFINDO mengadakan Perjanjian Fasilitas *Forex Line* dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai Addendum Perjanjian *Forex Line* berdasarkan Akta Notaris Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. No. 7 tanggal 29 Oktober 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

5. PT SUCOFINDO entered into *Forex Line Facility* with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk based on the Addendum on *Forex Line Agreement* as stated in Notarial Deed of Notary Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. No. 7 dated October 9, 2021 with the proposed terms and conditions as follows:

Nilai fasilitas	USD1.000.000	Facilities amount
Tujuan	Untuk melakukan transaksi jual beli valas dengan penyelesaian valuta dalam periode tertentu (<i>value today, tomorrow, spot dan forward</i>), <i>option, call spread option, interest rate swap dan cross currency swap</i> terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan/ <i>To buy and sell foreign currency with currency settlement within a certain period (value today, Tomorrow, spot and forward), options, call spread options, interest rate swaps and cross currency swaps related to PT Sucofindo's operational activities</i>	Purpose
Jangka waktu	1 (satu/one) tahun/year (12/06/2021 - 12/06/2022)	Period
Jaminan	Terkait dengan jaminan fasilitas kredit modal kerja/ <i>Related to collaterals used for working capital credit facility</i>	Collateral

Pada tahun 2022, Perjanjian Fasilitas *Treasury Line* di atas sudah berakhir dan tidak berlaku lagi.

In 2022, the above *Treasury Line Facility Agreement* has expired and no longer valid.

35. TUNTUTAN HUKUM DAN KONTINJENSI

35. LITIGATIONS AND CONTINGENCY

PT Superintending Company of Indonesia
(PT SUCOFINDO) – Entitas Anak

PT Superintending Company of Indonesia
(PT SUCOFINDO) - Subsidiaries

1. Pada tanggal 25 Mei 2022, terdapat gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap PT SUCOFINDO yang diajukan oleh Yayasan Forum Komunikasi dan Silaturahmi Purnabakti Sucofindo (FKSPS) dengan No 461/Pdt.G/2022/PN mengenai perbuatan melawan hukum mengenai Restrukturisasi Polis Asuransi Program Tunjangan Hari Tua Karyawan dan Jaminan Hari Tua. Turut tergugat dalam kasus ini Menteri Badan Usaha Milik Negara qq Kementerian Badan Usaha Milik Negara, SGS, dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kerugian materil sebesar Rp1.588.596.595.094 dengan jumlah 768 orang dan kerugian immateriil sebesar Rp376.500.000.000 beserta harta benda berupa tanah dan bangunan yang terletak di:
- Graha Sucofindo Jl. Raya Pasar Minggu No. Kav 16 RT.7/RW.9, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
 - Lavenue, Jl. Raya Pasar Minggu No. Kav 16 RT.7/RW.9, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
 - Gedung Lab Cibitung dan Cabang Bekasi, Jl. Arteri Tol Cibitung No.1 Sukadanau, Cibitung, Gandasari, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
 - Gedung Cilegon, Jl. Raya Serang No.106, Sukmajaya Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten.

1. On May 25, 2022, there was a civil lawsuit with the South Jakarta District Court against the PT SUCOFINDO that was filed by the Yayasan Forum Komunikasi dan Silaturahmi Purnabakti Sucofindo (FKSPS) No.461/Pdt.G/2022/PN of the South Jakarta District Court regarding unlawful acts regarding Insurance Policy Restructuring of Old Age Benefit Program and Old Age Protection. Co-defendants in this case were the Minister of State-Owned Enterprises qq the Ministry of State-Owned Enterprises, SGS, and PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Material loss of Rp1,588,596,595,094 for a total of 768 people and immaterial losses of Rp376,500,000,000 along with property in the land and buildings located at:

- Graha Sucofindo Jl. Raya Pasar Minggu No. Kav 16 RT.7/RW.9, Kecamatan Pancoran, South Jakarta.
- Lavenue, Jl. Raya Pasar Minggu No. Kav 16 RT.7/RW.9, Kecamatan Pancoran, South Jakarta.
- Gedung Lab Cibitung dan Cabang Bekasi, Jl. Arteri Tol Cibitung No.1 Sukadanau, Cibitung, Gandasari, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, West Java.
- Gedung Cilegon, Jl. Raya Serang No.106, Sukmajaya Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten.

35. TUNTUTAN HUKUM DAN KONTINJENSI (lanjutan)

**PT Superintending Company of Indonesia
(PT SUCOFINDO) – Entitas Anak (lanjutan)**

Sidang telah dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali dengan sidang terakhir pada tanggal 19 Desember 2023. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada tanggal 20 Juni 2024 dengan agenda Panggil Turut Tergugat II (SGS).

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, PT SUCOFINDO belum dapat memastikan timbulnya beban dan liabilitas yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus kas keluar sumber daya PT SUCOFINDO, serta belum menentukan estimasi yang handal terkait liabilitas kontinjensi tersebut.

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Entitas Anak

a. Tagihan Rabobank Singapore dan Gugatan Highland Beef Pty. Ltd.

Pada tanggal 7 November 2018 terdapat surat tagihan dari Rabobank Singapore atas *Bill of Exchange* yang diterbitkan oleh Highland Beef Pty. Ltd. (Highland Beef) untuk pembelian sapi dalam rangka kegiatan Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan (SKEBP) Daging Sapi senilai USD13.355.381.

Perjanjian-perjanjian dan *Bill of Exchange* atas kegiatan ini disepakati dan ditandatangani oleh mantan Direktur Operasi periode tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018, yaitu Sdr. Bambang Isworo. Namun, perjanjian dan *Bill of Exchange* tersebut tidak terdokumentasikan dan tidak tercatat dalam pembukuan PT SI.

PT SI tidak melakukan pembayaran atas tagihan yang dikeluarkan Rabobank Singapore atas *Bill of Exchange* yang diterbitkan oleh Highland Beef untuk pembelian daging sapi tersebut. Pada tanggal 19 Desember 2018 *Highland Beef* mengirimkan pemberitahuan yaitu gugatan arbitrase melalui *Permanent Court of Arbitration* (PCA) kepada PT SI meminta penyelesaian perjanjian SKEBP senilai USD100 juta.

Berdasarkan hasil kajian dari internal PT SI, konsultan eksternal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) proses pembentukan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan SKEBP Daging Sapi tidak sesuai Anggaran Dasar PT SI dan tidak dicatat dalam administrasi PT SI.

Dalam menghadapi gugatan arbitrase dari Highland Beef, dilakukan upaya-upaya hukum berupa:

35. LITIGATIONS AND CONTINGENCY (continued)

**PT Superintending Company of Indonesia
(PT SUCOFINDO) – Subsidiaries (continued)**

Trials have been held 11 (eleven) times with the last trial on December 19 2023. The next trial is scheduled for June 20 2024 with the agenda of Summoning Defendant II (SGS).

Until the completion of these consolidated financial statements PT SUCOFINDO still has not yet ascertained the possibility of the occurrence of expense and liabilities whose settlement can result in outflows of PT SUCOFINDO resources and has not been able to determine reliable estimates regarding these contingent liabilities.

PT Surveyor Indonesia (PT SI) - Subsidiaries

a. Rabobank Singapore Bill and Lawsuit from Highland Beef Pty. Ltd.

On November 7, 2018 there was an invoice from Rabobank Singapore on the Bill of Exchange which was issued by Highland Beef Pty. Ltd. (Highland Beef) for the purchase of cattle in relation to Trade-Based Export Credit Scheme (SKEBP) for cow meat worth USD13,355,381.

Agreements and Bill of Exchange for this activity were agreed upon and signed by the former Director Operations for the period June 28, 2013 to June 28, 2018, Mr. Bambang Isworo. However, these agreements and Bill of Exchange are not documented and are not recorded in PT SI's books.

PT SI has not paid the bills issued by Rabobank Singapore for the Bill of Exchange issued by Highland Beef for the purchase of these cow meats. On December 19, 2018 Highland Beef sent an arbitration notice to PT SI through the Permanent Court of Arbitration (PCA) demanding the settlement of SKEBP arrangement amounting to USD100 million.

Based on the assessment from the internal of PT SI, external consultant and and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) the process of forming agreements regarding SKEBP Beef was not in accordance with PT SI's Article of Association and not registered in PT SI's record.

In dealing with the arbitration lawsuit from Highland Beef, the following legal actions were taken:

35. TUNTUTAN HUKUM DAN KONTINJENSI (lanjutan)

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Entitas Anak
(lanjutan)

a. Tagihan Rabobank Singapore dan Gugatan Highland Beef Pty. Ltd. (lanjutan)

- a. Gugatan perdata di PN Sukoharjo. Sehubungan dengan gugatan ini, keputusan Pengadilan Tinggi Sukoharjo No 49/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 16 Desember 2020:
- Telah membatalkan perjanjian *Sales Management Service Agreement* antara KSO SI-STI dan Highland Beef.
 - Memerintahkan Arif Zainuddin, Highland Beef Pty Ltd., Asei Bina Holding Pte Ltd., dan PT Synerga Tata Internasional, untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang dialami penggugat sebesar USD113.355.831,29 dan sebesar Rp15.000.000.000 serta kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000. Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No 49/Pdt.G/2020/PN Skh tanggal 16 Desember 2020.

Sampai saat ini pihak tergugat tidak melakukan upaya hukum atas putusan pengadilan tersebut.

- b. Gugatan perdata terhadap Rabobank di Singapore International Arbitration Center (SIAC).

PT SI menggugat Rabobank sebesar USD 100juta atas kerugian materiil dan immateriil karena kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban identifikasi calon kreditur (*know your customer*) sehingga Rabobank menerbitkan kredit sebesar USD 60juta kepada PT SI untuk bisnis SKEB Daging Sapi. Putusan SIAC tanggal 16 Mei 2022:

- *Security Deed* sah;
- PT SI tidak berhak mendapatkan ganti rugi terhadap semua kerugian yang timbul terhadap biaya yang harus dibayarkan kepada Highland Beef;
- PT SI tidak berhak mendapatkan ganti rugi terhadap semua kerugian yang timbul akibat kegagalan Rabobank untuk melakukan *due diligence* terhadap kewenangan Bambang Isworo untuk mengeluarkan *Security Deed*;
- PT SI diwajibkan membayar tagihan yang diberikan oleh Rabobank.
- PT SI harus membuat *Security Deed* dalam Bahasa Indonesia
- PT SI harus membayar ganti rugi kepada Rabobank Sebesar USD8.249.702.

35. LITIGATIONS AND CONTINGENCY (continued)

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Subsidiaries
(continued)

a. Rabobank Singapore Bill and Lawsuit from Highland Beef Pty. Ltd. (continued)

- a. *Filing civil lawsuit at PN Sukoharjo. Regarding the lawsuit, decision of The Sukoharjo High Court No 49/Pdt.G/2020/PN Skh dated December 16, 2020:*
- *Has cancelled the Sales Management Service Agreement between KSO SISTI and Highland Beef.*
 - *Has ordered Arif Zainuddin, Highland Beef Pty Ltd., Asei Bina Holding Pte Ltd., and PT Synerga Tata Internasional to pay for the material and immaterial losses suffered by the plaintiff in the amount of USD113,355,831.29 and Rp15,000,000,000 and immaterial losses of Rp50,000,000,000 In connection with the Decision of the Sukoharjo District Court No. 49/Pdt.G/2020/PN Skh dated December 16, 2020.*

Until now the defendant has not taken legal action against the court decision.

- b. *Filing of a civil lawsuit against Rabobank at the Singapore International Arbitration Center (SIAC).*

PT SI sued Rabobank for USD 100 million for material and immaterial losses due to its negligence in carrying out the obligation to identify potential creditors (know your customer) resulting in Rabobank issuing a credit of USD 60 million to PT SI for the SKEBP Beef business. SIAC's decision dated May 16, 2022:

- *Security Deed is valid;*
- *PT SI is not entitled to receive compensation for all losses arising from costs that must be paid to Highland Beef;*
- *PT SI is not entitled to receive compensation for all losses arising from Rabobank's failure to conduct due diligence on Bambang Isworo's authority to issue Security Deed;*
- *PT SI is required to pay bills submitted by Rabobank.*
- *PT SI must make Security Deed in Indonesian.*
- *PT SI must pay compensation to Rabobank in the amount of USD 8,249,702.*

35. TUNTUTAN HUKUM DAN KONTINJENSI (lanjutan)

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Entitas Anak
(lanjutan)

**a. Tagihan Rabobank Singapore dan Gugatan
Highland Beef Pty. Ltd. (lanjutan)**

- PT SI diwajibkan membayar bunga sebesar 6% sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan.
 - PT SI diwajibkan membayar biaya arbitrase sebesar SGD579.663,66.
 - PT SI harus membayar biaya hukum Rabobank yang timbul dalam arbitrase ini sejumlah SGD1.854.270,58.
 - Semua klaim dan permintaan keringanan lainnya ditolak.
- c. Atas putusan SIAC tersebut di atas, Perusahaan kemudian melakukan gugatan baru melalui Singapore International Commercial Court (SICC) untuk menyatakan Putusan SIAC tidak berkekuatan hukum dikarenakan proses yang tidak adil. Pada tanggal 31 Mei 2023 telah terbit hasil Putusan SICC yang pada intinya adalah:
- Tuntutan yang diajukan Perusahaan tidak terbukti.
 - Menguatkan Putusan SIAC.
 - PTSI wajib membayar kepada Rabobank atas semua biaya yang ditimbulkan.
- d. Berdasarkan putusan SIAC dan SICC tersebut memperkuat bahwa terdapat kerugian negara yang timbul, maka Perusahaan mengajukan Pelaporan pidana melalui Kejaksaan Agung Tindak Pidana Khusus. Atas pelaporan ini, telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JktPst sebagai berikut:
- Sdr. Bambang Isworo
- Pidana Penjara selama 10 tahun dikurangi masa tahanan sementara.
 - Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang apabila tidak dibayar dalam 1 bulan diganti dengan Pidana Penjara selama 1 tahun.

35. LITIGATIONS AND CONTINGENCY (continued)

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Subsidiaries
(continued)

**a. Rabobank Singapore Bill and Lawsuit from
Highland Beef Pty. Ltd. (continued)**

- *PT SI is required to pay interest of 6% up to the due date of bill payment.*
 - *PT SI is required to pay an arbitration fee of SGD 579,663.66.*
 - *PT SI must pay Rabobank's legal fees incurred in this arbitration in the amount of SGD 1,854,270.58.*
 - *All other claims and requests for relief were rejected.*
- c. *Regarding SIAC's decision above, the Company has filed a new lawsuit through the Singapore International Commercial Court (SICC) which essentially requests a declare that SIAC's decision has no legal force due to an unfair process. On 31 May 2023 The results of the SICC Decision have been given, which are:*
- *The claims submitted by the Company are not proven.*
 - *Uphold the SIAC Decision.*
 - *The Company is obliged to pay Rabobank for all costs incurred.*
- d. *Based on the SIAC and SICC decisions which confirmed that state losses had occurred, the Company submitted a criminal report through the Attorney General's Office for Special Crimes. Regarding this report, the Central Jakarta District Court has decided with Decision Number 42/Pid.SusTPK/2023/PN.JktPst as follows:*
- Mr. Bambang Isworo*
- *Imprisonment for 10 years minus the temporary detention period.*
 - *A fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion Rupiah) which if not paid within 1 month will be replaced by imprisonment for 1 year.*

35. TUNTUTAN HUKUM DAN KONTINJENSI (lanjutan)

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Entitas Anak
(lanjutan)

**a. Tagihan Rabobank Singapore dan Gugatan
Highland Beef Pty. Ltd. (lanjutan)**

- Pidana Tambahan Uang Pengganti sebesar USD10.202.585,05 (sepuluh juta dua ratus dua ribu lima ratus delapan puluh lima Dolar Amerika Serikat lima sen), SGD2.433.934,24 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat dan dua puluh empat sen Dolar Singapura) dan Rp55.177.770,96 (lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh koma sembilan puluh enam Rupiah) untuk SKEBP Daging Sapi serta sebesar USD1.512.274,56 (satu juta lima ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat lima puluh enam sen) untuk SKEBP Rajungan yang apabila tidak dibayar dalam 1 bulan setelah Putusan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan apabila harta benda tidak mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun.
- Biaya Perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Setelah putusan tersebut Sdr. Bambang Isworo mengajukan banding dan dijatuhi Putusan Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2023/PN.JktPst sebagai berikut:

- Pidana Penjara selama 12 tahun dikurangi masa tahanan sementara.
- Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.

35. LITIGATIONS AND CONTINGENCY (continued)

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Subsidiaries
(continued)

**a. Rabobank Singapore Bill and Lawsuit from
Highland Beef Pty. Ltd. (continued)**

- Additional Penal Replacement Money amounting to USD10,202,585.05 (ten million two hundred two thousand five hundred eighty-five United States Dollars and five cents), SGD2,433,934.24 (two million four hundred thirty-three thousand nine hundred thirty-four and twenty-four cents Singapore Dollars) and Rp 55,177,770.96 (fifty-five million one hundred seventy-seven thousand seven hundred seventy point ninety-six Rupiah). for SKEBP Beef and USD1,512,274.56 (one million five hundred twelve thousand two hundred and seventy four United States Dollars and fifty six cents) for SKEBP Crab if it is not paid within 1 month after the Decision, the assets can be confiscated by the Prosecutor and if the assets are insufficient to pay the Replacement Money, then a penalty of imprisonment for 5 (five) years will be replaced.
- Court fees Rp. 10,000.00 (ten thousand Rupiah).

After the Decision, Mr. Bambang Isworo filed an appeal and was sentenced to the DKI Jakarta High Court with Decision Number 55/Pid.Sus-TPK/2023/PN.JktPst as follows:

- Imprisonment for 12 years minus the temporary detention period.
- A fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion Rupiah) which if not paid within 1 month will be replaced by imprisonment for 1 year.

35. TUNTUTAN HUKUM DAN KONTINJENSI (lanjutan)

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Entitas Anak
(lanjutan)

**a. Tagihan Rabobank Singapore dan Gugatan
Highland Beef Pty. Ltd. (lanjutan)**

- Pidana Tambahan Uang Pengganti sebesar USD10.202.585,05 (sepuluh juta dua ratus dua ribu lima ratus delapan puluh lima Dolar Amerika Serikat lima sen), SGD2.433.934,24 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat dan dua puluh empat sen Dolar Singapura) dan Rp55.177.770,96 (lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh koma sembilan puluh enam Rupiah) untuk SKEBP Sapi serta sebesar USD1.512.274,56 (satu juta lima ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat lima puluh enam sen) untuk SKEBP Rajungan yang apabila tidak dibayar dalam 1 bulan setelah Putusan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan apabila harta benda tidak mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti Pidana Penjara selama 8 tahun.
- Biaya Perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).
- e. Bila Rabobank Singapore melakukan eksekusi putusan SIAC dan SICC di Indonesia, maka Perusahaan akan melakukan perlawanan dengan menggunakan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana pada putusan tersebut nilai tagihan Rabobank Singapore yang diputuskan SIAC dibebankan kepada Sdr. Bambang Isworo. Hal ini juga dikuatkan dengan Pendapat Hukum yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal V Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, otoritas nasional dapat menolak untuk memberlakukan atau mengakui putusan asing dengan alasan terbatas tertentu, termasuk jika hal itu bertentangan dengan kebijakan publik negara tersebut. Jika terjadi korupsi yang mempengaruhi kontrak yang mendasarinya, penolakan dapat diajukan pada setiap tahap proses penyelesaian sengketa, baik di hadapan majelis arbitrase, dalam proses pembatalan, atau pada saat pelaksanaan.

35. LITIGATIONS AND CONTINGENCY (continued)

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Subsidiaries
(continued)

**a. Rabobank Singapore Bill and Lawsuit from
Highland Beef Pty. Ltd. (continued)**

- Additional Penal Replacement Money amounting to USD10,202,585.05 (ten million two hundred two thousand five hundred eighty-five United States Dollars and five cents), GD2,433,934.24 (two million four hundred thirty-three thousand nine hundred thirty-four and twenty-four cents Singapore Dollars) and Rp55,177,770.96 (fifty-five million one hundred seventy-seven thousand seven hundred seventy point ninety-six Rupiah) for SKEBP Beef and USD1,512,274.56 (one million five hundred twelve thousand two hundred and seventy four United States Dollars and fifty six cents) for SKEBP Crab if it is not paid within 1 month after the Decision, the assets can be confiscated by the Prosecutor and if the assets are insufficient to pay the Replacement Money, then a penalty of imprisonment for 8 years will be replaced.
- Court fees Rp10,000.00 (ten thousand Rupiah).
- e. If Rabobank Singapore execute the SIAC and SICC Decision in Indonesia, the Company will use the Central Jakarta District Court's ruling, in which Mr. Bambang Isworo is charged with Penal Replacement Money as leverage to Rabobank Singapore value determined by SIAC against Mr. Bambang Isworo is also supported by the Legal Opinion stating that under Article V of the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, national authorities may refuse to enforce or recognize foreign decisions for certain limited reasons, including if it is contrary to the public policy of that country. If corruption occurs that affects the underlying contract, rejection can be raised at any stage of the dispute resolution process, whether before an arbitration tribunal, in the annulment process, or at the time of implementation.

35. TUNTUTAN HUKUM DAN KONTINJENSI (lanjutan)

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Entitas Anak
(lanjutan)

a. Tagihan Rabobank Singapore dan Gugatan Highland Beef Pty. Ltd. (lanjutan)

Untuk proses Arbitrase PCA di Singapura, pada tanggal 16 Maret 2022 hakim Arbiter (Tribunal) telah memutuskan untuk menunda kasus ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan karena *Supplementary Deposit* yang dipersyaratkan untuk dibayarkan Para Pihak tidak pernah terpenuhi.

Sampai saat ini Tergugat 1 dan 2 (PT SI dan PT STI) telah mengajukan *termination*, sementara untuk Tergugat 3 dan 4 (Kementerian BUMN RI dan Negara Republik Indonesia) sedang meminta opini hukum dari Konsultan Hukum mereka untuk mengajukan *termination* terhadap kasus tersebut

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Entitas Anak

b. Tagihan DBS Bank

Pada tanggal 21 Desember 2018, SI menerima surat tagihan dari DBS Bank untuk membayar tagihan sebesar USD1.512.274 atas pekerjaan Skema Kredit Ekspor Berbasis perdagangan (SKEBP) Rajungan. Tagihan tersebut didasarkan pada *Purchase Order* pemesanan rajungan yang dikirimkan oleh SI kepada CBS Ventures Pte. Ltd. dan/atau Chemtank Marine Pte. Ltd.

PT SI tidak melakukan pembayaran atas tagihan yang dikeluarkan DBS Bank berdasarkan *Purchase Order* pemesanan rajungan yang dikirimkan oleh PT SI kepada CBS Ventures Pte. Ltd. and/or Chemtank Marine Pte. Ltd. untuk pembelian rajungan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut PT SI telah melaporkan perkara SKEBP Rajungan di Direktorat Kriminal Khusus (DIRKRIMSUS) Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi No.LP/3359/VI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 14 Juni 2020 dengan dugaan tindak pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Pemalsuan Surat jo Pasal 3. 4. 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Terlapor 2 (dua) orang mantan Direksi PT SI periode sebelumnya. Selanjutnya, laporan tersebut telah dicabut oleh PT SI karena laporan yang sama sedang berjalan di Kejaksaan Agung dan telah sampai pada tahap penyidikan.

35. LITIGATIONS AND CONTINGENCY (continued)

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Subsidiaries
(continued)

a. Rabobank Singapore Bill and Lawsuit from Highland Beef Pty. Ltd. (continued)

For the PCA Arbitration process in Singapore, on March 16, 2022 the Arbitrator Judge (Tribunal) has decided to adjourn this case indefinitely because the *Supplementary Deposit* required to be paid by the Parties never being fulfilled.

Until now, Defendants 1 and 2 (PT SI and PT STI) have requested for termination, while Defendants 3 and 4 (Ministry of State-Owned Enterprises RI and the Republic of Indonesia) have requested legal opinion from their legal consultant to file a request for termination of the case.

PT Surveyor Indonesia (PT SI) - Subsidiaries

b. DBS Bank Bill

On December 21, 2018, SI received a bill from DBS Bank to pay a bill of USD1,512,274 for the work of Rajungan's Trade-Based Export Credit Scheme (SKEBP). The bill is based on a *Purchase Order* order sent by SI to CBS Ventures Pte. Ltd. and/or Chemtank Marine Pte. Ltd.

PT SI has not paid the bills issued by DBS Bank based on *Purchase Order* of rajungan sent by PT SI to CBS Ventures Pte. Ltd. and/or Chemtank Marine Pte. Ltd for the purchase of these rajungan.

Based on this PT SI has reported the case of SKEBP Rajungan at the Directorate of Special Crimes (DIRKRIMSUS) of Metro Jaya Police with police report No.LP/3359/VI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ dated June 14, 2020 with alleged criminal acts of Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code concerning Forgery of Letter jo Article 3. 4. 5 Law No. 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes with allegation against 2 (two) former Directors of the Company. The report had subsequently been revoked by PT SI because the same report is being processed at the Attorney General's Office and has reached the investigation stage.

35. TUNTUTAN HUKUM DAN KONTINJENSI (lanjutan)

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Entitas Anak
(lanjutan)

b. Tagihan DBS Bank (lanjutan)

Pada tanggal 14 Oktober 2021 DBS Bank Ltd mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam gugatan tersebut DBS Bank Ltd menuntut PT SI dan Chemtank Marine Pte Ltd. dengan jumlah keseluruhan ganti rugi sebesar USD1.987.402,72. Status saat ini sedang dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada tanggal 19 September 2023, pengadilan memutuskan untuk menolak gugatan penggugat karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai hak untuk menangani perkara tersebut (Kompetensi Absolut).

c. PT Farlatek Indonesia Tangguh (PT Farlatek)

Berdasarkan kontrak kerjasama No: 067/FIT/PTSI/IX/2020 tanggal 18 September 2020. PT Farlatek Indonesia Tangguh (PT Farlatek) bekerjasama dengan PT SI untuk Pekerjaan Jasa Verifikasi Material, Supervisi Fabrikasi, dan Pendampingan Administrasi Pembangunan Tangki Kios Bahan Bakar Minyak.

PT SI telah menagih sebesar Rp5.102.428.813 dan PT Farlatek telah membayar sebesar Rp3.100.000.000. Sisa pembayaran sebesar Rp2.002.428.813 dilakukan dengan penerbitan cek oleh PT Farlatek, namun pada saat jatuh tempo, cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak tersedianya dana di rekening bank PT Farlatek.

PT Farlatek menilai bahwa bisnis yang dibangun antara PT Farlatek dan PT SI adalah bisnis investasi sehingga kerugian yang terjadi adalah murni merupakan kerugian bisnis investasi bukan merupakan hutang yang harus dibayarkan PT Farlatek terhadap PT SI. Oleh karena Perbuatan PT SI melapor ke Kepolisian Daerah Makassar atas dugaan penipuan maka PT Farlatek mengalami kerugian materiil dan immateriil sehingga PT Farlatek mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp10.000.000.000.

PT SI kemudian melaporkan PT Farlatek di Polda Makassar atas dugaan penggelapan dan/atau penipuan melalui laporan polisi No. LP/B/623/VI/2022/SPKT/Polda Sulsel tanggal 21 Juni 2022.

35. LITIGATIONS AND CONTINGENCY (continued)

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Subsidiaries
(continued)

b. DBS Bank Bill (continued)

On October 14, 2021. DBS Bank Ltd. filed a civil lawsuit with the South Jakarta District Court. In the lawsuit. DBS Bank Ltd demanded compensation from PT SI & Chemtank Marine Pte. Ltd totaling USD1,987,402.72. The current status is in the process of trial at the South Jakarta District Court.

On September 19 2023, the court decided to reject the plaintiff's lawsuit because the South Jakarta District Court did not have the right to handle the case (Absolute Competency).

c. PT Farlatek Indonesia Tangguh (PT Farlatek)

Based on cooperation contract No: 067/FIT/PTSI/IX/2020 dated September 18, 2020. PT Farlatek Indonesia Tangguh (PT Farlatek) with PT SI for Material Verification Service, Fabrication Supervision, and Administrative Assistance for the Development of Oil Fuel Kiosk Tanks.

PT SI has submitted invoices totalling Rp5,102,428,813 and PT Farlatek has paid Rp3,100,000,000. The remaining balance Rp2,002,428,813 is to be settled using cheque, however the cheque could not be cashed in when presented due to insufficient balance in the PT Farlatek's bank account.

PT Farlatek considers that the business developed between PT Farlatek and PT SI is an investment business therefore the losses that occur are purely investment business losses and are not debts that must be paid by PT Farlatek to PT SI. Due to PT SI's actions in reporting to the Regional Police of Makassar for alleged fraud, PT Farlatek suffered material and immaterial losses, therefore PT Farlatek filed a claim for compensation of Rp10,000,000,000.

PT SI then reported PT Farlatek to the Makassar Police for alleged embezzlement and/or fraud through police report No.LP/B/623/VI/2022 /SPKT/Polda Sulsel dated June 21, 2022.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. TUNTUTAN HUKUM DAN KONTINJENSI (lanjutan)

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Entitas Anak
(lanjutan)

c. PT Farlatek Indonesia Tangguh (PT Farlatek)
(lanjutan)

PT Farlatek kemudian melakukan gugatan terhadap Perusahaan di PN Jakarta Selatan melalui gugatan No. 1065/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Sel tanggal 24 November 2022. Pada tanggal 3 Mei 2023 telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

d. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Synerga Tata Internasional

Berdasarkan register perkara No. 294/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Juli 2021, PT Sarbi Moerhani Lestari mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Synerga Tata Internasional. Atas permohonan tersebut pada tanggal 10 September 2021 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan memberikan PKPU Sementara kepada PT Synerga Tata Internasional selama 43 hari. Sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021, terdapat 13 Kreditor yang mendaftarkan tagihan mereka dengan jumlah tagihan sebesar Rp32.506.923.616.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 294/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 4 Februari 2021, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui permohonan PKPU kepada 12 Kreditor, dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp27.408.724.304.

Pembayaran kewajiban kepada para kreditor pemegang saham (pihak berelasi) dan selain pemegang saham (pihak ketiga) ditetapkan sebagai berikut:

1. Kreditor pemegang saham
Piutangnya akan dikonversi menjadi saham pada PT Synerga Tata Internasional. Sampai dengan tanggal pelaporan, belum ada tindak lanjut mengenai konversi piutang menjadi saham.
2. Kreditor selain pemegang saham
 - a. Grace periode pembayaran selama 1 tahun;
 - b. Hutang pokok akan dibayarkan secara bertahap selama 12 tahun, dimulai pada tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan 24 Desember 2034;
 - c. Bunga dihapuskan.

35. LITIGATIONS AND CONTINGENCY (continued)

PT Surveyor Indonesia (PT SI) – Subsidiaries
(continued)

c. PT Farlatek Indonesia Tangguh (PT Farlatek)
(continued)

PT Farlatek subsequently filed a law suit against the Company at the South Jakarta District Court through lawsuit no. 1065/Pdt.G/2022/ PN.Jkt.Sel dated November 24, 2022. On May 3 2023, it was decided by the Judges at the South Jakarta District Court that the South Jakarta District Court had no authority to examine and execute this case.

d. Suspension of Payment (SoP) PT Synerga Tata Internasional

Based on case register No. 294/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dated July 13, 2021, PT Sarbi Moerhani Lestari filed an application for SoP by PT Synerga Tata Internasional. Relating to this application on 10 September 2021 the Commercial Court at the Central Jakarta District Court granted a Temporary SoP to PT Synerga Tata International for 43 days. Until October 7, 2021, there were 13 creditors who registered their claim for payments totaling Rp32,506,923,616.

Based on Decree No. 294/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dated February 4, 2021, the Commercial Court at the Central Jakarta granted SoP to 12 Creditor, totaling Rp27,408,724,304.

Payment of obligations to creditors of shareholders (related parties) and nonshareholders (third parties) is determined as follows:

1. Shareholder creditors
The receivables will be converted into shares in PT Synerga Tata Internasional. As of the reporting date, there has been no follow-up regarding the conversion of receivables into shares.
2. Non-shareholders (third parties)
 - a. Grace period of 1 year;
 - b. Principal debt will be paid in stages over 12 years, starting on December 24, 2023 until December 24, 2034;
 - c. Interest payable are waived

36. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

a. Manajemen Risiko Mata Uang Asing

Grup terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing seperti penjualan dan pembelian barang impor.

Grup mengelola eksposur mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang.

Sebagian besar transaksi Grup dilakukan dalam mata uang Rupiah, demikian juga dengan pembukuannya.

b. Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank, deposito berjangka, piutang usaha dan lain-lain. Grup menempatkan saldo bank dan deposito berjangka pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

c. Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Grup melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk dan kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang dari pelanggan yang memiliki jangka waktu kredit satu bulan.

36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group's financial risk management objectives and policies are to ensure that adequate financial resources are available for business operations and development, and to manage foreign currency risk, interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The Group operates within the guidelines set by the Board of Directors.

a. Foreign Currency Risk Management

The Group is exposed to the effects of fluctuations in foreign currency exchange rates mainly due to transactions denominated in foreign currencies such as sales and purchases of imported goods.

The Group manages the foreign currency exposure by matching, as far as possible, receipts and payments in each individual currency.

Most of the Group's transactions are denominated in Rupiah, as well as for bookkeeping purposes.

b. Credit Risk Management

Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Group.

The credit risk of the Group is primarily attributed to its cash in banks, time deposits, trade and other receivables. The Group places their bank balances and time deposits to the credit worthy financial institutions.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk.

c. Liquidity Risk Management

Liquidity risk is the risk that the Group is unable to meet its obligations when they fall due. Group evaluates and monitors cash-in flow and cash-out flow to ensure the availability of fund to settle the due obligation. In general, fund needed to settle the current and long-term liabilities is obtained from settlement of trade receivables from the customers with one month credit term.

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original consolidated financial statements
included here is in Indonesian Language
**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN** (lanjutan)

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual semula yang tidak didiskontokan:

**36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
POLICIES** (continued)

The table below summarizes the maturity profiles of financial liabilities based on undiscounted original contractual payments of the Group:

31 Desember 2023/December 31, 2023									
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 - 5 tahun/ 1 - 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Nilai tercatat/ Carrying amount					
Utang usaha	336.831.900.636	--	--	336.831.900.636					Trade payables
Biaya yang masih harus dibayar	580.870.876.897	--	--	580.870.876.897					Accrued expenses
Liabilitas sewa jangka pendek	2.320.415.317	--	--	2.320.415.317					Lease liability – current portion
Liabilitas jangka pendek lainnya	70.790.796.797	--	--	70.790.796.797					Other current liabilities
Utang afiliasi	--	10.343.255.468	--	10.343.255.468					Affiliated payables
Liabilitas sewa jangka panjang	--	35.010.416.634	--	35.010.416.634					Lease liability - non-current portion
Utang jaminan	--	2.004.807.687	--	2.004.807.687					Deposit payables
Liabilitas jangka panjang lainnya	--	5.204.723.143	--	5.204.723.143					Other non-current liabilities
Jumlah	990.813.989.647	52.563.202.932	--	1.043.377.192.579					Total

31 Desember 2022/December 31, 2022									
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 - 5 tahun/ 1 - 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Nilai tercatat/ Carrying amount					
Utang usaha	213.768.388.229	--	--	213.768.388.229					Trade payables
Biaya yang masih harus dibayar	540.923.888.674	--	--	540.923.888.674					Accrued expenses
Liabilitas sewa jangka pendek	948.966.241	--	--	948.966.241					Lease liability – current portion
Liabilitas jangka pendek lainnya	59.282.814.387	--	--	59.282.814.387					Other current liabilities
Utang afiliasi	--	10.343.255.468	--	10.343.255.468					Affiliated payables
Liabilitas sewa jangka panjang	--	37.248.110.236	--	37.248.110.236					Lease liability - non-current portion
Utang jaminan	--	1.934.809.178	--	1.934.809.178					Deposit payables
Jumlah	814.924.057.531	49.526.174.882	--	864.450.232.413					Total

d. Manajemen Modal

Grup bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan, terutama untuk rasio utang terhadap ekuitas.

d. Capital Management

The Group aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of their business objectives, which include maintaining healthy capital ratios and maximizing shareholder value.

Management monitors capital using several financial leverage measurements, primarily for debt to equity ratio.

37. INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan, beserta nilai tercatatnya, adalah sebagai berikut:

37. FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follows:

31 Desember 2023/ December 31, 2023				31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value		Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value				
Aset keuangan								Financial assets	
Kas dan setara kas	3.357.575.663.468	3.357.575.663.468		3.046.844.772.886	3.046.844.772.886			Cash and cash equivalents	
Piutang usaha - bersih	972.168.999.643	972.168.999.643		834.412.150.567	834.412.150.567			Trade receivables - net	
Piutang lain-lain - bersih	15.897.251.372	15.897.251.372		38.148.322.459	38.148.322.459			Other receivables - net	
Pendapatan akan diterima	714.663.133.352	714.663.133.352		507.712.855.175	507.712.855.175			Accrued revenue	
Jumlah	5.060.305.047.835	5.060.305.047.835		4.427.118.101.087	4.427.118.101.087			Total	

31 Desember 2023/ December 31, 2023				31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value		Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value				
Liabilitas keuangan								Financial liabilities	
Utang usaha	336.831.900.636	336.831.900.636		213.768.388.229	213.768.388.229			Trade payables	
Utang akrual	580.870.876.897	580.870.876.897		540.923.888.674	540.923.888.674			Accrued payables	
Liabilitas sewa jangka pendek	2.320.415.317	2.320.415.317		948.966.241	948.966.241			Lease liability - current portion	
Liabilitas jangka pendek lainnya	70.790.796.797	70.790.796.797		59.282.814.387	59.282.814.387			Other current liabilities	
Utang afiliasi	10.343.255.468	10.343.255.468		10.343.255.468	10.343.255.468			Affiliated payables	
Liabilitas sewa jangka panjang	35.010.416.634	35.010.416.634		37.248.110.236	37.248.110.236			Lease liability - non-current portion	
Utang jaminan	2.004.807.687	2.004.807.687		1.934.809.178	1.934.809.178			Deposit payables	
Liabilitas jangka panjang lainnya	5.204.723.143	5.204.723.143		--	--			Other non-current liabilities	
Jumlah	1.038.172.469.436	1.038.172.469.436		864.450.232.413	864.450.232.413			Total	

**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

*The original consolidated financial statements
included here is in Indonesian Language*
**PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
For the Years Ended
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

38. CATATAN PENDUKUNG LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Transaksi signifikan nonkas dari aktivitas investasi terdiri dari:

	31 Desember 2023/ Desember 31, 2023	31 Desember 2022/ Desember 31, 2022
	Rp	Rp
Penambahan aset tetap melalui:		
Utang usaha	40.045.599.645	25.543.199.303
Liabilitas sewa	1.052.238.076	30.722.929.877

38. SUPPORTING CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Significant non-cash transactions from investing activities are as follows:

Addition of fixed assets through:
Trade payables
Lease liabilities

39. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2024.

39. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on February 23, 2024.



Jl. Yos Sudarso 38-40, Tanjung Priok,
Jakarta - 14320
Telp. 021 430 10 17
Fax. 021 436 18 99

www.bki.co.id



Scan with us

